

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi menggambarkan karakteristik lokasi dan wilayah pengembangan wilayah, kerentanan wilayah dan demografi Kota Sungai Penuh.

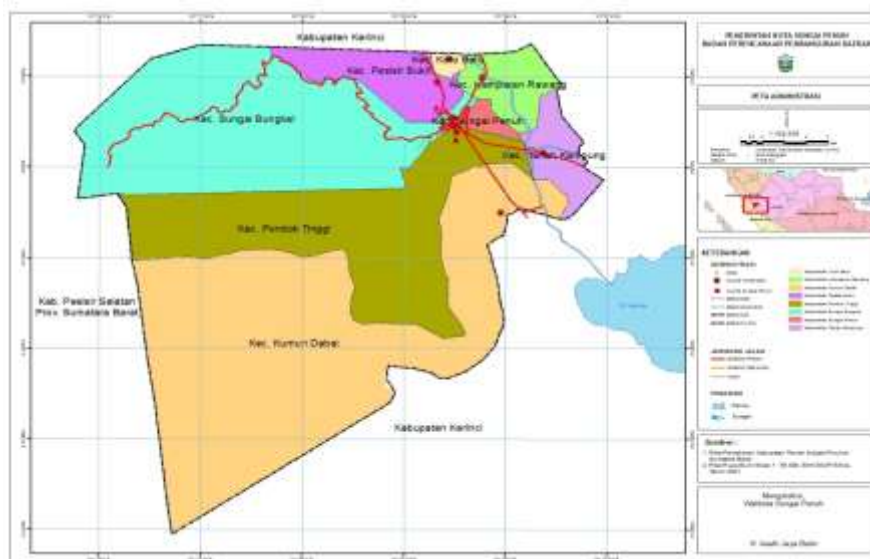
2.1.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Sungai Penuh merupakan wilayah hasil pemekaran Kab. Kerinci sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yang diresmikan pada tanggal 08 November 2008, memiliki luas 391,5 Km² (39.150 Ha) atau 0,78 % dari total wilayah Provinsi Jambi yang sekitar 59,2 % (23.177,6 Ha) merupakan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan merupakan kawasan lindung dan kawasan strategis nasional. Yang lokasinya berbatasan dengan berbatasan dengan:

1. Sebelah utara : Kec. Siulak, Kec. Depati Tujuh dan Kec. Air Hangat Timur Kab. Kerinci
2. Sebelah Selatan : Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci
3. Sebelah Barat : Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumbar
4. Sebelah Timur : Kec. Air Hangat Timur dan Kec. Sitinjau Laut Kab. Kerinci

Gambar 2.1
Wilayah Administrasi Kota Sungai Penuh



Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2031

Secara administratif kewilayahan Kota Sungai Penuh yang ber-ibu kota di Sungai Penuh sejak Tahun 2012 terbagi dalam 8 Kecamatan (semula 5 Kecamatan), 65 Desa dan 4 Kelurahan. Kecamatan yang wilayahnya paling besar adalah Kecamatan Kumun Debai dengan luas 14.200 Ha atau 36,27% dari total luas Kota Sungai Penuh. Sedangkan kecamatan yang mempunyai wilayah paling kecil adalah Kecamatan Koto Baru dengan luas 164 Ha atau 0,42% dari luas wilayah keseluruhan.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Sungai Penuh

| KECAMATAN | LUAS WILAYAH | | JUMLAH | | |
|--------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | (Ha) | (%) | Desa | Kelurahan | Jumlah |
| 1. Tanah Kampung | 1.100 | 2,81% | 13 | - | 13 |
| 2. Kumun Debai | 14.200 | 36,27% | 9 | - | 9 |
| 3. Sungai Penuh | 335 | 0,86% | 3 | 2 | 5 |
| 4. Hamparan Rawang | 1.215 | 3,10% | 13 | - | 13 |
| 5. Pesisir Bukit | 1.946 | 4,97% | 9 | - | 9 |
| 6. Sungai Bungkal | 11.095 | 28,34% | 5 | 1 | 6 |
| 7. Pondok Tinggi | 9.095 | 23,23% | 7 | 1 | 8 |
| 8. Koto Baru | 164 | 0,42% | 6 | 0 | 6 |
| JUMLAH | 39.150 | 100% | 65 | 4 | 69 |

Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2016

2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Sungai Penuh dilihat berdasarkan posisi astronomi, Kota Sungai Penuh berada diantara 101° 14' 32" BT sampai dengan 101° 27' 31" BT dan 02° 01' 40" LS sampai dengan 02° 14' 54" LS

Dalam konteks pembangunan Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh yang terletak di bagian barat Provinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatra Barat memiliki fungsi dan kedudukan diantaranya :

1. Penetapan dan peningkatan Kota Sungai Penuh menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
2. Pemantapan fungsi kawasan lindung Kota Sungai Penuh dan mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi.
3. Kota Sungai Penuh di dalam Sistim Perkotaan Provinsi Jambi ditetapkan memiliki peranan dan fungsi sebagai :
 - a. Pelayanan pariwisata;
 - b. Pendidikan;
 - c. Perdagangan dan jasa regional; dan
 - d. Kawasan Konservasi.
4. Di dalam Sistim Transportasi Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh diarahkan untuk menjadi Jalur Penghubung (*feeder road*) berupa jalur Bangko-Sungai Penuh, serta pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Sungai Penuh-Kayu Aro-Batas Sumbar dan Jaringan Jalan Kolektor Primer Sungai Penuh-Lempur.
5. Pembangunan dan Peningkatan jaringan jalan baru untuk sistim dan fungsi kolektor primer, berupa jalur Kumun Debai-Tanah Kampung-Hamparan Rawang-Pesisir Bukit-Sako (Kabupaten Pesisir Selatan Prov. Sumbar).

2.1.1.1.3. Fisiografis Dan Tofografi

A. Fisiografis

Dalam sistem fisiografis, Kota Sungai Penuh secara umum berada pada ketinggian antara 500-1000 mdpl yakni mencapai 52,59% dari luas wilayah, ketinggian lebih dari 1000 mdpl 46,90%, sedangkan sisanya berada pada ketinggian kurang dari 500 mdpl. Kota Sungai Penuh dikelilingi oleh perbukitan di sebelah utara dan barat. Dengan kondisi demikian, maka Kota Sungai Penuh menjadi perlintasan sistem sungai regional, yang mengalir dari hulu di utara ke arah hilir di selatan. Sistem drainase di Kota Sungai Penuh akan didukung oleh sistem sungai regional tersebut, dengan mengalirkan limpasan air hujan yang jatuh di Kota Sungai Penuh ke sistem sungai terkait, yang secara topografis mengalir ke arah hilir selatan di Kabupaten Kerinci.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kota Sungai Penuh menurut Ketinggian dari Permukaan Laut

| KECAMATAN | LUAS WILAYAH MENURUT POSISI KETINGGIAN DARI PERMUKAAN LAUT (HA) | | | JUMLAH |
|--------------------|---|-----------------|-------------|--------|
| | 100 - 500 Mdpl | 500 - 1000 Mdpl | > 1000 Mdpl | |
| 1. Tanah Kampung | - | 1.100 | - | 1.100 |
| 2. Kumun Debai | - | 860 | 13.340 | 14.200 |
| 3. Sungai Penuh | - | 335 | - | 335 |
| 4. Hamparan Rawang | - | 1.215 | - | 1.215 |
| 5. Pesisir Bukit | - | 1.216 | 730 | 1.946 |
| 6. Sungai Bungkal | - | 310 | 10.325 | 11.095 |
| 7. Pondok Tinggi | - | 770 | 10.335 | 9.095 |
| 8. Koto Baru | - | 164 | - | 164 |
| JUMLAH | - | 5.970 | 33.180 | 39.150 |

Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2016

B. Tofografi

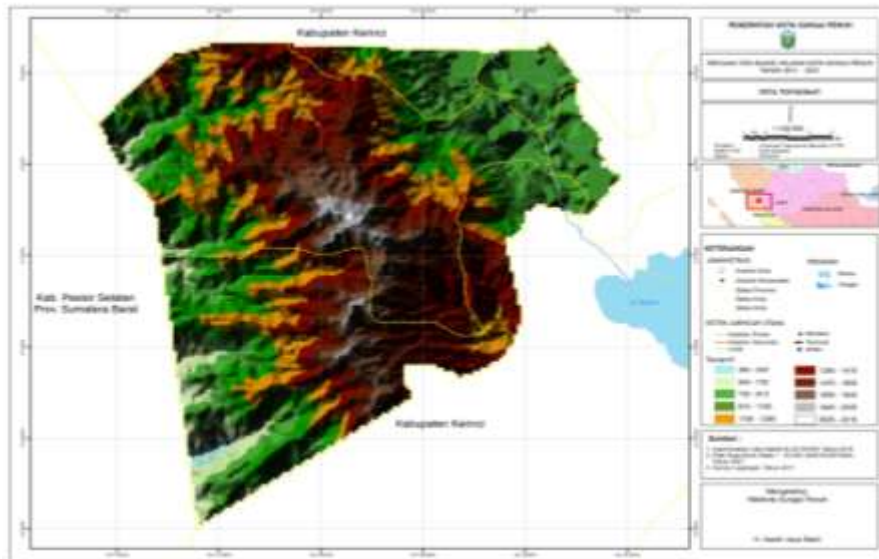
Dengan lokasi yang berada pada dataran tinggi, kemiringan lereng wilayah Kota Sungai Penuh sangat bervariasi, dapat dibagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit, dan terjal. Wilayah yang terjal berada di bagian tengah Kecamatan Sungai Penuh dan Kumun Debai (24,3%), sementara daerah perbukitan (28,2%) berada di bagian barat Kecamatan Sungai Penuh dan Kumun Debai dan dikawasan perbatasan Kota Sungai Penuh dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Lahan yang memiliki kemiringan relatif datar (12,3%) terdapat sebagian besar di Kecamatan Hamparan Rawang dan Tanah Kampung, serta di Kecamatan Pesisir Bukit, Sungai Penuh dan Kumun bagian timur.

Tabel 2.3
Klasifikasi Lereng di Kota Sungai Penuh

| No | Klasifikasi lereng | Lereng | Luas (ha) | Persentase Luas (%) |
|--------------------------|----------------------|------------|---------------|---------------------|
| 1. | Datar | 0 - 2 % | 4.812 | 12,29 |
| 2. | Bergelombang | > 2 - 15 % | 4.618 | 11,80 |
| 3. | Berbukit | >15 - 25% | 11.051 | 28,23 |
| 4. | Curam | >25 - 40% | 9.171 | 23,42 |
| 5. | Sangat Curam, Terjal | > 40% | 9.498 | 24,23 |
| Luas Wilayah Kota | | | 39.150 | 100.00 |

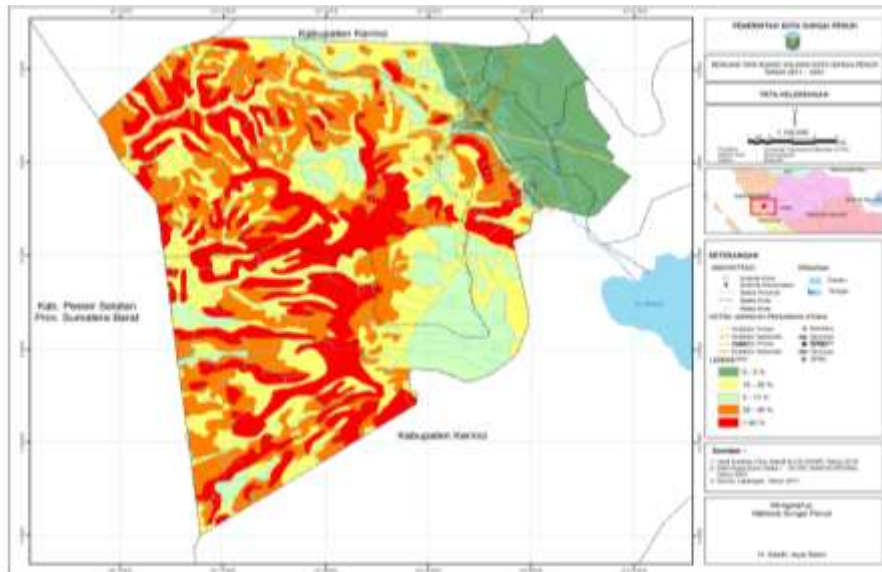
Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2015

Gambar 2.2
Peta Topografi Kota Sungai Penuh



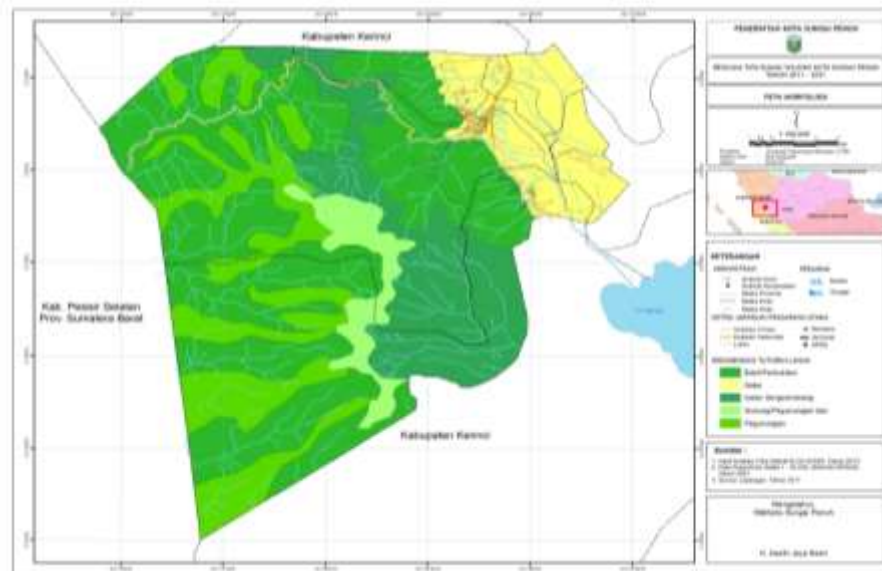
Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2031

Gambar 2.3
Peta Kelerengan Kota Sungai Penuh



Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2031

Gambar 2.4
Peta Morfologi Kota Sungai Penuh



Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2031

2.1.1.1.4. Geologi

Kota Sungai Penuh secara regional berada di lingkungan Bukit Barisan yang dibentuk oleh bentang alam perbukitan dan pegunungan dengan relief permukaan yang umumnya tinggi. Pembentukan bentang alam yang tampak seperti sekarang ini sangat dipengaruhi oleh susunan batuan (litologi), struktur geologi yang berkembang, serta proses-proses geologi yang sedang berlangsung. Pusat kegiatan kota menempati bagian kaki dari bentang alam tersebut yang disusun oleh endapan material rombakan, batuan gunung api, sedimen, dan batuan terobosan yang secara morfologi berupa kipas.

- Batuan Sedimen; terletak di bagian selatan Kota Sungai Penuh dan dikenal dengan nama Formasi Kumun membentuk bentang alam perbukitan berelief terjal memanjang barat laut tenggara, terdiri dari batu pasir, konglomerat, breksi, dan tuf dengan sisipan lignit dan berlapis baik.
- Batuan Gunung Api; bersusunan andesit-basal, menempati bagian barat Kota Sungai Penuh membentuk bentang alam pegunungan dan perbukitan yang terdiri dari lava andesit-basalt, tuf, dan breksi gunung api.
- Batuan Terobosan; terdiri dari Granodiorit terletak di sekitar Kota Sungai Penuh membentuk perbukitan yang memanjang barat laut tenggara, dan batuan terobosan granit yang menempati bagian barat laut.
- Batuan Sedimen Lainnya dan Endapan Aluvium; mengalasi bentang alam dataran, yaitu formasi pengasih terdiri dari batu lempung, batu lanau, batu pasir berbatu apung dengan sisipan lignit dan konglomerat. Endapan aluvium ini menempati bentang alam dataran di sekitar wilayah Kota Sungai Penuh.

Struktur geologi berupa lipatan, patahan, dan kelurusan banyak dijumpai di wilayah Kota Sungai Penuh, dimana umumnya berarah tenggara barat laut. Struktur patahan mempengaruhi seluruh batuan penyusun yang terbentuk di jaman Pra-Holosen bahkan hingga jaman Resen. Patahan ini mempengaruhi pula terhadap endapan aluvium di bagian dataran, yang tercerminkan oleh adanya retakan/lipatan dan kelurusan. Wilayah dataran yang disusun oleh endapan aluvium sungai merupakan endapan yang sangat sensitif terhadap gempa. Berdasarkan kejadian gempa yang pernah terjadi pada tahun 1995, bangunan rumah dan infrastruktur yang ada di atasnya telah mengalami rusak berat dibandingkan dengan bangunan yang bertumpu pada batuan lainnya, seperti batuan sedimen, batuan gunung api, batuan terobosan, dan endapan kipas (kolovial).

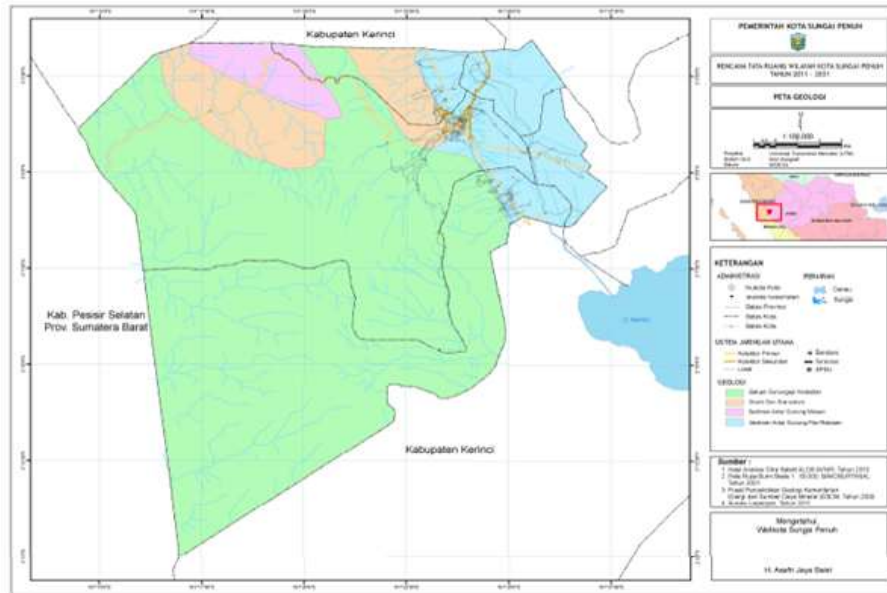
Tabel 2.4
Susunan Batuan Kota Sungai Penuh

| Jenis Batuan | Simbol |
|---|--------------|
| Formasi Asai | Ja |
| Granit tatan | Jgr |
| Formasi Peneta | Kjp |
| Formasi Hulusimapang (batuan gunung berapi) | Tomh |
| Batuan Sedimen Tersier | Tb, Tmk, Qtp |
| Formasi bandan | Tb |
| Formasi Kumun | Tmk |
| Formasi Pengasih | Qtp |
| Granit dan Diorit | Tdi |
| Granodiorit | Tgd |
| Granit | Tgr |
| Diorit | Di |
| Endapan Aluvial | Qa |
| Endapan Kipas Aluvial | Qaf |
| Endapan Delta | Qad |
| Endapan Aluvial Gunungapi | Qav |

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1996

Pada skala lokal 1:100.000, sesuai dengan struktur geologi di Kota Sungai Penuh terdapat sesar berarah ke barat laut-tenggara, yaitu sesar Siulak (hasil studi Pusat Geologi yang bekerjasama dengan Bappeda Kab. Kerinci pada tahun 2003). Sesar ini terdiri atas dua sesar yang sejajar melintasi Kota Sungai Penuh. Panjang sesar kurang lebih 37 km dan lebarnya 17 km. Sesar ini mulai aktif sejak Miosen Tengah, yang berhubungan dengan pembentukan Formasi Kumun dan diaktifkan lagi pada Plio-Plitosen. Sesar ini merupakan sesar geser manganan dengan kemiringan hampir tegak.

Gambar 2.5
Peta Geologi Kota Sungai Penuh



Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2031

2.1.1.1.5. Hidrologi

Pada dasarnya kondisi hidrologi Kota Sungai Penuh dapat terlihat dari adanya sumber-sumber air, baik berupa air permukaan, mata air, maupun air tanah sebagai berikut

A. Air permukaan (sungai)

Wilayah Kota Sungai Penuh termasuk dalam Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, yang merupakan rangkaian daerah aliran sungai dari Kabupaten Kerinci. Wilayah Kabupaten Kerinci didominasi oleh pegunungan Bukit Barisan, sebagai bagian dan rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang memanjang sepanjang pantai Barat Sumatera, titik tertinggi adalah puncak Gunung Kerinci. Terdapat banyak dataran sepanjang lembah Bukit Barisan tersebut. Pegunungan Bukit Barisan yang berada sebelah Barat dan timur Kerinci ini menjadi titik tertinggi di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, sehingga semua sungai yang mengalir di Kota Sungai Penuh mengalir ke arah tengah dan selatan menuju dan bermuara ke Danau Kerinci dan selanjutnya mengalir ke Sungai Batanghari.

Berdasarkan hasil penyelidikan hidrogeologi regional lembar Sungai Penuh dapat dibagi kedalam tiga (tiga) wilayah produktivitas akuifer (lapisan pembawa air) yaitu:

1. Akuifer Produktif sedang dengan penyebaran luas, keterusan rendah sampai sedang, muka air tanah beragam dan debit sumur kurang dari 5l/det;

2. Akuifer dengan produktifitas rendah setempat dimana umumnya keterusan rendah, setempat sedang, air tanah dalam jumlahnya cukup dapat diperoleh terutama dilembah-lembah atau zona sesar dan pelapukan; dan
3. Daerah air tanah langka. Pemanfaatan air permukaan sebagai air baku untuk pelayanan air bersih di Kota Sungai Penuh terutama berasal dari anak Sungai Ampuh yang terletak \pm 3 m di bagian tenggara pusat Kota Sungai Penuh yakni di desa sungai jernih Kecamatan Sungai Penuh.

B. Mata Air

Di wilayah Kota Sungai Penuh juga dijumpai mata air, yang terbentuk dari dasar lembah atau kaki perbukitan yang disebabkan adanya lapisan batuan kedap air dibawahnya, sehingga peregangan tidak terus ke dalam melainkan ke arah kateral dan muncul di kaki tebing/lembah atau kaki perbukitan. Hal ini ditunjukkan adanya beberapa danau, dan air terjun di daerah pegunungan.

C. Air Tanah

Keberadaan air tanah dipengaruhi oleh curah hujan, luas daerah resapan, sifat kelulusan bahan permukaan dan batuan yang terdapat dibawahnya serta morfologi. Potensi air tanah umumnya relatif dalam, sekitar >60 meter. Hampir seluruh Kecamatan di Kota Sungai Penuh mempunyai kedalaman efektif tanah >90 meter.

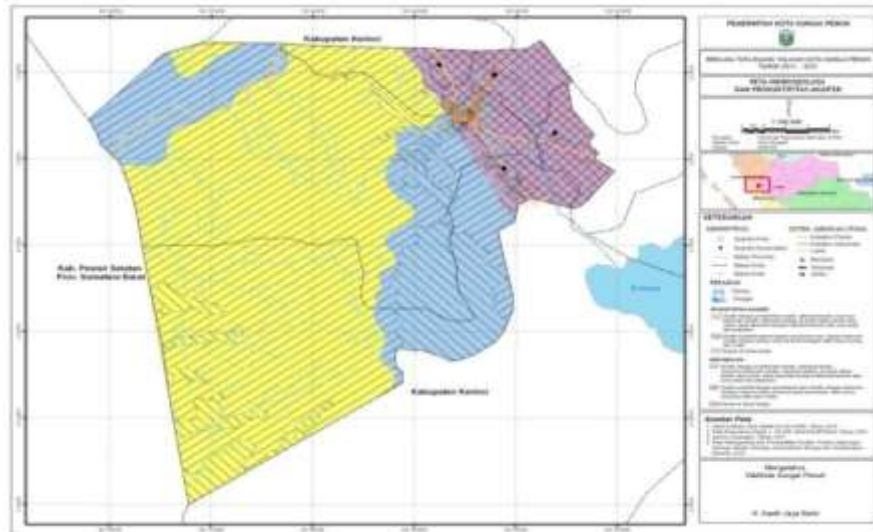
Sungai-sungai utama yang terdapat di Kota Sungai Penuh adalah : Sei Batang Air Baru, Sei Bt. Merau, Sei Mura Jaya, Sei Ning, Sei Air Bungkal dan Sei Rampuh.

Tabel 2.5
Profil Fisik Sungai di Kota Sungai Penuh

| No | NAMA SUNGAI | PAJANG (M) | LEBAR (M) | | KEDALAMAN (M) | DEBIT (M ³ /DTK) | |
|----|-----------------------|------------|-----------|-------|---------------|-----------------------------|------|
| | | | Permukaan | Dasar | | Maks. | Min. |
| 1 | Sungai Ning | 3.48 | 10 | 8 | 2 | 120 | 1,5 |
| 2 | Sungai Pengasah | 3.624 | 8 | 7 | 1,5 | 80 | 0,9 |
| 3 | Sungai Air Sesat | 1.14 | 12 | 10 | 2 | 95 | 0,95 |
| 4 | Sungai Air Sempit | 5.041 | 12 | 10 | 2 | 96 | 0,98 |
| 5 | Sungai Terung | 4.943 | 20 | 18 | 3 | 115 | 1,3 |
| 6 | Sungai Air Hitam | 2.793 | 10 | 8 | 2 | 90 | 0,8 |
| 7 | Sungai Batang Sangkir | 2.802 | 15 | 13 | 4 | 130 | 2 |
| 8 | Sungai Air Bunkal | 2.988 | 8 | 6 | 2 | 170 | 2,5 |
| 9 | Sungai Rampuh | 6.18 | 6 | 4 | 1,5 | 70 | 1,1 |
| 10 | Sungai Ulu Air Kumun | 1.795 | 6 | 4 | 1,5 | 85 | 1 |
| 11 | Sungai Batang Bungkal | 9.062 | 15 | 13 | 2 | 190 | 3 |
| 12 | Sungai Batang Merao | 10.247 | 20 | 18 | 5 | 365 | 6 |

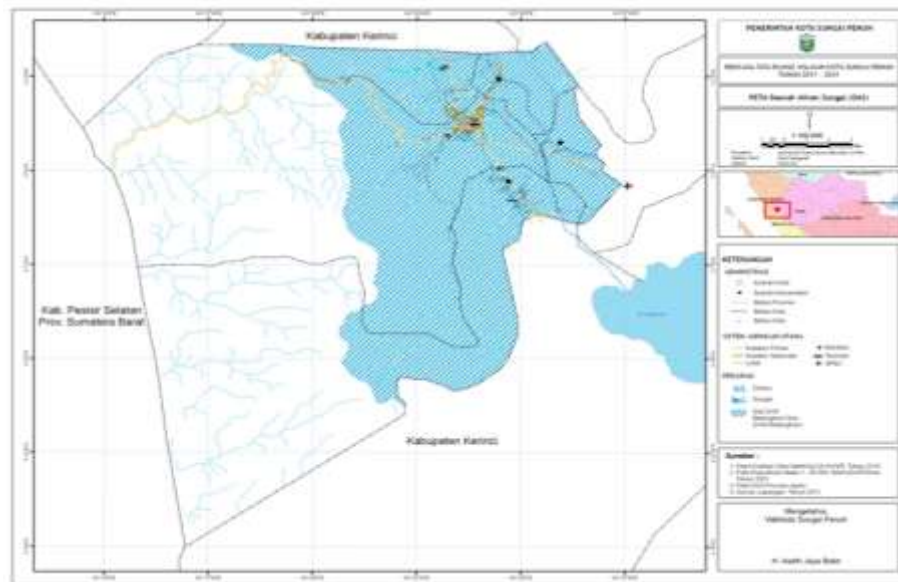
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh, 2015

Gambar 2.6
Peta Hidrogeologi dan Produktivitas Akuifer



Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2030

Gambar 2.7
Peta Daerah Aliran Sungai Penuh



Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2030

2.1.1.1.6. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kota Sungai Penuh meliputi 4 (empat) macam jenis tanah, yaitu: andosol, latosol, podsolik, dan alluvial yang dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah.

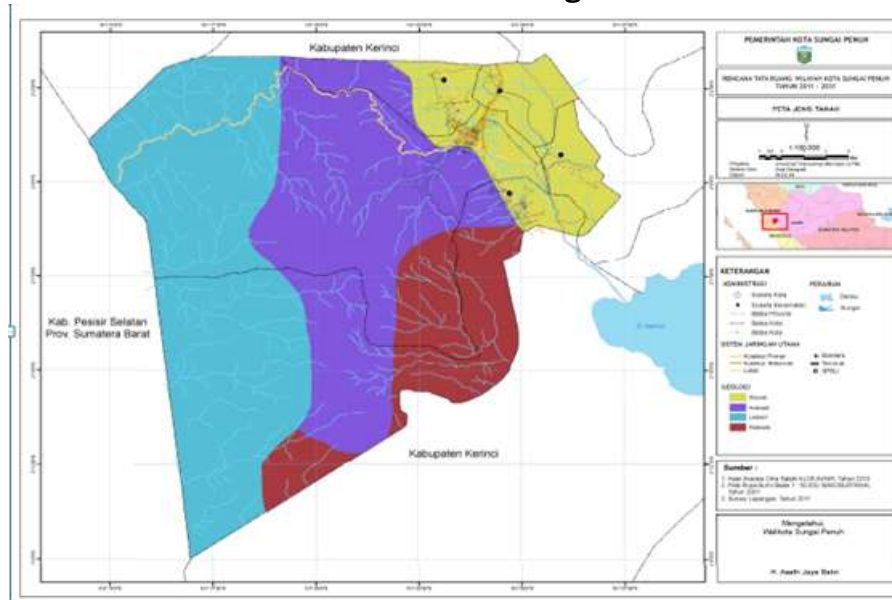
Pemanfaatan tanah jenis alluvial pada usaha pertanian dapat dilakukan di daerah endapan sungai atau daerah rawa-rawa pasang surut, sedangkan tanah aluvial yang berasal dari bahan alluvium umumnya merupakan tanah subur. Jenis tanah alluvial di Kota Sungai Penuh umumnya berupa tanah subur yang dimanfaatkan menjadi lahan pertanian sawah.

Tabel 2.6
Jenis Tanah di Kota Sungai Penuh

| No | Jenis Tanah | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|--------|-------------|-----------|----------------|
| 1 | Andosol | 12564 | 32.1 |
| 2 | Latosol | 15577 | 39.8 |
| 3 | Padsolik | 5594 | 14.3 |
| 4 | Alluvial | 5415 | 13.8 |
| Jumlah | | 39150 | 100 |

Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka, 2014

Gambar 2.8
Peta Kondisi Tanah Sungai Penuh



Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2030

2.1.1.1.7. **Klimatologi**

Sungai Penuh Beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22,50 C selama tahun 2015. Suhu maksimum sebesar 28,50 C terjadi pada bulan April-Mei, serta suhu minimum sebesar 17,70 C terjadi pada bulan September.

Curah hujan rata-rata per bulan sepanjang tahun 2015 sebesar 151,3 mm3 dengan curah hujan terendah sebesar 9,2 mm3 terjadi pada bulan Oktober dan curah hujan tertinggi sebesar 279,8 mm3 terjadi pada bulan Desember.

Kelembaban relatif udara rata-rata per bulan sebesar 82% dengan kelembaban udara terendah sebesar 77% di bulan Oktober dan kelembaban udara tertinggi sebesar 87% terjadi pada bulan Februari.

2.1.1.1.8. **Penggunaan Lahan**

Kota Sungai Penuh saat ini pada dasarnya terbentuk dari percampuran kegiatan-kegiatan yang bersifat perkotaan dan sebagian kecil bersifat perdesaan berupa lahan-lahan pertanian, serta kegiatan kepariwisataan. Kegiatan perkotaan yang mempunyai jangkauan pelayanan wilayah (regional) berupa fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi regional dan fasilitas perkantoran dan/atau pemerintahan. Sedangkan kegiatan-kegiatan kepariwisataan di Kota Sungai Penuh memiliki tingkat pelayanan nasional maupun regional antara lain berupa fasilitas akomodasi hotel dalam memberikan pelayanan jasa kepariwisataan yang

mengkaitkan objek-objek wisata baik yang berada di dalam kota ataupun yang terletak di luar kota dan daerah lain di Kabupaten Kerinci.

Komponen ruang kota yang bersifat pedesaan berupa lahan-lahan pertanian tanaman pangan sawah dan kebun lahan kering terdapat lebih banyak di wilayah hinterland kota dengan hasil produksi yang dipasarkan ke Propinsi Jambi, dan wilayah Sumatera Barat. Daerah pertanian ini sebagian besar berada di bagian timur dan selatan wilayah kota, terutama di Kecamatan Tanah Kampung dan Hamparan Rawang. Secara umum gambaran penggunaan lahan di Kota Sungai Penuh dapat dijelaskan sebagai berikut:

- kawasan pusat kota yang merupakan konsentrasi kegiatan perdagangan, pemerintahan dan perkantoran, pelayanan kegiatan sosial dan pariwisata dengan lingkup pelayanan regional wilayah kota dan daerah pinggiran. Kegiatan ini berada di Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Sungai Penuh, Desa Gedang, Permanti, Koto Tinggi, serta Aur Duri;
- kawasan pariwisata dan kegiatan pendukungnya yaitu sepanjang Bukit Sentiong, Bukit Khyangan dan kawasan Taman Bunga di Talang Lindung serta kawasan Bukit Khayangan;
- kawasan perumahan yang menyebar dengan intensitas yang semakin tinggi ke arah pusat kota. Bagian barat dan tenggara serta utara kota merupakan daerah perkembangan perumahan yang antara lain di Kecamatan Sungai Penuh bagian barat, dan Pesisir Bukit; dan
- kawasan Pertanian pada kawasan utara dan tenggara kota yang besaran lahannya semakin menyusut karena beralih fungsi menjadi lahan perumahan.

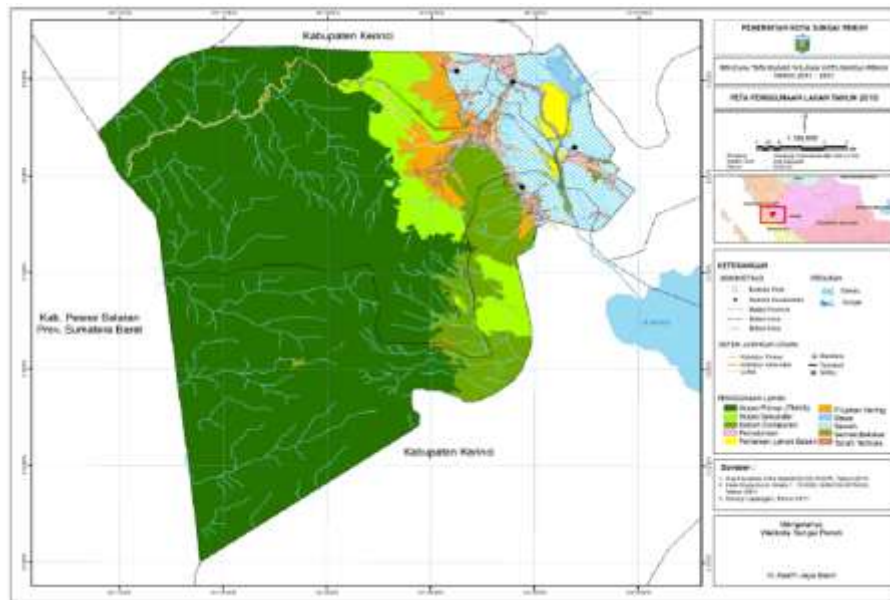
Perkembangan fisik ruang kota dari awal hingga mencapai besaran luas seperti sekarang berawal dari lingkungan pusat kota. Perkembangan mengikuti rencana pola jaringan jalan lingkaran yaitu poros jalan Desa Gedang-Jembatan I Tanah Kampung. Struktur Kota Sungai Penuh yang bersifat konsentrik cenderung mengarah ke pola pembauran sektoral yang terintegrasi tanpa zonasi yang tidak begitu jelas batasnya. Terjadi pemusatan kegiatan-kegiatan utama seperti kegiatan perdagangan, perkantoran, perhotelan dan kepariwisataan, pendidikan, dan kesehatan dengan konsentrasi tinggi pada pusat kota.

Tabel 2.7
Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh

| NO | PENGGUNAAN LAHAN | KECAMATAN | | | | | | | | LUAS (Ha) |
|------------|------------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------|
| | | Hamp. Rawang | Koto Baru | Kumun Debai | Pesisir Bukit | Pondok Tinggi | Sungai Bungkal | Sungai Penuh | Tanah Kampung | |
| 1 | Hutan Primer (TNKS) | - | - | 11.032 | 379 | 4.600 | 7.167 | - | - | 23.178 |
| 2 | Hutan Sekunder | - | - | 666 | 837 | 3.508 | 2.876 | - | - | 7.887 |
| 3 | Kebun Campuran | - | - | 1.218 | - | 324 | 371 | 10 | 38 | 1.961 |
| 4 | Pemukiman | 150 | 40 | 128 | 104 | 157 | 117 | 77 | 147 | 920 |
| 5 | Pertanian Lahan Basah | 287 | - | 4 | - | 52 | - | 5 | 51 | 399 |
| 6 | Pertanian Lahan Kering | - | - | 70 | 394 | 147 | 427 | - | 3 | 1.041 |
| 7 | Rawa | 127 | - | - | - | - | - | - | 3 | 130 |
| 8 | Sawah | 651 | 124 | 505 | 226 | 285 | 100 | 243 | 858 | 2.992 |
| 9 | Semak/Belukar | - | - | 568 | 5 | 20 | 37 | - | - | 630 |
| 10 | Tanah Terbuka | - | - | 9 | 1 | 2 | - | - | - | 12 |
| TOTAL (Ha) | | 1.215 | 164 | 14.200 | 1.946 | 9.095 | 11.095 | 335 | 1.100 | 39.150 |

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031.

Gambar 2.9
Peta Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh



Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031.

2.1.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah dan Potensi Unggulan Daerah

2.1.1.1.9.1. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Sungai Penuh sebagai salah satu kota di Provinsi Jambi memiliki peran strategis. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Sungai Penuh Tahun 2011-2031 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh tahun 2011-2031.

Di lihat dari sisi arahan sistem perkotaan nasional yang diatur dalam RTRWN dan arah pengembangan wilayah Provinsi Jambi, letak geografis Kota Sungai Penuh cukup strategis. Kota Sungai Penuh terletak pada posisi sentral antara Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu, dengan PKN yang terdekat dengan Kota Sungai Penuh adalah Kota Padang (PKN Sumbar) yang jalur lintasnya melalui PKW Muara Labuh atau PKW Painan. Sedangkan jalur lintas menuju PKN Kota Jambi melalui PKWp Bangko dan Muaro Bungo yang merupakan PKW terdekat dengan Kota Sungai Penuh dalam wilayah Provinsi Jambi.

Muara Bungo juga merupakan kawasan andalan yang terdekat dengan Kota Sungai Penuh, dengan sektor unggulannya adalah : perkebunan, pertanian dan kehutanan. Di sisi lain PKW Muko-muko merupakan jalur lintas menuju PKN Bengkulu. Kota Sungai Penuh juga menjadi daerah pusat kegiatan dari beberapa PKL di Kabupaten Kerinci (Sanggaran Agung, Siulak Mukai dan Batang Sangir) dan Provinsi Sumatera Barat (Tapan) serta Provinsi Bengkulu (Muko-muko). Oleh karena itu Kota Sungai Penuh di kemudian hari dapat diorientasikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah bagi daerah sekitarnya.

Dalam kaitannya dengan kondisi tersebut, Kota Sungai Penuh memiliki kawasan strategis yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah dimasa mendatang, diantaranya adalah:

A. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yaitu melalui pengembangan kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan sebagai kawasan pusat perdagangan, jasa, pergudangan dan transportasi skala regional di Kecamatan Sungai Penuh untuk mendorong percepatan pengembangan fungsi utama Kota Sungai Penuh sebagai PKWp. Hal ini mencakup pengembangan kawasan pergudangan, pasar serta Pusat Pemadu Modal (Terminal tipe A). Pengembangan pusat perbelanjaan, perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan wajib memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk pedagang informal atau kegiatan sejenis lainnya.

B. Kawasan Peruntukan Industri

Adapun untuk kawasan peruntukan industri berupa kawasan industri kecil maupun industri rumah tangga tersebar di Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Sungai Penuh disamping Kecamatan Lainnya. Kondisi eksisting pada kecamatan ini sudah banyak terdapat industri kecil/rumah tangga. Pemerintah Kota Sungai Penuh hanya perlu menata kembali kawasan ini, arahan pengembangan kawasan ini dilakukan di setiap Kecamatan serta terintegrasi dengan kawasan pariwisata budaya.

C. Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan perkantoran mencakup perkantoran pemerintah maupun swasta. Arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan perkantoran dapat dilakukan di Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh sesuai dengan potensi, sedangkan untuk kawasan perkantoran swasta di Kecamatan Sungai Penuh karena memiliki lokasi yang strategis dan konektivitas yang baik antar wilayah. Rencana Luas keseluruhan lahan yang digunakan untuk perkantoran pemerintahan ialah seluas 17,46 ha.

D. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Daya tarik wisata tersebut terdiri atas :a) daya tarik wisata alam; b) daya tarik wisata buatan; dan c) daya tarik wisata budaya. Daya tarik wisata alam, berupa pengembangan dan peningkatan kawasan, meliputi :

- 1) kawasan Bukit Sentiong di Kecamatan Sungai Penuh.
- 2) kawasan Bukit Khayangan di Kecamatan Sungai Bungkal dan Kecamatan Kumun Debai.
- 3) kawasan Taman Bunga di Kecamatan Sungai Penuh.
- 4) kawasan Bukit Tapan di Kecamatan Pesisir Bukit.
- 5) Kawasan Air Terjun di Kecamatan Kumun Debai.

Daya tarik wisata buatan berupa pengembangan dan peningkatan Kawasan Agrowisata di setiap kecamatan dalam Kota Sungai Penuh sedangkan daya tarik wisata budaya berupa pengembangan dan peningkatan kawasan, meliputi :a) Masjid Agung Pondok Tinggi di Kecamatan Pondok Tinggi; b) Masjid Raya Rawang di Kecamatan Hamparan Rawang; c) Tanah Sebingkeh di Kecamatan Hamparan Rawang; d) Tanah Mendapo di Kecamatan Sungai Penuh; e) Makam Nenek Siak Lengih di Kecamatan Sungai Penuh; f) Batu Sorban dan

Makam Siak Alam Koto Bingin di Kecamatan Pesisir Bukit; g) Batu Gong Nenek Betung di Kecamatan Kumun Debai.

Rencana luas kawasan objek wisata yang akan dikembangkan seluas 149,77 ha, sedangkan rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata diarahkan pada :

- 1) Penataan ruang kawasan pariwisata.
- 2) Pengembangan hasil kerajinan rakyat dan budaya masyarakat.
- 3) Pengembangan objek dan fasilitas pariwisata.
- 4) Promosi objek-objek wisata.

E. Kawasan Peruntukan Sektor Informal

Sektor informal merupakan sektor usaha pelayanan yang tidak terorganisasi baik waktu, jenis usaha maupun lokasi, karena kegiatan ini sangat tergantung pada waktu, jenis dan lokasi kegiatan formal terutama kegiatan perdagangan, jasa dan pelayanan publik lainnya yang bersifat formal. Pemanfaatan ruang untuk kawasan sektor informal pada dasarnya dimaksudkan untuk mengarahkan lokalisasi kegiatan sektor informal untuk sore dan malam hari (bukan pemanfaatan ruang secara penuh). Keberadaan sektor informal di Kota Sungai Penuh tersebar terutama pada kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota, yang memanfaatkan ruang pejalan dan area parkir. Rencana penyediaan ruang bagi sektor informal diarahkan dengan prinsip pengaturan waktu dan ruang untuk beraktifitas yaitu pada sore dan malam hari (antara jam 15.00-22.00 WIB). Sementara lokasi kegiatan sektor informal diarahkan untuk memanfaatkan ruang pada kawasan Pujasera Kelurahan Pasar Sungai Penuh, ruang terbuka non hijau dan pelataran parkir depan Kincai Plaza, serta pada kawasan Terminal Kota Sungai Penuh berupa pelataran terbuka.

F. Kawasan Peruntukan Pendidikan

Kawasan peruntukan pendidikan di Kota Sungai Penuh berupa kawasan pendidikan dan pelatihan yang berada di Kecamatan Pesisir Bukit dan di Kecamatan Sungai Penuh dengan dukungan keberadaan jalur pergerakan regional, ketersediaan lahan pengembangan dan telah terdapat beberapa perguruan tinggi di lokasi tersebut. Kawasan pendidikan ini diarahkan untuk berkembang dan dapat mendukung fungsi penunjang pendidikan tinggi berupa fasilitas pusat penelitian, asrama serta fasilitas sarana olahraga dan taman rekreasi yang dapat dimanfaatkan oleh publik. Hingga akhir tahun rencana, kawasan pendidikan dan pelatihan ini diarahkan untuk dapat menampung semua kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sudah ada saat ini, sehingga teraglomerasi pada satu lokasi, alokasi ruang bagi kawasan pendidikan dan pelatihan mencapai 32,08 ha.

G. Peruntukan Lainnya

1) Pertahanan dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan merupakan kawasan peruntukan lainnya terkait kepentingan strategis nasional. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di Kota Sungai Penuh memiliki luas area pemanfaatan mencapai 4,85 ha meliputi :

- a. Markas Komando Distrik Militer 0417 di Kecamatan Sungai Penuh;
- b. Koramil yang terdapat di kecamatan dalam Kota Sungai Penuh; dan
- c. Polres dan polsek dalam Kota Sungai Penuh.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dilakukan melalui kajian yang komprehensif dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

2) Kawasan Peruntukan Pertanian

a. Holtikultura dan Perkebunan

Kawasan peruntukan holtikultura dan perkebunan di Kota Sungai Penuh terdapat pada kawasan sebelah barat kota yakni di Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Kumun Debai berupa perkebunan dengan jenis tanaman seperti kentang, cabe, tomat, casia vera, kopi, kemiri, cengkeh dan lainnya.

Arahan pengembangan lahan holtikultura dan perkebunan ini adalah secara tumpang sari agar dapat meningkatkan nilai produksi hasil perkebunan. Pemanfaatan ruang kawasan perkebunan dengan tetap mempertahankan areal perkebunan yang sudah ada. Potensi luas kawasan peruntukan holtikultura dan perkebunan mencapai 5.944,35 ha. Selain diarahkan sebagai kawasan pertanian perkebunan dan holtikultura, kawasan ini juga diarahkan sebagai kawasan penyangga yang dibatasi pengelolaannya tanpa merubah fungsi utama kawasan. Rencana pengembangan kawasan peruntukan holtikultura, kawasan ini juga diarahkan sebagai kawasan penyangga yang dibatasi pengelolaannya tanpa merubah fungsi utama kawasan

b. Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan untuk pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan atau sawah kota diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki sarana-saluran irigasi yang memadai. Upaya untuk mempertahankan kawasan pertanian kota tidak hanya dalam rangka ketahanan pangan namun juga sebagai bagian dari penataan lansekap kota dalam upaya menjaga keseimbangan antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun serta untuk mendukung penjagaan iklim mikro Kota Sungai Penuh yang sudah terkenal dengan kesejukannya. Adapun luas lahan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sawah ini adalah 2.731,33 ha. Terdapatnya lahan rawa di Kecamatan Hamparan Rawang saat ini, sebagian telah diolah dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. Dengan karakteristik lahan rawa yang ada, selain dimanfaatkan sebagai daerah tangkapan air juga dapat diarahkan pada pengembangan areal persawahan.

3) Perternakan

Budidaya perternakan tersebar di seluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh, arahan pengembangan peternakan ini dilakukan di setiap Kecamatan. Rencana pengembangan budidaya peternakan diarahkan menyebar diseluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh melalui :

- a. Penggunaan lahan secara terpadu.

- b. Pengelolaan pemasaran hasil ternak secara lebih baik terutama untuk pemasaran lokal dan regional.

4) Kawasan Peruntukan Perikanan

Adapun untuk kawasan peruntukan perikanan tersebar di seluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh, arahan pengembangan kawasan ini dilakukan di setiap Kecamatan untuk memanfaatkan Sungai Batang Merao sebagai areal pengembangan budidaya perikanan darat serta pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) dalam Kota Sungai Penuh untuk menunjang pengembangan budidaya perikanan.

5) Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M)

Kawasan ini terdapat di Kecamatan Kumun Debai dan Kecamatan Sungai Penuh dengan luas lahan mencapai 941,03 ha. Penggunaan lahan pada kawasan hutan ini didominasi oleh perkebunan rakyat seperti tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura. Arahan pengembangannya adalah Pemanfaatan lahan oleh masyarakat bersifat pertanian konservasi.

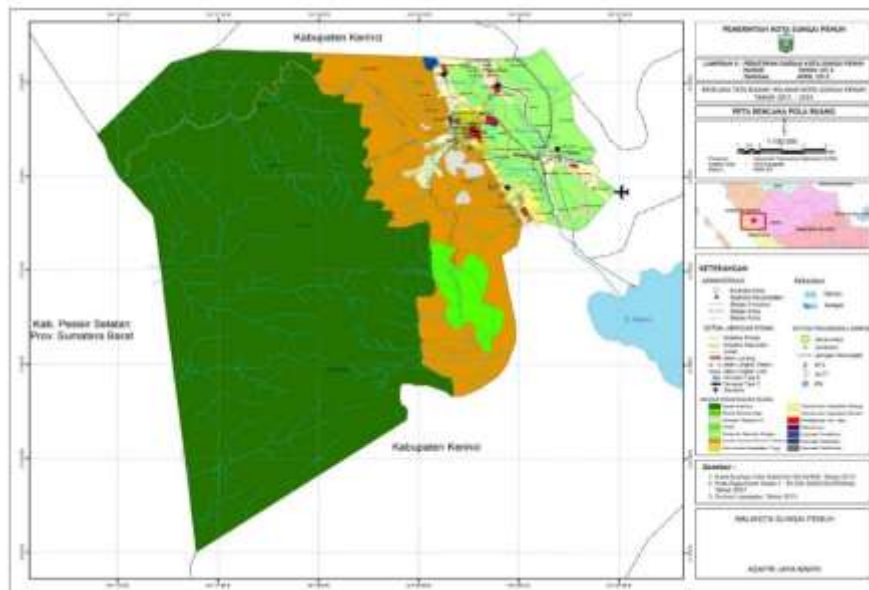
Rencana pemanfaatan lahan di Kota Sungai Penuh terbagi ke dalam 2 (dua) kawasan, yaitu: kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi : hutan konservasi, sempadan, hutan lindung, ruang terbuka hijau dan perairan. Kawasan budidaya meliputi : kawasan budidaya berfungsi lindung (hutan produksi, tanaman tahunan/perkebunan, hutan rakyat); kawasan budidaya pertanian (pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, peternakan) dan kawasan budidaya non pertanian (kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan pemerintahan/fasum, kawasan permukiman, kawasan perdagangan/jasa, kawasan Hankam). Rencana pemanfaatan lahan untuk kawasan lindung seluas 23.177,60 ha sedangkan rencana pemanfaatan lahan untuk kawasan budidaya seluas 10.721,00 ha.

Tabel 2.8
Rencana Pola Ruang Kota Sungai Penuh Sampai Akhir Tahun 2031

| No | FUNGSI KAWASAN | LUAS (ha) | PERSENTASE (%) |
|----|--|-----------|----------------|
| I | Kawasan Lindung | | |
| 1 | Taman Nasional Kerinci Seblat | 23.177,60 | 59,20 |
| 2 | Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahnya | 19,51 | 0,05 |
| 3 | Ruang Terbuka Hijau Kota | 492,51 | 1,26 |
| 4 | Kawasan Cagar Budaya | 3,00 | 0,01 |
| 5 | Kawasan Rawan Bencana | 962,38 | 2,46 |
| | Sub total | 24.655,00 | 62,98 |
| II | Kawasan Budidaya | | |
| A | Kawasan Perkotaan | 1.283,00 | 3,28 |
| 1 | Permukiman | 959,00 | 2,45 |
| 2 | Perdagangan dan jasa | 94,00 | 0,24 |
| 3 | Perkantoran | 50,00 | 0,13 |
| 4 | Industri Kecil | 5,00 | 0,01 |
| 5 | Pariwisata | 65,00 | 0,17 |
| 6 | Ruang Terbuka Non Hijau | 30,00 | 0,08 |
| 7 | Ruang Evakuasi Bencana | 30,00 | 0,08 |
| 8 | Ruang Sektor Informal | 5,00 | 0,01 |
| 9 | Kawasan Pendidikan | 30,00 | 0,08 |
| 10 | Kawasan Kesehatan | 15,00 | 0,04 |
| B | Peruntukan Lainnya | 9.438,00 | 24,11 |
| 1 | Kawasan Pertahanan dan Keamanan | 5,00 | 0,01 |
| 2 | Kawasan Pertanian : | | |
| | a. Perkebunan dan Hortikultura | 5.944,00 | 15,18 |
| | b. Pertanian Tanaman Pangan | 2.548,00 | 6,51 |
| 3 | Hutan Produksi | 941,00 | 2,40 |
| | Sub total | 10.721,00 | 27,38 |
| | Luas Wilayah Kota Sungai Penuh | 39.150,00 | 100 |

Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031

Gambar 2.10
Peta Rencana Pola Ruang Kota Sungai Penuh sampai Akhir Tahun 2031



Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031

2.1.1.1.9.2. Potensi Unggulan Daerah

Diketahui bahwa sektor Jasa Kemasyarakatan mengalami peningkatan jumlah penduduk bekerja dengan peranan terbesar sebesar 32,20% dengan peranan rata-rata periode 2010-2014 sebesar 27,02%, sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel mengalami peningkatan signifikan dengan jumlah penduduk bekerja dengan peranan sebesar 26,32 pada tahun 2014 dengan rata-rata peranan pada tahun 2010-2014 sebesar 24,37% memiliki peranan terbesar kedua, sektor Pertanian, kehutanan, Perburuan dan Perikanan berada di peringkat ke-3 dengan peranan rata-rata sebesar 24,00% pada tahun 2010-2014, jumlah terkecil yang berperan yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar 5,38% dengan rata-rata peranan sebesar 4,73%.

Tabel 2.9
Pesentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Sungai Penuh

| URAIAN | TAHUN | | | | | | Rata2 |
|---|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Pertanian, kehutanan, Perburuan dan Perikanan | 42.08 | 20.11 | 13.45 | N/A | 20.34 | 23.08 | 23.81 |
| Industri Pengolahan | 5.76 | 3.72 | 4.05 | N/A | 5.38 | 5.10 | 4.80 |
| Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel | 24.20 | 22.60 | 24.34 | N/A | 26.32 | 32.03 | 25.90 |
| Jasa Kemasyarakatan | 20.32 | 30.92 | 37.33 | N/A | 32.20 | 25.39 | 29.23 |
| Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, 15.75 Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan 2014) | 7.64 | 22.64 | 20.83 | N/A | 15.75 | 14.40 | 16.25 |

Sumber : Kota Sungai Penuh dalam angka, 2011-2015.

Ditinjau dari peranan sektoral terhadap PDRB pada tahun 2010-2014, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berperan terbesar yaitu 23.84% yang diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 14,14% serta sektor Konstruksi sebesar 12,99%. Dalam perekonomian dikenal adanya sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah sektor ekonomi yang sudah berkembang dan sudah memiliki kemampuan untuk kebutuhan lokal dan kebutuhan wilayah lain. Jika nilai LQ > 1 maka sektor tersebut dikategorikan sektor basis, artinya tingkat spesialisasi

kabupaten/kota lebih tinggi dari tingkat provinsi. Produksi komoditas sektor atau sub sektor yang bersangkutan sudah melebihi kebutuhan konsumsi di daerah dimana komoditas tersebut dihasilkan dan kelebihannya dapat dijual keluar daerah (ekspor). Jika $LQ = 1$ maka tingkat spesialisasi kabupaten/kota sama dengan di tingkat provinsi. Produksi komoditas yang bersangkutan hanya cukup untuk kebutuhan daerah setempat. Produksi komoditas tersebut belum mencukupi kebutuhan konsumsi di daerah yang bersangkutan dan pemenuhannya didatangkan dari daerah lain. Jika $LQ < 1$ maka sektor tersebut dikategorikan sektor non basis, artinya tingkat spesialisasi kabupaten/kota lebih rendah dari tingkat provinsi. Dalam kurun tahun 2010-2014.

Tabel 2.10
Hasil Analisis LQ Kota Sungai Penuh Tahun 2010 - 2014

| NO | SEKTOR | Hasil Analisis LQ Kota Sungai Penuh Tahun 2011 - 2014 | | | | |
|----|---|---|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3 | Industri Pengolahan | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 0.61 |
| 6 | Konstruksi | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.47 | 0.45 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0.64 | 0.63 | 0.69 | 0.64 | 0.65 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.28 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.28 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 2.02 | 2.03 | 1.88 | 1.92 | 1.93 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.08 |
| 12 | Real Estate | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.36 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 3.53 | 3.53 | 3.54 | 3.69 | 3.67 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.53 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1.19 | 1.14 | 1.28 | 1.26 | 1.27 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.00 | 1.04 | 0.95 | 0.96 | 0.91 |
| 17 | Jasa lainnya | 2.46 | 2.51 | 2.55 | 2.54 | 2.51 |

Sumber : Hasil Analisis Bappeda 2016.

Berdasarkan hasil analisis, Jasa Perusahaan menjadi sektor basis dengan nilai rata-rata 3,59 diikuti sektor oleh Jasa lainnya, Informasi dan Komunikasi dan sektor Jasa Pendidikan. Sementara sektor lainnya dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor non basis. Kriteria ini menunjukkan bahwa selama tahun 2010-2014 tidak terjadi pergeseran basis ekonomi sektoral.

Kemudian Hasil perhitungan LQ (*Master Plan Ekonomi Kota Sungai Penuh, 2015*) menurut sub sektor untuk Kota Sungai Penuh dalam perbandingannya dengan daerah sekitarnya ditampilkan pada Tabel dibawah, Jika LQ suatu sektor atau produk semakin positif dan lebih besar dari 1, menunjukkan bahwa sektor tersebut bisa dijadikan sebagai sektor atau sub sektor unggulan utama untuk ditumbuh kembangkan bagi pengembangan perekonomian suatu daerah. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi maka percepatan pengembangan sektor basis dan produk-produk unggulannya sangat diperlukan.

Tabel 2.11
Perbandingan Nilai "Location Quotient atau Karakteristik Perekonomian
Kota Sungai Penuh dengan Beberapa Daerah Sekitarnya 2014

| NO | Lapangan Usaha | Kabupaten/Kota | | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------------|----------|---------------|-----------------|--------------|------|
| | | Kerinci | Merangin | Solok Selatan | Pesisir Selatan | Kota S.Penuh | |
| I PRIMIER | | | | | | | |
| 1 | a | Tanaman Bahan Makanan | 1.09 | 0.79 | 0.85 | 0.77 | 0.18 |
| 2 | b | Tanaman Perkebunan | 1.06 | 1.88 | 1.22 | 1.03 | 0.19 |
| 3 | c | Perternakan dan Hasil-Hasilnya | 0.78 | 0.85 | 0.57 | 1.61 | 0.67 |
| 4 | d | Kehutanan | 0.44 | 0.30 | 0.12 | 0.07 | 0.03 |
| 5 | e | Perikanan | 1.33 | 0.87 | 1.26 | 0.44 | 0.58 |
| 6 | f | Penggalian | 0.55 | 0.75 | 0.61 | 0.55 | 0.48 |
| II SEKUNDER | | | | | | | |
| 7 | a | Industri Bukan Migas | 0.75 | 0.53 | 0.72 | 1.03 | 1.65 |
| 8 | b | Listrik | 0.35 | 0.46 | 0.65 | 0.65 | 0.75 |
| 9 | c | Gas Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | d | Air Bersih | 0.28 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.69 |
| 11 | e | Konstruksi | 0.48 | 0.53 | 0.60 | 0.70 | 1.15 |
| III TERSIER | | | | | | | |
| 12 | a | Perdagangan | 1.18 | 1.35 | 0.47 | 1.58 | 1.63 |
| 13 | b | Perhotelan | 0.51 | 0.78 | 0.95 | 0.65 | 1.04 |
| 14 | c | Restoran | 0.49 | 0.71 | 0.83 | 0.54 | 0.99 |
| 15 | d | Transportasi | 0.45 | 0.65 | 0.67 | 1.08 | 1.20 |
| 16 | e | Komunikasi | 0.27 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.34 |
| 17 | f | Perbankan | 0.20 | 0.89 | 0.25 | 0.81 | 1.60 |
| 18 | g | Lembaga Keuangan Non-Bank | 0.13 | 0.46 | 0.06 | 0.53 | 1.47 |
| 19 | h | Pendidikan | 0.56 | 0.57 | 0.25 | 0.25 | 1.59 |
| 20 | i | Sewa Bangunan | 0.38 | 0.65 | 0.47 | 0.89 | 1.04 |
| 21 | j | Jasa Perusahaan | 0.50 | 0.01 | 0.54 | 1.06 | 1.02 |
| 22 | k | Pemerintahan umum | 0.30 | 0.27 | 0.37 | 0.54 | 0.73 |
| 23 | l | Swasta | 0.65 | 1.04 | 0.48 | 1.01 | 1.08 |

Sumber : Master Plan Ekonomi Kota Sungai Penuh 2016.

2.1.1.1.10. Wilayah rawan bencana

Wilayah atau Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang memiliki faktor resiko terhadap kejadian bencana gempa bumi, banjir, dan gerakan tanah sehingga harus dilindungi dari pengembangan kawasan terbangun dan aktifitas perkotaan. Kawasan rawan bencana Kota Sungai Penuh terdiri dari kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan genangan (banjir) dan kawasan jalur sesar (gempa bumi).

A. Gerakan Tanah

Wilayah Kota Sungai Penuh dapat dibagi ke dalam 4 (empat) wilayah potensi gerakan tanah, yaitu potensi gerakan tanah sangat rendah, potensi gerakan tanah rendah, potensi gerakan tanah sedang, potensi gerakan tanah tinggi.

- *Potensi Gerakan Tanah Sangat Rendah*, wilayah ini umumnya menempati bentang alam dataran yang disusun oleh endapan alluvium pantai dan rawa. Gerakan tanah di wilayah ini tidak pernah terjadi, sehingga cukup stabil terhadap kemungkinan terjadinya gerakan tanah.
- *Potensi gerakan Tanah Rendah*, wilayah ini cukup luas menempati bentang alam perbukitan dan pegunungan batuan sedimen, batuan gunung api, dan batuan terobosan dengan kemiringan lereng terjal hingga sangat terjal. Gerakan tanah di wilayah ini pun masih sangat jarang terjadi.
- *Potensi Gerakan Tanah Menengah*, wilayah ini menempati bentang alam perbukitan dan pegunungan batuan sedimen, batuan gunung api, dan batuan terobosan dengan kemiringan lereng sangat terjal. Gerakan tanah di wilayah ini, umumnya pada zona lapukan batuan yang cukup tebal dengan tutupan lahan (vegetasi) yang jarang.
- *Potensi Gerakan Tanah Tinggi*, wilayah ini menempati bentang alam perbukitan dan pegunungan batuan sedimen, batuan gunung api, dan batuan terobosan dengan kemiringan lereng sangat terjal lebih dari 30 %.

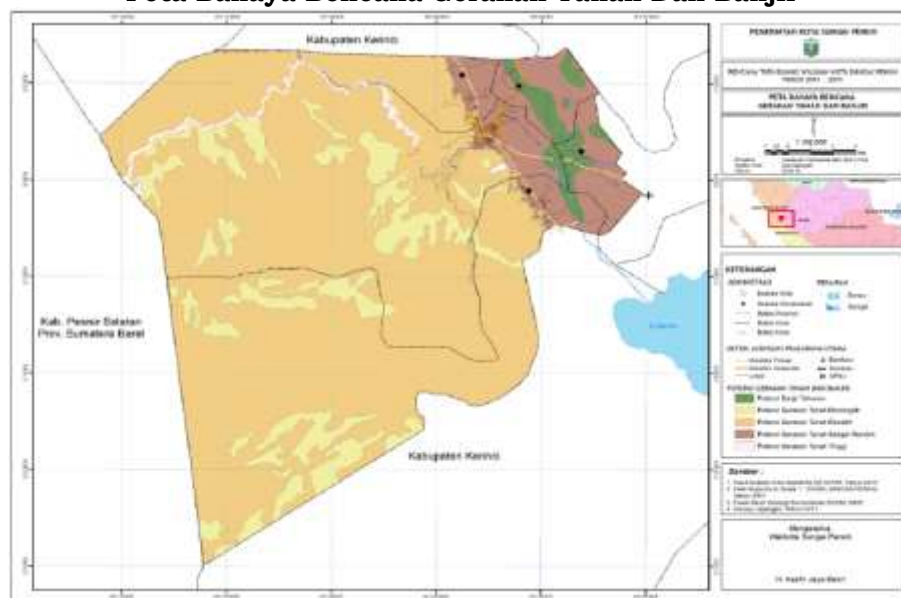
Wilayah ini nampak sebagai gerakan tanah lama atau tempat berakumulasinya material tanah pelapukan, yang bilamana terjadi perubahan terhadap kondisi eksisting medan dapat memicu terjadinya gerakan tanah baru. Potensi gerakan tanah tinggi ini banyak dijumpai di sekitar tepian jalan raya Sungai Penuh menuju Tapan, kondisi kemiringan lereng yang sangat terjal hingga tegak dan pengaruh dari struktur geologi berupa patahan. Jenis gerakan tanah yang terjadi adalah longsoran bahan rombakan, runtuhuan batu dan aliran tanah yang mempengaruhi terhadap lahan yang ada di bagian bawahnya seperti pertanian, perumahan dan infrastruktur jalan raya.

B. Banjir Bandang

Banjir menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dimaksud dengan banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir Bandang berpotensi terjadi di Wilayah Kota Sungai Penuh, banjir ini diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama di bagian hulu Daerah Aliran Sungai Batang Bungkal dan Sungai Ampuh yang bersatu masuk kedalam badan air Sungai Batang Bungkal. Peresapan air hujan di bagian hulu tersebut kurang baik sehingga air langsung mengalir ke bagian daerah aliran sungai di sekitarnya yang langsung mengalir masuk ke Sungai batang Bungkal yang melintasi Kota Sungai Penuh. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap bangunan fisik, jembatan, bangunan rumah yang berada di sekitar tepian sungai batang bungkal. Dampak lainnya sangat mempengaruhi terhadap wilayah Kabupaten Kerinci yang berada dibagian hilir sungai tersebut.

Kawasan rawan bencana banjir di Kota Sungai Penuh meliputi lahan-lahan yang berada di sekitar DAS beserta anak sungainya. Berdasarkan hasil analisis resiko bencana banjir, maka diperkirakan kawasan rawan banjir terletak pada Sebagian Kecamatan Sungai Penuh, sebagian Kecamatan Hampan Rawang dan sebagian Kecamatan Tanah Kampung serta Kecamatan Kumun Debai seluas 1.049 Ha.

Gambar 2.11
Peta Bahaya Bencana Gerakan Tanah Dan Banjir

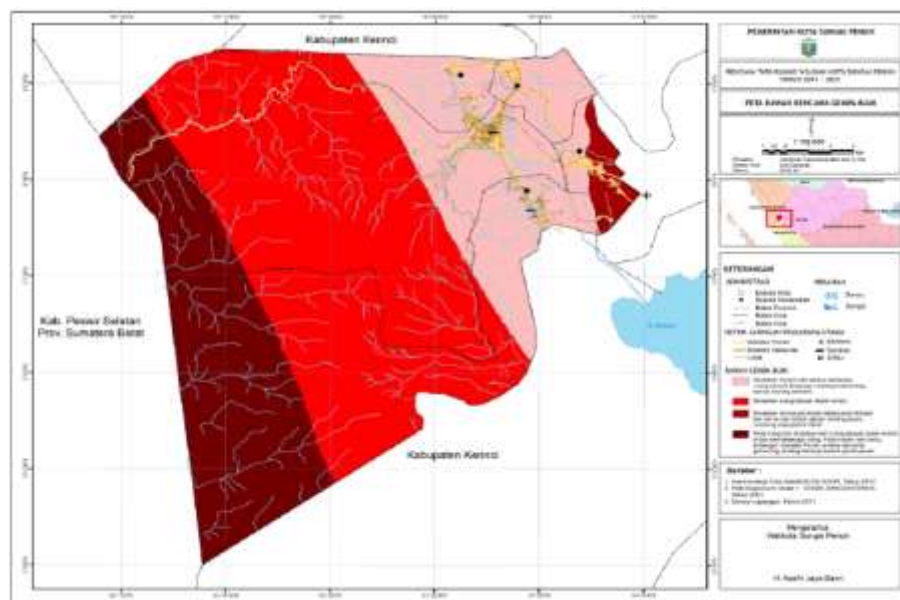


Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031

C. Gempa Bumi

Daerah Sungai Penuh Berdasarkan Peta Seismotektonik Daerah Sungai Penuh dan sekitarnya yang disusun oleh M. Firdaus, A. Soehaemi, dan kawan-kawan tahun 2002 (Pusat Survey Geologi, Badan Geologi), bahwa wilayah Kota Sungai penuh khususnya, umumnya termasuk kedalam zona gempa bumi berskala V, VI dan VII MMI. Oleh karena itu perlu ada kesiapan dari kota dalam menghadapi resiko tersebut. Kawasan di Kota Sungai Penuh yang dilalui oleh sesar aktif mencakup seluruh kawasan yakni terutama di sebagian Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit serta sebagian kecamatan Hamparan Rawang, Tanah Kampung dan Kecamatan Kumun Debai yang mencakup areal seluas 521 ha.

Gambar 2.12
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi



Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031;

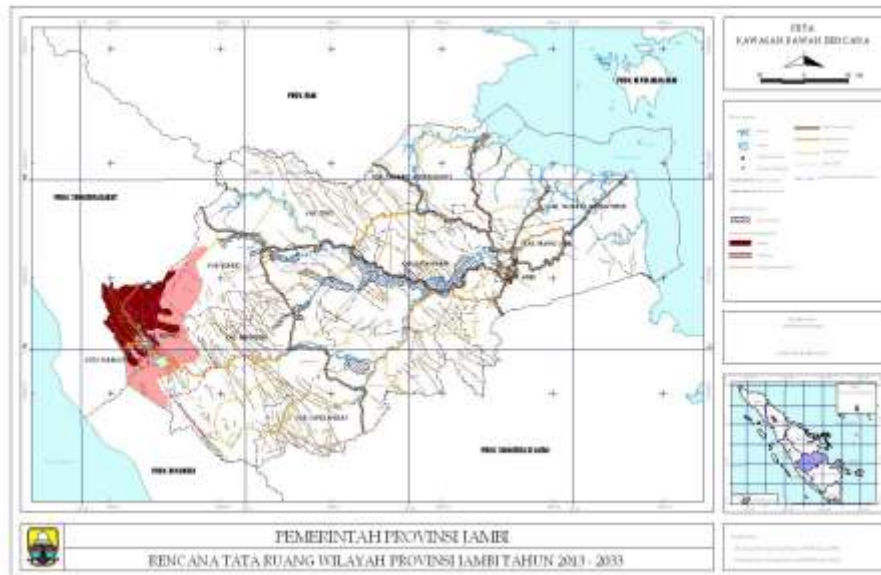
D. Letusan Gunung Berapi

Daerah letusan gunung berapi berdasarkan RTRW Provinsi Jambi terbagi menjadi dua daerah, batas-batas daerah bahaya sementara pada Gunung Kerinci, yaitu:

1. *Daerah Bahaya*, Daerah bahaya Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini, bilamana kegiatannya meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa awan panas letusan, bom vulkanik yang membara (rnatikan). Jika kegiatan gunung ini meningkat, seluruh wilayah daerah bahaya harus dikosongkan. Daerah bahaya ini di peta berwarna merah, berbentuk lingkaran dengan jari-jari 6 kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya diperluas mengikuti lembah tersebut.
2. *Daerah Waspada*, Daerah waspada Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini bilamana kegiatan gunung meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa lapili (kerikil vulkanik) dan abu, ataupun jika di puncak gunung terjadi hujan setelah adanya kegiatan (letusan) daerah ini akan terserang lahar hujan.

Daerah waspada di peta berwarna hijau, berbentuk lingkaran dengan jari-jari 9 kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya daerah ini diperluas mengikuti lembah-lembah tersebut

Gambar 2.13
Peta Rawan Bencana Provinsi Jambi



Sumber RTRWP Jambi Tahun 2013-2033

2.1.1.2. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan salah satu modal dasar suatu pembangunan. Selain itu, penduduk juga menjadi objek dari pembangunan. Namun, seperti yang kita ketahui, masalah kependudukan yang tidak pernah ada habisnya, masih menjadi perhatian pemerintah dan bangsa ini. Salah satu masalah yang masih menjadi fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun belakangan selain jumlah, komposisi dan distribusi penduduk adalah laju pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang berkembang pesat tanpa diimbangi dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri, justru hanya akan menjadi permasalahan yang merupakan awal bagi masalah-masalah berikutnya. Masalah-masalah yang mungkin akan timbul dengan tidak sejalanannya pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah menambah jumlah pengangguran karena terkadang kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan tidak terpenuhi yang berdampak makin meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat dsb

2.1.1.2.1. Jumlah Penduduk

Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau sentral dalam pembangunan karena peran penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat dan didukung dengan kualitas SDM yang tinggi dapat menciptakan akselerasi guna tercapainya kondisi ideal dari pembangunan.

Sejalan dengan perkembangan Kota Sungai Penuh telah terbentuk 3 di kecamatan baru pada tahun 2012 yang merupakan hasil pemekaran Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Pesisir Bukit. Perkembangan

Pertumbuhan Penduduk di Kota Sungai Penuh dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat pada dibawah ini :

Tabel 2.12
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh
Tahun 2011 – 2016

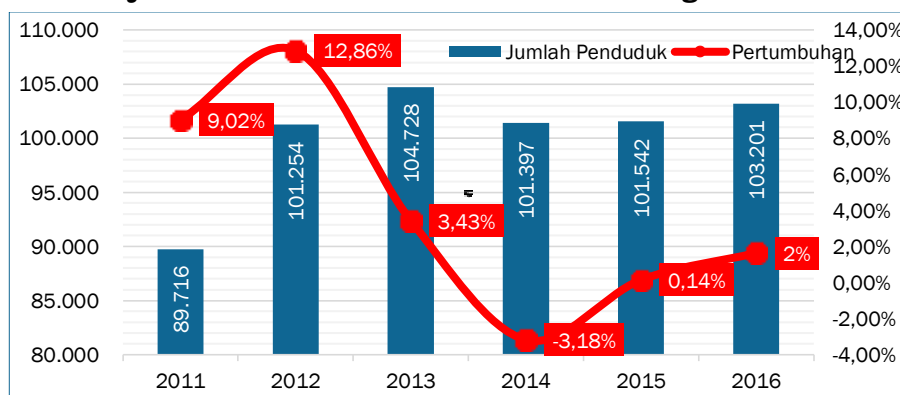
| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Sungai Penuh | 36.291 | 11.992 | 12.396 | 11.668 | 11.929 | 11,726 |
| 2 | Pesisir Bukit | 19.504 | 12.535 | 13.015 | 12.596 | 12.939 | 12,806 |
| 3 | Hamparan Rawang | 14.155 | 14.858 | 15.245 | 15.119 | 15.236 | 15,464 |
| 4 | Kumun Debai | 10.157 | 11.215 | 11.524 | 11.256 | 11.588 | 11,225 |
| 5 | Tanah Kampung | 9.609 | 11.213 | 11.517 | 11.191 | 11.586 | 11,359 |
| 6 | Pondok Tinggi | - | 18.935 | 19.781 | 18.836 | 18.447 | 19,509 |
| 7 | Sungai Bungkal | - | 9.618 | 9.986 | 9.979 | 10.699 | 11,303 |
| 8 | Koto Baru | - | 10.888 | 11.246 | 10.752 | 9.128 | 9,810 |
| | Jumlah | 89.716 | 101.254 | 104.728 | 101.397 | 101.542 | 103.201 |

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas sebaran atau distribusi penduduknya, kecamatan di Kota Sungai Penuh yang memiliki jumlah penduduk tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2011-2016) adalah Kecamatan Pondok Tinggi dan kecamatan Hamparan Rawang.

Sedangkan laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Sungai Penuh dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 2.14
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Sungai Penuh



Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Tahun 2016

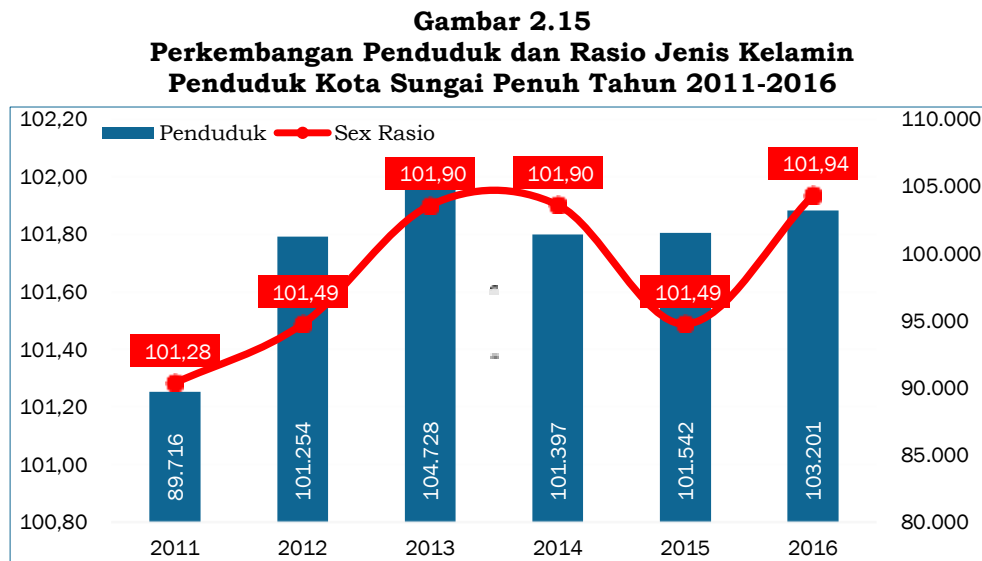
Dari gambar diatas terlihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Sungai Penuh pada tahun 2011-2015 sebesar 4 persen. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan penduduk Kota Sungai Penuh sebesar 12,86 persen pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebesar 3,43 persen. Sedangkan penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014 yang seiring dengan telah berjalannya pendataan penduduk melalui e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh sebesar -3,18 persen, sementara pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen. dan pada tahun 2016 kembali mengalami kenaikan sebesar 2 persen.

Namun demikian, karena Kota Sungai Penuh masih tergolong baru terbentuk secara administrasi, maka data-data penduduk tahun-tahun sebelumnya belum tersedia, sehingga sulit membandingkan laju pertumbuhan penduduknya dengan tahun yang lebih lama.

2.1.1.2.2. Komposisi Penduduk

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Sex ratio (rasio jenis kelamin) merupakan perbandingan jumlah pria dengan 100 wanita. Jika angka *sex ratio* (SR) > 100, berarti jumlah pria lebih banyak dibanding wanita, sebaliknya jika SR < 100 berarti jumlah pria lebih sedikit dibanding wanita. Berikut pada tabel di bawah ini digambarkan *Sex ratio* Kota Sungai Penuh tahun 2011-2016.



Sumber : Hasil Analisis, Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Tahun 2011-2015

Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan di Kota Sungai Penuh masih berada di atas 100. Yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Begitupun di tiap kecamatan, kecuali Pesisir Bukit, *Sex Ratio* lebih besar dari 100. Secara keseluruhan di Kota Sungai Penuh, SR sebesar 101,90, yang berarti dari 100 perempuan, terdapat 101 laki-laki. Struktur Penduduk Kota Sungai Penuh berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan piramida berikut ini.

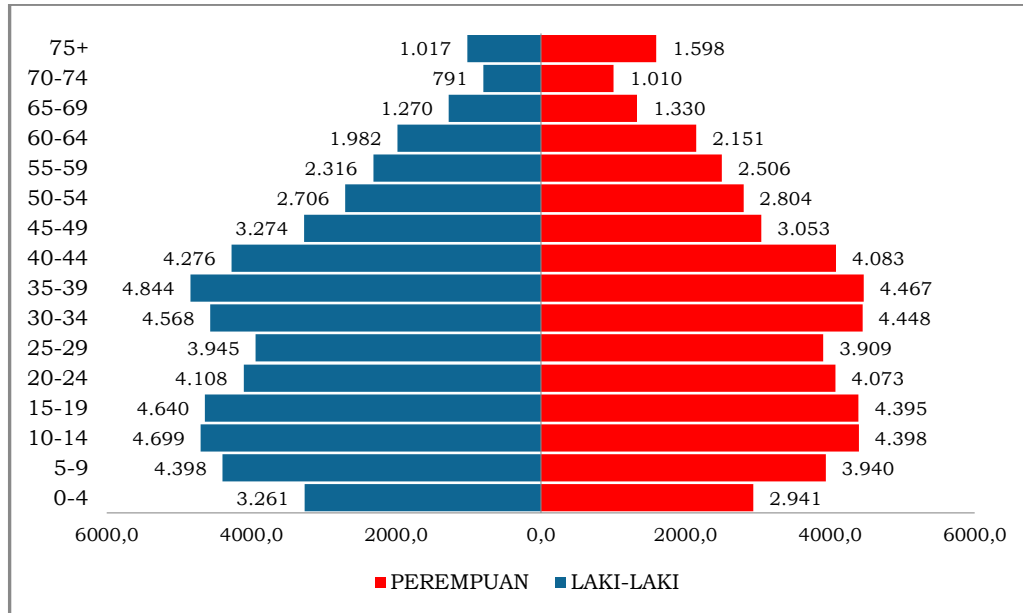
Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh menurut Kelompok Umur Tahun 2011-2016

| Kelompok Umur | Laki - Laki | | | Perempuan | | | Jumlah | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0-04 | 2.526 | 3.165 | 3.261 | 2.246 | 2.784 | 2.941 | 4.772 | 5.949 | 6.202 |
| 05-09 | 4.308 | 4.479 | 4.398 | 3.862 | 4.048 | 3.940 | 8.170 | 8.527 | 8.338 |
| 10-14 | 4.627 | 4.786 | 4.699 | 4.348 | 4.494 | 4.398 | 8.975 | 9.280 | 8.097 |
| 15-19 | 4.617 | 4.606 | 4.640 | 4.439 | 4.475 | 4.395 | 9.056 | 9.081 | 8.035 |
| 20-24 | 4.049 | 3.946 | 4.108 | 4.036 | 3.913 | 4.073 | 8.085 | 7.859 | 8.181 |
| 25-29 | 3.991 | 3.973 | 3.945 | 3.918 | 3.864 | 3.909 | 7.909 | 7.837 | 7.854 |
| 30-34 | 4.548 | 4.482 | 4.568 | 4.440 | 4.418 | 4.448 | 8.988 | 8.900 | 9.016 |
| 35-39 | 4.853 | 4.746 | 4.844 | 4.538 | 4.484 | 4.467 | 9.391 | 9.230 | 9.311 |
| 40-44 | 4.161 | 4.026 | 4.276 | 3.923 | 3.840 | 4.083 | 8.084 | 7.866 | 8.359 |
| 45-49 | 3.227 | 3.140 | 3.274 | 3.015 | 2.951 | 3.053 | 6.242 | 6.091 | 6.327 |
| 50-54 | 2.721 | 2.635 | 2.706 | 2.851 | 2.792 | 2.804 | 5.572 | 5.427 | 5.510 |
| 55-59 | 2.372 | 2.284 | 2.316 | 2.543 | 2.492 | 2.506 | 4.915 | 4.776 | 4.822 |
| 60-64 | 2.022 | 1.972 | 1.982 | 2.116 | 2.048 | 2.151 | 4.138 | 4.020 | 4.133 |
| 65-69 | 1.187 | 1.091 | 1.270 | 1.242 | 1.190 | 1.330 | 2.429 | 2.281 | 2.600 |
| 70-74 | 834 | 800 | 791 | 1.084 | 1.027 | 1.010 | 1.918 | 1.827 | 1.801 |
| 75+ | 1.133 | 1.015 | 1.017 | 1.620 | 1.576 | 1.598 | 2.753 | 2.591 | 2.615 |
| Total | 51.176 | 51.146 | 52.095 | 50.221 | 50.396 | 51.106 | 101.397 | 101.542 | 103.201 |

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, 2016

Kota Sungai Penuh secara umum dihuni oleh penduduk usia produktif, ini menandakan bahwa perkembangan Kota Sungai Penuh ke depan harus mengakomodasi pengembangan-pengembangan tempat bekerja, baik kegiatan perdagangan dan jasa maupun kegiatan perkantoran.

Gambar 2.16
Piramida Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2016



Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Tahun 2016

Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2016 sebanyak 103,201 jiwa, dimana penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada penduduk berjenis kelamin perempuan yaitu jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52,095 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 51,106 jiwa. Piramida penduduk dapat menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Tingkat Umur 35-39 tahun merupakan jumlah penduduk tertinggi yang ada di Kota Sungai Penuh yang merupakan penduduk usia produktif baik laki-laki maupun perempuan di Kota Sungai Penuh tertinggi dibandingkan dengan jumlah kelompok penduduk pada tingkat umuran lainnya. Sedangkan Tingkat Umur 70-74 tahun merupakan Jumlah penduduk terendah yang ada di Kota Sungai Penuh yang merupakan penduduk usia tua, dimana jumlah penduduk usia tua berjenis kelamin laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk usia tua berjenis kelamin perempuan.

2.1.1.2.3. Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan Kota Sungai Penuh Tahun 2016, jumlah penduduk yang tidak bersekolah dan lulusan SD sangat mendominasi di Kota Sungai Penuh ini. Dengan demikian tingkat pendidikan di Kota Sungai Penuh ini masih tergolong Rendah. Selengkapnya, dapat di lihat pada Tabel 2.14 dibawah ini .

Tabel 2.14
Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| KECAMATAN | TIDAK SEKOLAH | LULUSAN SD | LULUSAN SLTP | LULUSAN SLTA | LULUSAN DIPLOMA | LULUSAN S1 | LULUSAN S2-S3 |
|----------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------|---------------|
| Sungai Penuh | 2.017 | 1585 | 1805 | 3.796 | 694 | 1099 | 85 |
| Pesisir Bukit | 2.420 | 2833 | 1786 | 3.161 | 428 | 593 | 48 |
| Ham. Rawang | 2.909 | 2795 | 2271 | 3.066 | 511 | 749 | 27 |
| T. Kampung | 1.732 | 1961 | 1947 | 2.985 | 281 | 417 | 31 |
| Kumun Debai | 1.791 | 1792 | 1786 | 3.031 | 480 | 582 | 29 |
| Pondok Tinggi | 3.438 | 3035 | 2812 | 5.860 | 877 | 1274 | 110 |
| Sungai Bungkal | 1.928 | 1903 | 1486 | 3.359 | 539 | 731 | 61 |
| Koto Baru | 1.903 | 2521 | 1497 | 2.056 | 301 | 244 | 11 |

Sumber Data : Dukcapil Kota Sungai Penuh Tahun 2016

2.1.1.2.4. Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2016 kepadatan penduduk Kota Sungai Penuh adalah sebesar 263,61 jiwa/km², dengan Kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Koto Baru sebesar 5981,71 jiwa/km² karena Kecamatan Koto Baru memiliki luas wilayah yang kecil dengan jumlah penduduk hampir sama dengan jumlah penduduk kecamatan lainnya. Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada pada Kecamatan Kumun Debai 79,05 jiwa/km² dikarenakan Kecamatan Kumun Debai memiliki luas wilayah tertinggi dengan jumlah penduduk yang juga hampir sama dengan kecamatan lainnya dan juga Kecamatan Kumun Debai memiliki daerah untuk pertanian dan perkebunan yang berada di Desa Renah Kayu Embun. Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Kepadatan Penduduk Kota Sungai Penuh

| NO | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | LUAS WILAYAH | TNKS | LUAS HUNIAN/ BUDI DAYA | KEPADATAN PENDUDUK |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| | | (jw) | (km ²) | (ha) | (km ²) | (jw/km ²) |
| 1 | Sungai Penuh | 11.726 | 3,35 | - | 3,35 | 3500,30 |
| 2 | Pesisir Bukit | 12.806 | 19,46 | 83 | 18,63 | 658,07 |
| 3 | Hamparan Rawang | 15.464 | 12,15 | - | 12,15 | 1272,76 |
| 4 | Kumun Debai | 11.225 | 142 | 10.834 | 33,66 | 79,05 |
| 5 | Tanah Kampung | 11.359 | 11 | - | 11 | 1032,64 |
| 6 | Pondok Tinggi | 19.509 | 90,95 | 6.130,5 | 39,645 | 214,50 |
| 7 | Sungai Bungkal | 11.303 | 110,95 | 6.130,5 | 39,645 | 101,87 |
| 8 | Koto Baru | 9.810 | 1,64 | - | 1,64 | 5981,71 |
| KOTA SUNGAI PENUH | | 103.201 | 391,50 | 23.178 | 159,72 | 263,61 |

Sumber :Hasil Analisis Bappeda 2016

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini:

2.1.2.1. Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan daerah di Kota Sungai Penuh difokuskan pada pemerataan ekonomi dan kualitas masyarakat di bidang sosial. Fokus pemerataan ekonomi dilihat dari, pemerataan pendapatan, dan PDRB Perkapita.

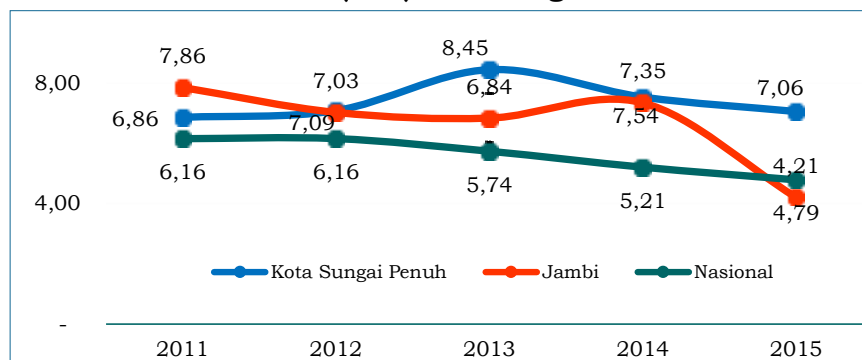
2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, hal ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015 disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Ini dimaksudkan agar perkembangan PDRB dapat ditelaah dengan atau tanpa memperhitungkan pengaruh harga. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan akan lebih mencerminkan PDRB tanpa dipengaruhi perubahan fluktuasi harga yang biasanya dapat menunjukkan kecenderungan pada perubahan produksi.

Perekonomian Kota Sungai Penuh sejak Tahun 2014, oleh Badan Pusat Statistik, telah menggunakan tahun dasar 2010 sebagai dasar perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, menggantikan tahun dasar sebelumnya yaitu tahun 2000. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi senantiasa meningkat secara konstan rata-rata 7,40% dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.

Gambar 2.17
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015



Sumber: Buku PDRB Kota Sungai Penuh Menurut Lapangan Usaha, 2010-2016

Pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh meningkat secara konstan selang Tahun 2011 sampai Tahun 2013 dimulai dari 6.86% sampai 8.45% namun mengalami perlambatan di angka 7.35% dan 7.06% (angka ini masih berada di atas Provinsi dan Nasional) di akhir Tahun 2014 dan Tahun 2015, keadaan ini sebagian besar karena terjadi perlambatan laju yang cukup signifikan pada beberapa sektor seperti :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Secara umum kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kota Sungai Penuh mengalami perlambatan sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2014. Laju pertumbuhan pertanian, kehutanan dan perikanan Tahun 2015 juga mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan kategori ini hanya mencapai 1,39 persen dimana pada Tahun 2014 bisa mencapai 4,54 persen. Perlambatan laju cukup signifikan ini bersumber dari melambatnya pertumbuhan sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan jasa Pertanian sebesar 1,38 persen, pertumbuhan sub sektor kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 3,85 persen dan pertumbuhan sub kategori Perikanan sebesar 3,12 persen dibandingkan Tahun 2014.

2. Pengadaan Listrik dan Gas

Nilai tambah yang dihasilkan Kategori Pengadaan Listrik dan Gas pada Tahun 2015 sebesar Rp. 1.023,6 juta. Sebesar 99,83 persen dari seluruh nilai tambah kategori ini disumbangkan oleh sub kategori Ketenagalistrikan yaitu Rp. 1.023, 6 Juta dan 0,17 Persen oleh sub kategori Pengadaan Gas dan Produksi Es dengan nilai Rp. 1,7 Juta. Kontribusi kategori ini terhadap total PDRB Kota Sungai Penuh selama Tahun 2011-2015 relatif kecil, hanya berkisar 0,02 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2015 adalah sebesar 5,76 persen, mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya yaitu 8,19 persen

3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Laju pertumbuhan Tahun 2015 terhadap harga konstan 2010, baik untuk kategori Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor maupun sub kategorinya menunjukkan perlambatan dari tahun sebelumnya. Dimana tercatat laju pertumbuhan kategori ini pada Tahun 2014 sebesar 11,58 persen dan melambat di Tahun 2015 menjadi 10,66 persen.

4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Secara keseluruhan kategori ini mencatat laju pertumbuhan positif sebesar 9,26 persen pada Tahun 2015, meningkat lambat dari tahun sebelumnya yang sebesar 16,92 persen. Sub kategori Penyediaan Makanan Minum tahun 2014 tumbuh sebesar 3,62 persen menjadi 3,91 persen pada Tahun 2015. Sehingga mengakibatkan kegiatan perekonomian terhambat selama beberapa bulan di awal tahun, hal ini terlihat pada tabel berikut ini. Namun perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tahun 2014 dan Tahun 2015 tidak berbanding lurus dengan PDRB yang terus meningkat, demikian juga nilai PDRB/kapita, namun berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran di Kota Sungai Penuh, kedepan indikator makro ekonomi lainnya harus menunjukkan trend positif yang juga menunjukkan kemampuan Kota untuk mengatasi hal tersebut serta menggunakan keadaan yang tidak menguntungkan menjadi kekuatan (*resilient*).

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen),
Tahun 2011-2015

| No | Lapangan Usaha / Industry | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Rata2 Pertumbuhan |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan | 8.96 | 5.91 | 5.57 | 4.54 | 1.39 | 5.27 |
| 2 | Pertambangan Dan Penggalian | 4.06 | 6.98 | 6.17 | 5.96 | 5.78 | 5.79 |
| 3 | Industri Pengolahan | 11.94 | 10.32 | 2.25 | 6.26 | 4.97 | 7.15 |
| 4 | Pengadaan Listrik Dan Gas | 13.70 | 9.82 | 6.64 | 8.19 | 5.76 | 8.82 |
| 5 | Pengadaan Air Dan Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang | 4.11 | 1.12 | 1.32 | 2.44 | 3.24 | 2.45 |
| 6 | Konstruksi | 3.99 | 16.20 | 18.91 | 3.23 | 3.59 | 9.18 |
| 7 | Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil, Dan Sepeda Motor | 8.17 | 7.35 | 8.65 | 11.58 | 10.66 | 6.97 |
| 8 | Transportasi Dan Pergudangan | 3.70 | 8.13 | 5.97 | 6.10 | 6.31 | 6.04 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi Makan Minum | 6.01 | 4.22 | 6.60 | 16.92 | 9.26 | 8.60 |
| 10 | Informasi Dan Komunikasi | 8.54 | 2.21 | 7.33 | 12.35 | 9.56 | 8.00 |
| 11 | Jasa Keuangan Dan Asuransi | 21.70 | 14.60 | 16.16 | 2.99 | 1.04 | 11.30 |
| 12 | Real Estat | 5.03 | 2.12 | 3.04 | 2.55 | 2.67 | 2.08 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 2.28 | 3.68 | 2.93 | 3.73 | 3.78 | 3.28 |

| No | Lapangan Usaha / Industry | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Rata2 Pertumbuhan |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 14 | Administrasi Pemerintahan Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib | 8.02 | 4.70 | 5.36 | 12.15 | 7.43 | 7.53 |
| 15 | Jasa Pendidikan / Education | 2.19 | 6.53 | 4.35 | 1.68 | 9.30 | 4.81 |
| 16 | Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial | 8.67 | 3.09 | 6.87 | 16.08 | 9.49 | 8.84 |
| 17 | Jasa Lainnya | 4.60 | 4.82 | 4.45 | 5.23 | 6.55 | 5.13 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 6.86 | 7.09 | 8.45 | 7.54 | 7.06 | 7.40 |

Sumber: Buku PDRB Kota Sungai Penuh Menurut Lapangan Usaha, 2010-2016

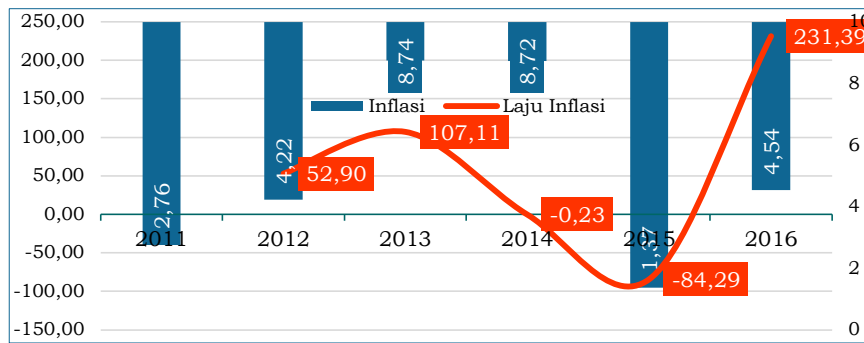
Disisi lain, Secara sektoral, kategori-kategori lainnya pada Tahun 2015 berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, diantaranya kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mencatat sebesar 3,78%, kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,49%, kategori informasi komunikasi sebesar 9,56%, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,66%, kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 5,76%, kategori pertambangan dan penggalian sebesar 5,78%, kategori transportasi dan pergudangan sebesar 6,31%, kategori jasa lainnya sebesar 6,55%, kategori jasa perusahaan sebesar ,78%, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,39%, kategori industri pengolahan 4,97%, kategori konstruksi sebesar 3,59%, kategori real estate sebesar 2,67%, kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,04%, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 3,24%, dan kategori jasa pendidikan sebesar 9,30%. Kategori Penyediaan akomodasi dan minuman sebesar 9,26%.

Laju pertumbuhan PDRB terbesar selama periode Tahun 2011-2015 berada pada sektor jasa keuangan sebesar dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,30%, konstruksi sebesar 9,18%, sedangkan sektor yang paling kecil kontribusinya adalah sektor Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu hanya sebesar 2,45%.

2.1.2.1.2. Inflasi

Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi Kota Sungai Penuh merujuk kepada inflasi Kota Jambi, dimana inflasi Kota Sungai Penuh cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,76 persen pada tahun 2011 dan yang terendah pada Tahun 2015 sebesar 1,37 persen. Inflasi yang tertinggi terjadi pada Tahun 2013 sebesar 8,74. Persen. Pada Tahun 2016 inflasi di Kota Sungai Penuh sebesar 4,54 persen.

Gambar 2.18
Laju Inflasi Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2016



Sumber: BPS Jambi, 2015.

Naiknya tingkat inflasi lebih disebabkan oleh tingginya inflasi pada kelompok *volatile food* pada triwulan III (5,24%) dan triwulan IV (6,63%). Penyebabnya adalah naiknya harga cabe merah akibat terbatasnya pasokan dari sentra produksi. Berikutnya, inflasi pada kelompok inti (*core inflation*) sebesar 4,62% (yoy) lebih tinggi dari triwulan III (4,14%). Proyeksi Bank Indonesia untuk tahun 2017, inflasi Jambi akan berada pada kisaran 4,51%-5,01% lebih tinggi dari realisasi tahun 2016.

2.1.2.1.3. Pendapatan Perkapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.17
PDRB Per Kapita Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2014 (juta Rp.)

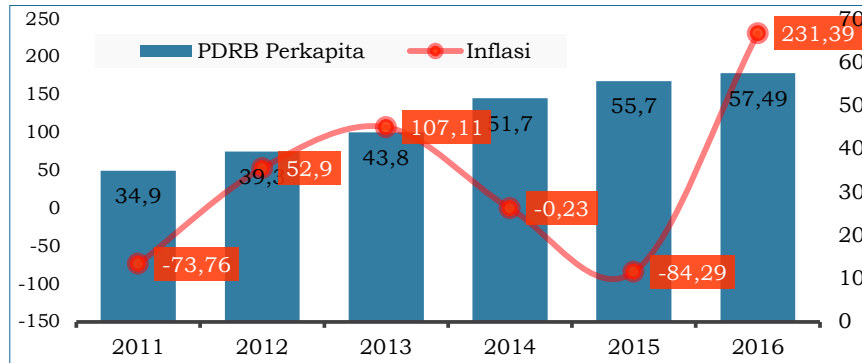
| LAPANGAN USAHA | TAHUN | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 |
| 2 Pertambangan dan Pengalihan | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 3 Industri Pengolahan | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 Pengadaan Listrik dan Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 6 Konstruksi | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 5,9 | 6,4 |
| 7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7,4 | 8,6 | 9,8 | 10,6 | 13,2 |
| 8 Transportasi dan Pergudangan | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
| 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| 10 Informasi dan Komunikasi | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| 11 Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,7 |
| 12 Real Estate | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 13 Jasa Perusahaan | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 3 |
| 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 3,5 |
| 15 Jasa Pendidikan | 3,3 | 3,6 | 4,3 | 4,8 | 5,9 |
| 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 |
| 17 Jasa lainnya | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 31,4 | 34,9 | 39,3 | 43,8 | 51,7 |

Sumber: Buku PDRB Kota Sungai Penuh Menurut Lapangan Usaha, 2010-2014

Perkembangan PDRB per kapita atau pendapatan per kapita dari tahun ke tahun menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Bila tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasi akan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kota Sungai Penuh. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan

dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Gambar 2.19
Laju Inflasi dan PDRB PerKapita Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2016



Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2016

Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kota Sungai Penuh mencapai 57,49 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 1,74 persen dibandingkan PDRB per kapita Tahun 2015 yang sebesar 55,7 juta rupiah. Peningkatan pendapatan ini berada dalam situasi sangat baik, sebab inflasi Tahun 2016 meningkat sebesar 231,39 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 84,29 persen. Hal ini menandakan bahwa daya beli masyarakat di Kota Sungai Penuh sedikit menurun.

Pada tingkat Provinsi Jambi, ternyata PDRB perkapita atas harga konstan selama 5 tahun terakhir atau periode Tahun 2012-2016 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2012, PDRB perkapita Provinsi Jambi sebesar Rp. 32.752 (juta) meningkat menjadi Rp. 37.728 (juta) pada Tahun 2016, sedangkan PDRB perkapita atas harga berlaku Pada Tahun 2012, sebesar Rp. 35.667 (juta) meningkat menjadi Rp. 49.642 (juta) pada Tahun 2016.

2.1.2.1.4. **Indek Gini**

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah. Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi pada lingkup negara, bahkan sampai pada wilayah provinsi atau unit yang lebih rendah sekalipun. Ketimpangan sering menjadi permasalahan yang serius bagi setiap wilayah karena berpotensi menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling memperlemah antar wilayah. Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Indeks gini juga digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada masing-masing wilayah.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Tabel 2.18
Indek Gini Rasio Kota Sungai Penuh 2011-2016

| No | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Indek Gini Rasio | 0,296 | 0,321 | 0,322 | 0,342 | 0,333 | 0,328 |

Sumber : Susenas Maret 2011-2016

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Aspek pembangunan masyarakat pada bidang sosial diukur dengan melihat Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Keadaan kesehatan gizi masyarakat, jumlah grup kesenian ada di daerah, sarana prasarana kesenian, jumlah klub olahraga, dan sarananya, serta masalah ketenagakerjaan.

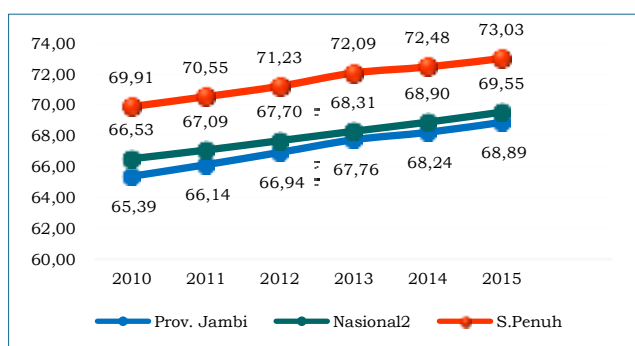
2.1.2.2.1. Pendidikan

Pembangunan manusia adalah suatu proses manusia agar mampu memiliki lebih banyak pilihan (pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dsb).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; Harapan Lama Sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

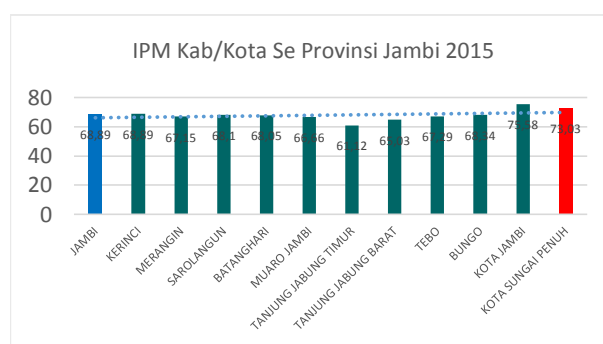
Perkembangan IPM Kota Sungai Penuh dalam kurun waktu 2010-2015 semakin membaik, IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2015 mencapai 73,03 lebih tinggi dibandingkan IPM nasional (68,89), Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan sumber daya manusia di Sungai Penuh telah menunjukkan perbaikan yang berarti dengan ranking IPM Kota Sungai Penuh tahun 2015 menduduki peringkat ke 2 secara Provinsi setelah Kota Jambi dan masuk kategori tinggi.

Gambar 2.20
Capaian IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2015



Sumber : BPS, 2016

Gambar 2.21
Posisi Capaian IPM Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2015



Sumber : BPS, 2016

Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu terus mendorong peningkatan IPM membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh perangkat

daerah untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Selain itu Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Capaian angka IPM di Kota Sungai Penuh dari Tahun 2010 sampai Tahun 2015 kondisinya selalu meningkat. Berikut ini disajikan perkembangan indikator pembentuk IPM.

Tabel 2.19
Perkembangan Capaian Indikator Pembentuk IPM
di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| TAHUN | IPM | AHH | EYS | MYS | PENGELUARAN (000) |
|-------|-------|-------|-------|------|----------------------|
| 2010 | 69,91 | 71,03 | 13,73 | 9,23 | 8.272,94 |
| 2011 | 70,55 | 71,09 | 13,81 | 9,68 | 8.585,60 |
| 2012 | 71,23 | 71,19 | 13,89 | 9,82 | 8.995,53 |
| 2013 | 72,09 | 71,51 | 14,35 | 9,05 | 9.266,12 |
| 2014 | 72,48 | 71,61 | 14,57 | 9,17 | 9.328,12 |
| 2015 | 73,03 | 71,61 | 14,74 | 9,17 | 9.502 |

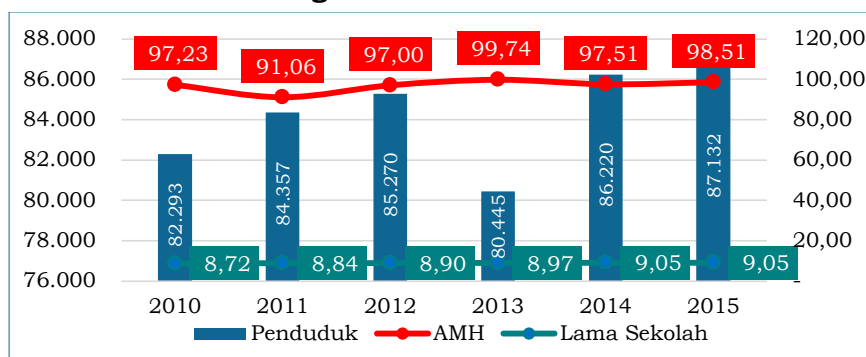
Sumber: BPS Kota Sungai Penuh 2016

Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah,

Dalam pembangunan suatu bangsa maupun daerah, pendidikan yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan yang akan menentukan arah perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dan negara. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kemajuan pembangunan manusia karena pendidikan membawa dampak yang positif bagi kualitas manusia. Menurut Boserup (1984), pendidikan mampu membangun pola pikir seseorang menjadi lebih peka dan kritis dalam menanggapi suatu permasalahan, serta membuka pengetahuan seseorang yang memungkinkan ia untuk mengubah nasibnya. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu meningkatkan pembangunan pendidikan di Indonesia menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi sekolah secara berkelanjutan. Disamping itu kebijakan pendidikan murah untuk semua dengan BOS dan Wajib Belajar 9 tahun wajib dilanjutkan dan ditingkatkan.

AMH menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu baca dan tulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah merepresentasikan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

Gambar 2.22
Persentase Angka Melek Huruf dan Lama Sekolah
Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2015



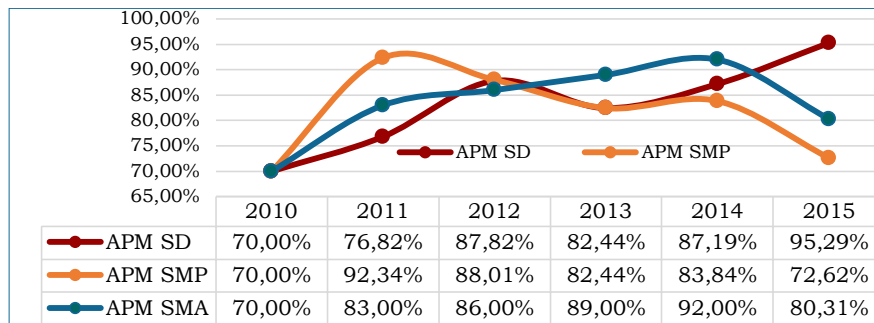
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, diolah, 2016

Dari gambar di atas terlihat bahwa pada periode 2011-2015 secara umum AMH penduduk terus mengalami peningkatan, meski laju peningkatannya terlihat sangat perlahan. Pada prakteknya dibutuhkan jangka waktu yang cukup lama untuk menjadikan indikator sosial seperti AMH maupun Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years Schooling/MYS*). untuk meningkat secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan perubahan AMH atau MYS tersebut membutuhkan proses yang kompleks, tidak cukup dengan pembangunan gedung-gedung dan fasilitas sekolah saja, tetapi harus diiringi dengan penyediaan tenaga pendidik yang cukup dan berkualitas, akses yang memadai, serta faktor budaya yang mengesampingkan pendidikan harus diperbaiki.

Tingkat Partisipasi Sekolah. Banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan angka partisipasi sekolah. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan partisipasi sekolah menurut kelompok umur tertentu yang dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni.

Angka Partisipasi Murni (APM), adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Perkembangan APM periode 2010-2015 di Kota Sungai Penuh terjadi peningkatan yang fluktuatif, seperti pada tingkat SD sebesar 87,82% pada tahun 2012 menurun menjadi 82,44% pada Tahun 2013, lalu mengalami kenaikan kembali pada Tahun 2015 sebesar 95,29%. Begitu pula pada tingkat SMP dan SMA terjadi perkembangan yang fluktuatif. Berdasarkan gambar dibawah diketahui perkembangan rata-rata Angka Partisipasi Murni untuk SD, SMP dan SMA masing masing sebesar 83,26%, 81,54% dan 83,39%. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan APM tertinggi tercatat di tingkat SMP dan SMA.

Gambar 2.23
Angka Partisipasi Murni SD, SMP, SMA Kota Sungai Penuh

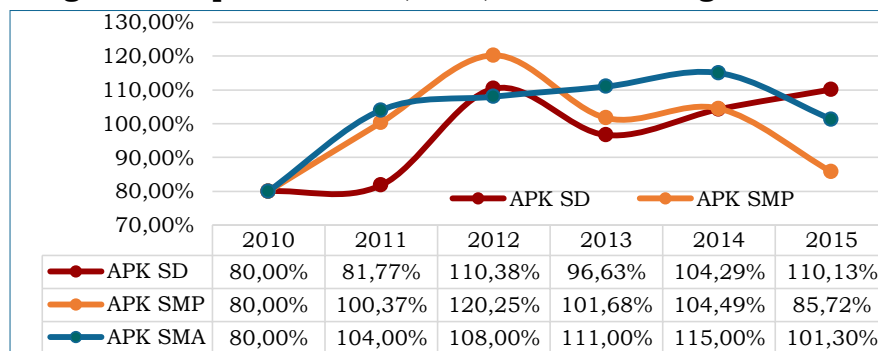


Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, diolah, 2016

Angka Partisipasi Kasar (APK), adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK juga mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Angka APK ini bisa lebih besar dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

APK untuk kelompok umur SD Tahun 2015 (gambar 2.24) tercatat sebesar 110.13%, kelompok umur SMP sebesar 85.72%, dan pada kelompok umur SMA sebesar 101.30%. Secara umum APK SMA lebih besar dibandingkan APK SMP dan APK SD

Gambar 2.24
Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, SMA Kota Sungai Penuh



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, diolah, 2016

Kelengkapan fasilitas pendidikan di Kota Sungai Penuh ditunjukkan dengan keberadaan sarana pendidikan yang ada, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah pendidikan tinggi setingkat universitas, distribusi masing-masing jenis pendidikan disetiap kecamatan pada umumnya cukup merata, Adapun kondisi kegiatan pendidikan yang dirinci menurut tingkat pendidikan dan kecamatan Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Jumlah dan Sebaran Fasilitas Pendidikan di Kota Sungai Penuh Tahun 2015

| No | KECAMATAN | TK | SD | SLTP | SLTA/ SMK | PERGURUAN TINGGI | MIS/MTS/ MAN/ MAS |
|----|--------------------|----|----|------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | Sungai Penuh | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | Pesisir Bukit | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Hamparan Rawang | 7 | 11 | 1 | 1 | - | 4 |
| 4 | Tanah Kampung | 2 | 10 | 1 | 1 | - | 2 |
| 5 | Kumun Debai | 3 | 10 | 1 | 2 | - | 2 |
| 6 | Pondok Tinggi | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | - |
| 7 | Sungai Bungkal | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Koto Baru | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| | Jumlah | 36 | 73 | 13 | 12 | 6 | 16 |

Sumber : LPPD Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun 2015

2.1.2.2.2. Kesehatan

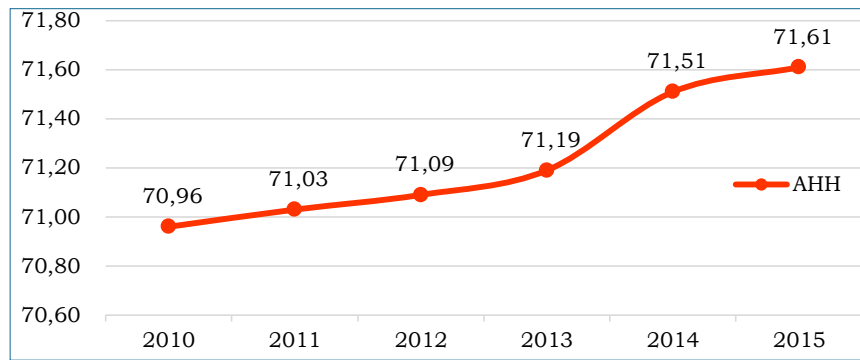
Perkembangan kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Kota Sungai Penuh dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Balita Gizi buruk serta angka kesakitan di Kota Sungai Penuh.

Angka Harapan Hidup (AHH), adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Perkiraan ini didasarkan pada *age specific death rate* (ASDR) pada tahun tertentu. Biasanya, AHH dibuat terpisah berdasarkan jenis kelamin, umur sekarang, dan suku/etnik. Ukuran yang umum digunakan adalah AHH pada saat lahir mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu.

Angka harapan hidup yang terus meningkat tersebut memperlihatkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dinilai cukup berhasil. Karena angka harapan hidup merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja pemerintah dari segi peningkatan kesehatan penduduk.

Perkembangan angka harapan hidup penduduk menunjukkan perkembangan berarti, dimana terlihat pada gambar di bawah ini, angka harapan hidup penduduk Kota Sungai Penuh dari Tahun 2010-2015 terus menunjukkan peningkatan, yang semula pada Tahun 2010, angka harapan hidup sebesar 70,96 tahun meningkat menjadi sebesar 71,61 pada Tahun 2015, Dengan rata-rata pertahun 71,23.

Gambar 2.25
Angka Harapan Hidup di Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2015



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2016

Angka Kematian Bayi, per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) di Kota Sungai Penuh pada tahun 2015 adalah 7/1.000 KH. Hal ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2011 di Kota Sungai Penuh angka kematian bayi adalah 15/1.000 KH, pada Tahun 2012 adalah 12/1.000 KH dan tahun 2014 adalah 6/1.000 KH. Data kematian neonatal, bayi dan balita di kota sungai penuh Tahun 2015 bersumber dari Data Dasar Kesehatan Anak yang tercatat dan dilaporkan oleh puskesmas angka Absolut Kematian Bayi sebanyak 10 kasus yang disebabkan oleh Aspiksia, BBLR dan Penyakit Lainnya.

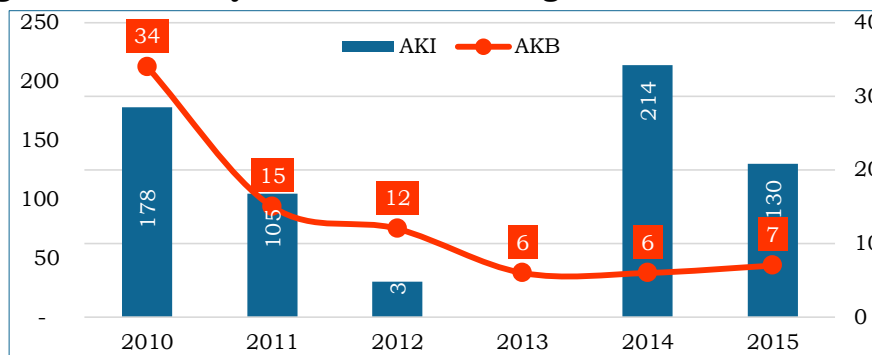
Walaupun terjadinya penurunan namun, AKB ini perlu menjadi perhatian serius bagi kita, karena angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Mosley dan Chen (dalam SDKI 2007) menerangkan bahwa ada berbagai faktor sosial ekonomi yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kematian bayi antara lain, yaitu karakteristik ibu seperti umur, paritas, ataupun selang kelahiran; pencemaran lingkungan; gizi; kecelakaan; dan penyakit.

Sedangkan untuk **Angka Kematian Ibu** atau Angka kematian Maternal (MMR) adalah jumlah kematian ibu yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan kelahiran anak per 100.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Kasus kematian ibu yang disebabkan karena komplikasi kehamilan dan kelahiran anak di Indonesia masih cukup tinggi. Beberapa penyebab kematian maternal dapat dicegah dengan adanya penanganan profesional dalam pemeliharaan antenatal dan kelahiran, serta peningkatan gizi ibu hamil.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Angka Kematian Ibu di Kota Sungai Penuh tahun 2015 adalah 130 per 100.000 KH. Menurut angka Absolut kematian ibu melahirkan di Kota Sungai Penuh Tahun 2015 adalah 2 Orang yang disebabkan oleh Pendarahan, Eklamsi dan Penyakit Lainnya. Hal ini lebih rendah dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu pada Tahun 2014 yaitu 214 kematian ibu setiap 100.000 KH.

Gambar 2.26
Angka Kematian Bayi dan Ibu di Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2015

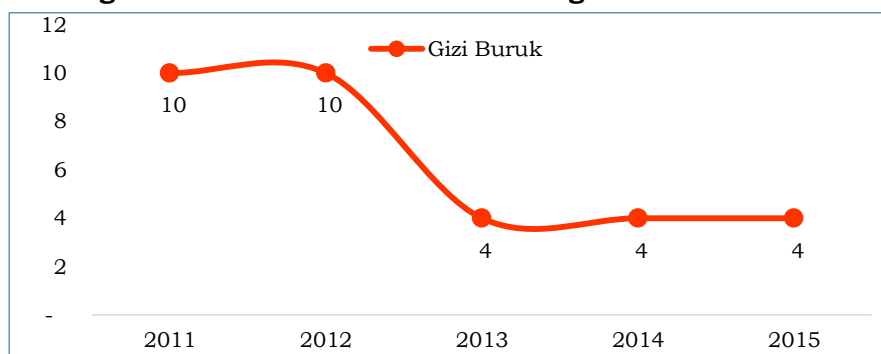


Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Balita Gizi Buruk, Tingkat kesehatan gizi sesuai dengan tingkat konsumsi yang menyebabkan tercapainya kesehatan tersebut. Tingkat kesehatan gizi terbaik ialah kesehatan gizi optimum (*eunutritional state*). Dalam kondisi ini jaringan jenuh oleh semua zat gizi tersebut. Tubuh terbebas dari penyakit dan mempunyai daya kerja dan efisiensi yang sebaik-baiknya. Tubuh juga mempunyai daya tahan yang setinggi-tingginya

Perkembangan gizi buruk sejak Tahun 2011-2015 di Kota Sungai Penuh, menunjukkan penurunan. Dimana pada tahun 2011 sebanyak 10 jiwa turun menjadi 4 jiwa pada Tahun 2013, namun sampai dengan Tahun 2014 terjadi stagnasi dengan jumlah gizi buruk sebanyak 4 jiwa/orang.

Gambar 2.27
Perkembangan Balita Gizi Buruk di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015



Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Dalam upaya penanganan masalah gizi buruk, diperlukan adanya keterkaitan dengan sektor/bidang lain khususnya dalam pencegahan sebelum kasus gizi buruk terjadi. Kasus gizi buruk dapat teridentifikasi lebih dini melalui kegiatan penimbangan balita yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan, namun kendala yang ditemui belum semua ibu yang mempunyai balita datang secara rutin setiap bulan hal ini bisa dilihat dari capaian penimbangan balita yang belum mencapai 100%. Berkaitan dengan itu maka revitalisasi posyandu menjadi penting untuk dilaksanakan sehingga fungsinya akan semakin meningkat. Selain itu pemenuhan dan peningkatan kemampuan kader juga perlu terus dilakukan sebagai pelaksana posyandu. Upaya lain dalam penanganan balita gizi buruk adalah pengembangan puskesmas dengan klinik gizi.

Hal ini juga terkait dengan status ekonomi masyarakat setempat yang tidak menunjukkan peningkatan yang lebih baik. Penanggulangan gizi buruk bukan saja tugas dinas kesehatan, namun sangat dibutuhkan juga peran serta

masyarakat termasuk kepala keluarga untuk segera melaporkan jika bayi bermasalah dengan gizi. Peran posyandu diperlukan untuk memberikan pengetahuan mengenai sadar gizi untuk balita. Peningkatan angka kecukupan gizi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Program prioritas yang harus dilakukan terkait dengan pembangunan kesehatan harus menyeluruh dari penurunan AKB, peningkatan gizi masyarakat, jaminan kesehatan ibu hamil, serta pelatihan tenaga medis.

Angka Kesakitan, Morbiditas (angka kesakitan) digunakan untuk menggambarkan pola penyakit yang terjadi di masyarakat. Berikut adalah beberapa kejadian morbiditas yang terjadi di kota sungai penuh.

Tabel 2.21
10 Penyakit Terbesar di Kota Sungai Penuh Tahun 2015.

| No | JENIS PENYAKIT | JUMLAH KASUS | PERSENTASE (%) |
|--------|--|--------------|----------------|
| 1. | ISPA | 9.866 | 28.34 |
| 2. | Gastritis | 5.243 | 15.06 |
| 3. | Hipertensi | 4.738 | 13.61 |
| 4. | Penyakit pada Sistem Otot dan Jaringan Pengikat (REUMATIK) | 3.608 | 10.36 |
| 5. | Influenza | 2.478 | 7.12 |
| 6. | Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal | 2,087 | 5.99 |
| 7. | Karies Gigi | 2,023 | 5.81 |
| 8. | Penyakit Kulit Alergi | 1.942 | 5.57 |
| 9. | Infeksi Lain pada Saluran Pernapasan Bagian Atas | 1.460 | 4.19 |
| 10. | Diare | 1.881 | 3.90 |
| Jumlah | | 35.326 | 100.00 |

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

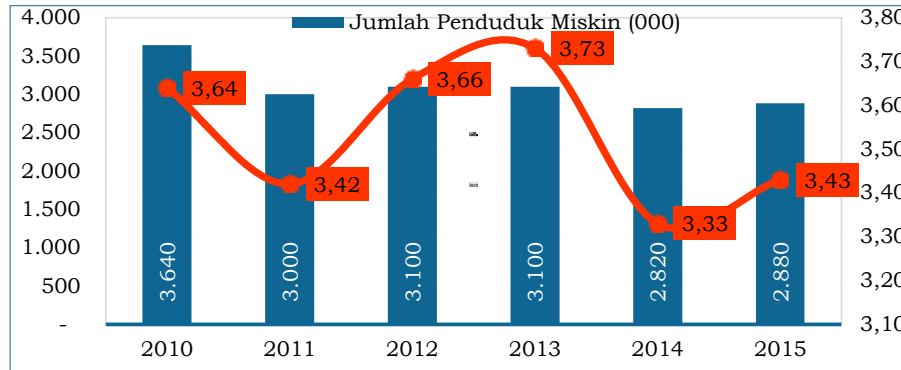
2.1.2.2.3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin, Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak.

Perkembangan kemiskinan di Kota Sungai Penuh selama kurun waktu 2010-2015 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan Kota Sungai Penuh pada tahun 2014 sebesar 3.33%, mengalami penurunan dari tahun 2013 yang sebesar 53.73%, sedang pada tahun 2012 adalah sebesar 3.66%. Kondisi tahun 2014 sebetulnya sudah menurun sangat baik jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 3.42%. Dan data terakhir di tahun 2015 adalah sebesar 3.43%. Sementara itu kondisi tahun 2013 menunjukkan tingkat kemiskinan paling tinggi jika dibandingkan dengan 6 tahun lainnya, namun jumlah absolutnya masih cukup besar dimana jumlah penduduk miskin tahun 2015 sebanyak 2.880 jiwa (3,43%). Perkembangan tingkat kemiskinan Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

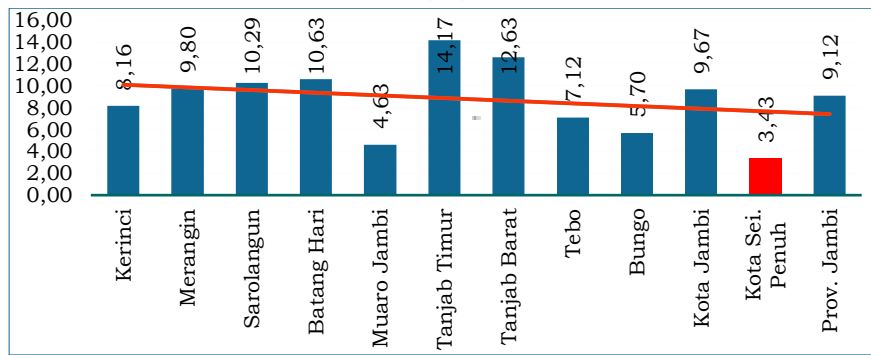
Gambar 2.28
Perkembangan Penduduk Miskin Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2015



Sumber : BPS Jambi Tahun 2016

Tingkat kemiskinan Kota Sungai Penuh pada Tahun 2015 sebesar 3,43% jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jambi sebesar 8,75% menunjukkan kondisi yang lebih baik yaitu berada di bawahnya. Jika dibandingkan dengan kota lainnya yang ada di Provinsi Jambi, tingkat kemiskinan di Kota Sungai Penuh menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya, hal ini seiring dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kota Sungai Penuh yang lebih kecil. Untuk lebih jelasnya posisi relatif tingkat kemiskinan Kota Sungai Penuh dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.

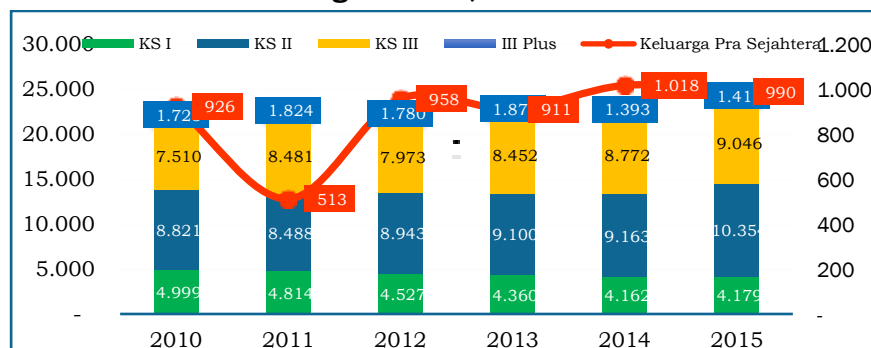
Gambar 2.29
Perbandingan Penduduk Miskin (%) Kota Sungai Penuh Tahun 2015



Sumber : BPS Jambi Tahun 2015

Sedangkan perkembangan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus di Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.30
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III dan Sejahtera Plus di Kota Sungai Penuh, Tahun 2010-2015

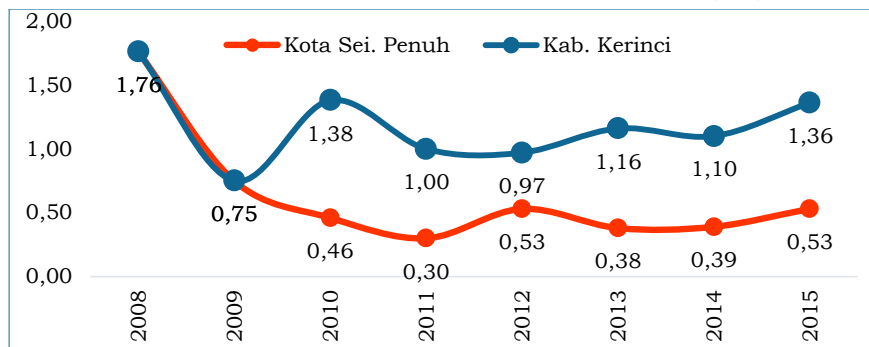


Sumber : BPS Sungai Penuh Tahun 2016

Perkembangan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III dan Sejahtera Plus di Kota Sungai Penuh, Tahun 2010-2015 cenderung mengalami fluktuatif, dimana keluarga pra-sejahtera pada tahun 2010 sebesar 926 jiwa turun menjadi 990 jiwa pada tahun 2015 atau mengalami penurunan sebesar 0,15% per tahun, begitu pula indikator pada indikator lainnya.

Indeks kedalaman kemiskinan, merupakan indeks yang mempresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada tingkat garis kemiskinan). Berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Sungai Penuh, pada Tahun 2015 indeks kedalaman kemiskinan mencapai 0,53%. Indikator indeks kedalaman kemiskinan (P1) tahun 2015 di Kota Sungai Penuh jika dilihat secara grafik, perkembangan antar waktu tampak terjadinya kenaikan yang cukup tinggi dari tahun 2013 (0,15%). Dengan rata-rata kedalaman kemiskinan periode 2008-2015 sebesar 0,64%.

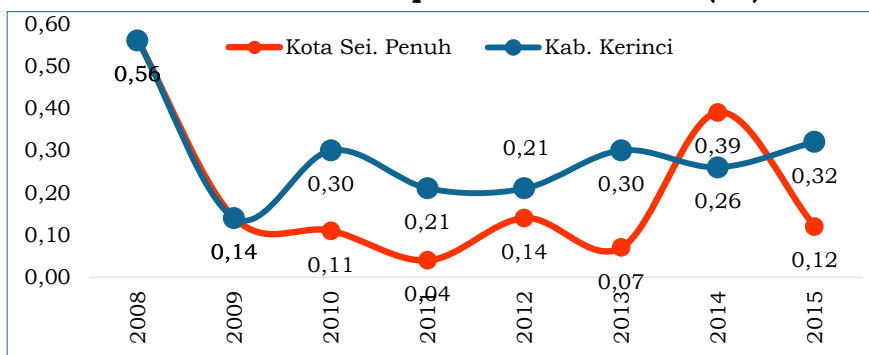
Gambar 2.31
Indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)



Sumber : BPS Jambi Tahun 2015

Indek Keparahan Kemiskinan, Terlihat perubahan perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Sungai Penuh periode tahun 2008-2015, setelah berpisah dengan kabupaten kerinci di tahun 2008 indeks keparahan kemiskinan Kota Sungai Penuh Tahun 2013 sebesar 0,07%, dan mengalami kenaikan pada Tahun 2015 menjadi 0,12%. begitupun kabupaten induk, indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,30% pada Tahun 2013 dan juga mengalami kenaikan pada Tahun 2015 menjadi 0,32%.

Gambar 2.32
Indikator Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

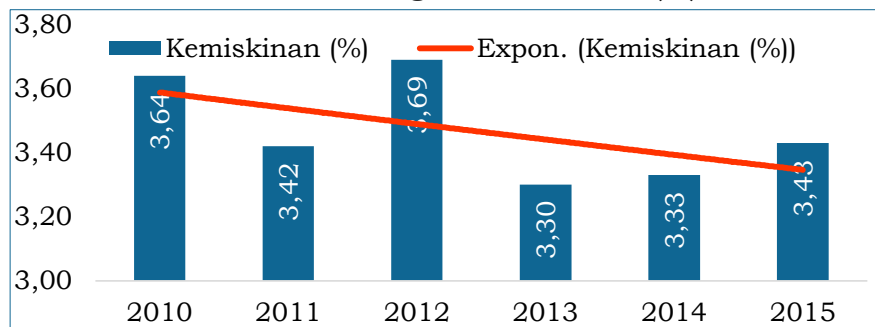


Sumber : BPS Jambi Tahun 2015

Efektifitas tingkat kemiskinan (%) di Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2013 cenderung menurun walaupun pada Tahun 2014 kembali mengalami

kenaikan, karena jika di lihat garis capaian (trendline) bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Sungai Penuh menurun, jika garis capaian (trendline) menurun bisa dikatakan efektifitas tingkat kemiskinan di Kota Sungai Penuh membaik. Hal ini seiring dengan meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Sungai Penuh.

Gambar 2.33
Efektivitas Tingkat Kemiskinan (%)



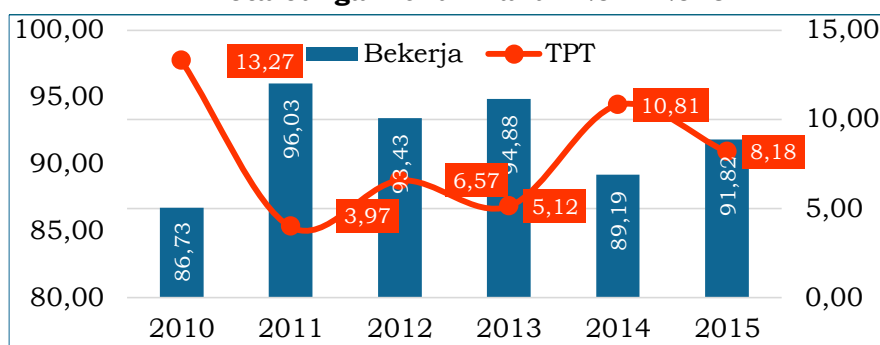
Sumber : BPS Jambi Tahun 2015

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah melalui program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin diharapkan juga dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan garis kemiskinan. Pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan serta keterpaduan antara pemerintah kota, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan.

2.1.2.2.4. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat TPT, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi TPT di suatu wilayah mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Dalam lingkup Kota Sungai Penuh indeks TPT dari Tahun 2010-2015 mengalami kenaikan khususnya di tahun 2013 hingga 2014 dan kemudian perlahan turun di tahun 2015 mencapai 8.18%. Perkembangan penduduk berumur 15 Tahun keatas yang menganggur di Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

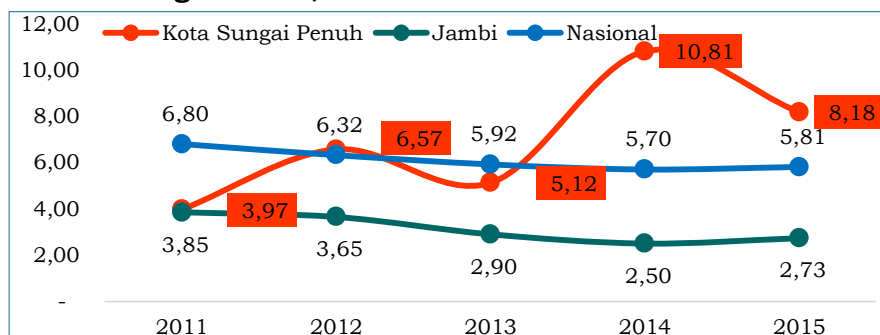
Gambar 2.34
Perkembangan Penduduk yang menganggur
Di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015



Sumber : BPS, diolah, 2016

Bila dibandingkan dengan Tingkat pengangguran di Provinsi Jambi dan Nasional, TPT Kota Sungai Penuh berada di atas rata-rata tingkat pengangguran Provinsi Jambi dan Nasional. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2011-2015, tingkat pengangguran wilayah cenderung menaik, yang menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru belum mampu diserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Tingkat pengangguran terbuka Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015 naik sebesar 4,21 persen (Gambar dibawah). Dalam penciptaan lapangan kerja ini masih perlu ditelaah dari sisi kualitas dan produktivitasnya. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Gambar 2.35
Perkembangan Penduduk yang menganggur di
Kota Sungai Penuh, Jambi dan Nasional Tahun 2011-2015



Sumber : BPS, diolah, 2016

2.1.2.3. Fokus Pemuda, Seni Budaya dan Olah Raga

2.1.2.3.1. Kebudayaan

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kota Sungai Penuh termasuk yang bercorak heterogen namun masih dalam pengaruh dominasi kebudayaan suku Kerinci yang merupakan suku bangsa asli Kota Sungai Penuh. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat kota kota sungai penuh tak pernah lepas dari pengaruh budaya Kerinci. Secara turun temurun, nilai kehidupan tradisonal khas Kerinci itu telah mewarnai pola kehidupan masyarakat Kota Sungai Penuh.

Nilai kehidupan tradisonal khas Kota Sungai Penuh ini kemudian berakulturasi dengan nilai-nilai kehidupan suku bangsa lain yang semakin membuat kehidupan masyarakat kota sungai penuh semakin berwarna dan khas sekaligus menjadikan kota ini sebagai kota multi kultural dan multi suku

bangsa. Ini pula yang kemudian semakin memperkaya khasanah budaya Kota Sungai Penuh.

Kekayaan khasanah budaya Kota Sungai Penuh yang lain tercermin pula dari keberadaan benda cagar budaya berupa gedung bersejarah yang tersebar di seluruh wilayah, selain itu, Kota Sungai Penuh dikenal sebagai wilayah yang memiliki banyak kesenian daerah khas seperti tari rangguk, tari rantak kudo, dll. Ini pula yang menambah warna-warni khasanah budaya Kota Sungai Penuh.

Dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kota Sungai Penuh mengemban sasaran meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Adapun salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan urusan kebudayaan diantaranya adalah Penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Perkembangan indikator kebudayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.22
Perkembangan Seni Budaya
Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | CAPAIAN PEMBANGUNAN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk | 1.45 | 7.90 | 7.64 | 7.40 | 5.32 |
| 2 | Jmlag Gedung Kesenian per 10.000 penduduk | 0.78 | 0.49 | 0.57 | 0.99 | 1.38 |
| 3 | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumber: Hasi Analisis, Bps Sungai Penuh, diolah 2016.

2.1.2.3.2. Pemuda dan Olah Raga

Sedangkan dari sisi *Pemuda, dan Olahraga*, Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Jumlah pemuda (usia 15-34 tahun) di Kota Sungai Penuh pada Tahun 2015 adalah sebanyak 33.677 jiwa atau 33,17 persen dari jumlah penduduk, untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan.

Tabel 2.23
Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga
Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2015

| No | Capaian Pembangunan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|------|------|------|-------|-------|
| 1 | Jumlah Organisasi Pemuda | 54 | 60 | 65 | 93 | 79 |
| 2 | Jumlah Klub Olah Raga per 10.000 penduduk | 9.14 | 9.28 | 8.98 | 12.13 | 15.07 |
| 3 | Jumlah Gedung Olah Raga per 10.000 penduduk | 6.13 | 8.30 | 8.69 | 12.62 | 13.69 |

Sumber: Bps Sungai Penuh, diolah 2016.

Bidang keolahragaan di Kota Sungai Penuh secara organisasi ditangani oleh KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Sungai Penuh. Berdasarkan data dari KONI Kota Sungai Penuh pada tahun 2015 terdapat 38 cabang olahraga yang dibina oleh KONI Kota Sungai Penuh. Diantara beberapa cabang olahraga yang telah dibina tersebut seperti cabang olahraga panjat tebing, dayung, karate, pencak silat telah mengukir prestasi

Untuk sarana olahraga sepak bola yaitu lapangan Bola Kaki sudah ada di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Penuh 1 lapangan di Lapangan Merdeka, Kecamatan Pesisir Bukit ada 2 lapangan sepak bola, di Hampanan Rawang 3 lapangan sepak bola, Kumun Debai 1 lapangan sepak bola, Tanah Kampung 4 lapangan sepak bola. Untuk sarana olahraga bulu tangkis sudah ada Hall Bulu tangkis di semua kecamatan dalam wilayah Kota Sungai Penuh dan untuk sarana olahraga Tenis Meja, lapangan bola voli sudah ada di semua kecamatan serta lapangan bola voli juga sudah ada di sekolah-sekolah SMP, SMA/SMK dalam Kota Sungai Penuh sebanyak 22 Sekolah. Untuk sarana olahraga tenis lapangan sudah ada 4 yaitu di Koto Renah/Pesisir Bukit, Hotel Mahkota, Simpang Tiga dan Dusun Baru. Prasarana olahraga takraw ada 10. Lapangan Basket ada di sekolah dan Kodim yang totalnya sebanyak 13 lapangan basket. Di Kota Sungai Penuh juga berkembang olahraga beladiri pencak silat yang ada 4 perguruan pencak silat dengan menggunakan 5 fasilitas lapangan untuk latihan. Untuk renang di Kota Sungai Penuh ada 3 kolam renang. Olahraga futsal juga berkembang di Kota Sungai Penuh yang terlihat dengan telah bertambahnya sarana Lapangan Futsal ini sampai 6 lapangan futsal.

Untuk menumbuhkan dan menciptakan budaya olahraga yang sehat, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai baik di lingkungan sekolah, pekerjaan maupun pemukiman sehingga memungkinkan segenap lapisan warga masyarakat melakukan olahraga dan berbagai aktivitas jasmani. Kondisi keolahragaan di Kota Sungai Penuh belum menunjukkan prestasi yang mengembirakan. Belum terwujudnya prestasi olahraga dikarenakan pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi di beberapa cabang olahraga, antara lain terkendala oleh keterbatasan dukungan dana serta sarana dan prasarana pendukung.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Fungsi pemerintah sebagai dinamisator pembangunan, maka bagian aspek pelayanan umum yang dilaksanakan pemerintah Kota Sungai Penuh ditujukan untuk tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang merupakan salah satu faktor utama pembangunan. Oleh karena itu dalam peningkatan kualitas SDM terutama difokuskan kepada aksesibilitas masyarakat terutama terhadap bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Berikut ini menjelaskan kondisi eksisting pemerintah daerah Kota Sungai Penuh, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.

Pegawai Kota Sungai Penuh pada Tahun 2017 berjumlah 2.900 orang yang terdiri dari Pegawai Struktural dan Pegawai Fungsional. Gambaran mengenai potensi PNS Kota Sungai Penuh adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.24
Jumlah Pegawai Per Golongan Di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017

| GOLONGAN | | SKPD/KEC/KEL/KPU | UPTD PENDIDIKAN | PUSKESMAS/LABKESDA | SMP | SD | TK |
|----------------------|----------|------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| GOLONGAN IV | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | A | 125 | 34 | 5 | 236 | 335 | 38 |
| GOLONGAN III | D | 231 | 4 | 36 | 31 | 41 | 7 |
| | C | 191 | 3 | 28 | 20 | 13 | 6 |
| | B | 258 | 7 | 31 | 82 | 68 | 6 |
| | A | 246 | 7 | 73 | 68 | 173 | 12 |
| GOLONGAN II | D | 39 | 0 | 67 | 3 | 7 | 2 |
| | C | 62 | 3 | 65 | 3 | 36 | 1 |
| | B | 21 | 1 | 2 | 5 | 26 | 2 |
| | A | 8 | 0 | 2 | 5 | 26 | 0 |
| GOLONGAN I | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 1278 | 59 | 310 | 453 | 726 | 74 |
| TOTAL PEGAWAI | | | | 2900 | | | |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2017

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kota Sungai Penuh masih perlu ditingkatkan, sebagaimana kondisi eksisting sebagai berikut :

2.1.3.1.1. Urusan pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar

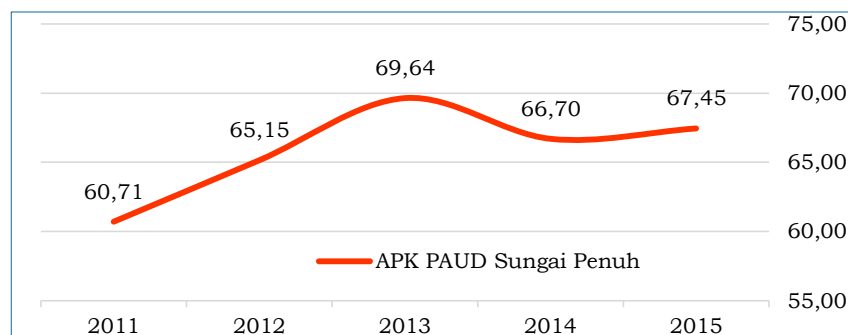
2.1.3.1.1.1. Urusan Pendidikan

1) Gambaran Pelayanan PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam mempersiapkan anak-anak Indonesia, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. PAUD mempersiapkan anak sejak dini sejak usia sangat muda sehingga tumbuh kembang anak dan perkembangan emosional dan juga psikomotorik anak menjadi tarpantau dan terbina. PAUD mendidik anak menjadi insan yang berkualitas di kemudian hari.

Kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) salah satunya diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar. Capaian kinerja PAUD di sini termasuk pendidikan TK/RA. perkembangan APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD di Kota Sungai Penuh, seperti terlihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.36
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015



Sumber : Dinas Pendidikan 2016

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kota Sungai Penuh periode 2011-2015 mengalami kecenderungan kenaikan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 65,93%. Dimana Pada tahun 2013 capaian APK PAUD sebesar 69,64%, namun pada tahun 2014 APK PAUD mengalami penurunan menjadi sebesar 66,70% walaupun pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan menjadi 67,45%. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya perhatian serius terhadap kinerja lembaga PAUD dan juga tingkat kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD

Secara Nasional Target bagi Pendidikan Anak Usia Dini pada Tahun 2015 adalah meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sampai 75%. Anak usia 0-6 Tahun yang memperoleh layanan pendidikan di Kota Sungai Penuh terjadi peningkatan dari tahun ke tahun sejalan dengan meningkatnya akses layanan PAUD.

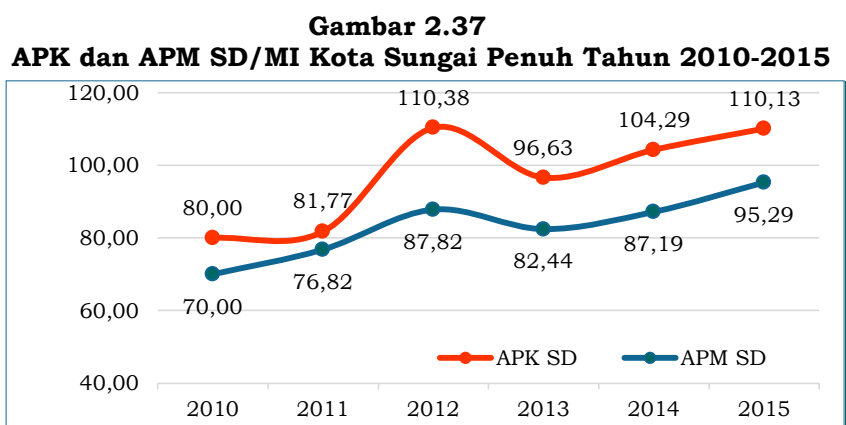
2) Gambaran Pelayanan Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pendidikan dasar 9 tahun, merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sejak Tahun 2003, pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) UU No. 20 Tahun 2003) yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Melalui pendidikan dasar 9 tahun diharapkan di masa mendatang, pendidikan minimal penduduk Indonesia adalah lulus SMP/MTs. Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan 9 tahun diukur melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan, Angka Putus Sekolah, jumlah guru, jumlah murid dan jumlah sekolah:

a) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

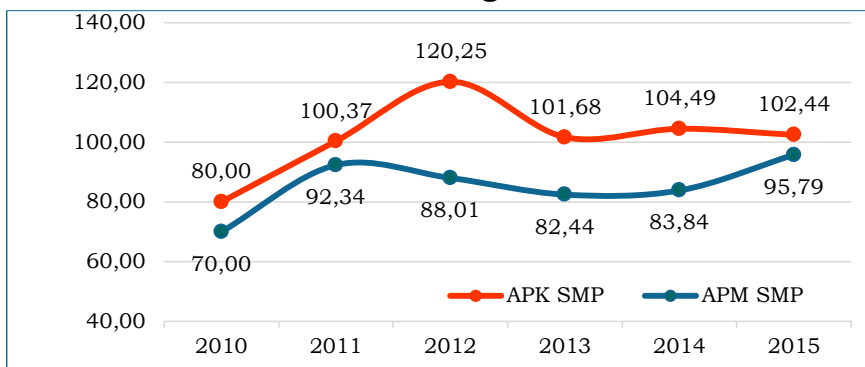
Capaian APK dan APM pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) selama kurun waktu 2010-2015, fluktuatif dan memiliki kecenderungan meningkat. APK SD Sederajat pada Tahun 2015 sebesar 110.13% meningkat dibandingkan Tahun 2014. Demikian juga dengan APM SD sederajat juga mengalami peningkatan selama kurun waktu tersebut. Tingginya Capaian APK di Kota Sungai Penuh melebihi 100%, ini diasumsikan karena terjadinya perpindahan penduduk ke Kota Sungai Penuh dengan membawa keluarganya, kemudian penyebab lain adalah terdapat anak diluar usia 7-12 tahun yang bersekolah sebanyak 10.12%. Sama halnya dengan capaian APM yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2010-2015 walaupun belum mencapai 100% hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sejumlah anak-anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah baik sama sekali belum pernah sekolah maupun yang tidak lagi bersekolah.



Sumber : Dinas Pendidikan 2016

Capaian APK SMP sederajat selama kurun waktu yang sama menunjukkan kecenderungan meningkat. Begitu pula dengan capaian APM SMP sederajat, kondisinya sama dengan kondisi APK namun demikian APM SMP sederajat pada akhir Tahun 2015 sebesar 95.79%. Ini menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat SMP sederajat di Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan, namun begitu jika dilihat dari capaian APM menunjukkan bahwa terdapat 95.79 persen penduduk yang berusia 13-15 tahun yang bersekolah di SMA (4.21 % tidak sekolah SMP sederajat).

Gambar 2.38
APK dan APM SMP/MTS Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2015



Sumber : Dinas Pendidikan 2016

b) Angka Putus Sekolah

Tingkat keberhasilan Program Wajib Belajar 9 tahun salah satunya dapat diukur melalui Angka Putus Sekolah. Angka putus sekolah menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena alasan tertentu. Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah biasanya adalah alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan sosial.

Angka Putus Sekolah pendidikan dasar di Kota Sungai Penuh menunjukkan kondisi yang baik dimana tidak ada angka putus sekolah, target Nasional Angka Putus Sekolah SD sederajat pada tahun 2015 adalah 0,15% sehingga Angka Putus Sekolah Kota Sungai Penuh sudah di bawah Angka Putus Sekolah Nasional. Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMP sederajat. Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP selama kurun waktu 2010-2015 tidak terdapat angka putus sekolah, lebih tinggi dari target Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebesar 0,22%. Secara rinci perkembangan Angka Putus Sekolah pendidikan dasar di Kota Sungai Penuh terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.25
Capaian Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP sederajat Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2014

| No | INDIKATOR | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1. | Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Angka Putus Sekolah (APS) SMP Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh 2016

c) Angka Kelulusan

Keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur melalui indikator angka kelulusan. Angka kelulusan membandingkan antara jumlah peserta yang lulus ujian dengan jumlah peserta ujian. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD sederajat selama Tahun 2010-2015 menunjukkan kecenderungan menaik. Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMP sederajat, angka kelulusannya juga menunjukkan angka yang baik. Capaian Angka Kelulusan SD sederajat dan SMP sederajat termasuk dalam kategori sedang. Perkembangan Angka Kelulusan pendidikan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Capaian Angka Kelulusan SD Sederajat dan SMP sederajat
Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | INDIKATOR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|
| 1 | Angka Kelulusan SD Sederajat (%) | 99.54 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Angka Kelulusan SMP Sederajat (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh 2016

d) Angka Melanjutkan (AM)

Indikator Angka Melanjutkan merupakan indikator strategis untuk mengukur apakah semua lulusan SD sederajat melanjutkan ke SMP sederajat dan lulusan SMP sederajat melanjutkan ke Sekolah Menengah (SM). Diharapkan semua lulusan SD sederajat melanjutkan ke SMP sederajat, dan semua lulusan SMP sederajat melanjutkan ke SM. Capaian AM ke SMP sederajat dan ke SM terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Capaian Angka Melanjutkan SD Sederajat dan SMP
sederajat Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015.

| No | INDIKATOR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat (%) | 100 | 102.16 | 77.87 | 91.24 | 95.98 |
| 2 | Angka Melanjutkan Ke Sekolah menengah (SMA/SMK) (%) | 100 | 118.48 | 157.65 | 123.02 | 169.17 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka melanjutkan baik dari SD sederajat ke SMP sederajat maupun melanjutkan dari SMP sederajat ke SMA/SMK menunjukkan kategori baik yaitu di atas 100%. Hal ini berarti di bidang pendidikan SMP sederajat, SD sederajat dan SMA/SMK Kota Sungai Penuh menjadi magnet di bidang pendidikan bagi daerah sekitarnya seperti Kabupaten kerinci dan daerah tetangga lainnya.

e) Rasio Guru /Murid

Standar Nasional rasio jumlah guru dan murid adalah 1:23 artinya untuk setiap 23 murid ada satu orang guru yang akan mengajar mereka, itulah kondisi ideal yang diharapkan. Sejak tahun 2011 rasio guru murid jenjang Sekolah Dasar telah berada di bawah rasio 1:23, keadaan ini bertahan sampai Tahun 2015 dengan rata-rata rasio Rasio guru terhadap murid tahun 2011-2015 adalah 1:19. Demikian juga Di jenjang Sekolah Menengah Pertama secara umum rasio guru murid kota ada pada angka 1:11. Angka ini ada di bawah standar nasional.

Tabel 2.28
Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Guru
terhadap Murid Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | INDIKATOR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Rasio guru/murid SD | 1 : 7 | 1 : 8 | 1 : 10 | 1 : 11 | 1 : 9 |
| 2 | Rasio guru/murid SMP | 1 : 12 | 1 : 13 | 1 : 12 | 1 : 10 | 1 : 10 |

Sumber: Hasil Analisis, Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh 2016

Kondisi pendidikan dasar di Kota Sungai Penuh, Pada Tahun 2014 jumlah SD di Kota Sungai Penuh sebanyak 74 unit terdiri 69 unit negeri dan 5 unit swasta sedangkan jumlah SMP 14 unit terdiri dari 13 negeri dan 1 swasta sedangkan jumlah siswa SD 9.793 siswa.

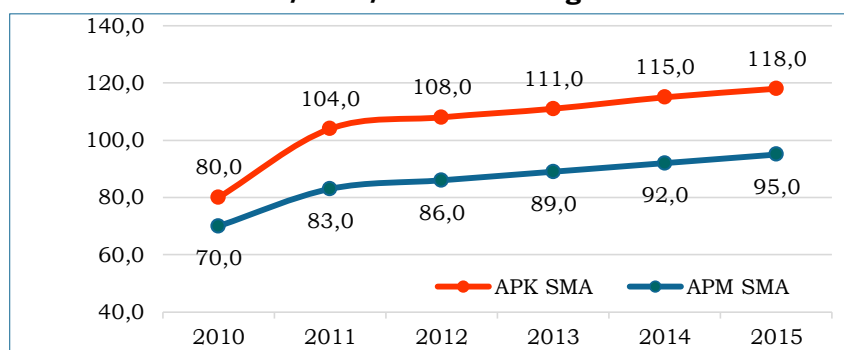
3) Gambaran Pelayanan Pendidikan Menengah

Pelayanan pendidikan menengah memiliki arti penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia umumnya dan di Kota Sungai Penuh pada khususnya. Keberhasilan pembangunan pendidikan menengah diukur melalui beberapa indikator yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Kelulusan dan rata-rata nilai UN Sekolah Menengah.

a) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA selama kurun waktu 2010 sampai dengan Tahun 2015 fluktuatif namun cenderung meningkat, yaitu 80.0% pada Tahun 2010 menjadi 118.00% pada Tahun 2015. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah penduduk non usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang SMA/Sederajat, yang dapat terjadi karena tidak lulusnya murid kelas 3, sistem pembelajaran akselerasi pada jenjang SMP/MTs, atau meningkatnya jumlah murid yang tidak naik kelas. Perkembangan APK dan APM Sekolah Menengah terlihat pada tabel berikut:

Gambar 2.39
Capaian APK dan APM SMA/SMK/MA Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2015



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh 2016

b) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah selama kurun waktu 2010-2015 menunjukkan kecenderungan menurun walaupun kembali naik pada Tahun 2015. Angka Putus Sekolah SM di Kota Sungai Penuh masih termasuk rendah karena di bawah target Angka Putus Sekolah SMA Nasional yaitu sebesar 0,22%. Hal ini mengindikasikan tingginya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sekolah. Persentase angka putus sekolah SMA Sederajat pada Tahun 2015 sebesar 0,04% telah memenuhi SPM Nasional, angka putus sekolah tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah. Perkembangan Angka Putus Sekolah SM tahun 2011-2015 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|----|------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%) | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.04 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh 2016

c) Angka Kelulusan

Angka Kelulusan Sekolah Menengah selama kurun waktu 2010-2015 fluktuatif. Angka Kelulusan SMA di Kota Sungai Penuh termasuk tinggi karena di atas target Angka kelulusan SMA Nasional yaitu sebesar 99,00%. Hal ini menunjukkan perbaikan kualitas pembelajaran di jenjang Sekolah Menengah. Perkembangan Angka Kelulusan SMA tahun 2011-2015 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Perkembangan Angka Kelulusan Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA) Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|----|--------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%) | 99.95 | 99.9 | 99.86 | 82.63 | 99.82 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS 2015

d) Rata-rata nilai UN

Perkembangan Capaian nilai rata-rata UN SMA/MA selama kurun waktu 2011-2015 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Perkembangan Nilai Rata-rata Ujian Nasional Sekolah Menengah (SM) Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|----|----------------------------|-------|------|-------|-------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Rata-RATA nilai UN SMA /MA | N.a | N.a | N.a | 41,88 | N.a |
| 2 | Rata-RATA nilai UN SMK | N.a | N.a | 28,45 | 28,02 | N.a |

Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS 2015

Capaian nilai Rata-rata UN relatif cukup dan perlu ditingkatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan relatif sedang. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai rata-rata UN.

e) Rasio Guru/Murid Sekolah Menengah

Rasio guru terhadap murid di Kota Sungai Penuh kurun 2011-2016 fluktuatif, cenderung menurun dari tahun ke tahun sebelumnya. Hal ini merupakan tantangan pemerintah daerah di bidang pendidikan karena menurut Stándar Pelayanan Minimum, jumlah rasio seharusnya 14 murid per guru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32
Rasio Guru/Murid Sekolah Menengah Tahun 2011-2016

| No | INDIKATOR | TAHUN | | | | | |
|----|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Rasio Guru/Murid Sekolah Menengah (%) | 01,10 | 01,11 | 01,15 | 01,18 | 01,39 | 01,08 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS 2015

4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru memenuhi kualifikasi D4/S1 selama kurun waktu 2011-2015 menunjukkan peningkatan. Persentase guru SD yang memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 79,70%, Guru SMP yang memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 79,30 Sedangkan Guru SMA yang memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 93,10%. Secara Rinci perkembangan guru yang memiliki kualifikasi D4/S1 terlihat pada tabel 2.24 berikut:

Tabel 2.33
Persentase Pendidik dengan kualifikasi D4/S1 Jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 36.90 | 59.60 | 74.60 | 80.10 | 79.70 |
| 2 | Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 68.90 | 73.00 | 74.60 | 77.60 | 79.30 |
| 3 | Guru SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 87.20 | 87.60 | 91.40 | 92.96 | 93.10 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS 2015

Tabel di atas menggambarkan bahwa secara keseluruhan kualifikasi guru di Kota Sungai Penuh cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama Guru SD/MI dan SPM.

2.1.3.1.1.2. Kesehatan

Berdasarkan amanat Undang-undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009, tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat.

Table 2.34
Data Pelayanan Kesehatan Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | INDIKATOR -SPM | CAKUPAN (%) | | | | |
|----|---|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 (mendapat pelayanan kehamilan paling sedikit 4 kali sesuai standar) | 93.15 | 93.76 | 95.38 | 96.39 | 95.42 |
| 2 | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani | 60.71 | 56.03 | 100.00 | 45.30 | 47.94 |
| 3 | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | 91.38 | 93.41 | 93.52 | 94.00 | 94.95 |
| 4 | Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (masa 6 sampai 42 jam pasca persalinan) | 88.17 | 90.30 | 90.74 | 91.93 | 91.19 |
| 5 | Cakupan Neonatus (bayi umur 0-28 hari) dengan Komplikasi yang Ditangani | 54.62 | 29.66 | 100.00 | 23.64 | 33.64 |
| 6 | Cakupan Kunjungan Bayi | 96.26 | 93.67 | 91.98 | 94.05 | 92.49 |
| 7 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (desa/kelurahan dengan cakupan imunisasi dasar secara lengkap pada bayi >= 80%) | 100.00 | 92.75 | 97.10 | 98.55 | 94.20 |
| 8 | Cakupan Pelayanan Pemantauan Tumbuh-Kembang Anak Balita (12-59 bulan) | 87.38 | 72.11 | 75.11 | 91.90 | 90.75 |
| 9 | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin | 3.32 | 100.00 | 86.34 | 67.08 | 85.83 |
| 10 | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Siswa Kelas I SD dan Setingkat oleh Tenaga Kesehatan atau Tenaga Terlatih (guru UKS/ dokter kecil) | 94.96 | 95.43 | 98.57 | 98.57 | 100.39 |
| 12 | Cakupan Peserta KB Aktif pada Pasangan Usia Subur | 81.62 | 100.58 | 99.70 | 98.08 | 99.73 |

| No | INDIKATOR -SPM | CAKUPAN (%) | | | | |
|----|---|-------------|------------|------------|--------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 13 | Angka Penemuan Acute Flacid Paralysis (lumpuh layuh mendadak) per 100.000 penduduk < 15 tahun | 0.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita | 18.94 | 5.20 | 5.76 | 3.76 | 6.30 |
| 15 | Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif | 53.38 | 56.30 | 54.55 | 51.05 | 33.09 |
| 16 | Cakupan Penderita DBD yang ditangani | 100.00 | 100.00 | 44.00 | 12.00 | 100.00 |
| 17 | Cakupan Penemuan Penderita Diare | 117.88 | 118.95 | 73.05 | 86.27 | 79.97 |
| 18 | Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas/Balai Pengobatan/Praktek bersama dan Perorangan) | 68.41 | 176.37 | 196.74 | 20.54 | 76.13 |
| 19 | Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit/BKMM/BKPM/BKIM) | 5.58 | 1.40 | 53.09 | 156.14 | 37.42 |
| 20 | Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan oleh Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) di Kab/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang ditangani < 24 jam | 83.33 | 71.43 | 100.00 | 100.00 | 0 |
| 22 | Cakupan Desa Siaga Aktif | 0.00 | 5.88 | 83.33 | 83.33 | 0 |

Sumber: Dinas Kesehatan 2016

2.1.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan untuk menyediakan dan memenuhi pelayanan yang mendasar dan mutlak yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan seperti sumber daya air, jalan, air minum dan sanitasi lingkungan (air limbah, drainase dan persampahan) yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

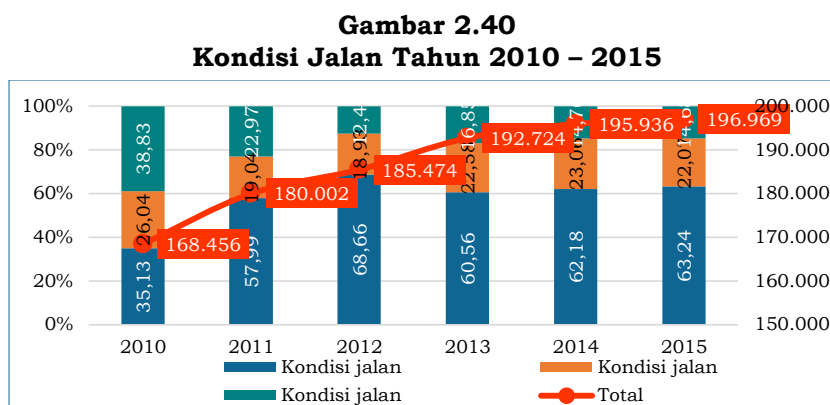
A. Jalan Dan Jembatan

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Ketersediaan prasarana jalan raya dan jembatan yang menghubungkan Kota Sungai Penuh dengan wilayah diluarnya, tersedia jaringan jalan Arteri Primer (jalan Provinsi) sebagai berikut:

- Ruas Sungai Penuh - batas Provinsi Sumbar (Tapan)
- Ruas Sungai penuh - arah Lempur
- Ruas Sungai Penuh - arah Bangko
- Ruas Sungai Penuh - batas Provinsi ke arah Padang, melalui Muara Labuh

Berdasarkan Kondisi panjang jalan di Kota Sungai Penuh tahun 2010-2015 menuju kondisi jalan yang semakin baik dapat dilihat pada tabel berikut

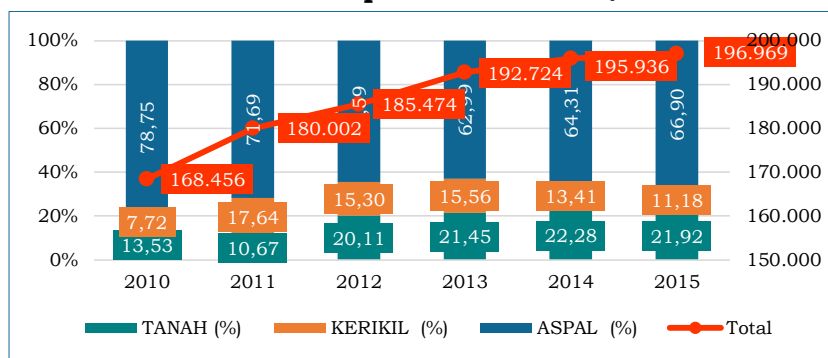


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh. 2016.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total panjang jalan yang ada di Kota Sungai Penuh sampai dengan tahun 2015 adalah sepanjang ± 196,969 Km atau terjadi penambahan panjang jalan periode 2011-2015 sepanjang +28,513 km, dimana kondisi baik sebesar 63,24 % (124,572 Km), rusak ringan 22,07% dan rusak berat sebesar 14,68%.

Sedangkan untuk kondisi jalan di Kota Sungai Penuh dengan **permukaan** beraspal meningkat dari 132,667 Km pada 2010 menjadi 131,764 kilometer pada akhir 2015, atau terjadi penurunan jalan dengan permukaan aspal sepanjang 9,028 Km. Hal ini seiring dengan penambahan total panjang jalan, dari total panjang jalan di Kota Sungai Penuh kondisi jalan pada tahun 2015 dengan permukaan tanah sebanyak 43,177 Km (21.92%) dan kondisi jalan dengan permukaan Kerikil sebanyak 22,028 Km (11.18%).

Gambar 2.41
Kondisi Jalan Beraspal Tahun 2010 S/D 2015



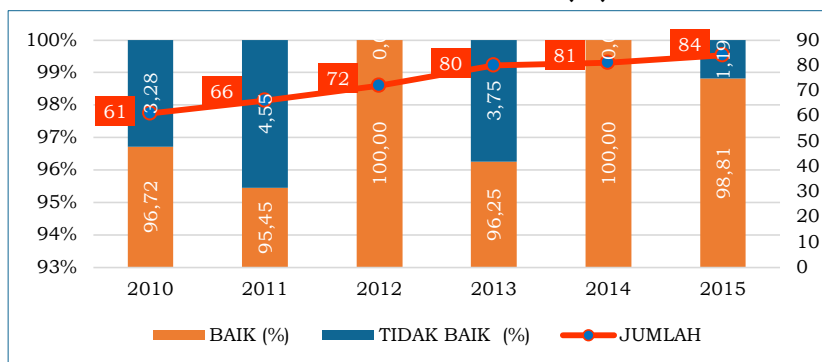
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh, 2016

Jembatan merupakan sarana transportasi yang berfungsi untuk melewati lalu lintas kendaraan, agar lalu lintas tersebut tidak terputus atau bisa mengurangi terjadinya kemacetan dan memiliki peranan penting dalam mensukseskan program pembangunan ekonomi. Dengan demikian jembatan harus selalu dalam keadaan baik dan terpelihara sehingga bisa berfungsi sebagai mana mestinya.

Pengembangan infrastruktur harus menyeluruh, terintegrasi karena saling terkait. Jika jembatan dalam kondisi tidak baik, maka sebaik apapun fasilitas jalan yang ada fungsinya akan menurun. Begitu sebaliknya jika jembatan dalam kondisi baik maka fungsi jalan akan bisa maksimal pengguna akan memilih jalur lain yang mana akan terjadi overload yang akan mengindikasikan tidak meratanya pembangunan infrastruktur, oleh sebab itu banyak jembatan yang rusak dikarenakan lambatnya penanganan dan perlu penanganan.

Periode tahun 2010-2015 di Kota Sungai Penuh terdapat sebanyak 84 unit jembatan permanen atau terjadi peningkatan sebanyak 23 Jembatan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun 1,5% pertahun, sampai akhir tahun 2015 kondisi jembatan permanen dalam kondisi baik sebanyak 83 buah (98,81%) sedangkan hanya 1 jembatan permanen dalam kondisi tidak baik atau 1,19%.

Gambar 2.42
Kondisi Jembatan Permanen Berkualitas Baik (%) Tahun 2010 s/d 2015



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh. 2016

B. Sumber Daya Air

Kota Sungai Penuh banyak memiliki mata air dengan debit yang beraneka ragam. Mata air yang ada tersebut pada umumnya terletak di Kecamatan Pesisir Bukit, Kumun Debai, dan Kecamatan Sungai Bungkal. Mengingat mata air dan bangunan irigasi merupakan sarana vital dalam kegiatan pertanian, hal ini perlu mendapatkan perhatian dan prioritas.

Sampai akhir tahun 2015, 55% (2,7 juta) Ha Daerah Irigasi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kondisi rusak, sasaran DAK Bidang Irigasi tahun 2015 adalah perbaikan dan peningkatan kinerja layanan irigasi pada 511 ribu Ha Daerah irigasi atau sebesar 18,9% dari daerah irigasi yang rusak.

Tipe-tipe irigasi yang ada di Kota Sungai Penuh disediakan oleh beberapa tipe bendung, yaitu: Bendung Permanen dan Bronjong. kondisi irigasi Kota Sungai Penuh pada tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Kondisi Jaringan Irigasi di Kota Sungai Penuh

| TAHUN | KONDISI JARINGAN IRIGASI (M) | | | | Jumlah |
|-------|------------------------------|-------|-------------|-------|--------|
| | Baik | % | Kurang Baik | % | |
| 2010 | 13,509 | 27.85 | 35,000 | 72.15 | 48,509 |
| 2011 | 18,509 | 38.16 | 30,000 | 61.84 | 48,509 |
| 2012 | 20,320 | 36.73 | 35,000 | 63.27 | 55,320 |
| 2013 | 25,733 | 37.32 | 43,226 | 62.68 | 68,959 |
| 2014* | 29,927 | 43.40 | 39,032 | 56.60 | 68,959 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh, LKPJ dan analisis
* Perkiraan

Dari tabel diatas dapat dilihat pembangunan jaringan/saluran irigasi dari total panjang irigasi di Kota Sungai Penuh tahun 2013 sepanjang 68.959 M, dimana 37,32% (25.733 m) dalam kondisi baik dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 43,40% (29.927m) dalam kondisi baik. Selanjutnya dengan pembangunan jaringan irigasi tersebut akan meningkat kondisi produktifitas lahan/areal/daerah irigasi, dimana pada tahun 2013 areal irigasi kondisi baik seluas 2.668 Ha atau mencapai 61,36% dan meningkat menjadi 62,81% atau 2.731 Ha di tahun 2014.

Tabel 2.36
Kondisi Areal (Ha) Irigasi Tahun 2013-2014

| TAHUN | BAIK (Ha) | % | KURANG BAIK (Ha) | % | LUAS (Ha) |
|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|
| 2013 | 2,668 | 61.36 | 1,680 | 38.64 | 4,348 |
| 2014 | 2,731 | 62.81 | 1,617 | 37.19 | 4,348 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Analisis

C. Drainase

Pengelolaan drainase di Kota Sungai Penuh ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum. Secara umum, saluran drainase di Kota Sungai Penuh telah menjangkau hampir seluruh wilayah kota. Saluran drainase bertujuan untuk mengalirkan limpasan air hujan baik dalam bentuk drainase buatan maupun drainase alami. Namun dalam pengelolaan pemeliharannya belum optimal, hal ini terbukti banyaknya terjadi luapan air ke permukaan jalan ketika terjadi hujan. Untuk kedepannya perlu dilakukan inventarisasi mengenai saluran-saluran tersebut dikarenakan jaringan drainase dengan irigasi masih bercampur satu sama lain.

Saluran-saluran drainase memiliki pola yang sejajar dengan jalan. Dengan kondisi topografi yang relatif miring, serta dengan ketinggian kota diatas permukaan laut yang cukup tinggi, maka hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pengaliran air pada sistem drainase sehingga aliran permukaan mengalir langsung ke dataran yang lebih rendah yaitu Batang Air Bungkal.

Sistem drainase di Kota Sungai Penuh secara umum dibagi dalam tiga sistem:

- Sistem drainase terbuka. Sistem drainase terbuka saat ini cukup memadai untuk menampung dan mengalirkan air.
- Sistem drainase tertutup. Sistem drainase tertutup saat ini juga cukup memadai, namun terkendala dalam pembersihan/pengerukan sedimen, disebabkan oleh adanya sebagian pertokoan di atas saluran.
- Sistem drainase saluran tanah. Sistem ini sudah lama ada dan sangat bermanfaat bagi drainase kota dikala hujan turun sehingga drainase tanah yang ada dapat menampung beban curah hujan yang cukup tinggi.

Tabel 2.37
Data Jaringan Sistim Drainase di Kota Sungai Penuh Tahun 2015

| No | KEC. | KONDISI DRAINASE | | | KONDISI DRAINASE | | KONDISI DRAINASE | | |
|----|---------------|------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------|
| | | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Saluran Tertutup | Saluran Terbuka | Alamiah | Semi Perma nen | Perma nen |
| | | (KM) | (KM) | (KM) | (KM) | (KM) | (KM) | (KM) | (KM) |
| 1 | Sei. Penuh | 19,25 | 11,5 | 7,7 | 11,55 | 15,4 | 11,55 | 8,1 | 28,9 |
| 2 | T. Kampung | 16,6 | 5,53 | 5,53 | 2,77 | 24,912 | 13,84 | 8,3 | 5,53 |
| 3 | Ham. Rawng | 13,2 | 3,72 | 1,86 | 5,58 | 13,02 | 11,16 | 3,72 | 3,72 |
| 4 | Pesisir Bukit | 8,15 | 3,26 | 4,89 | 4,89 | 11,41 | 10,59 | 1,63 | 4,07 |
| 5 | K. Debai | 12 | 4,02 | 4,02 | 8,04 | 12,06 | 9,04 | 5,03 | 6 |
| 6 | Btg. Bungkal | 8,44 | 4,22 | 4,22 | 10,55 | 10,55 | 9,49 | 4,22 | 7,39 |
| 7 | P. Tinggi | 10,94 | 4,97 | 5,97 | 8,9 | 10,94 | 7,95 | 3,98 | 7,95 |
| 8 | Koto Baru | | | | | | | | |
| | JUMLAH | 88,58 | 37,22 | 34,19 | 52,28 | 98,292 | 73,62 | 34,98 | 63,56 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh, 2015

Kondisi saluran secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kondisi saluran pada lingkungan perumahan dalam Kota Sungai Penuh pada umumnya mengalir pada sisi jalan raya maupun jalan utama, dimana pada sisi jalan utama saat ini mempunyai saluran drainase yang cukup baik sehingga baik pada musim hujan maupun musim kemarau

saluran drainase lingkungan perumahan maupun di jalan utama masih dapat mengatasi air masuk ke dalam saluran.

- Letak Kota Sungai Penuh yang konturnya berbukit, sehingga air mengalir memanfaatkan gravitasi ke tempat yang lebih rendah.
- Drainase kota menggunakan saluran tertutup, bagian atas tutup saluran dijadikan *site walk*/trotoar, ± 25 m diberi manhole untuk mengetahui kelancaran aliran air.
- Masih adanya genangan air pada saat musim hujan di beberapa tempat yang disebabkan belum adanya pembuatan drainase, dan terjadinya sedimentasi
- Kurang seragamnya dimensi saluran yang mengakibatkan meluapnya air hujan ke jalan.

D. Irigasi

Jaringan irigasi di Kota Sungai Penuh tersebar di setiap kecamatan, luas layanan irigasi Kota Sungai Penuh mencapai 2.586 ha. Daerah irigasi di setiap kecamatan Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.38
Daerah Irigasi Kecamatan Sungai Penuh

| No | NAMA DAERAH IRIGASI | DESA | LUAS LAYANAN (Ha) |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | D.I. Sei Bungkal | Sungai Penuh | 230 |
| 2 | D.I. Sei. Batu Lumut | Karya Bakti | 112 |
| 3 | D.I. Sei Jembatan Serong | Lawang Agung | 245 |
| 4 | D.I. Sei Ampuh | Air Jernih | 25 |
| 5 | D.I. Sei Air Jernih | Air Jernih | 50 |
| 6 | D.I. Sei Desa Gedang | Desa Gedang | 185 |
| 7 | D.I. Sei Nua | Karya Bakti | 145 |
| 8 | D.I. Sei Sumur Anyir | Sumur Anyir | 70 |
| 9 | D.I. Sei Pematang Tampung | Ulu Air | 40 |
| 10 | D.I. Dusun Baru | Dusun Baru | 65 |
| 11 | D.I. Bandar Panjang Pondok Tinggi | Pondok Tinggi | 75 |
| Total Luas Layanan | | | 1.242 |

Sumber : Bappeda, 2016

Tabel 2.39
Daerah Irigasi Kecamatan Kumun Debai

| No | NAMA DAERAH IRIGASI | DESA | LUAS LAYANAN (Ha) |
|--------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | D.I. Sei. Renah Kayu embun | Kumun | 180 |
| 2 | D.I. Sei. Ulu Air | Ulu Air | 35 |
| 3 | D.I. Sei Muara Jaya I | Kumun Mudik | 70 |
| 4 | D.I. Sei Muara Jaya II | Kumun Mudik | 80 |
| 5 | D.I. Sei Muara Jaya III | Kumun Mudik | 75 |
| 6 | D.I. Sei. Air Teluk | Air Teluk | 25 |
| 7 | D.I. Sei. Sandran Galeh | Sandaran Galeh | 131 |
| Total Luas Layanan | | | 596 |

Sumber : Bappeda, 2016

Tabel 2.40
Daerah irigasi Kecamatan Pesisir Bukit

| No | NAMA DAERAH IRIGASI | DESA | LUAS LAYANAN (Ha) |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | D.I. Sei. Koto Duo | Koto Berngin | 18 |
| 2 | D.I. Sei. Rawang | Simpang III Rawang | 60 |
| 3 | D.I. Paling Serumpun | Paling Serumpun | 40 |
| 4 | D.I. Simpang III Rawang | Rawang | 60 |
| Total Luas Layanan | | | 178 |

Sumber : Bappeda, 2016

Tabel 2.41
Daerah Irigasi Kecamatan Hamparan Rawang

| No | Nama Daerah Irigasi | Desa | Luas Layanan (Ha) |
|--------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 1 | D.I. Sei. Koto Duo | Koto Duo | 65 |
| 2 | D.I. Sei. Koto Bento | Koto Bento | 80 |
| 3 | D.I. Sei. Koto Lolo | Koto Lolo | 50 |
| 4 | D.I. Sei. Koto Baru | Koto Baru | 85 |
| Total Luas Layanan | | | 280 |

Sumber : Bappeda, 2016

Tabel 2.42
Daerah Irigasi Kecamatan Tanah Kampung

| No | Nama Daerah Irigasi | Desa | Luas Layanan (Ha) |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | D.I. Sei. Koto Tengah | Koto Tengah | 50 |
| 2 | D.I. Sei. Koto Tuo | Koto Tuo | 45 |
| 3 | D.I. Koto Panap | Koto Panap | 60 |
| 4 | D.I. Koto Dumo | Koto Dumo | 75 |
| 5 | D.I. Air Mati Pendung Hiang | Koto Dumo-pendung Hiang | 60 |
| Total Luas Layanan | | | 290 |

Sumber : Bappeda, 2016

E. Air Limbah

Cakupan pengelolaan air limbah cair di Kota Sungai Penuh berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh dapat digambarkan sebagai berikut : Sistem pengelolaan air limbah di Kota Sungai Penuh masih banyak menggunakan sistem pengolahan air limbah setempat (*on-site system*) baik itu secara individu dan di beberapa tempat secara komunal. Di sisi lain masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki pengelolaan air limbah dan membuang limbahnya ke saluran atau sungai. Pengelolaan limbah cair domestik yang ada di Kota Sungai Penuh lebih pada pemanfaatan sistem setempat (*on site system*) antara lain black water dan grey water yang yang dihasilkan langsung di buang ke sungai, lahan terbuka serta ada yang dibuang ke septik tank kemudian dibuang ke drainase lingkungan. Sistem pembuangan air limbah seharusnya dipisahkan dengan sistem pembuangan air hujan, tapi di Kota Sungai Penuh masih sering dijumpai limbah dari rumah tangga dibuang kedalam sistem pembuangan air hujan yang dapat mengakibatkan polusi/pencemaran lingkungan. Pengelolaan prasarana dan sarana air limbah pada setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, baik tingkat pelayanan, jenis dan jumlah pelayanannya. Pengelolaan sanitasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) sistem yaitu:

- a. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (*on-site system*).
- b. Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (*off-site system*).

Di beberapa tempat, pada bangunan-bangunan tertentu diwajibkan menyediakan fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) seperti: rumah sakit, industri, penginapan dll. Fasilitas pengolahan ini sangat dibutuhkan untuk menghindari dampak pencemaran lingkungan hidup. Prasarana pembuangan air limbah yang ada di Kota Sungai Penuh antara lain : Jamban Keluarga; Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Perkiraan timbulan limbah pada tahun rencana diperkirakan sebagai berikut:

Tabel 2.43
Volume Timbulan Air Limbah di Kota Sungai Penuh

| No | KECAMATAN | JUMLAH | PEMAKAIA | KEBUTUH | TIMBULAN AIR LIMBAH | | |
|----|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | PENDUDUK | N AIR | AN AIR | Black | Grey | Total |
| | | (jiwa) | MINUM | MINUM | Water | Water | |
| | | (ltr/org/hr) | (m ³ /hari) | (m ³ /hari) | (m ³ /hari) | (m ³ /hari) | (m ³ /hari) |
| 1 | Sungai Penuh | 9.738 | 100,00 | 973,80 | 194,76 | 584,28 | 779,04 |
| 2 | Pesisir Bukit | 11.577 | 100,00 | 1.157,70 | 231,54 | 694,62 | 926,16 |
| 3 | Hamparan Rawang | 18.376 | 100,00 | 1.837,60 | 367,52 | 1.102,56 | 1.470,08 |
| 4 | Tanah Kampung | 15.532 | 100,00 | 1.553,20 | 310,64 | 931,92 | 1.242,56 |
| 5 | Kumun Debai | 11.613 | 100,00 | 1.161,30 | 232,26 | 696,78 | 929,04 |
| 6 | Pondok Tinggi | 20.856 | 100,00 | 2.085,60 | 417,12 | 1.251,36 | 1.668,48 |
| 7 | Sungai Bungkal | 9.839 | 100,00 | 983,90 | 196,78 | 590,34 | 787,12 |
| 8 | Koto Baru | 10.280 | 100,00 | 1.028,00 | 205,60 | 616,80 | 822,40 |
| | Total | 107.811 | | 10.781,10 | 2.156,22 | 6.468,66 | 8.624,88 |

Sumber: Mastel Plan Sistem Air Limbah Kota Sungai Penuh. 2015

Berdasarkan tabel diatas, dengan jumlah penduduk 107.811 jiwa, maka volume timbulan air limbah di Kota Sungai Penuh adalah 8.624,88 m³/hari yang terdiri dari:

- Black Water = 2.156,22 m³/hari
- Grey Water = 6.468,66 m³/hari
- Total = 8.624,88 m³/hari

Beban limbah organic (BOD), Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jakarta Tahun 1989 oleh Dinas PU DKI dan Tim JICA (1989), jumlah tiap orang rata-rata mengeluarkan beban limbah organik sebesar 40 gram BOD/org/hari yang berasal dari:

- Black Water = 13 gram/org/hr
- Grey Water = 27 gram/org/hr

Dengan jumlah penduduk 107.811 maka perhitungan beban pencemaran BOD di Kota Sungai Penuh disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.44
Beban Limbah Organik (BOD)

| No | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK (jiwa) | BEBAN LIMBAH ORGANIK (BOD) | | | TOTAL BEBAN LIMBAH ORGANIK (BOD) | | |
|----|-----------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------|----------|
| | | | Black Water | Grey Water | Total | Black Water | Grey Water | Total |
| | | | (gr/org/hr) | (gr/org/hr) | (gr/org/hr) | (kg/hr) | (kg/hr) | (kg/hr) |
| 1 | Sungai Penuh | 9.738 | 13,00 | 27,00 | 40,00 | 126,59 | 262,93 | 389,52 |
| 2 | Pesisir Bukit | 11.577 | 13,00 | 27,00 | 40,00 | 150,50 | 312,58 | 463,08 |
| 3 | Hamparan Rawang | 18.376 | 13,00 | 27,00 | 40,00 | 238,89 | 496,15 | 735,04 |
| 4 | Tanah Kampung | 15.532 | 13,00 | 27,00 | 40,00 | 201,92 | 419,36 | 621,28 |
| 5 | Kumun Debai | 11.613 | 13,00 | 27,00 | 40,00 | 150,97 | 313,55 | 464,52 |
| 6 | Pondok Tinggi | 20.856 | 13,00 | 27,00 | 40,00 | 271,13 | 563,11 | 834,24 |
| 7 | Sungai Bungkal | 9.839 | 13,00 | 27,00 | 40,00 | 127,91 | 265,65 | 393,56 |
| 8 | Koto Baru | 10.280 | 13,00 | 27,00 | 40,00 | 133,64 | 277,56 | 411,20 |
| | Total | 107.811 | | | | 1.401,54 | 2.910,90 | 4.312,44 |

Sumber: Mastel Plan Sistem Air Limbah Kota Sungai Penuh. 2015

Beban limbah organic (BOD) yang sudah ditangani dihitung berdasarkan kepemilikan jamban dan kepemilikan tanki septik. Berdasarkan Studi EHRA, kepemilikan jamban berdasarkan penduduk yang survey adalah 79.3 % sedangkan kepemilikan tanki septik adalah 59.8 % dari yang mempunyai jamban. Berdasarkan data tersebut maka perhitungan beban limbah organik (BOD) yang sudah tertangani adalah seperti disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.45
Beban Limbah Organik (BOD) Yang Sudah Tertangani

| No | KECAMATAN | KEPEMILIKAN SEPTIK TANK | | | | BEBAN LIMBAH ORGANIK (BOD) YANG SUDAH TERTAGANI | | |
|-------|-----------------|-------------------------|-------------|--------|------------------|---|------------|--------|
| | | JUMLAH KK | KEP. JAMBAN | Jumlah | BOD Removal Rate | Black Water | Grey Water | Total |
| | | (KK) | (buah) | | | | | |
| 1 | Sungai Penuh | 2.435 | 1.931 | 1.154 | 65% | 39,02 | - | 39,02 |
| 2 | Pesisir Bukit | 2.894 | 2.295 | 1.372 | 65% | 46,39 | - | 46,39 |
| 3 | Hamparan Rawang | 4.594 | 3.643 | 2.179 | 65% | 73,63 | - | 73,63 |
| 4 | Tanah Kampung | 3.883 | 3.079 | 1.841 | 65% | 62,24 | - | 62,24 |
| 5 | Kumun Debai | 2.903 | 2.302 | 1.377 | 65% | 46,53 | - | 46,53 |
| 6 | Pondok Tinggi | 5.214 | 4.135 | 2.473 | 65% | 83,57 | - | 83,57 |
| 7 | Sungai Bungkal | 2.460 | 1.951 | 1.166 | 65% | 39,43 | - | 39,43 |
| 8 | Koto Baru | 2.570 | 2.038 | 1.219 | 65% | 41,19 | - | 41,19 |
| Total | | 26.953 | 21.374 | 12.781 | | 432,01 | - | 432,01 |

Sumber: Mastel Plan Sistem Air Limbah Kota Sungai Penuh. 2015

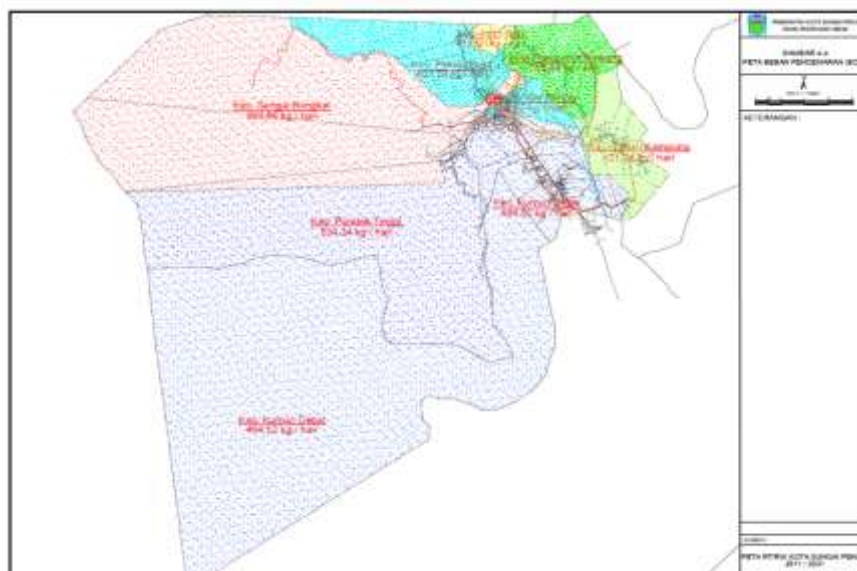
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa beban air limbah yang sudah tertangani adalah 432,01 kg/hari dari total BOD 4.312,44 kg/hari. Dengan demikian beban air limbah organik (BOD) yang sudah tertangani di Kota Sungai Penuh baru ± 10%, sedangkan 90% nya masih belum tertangani. Berikut perhitungan beban limbah organik (BOD) yang belum tertangani.

Tabel 2.46
Beban Limbah Organik (BOD) Yang Belum Tertangani

| No | KECAMATAN | BEBAN LIMBAH ORGANIK (BOD) YANG SUDAH TERTAGANI | | | BEBAN LIMBAH ORGANIK (BOD) YANG BELUM TERTAGANI | | |
|-------|-----------------|---|------------|---------|---|------------|----------|
| | | Black Water | Grey Water | Total | Black Water | Grey Water | Total |
| | | (kg/hr) | (kg/hr) | (kg/hr) | (kg/hr) | (kg/hr) | (kg/hr) |
| 1 | Sungai Penuh | 39,02 | - | 39,02 | 87,57 | 262,93 | 350,50 |
| 2 | Pesisir Bukit | 46,39 | - | 46,39 | 104,11 | 312,58 | 416,69 |
| 3 | Hamparan Rawang | 73,63 | - | 73,63 | 165,25 | 496,15 | 661,41 |
| 4 | Tanah Kampung | 62,24 | - | 62,24 | 139,68 | 419,36 | 559,04 |
| 5 | Kumun Debai | 46,53 | - | 46,53 | 104,43 | 313,55 | 417,99 |
| 6 | Pondok Tinggi | 83,57 | - | 83,57 | 187,56 | 563,11 | 750,67 |
| 7 | Sungai Bungkal | 39,43 | - | 39,43 | 88,48 | 265,65 | 354,13 |
| 8 | Koto Baru | 41,19 | - | 41,19 | 92,45 | 277,56 | 370,01 |
| Total | | 432,01 | - | 432,01 | 969,53 | 2.910,90 | 3.880,43 |

Sumber: Mastel Plan Sistem Air Limbah Kota Sungai Penuh. 2015

Gambar 2.43
Peta Beban Pencemaran Air Limbah (BOD)



Sumber: Mastel Plan Sistem Air Limbah Kota Sungai Penuh. 2015

F. Persampahan

Sumber sampah di Kota Sungai Penuh berasal dari sampah permukiman (berpenghasilan tinggi, sedang dan rendah), restoran, pertokoan, pasar, perkantoran, sekolah, hotel, penyapuan jalan, penyapuan taman serta sampah dari sarana umum lainnya. Pengelolaan kebersihan kota dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan. Pengelolaan kebersihan baik di lingkungan permukiman, pasar, jalan dan kawasan komersil dan perdagangan dilakukan secara teratur dengan pola pengumpulan pada pagi hari dan kemudian dilakukan pengangkutan dan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir dengan armada truk. Seluruh aktivitas pengelolaan kebersihan di Kota Sungai Penuh dibiayai oleh dana APBD Kota Sungai Penuh.

Cakupan wilayah pelayanan, pengelolaan sampah perkotaan saat sudah melayani semua Kecamatan. Ada 4 kecamatan yang belum terlayani 100% dengan permasalahan akses jalan dan fasilitas yaitu kecamatan Koto Baru, Hampanan Rawang, Kumun Debai dan Tanah Kampung.

Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah, Dari hasil Kajian Studi Komposisi Sampah Kota Sungai Penuh yang dilakukan pada 3 (tiga) sumber sampah perumahan yaitu perumahan pendapatan Tinggi dan Menengah, didapatkan nilai berat jenis dan timbulan sampah, sebagai berikut:

Tabel 2.47
Besaran Timbulan Sampah Versi Volume Sampah
Berdasarkan Kategori Sampel dan Komposisi Berat (kg)

| No | KATEGORI SAMPEL | BERAT NETTO (KG) | | | | | | | |
|----|----------------------------|------------------|--------------|--------|---------|--------|-------|------|-----------|
| | | Total | Sisa Makanan | Kertas | Plastik | Kaleng | Karet | Kain | Lain-lain |
| 1 | Rumah Tangga Permanen | 1,77 | 1,54 | 0,07 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rumah Tangga Semi Permanen | 1,93 | 1,13 | 0,06 | 0,24 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,10 |
| 3 | Rumah Tangga Non Permanen | 1,41 | 0,55 | 0,29 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,25 |
| 4 | Kantor | 1,51 | 0,32 | 1,10 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Sekolah | 2,16 | 0,00 | 0,16 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Toko | 3,17 | 2,57 | 0,37 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Pedagang Pasar | 1,10 | 0,48 | 0,26 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 8 | Jalan | 2,18 | 0,35 | 0,57 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| 9 | Hotel | 2,45 | 0,23 | 1,55 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 10 | Restoran | 3,43 | 3,18 | 0,10 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| | Rerata Gabungan | 2,11 | 1,03 | 0,45 | 0,43 | 0,005 | 0,007 | 0,01 | 0,23 |

Sumber : *Masterplan Sistem Persampahan Kota Sungai Penuh 2015*

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah disekitarnya. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh selama tahun telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan penjabaran RTRW kedalam rencana distribusi penataan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan kota. Pemerintah Kota Sungai Penuh menindaklanjuti RTRW dengan penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) yang

selanjutnya akan diperdakan. Capaian kinerja Urusan Penataan Ruang selengkapnya dapat dilihat pada berikut :

Tabel 2.48
Kinerja Urusan Penataan Ruang Pemerintah Daerah
Kota Sungai Penuh 2011-2015

| No | INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | 18 % | 18 % | 18 % | 120% | 21 % |
| 2 | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan | 0.004 | 0.006 | 0.380 | 0.650 | 0.656 |

Sumber : PU Kota Sungai Penuh 2016

2.1.3.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan upaya ini, dilakukan restrukturisasi kawasan-kawasan yang disinyalir mampu menimbulkan kekumuhan dan kurangnya penataan, salah satunya dengan perencanaan dan pembangunan serta penyediaan prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta kegiatan yang mendukung pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.49
Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

| No. | INDIKATOR | PERSENTASE PER TAHUN | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Rumah tangga pengguna listrik (%) | 94.56 | 94.28 | 98.49 | 97.50 | 96.88 |
| 2 | Luas Lingkungan permukiman kumuh (%) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.068 | 0.59 |
| 3 | Rasio rumah layak huni (%) | 70.14 | 94.40 | 94.40 | 82.00 | 93.39 |

Sumber :LPPD Kota Sungai Penuh 2011-2015.

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa rumah layak huni telah mencapai sampai dengan tahun 2015 sebanyak 93.39%, sedangkan rumah tidak layak huni (RTLH) saat ini sebanyak 6.61% , sehingga masih ada sejumlah RTLH yang masih harus diperbaiki.

Berdasarkan SK WaliKota Sungai Penuh No. 051/487/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Sungai Penuh telah diputuskan sebesar 28.74 Ha atau mencapai 3.12% dari wilayah permukiman Kota Sungai Penuh.

Tabel 2.50
Daftar Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh
di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2014

| No. | LOKASI | | LUAS (Ha) | TINGKAT KEKUMUHAN |
|-----|--------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| | KECAMATAN | DESA/ KEL. | | |
| 1 | Sungai Penuh | a. Kel. Pasar Sungai Penuh | 19.93 Ha | Kumuh Berat |
| | | b. Desa Pasar Baru | | Kumuh Berat |
| | | c. Desa Gedang | | Kumuh Berat |
| | | d. Kelurahan Pondok Tinggi | | Kumuh Berat |
| 2 | Kota Baru | Dujung Sakti | 8.81 Ha | Kumuh Berat |

Sumber : Bappeda Kota Sungai Penuh

2.1.3.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam mewujudkan sasaran urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yaitu Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, dibutuhkan beberapa indikator yang harus dicapai. Indikator-indikator tersebut diantaranya, Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk, Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan, Sistem informasi Pelayanan Perizinan dan administrasi pemerintah, Penegakan PERDA, Cakupan patroli petugas Satpol PP, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota, Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota, Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, Sistem Informasi Manajemen Pemda dan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Tabel 2.51
Perkembangan Kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | INDIKATOR | CAPAIAN | | | | |
|----|---|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | 1.45 | 1.48 | 1.05 | 1.58 | 1.77 |
| 2 | Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk | 4.57 | 5.73 | 7.07 | 8.97 | 10.54 |
| 3 | Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Sistem informasi Pelayanan Perizinan dan administrasi pemerintah | N.a | N.a | N.a | N.a | N.a |
| 5 | Penegakan PERDA (%) | 71 | 87 | 92 | 93 | 97 |
| 6 | Cakupan patroli petugas Satpol PP dalam 24 Jam | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%) | 72 | 77 | 85 | 98 | 98 |
| 8 | Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota (%) | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.09% | 0.11% |
| 9 | Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i> / 15 Menit setelah pengaduan) | | | | | |
| 10 | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | ada | ada | ada | ada | ada |

Sumber: Satpol PP dan Sungai dalam angka 2015

2.1.3.1.1.6. Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana dan lansia. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan dan lansia rawan sosial. Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.52
Indikator Urusan Sosial di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|----|---|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Sarana Sosial : | | | | | |
| | a. Panti Jompo | - | - | - | - | - |
| | b. Panti Asuhan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | c. Panti Sosial | - | - | - | - | - |
| | d. Rumah Singgah | - | - | - | - | - |
| | e. Panti Cacat | - | - | - | - | - |
| 2 | PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial | N.a | 6.803 | 10.268 | 11.927 | 19.576 |
| 3 | Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Anak Jalanan | N.a | 5.07 | 3.36 | 1.16 | 1.13 |

Sumber data : Dinas Sosnakertrasn Kota Sungai Penuh 2016

Berdasarkan tabel diatas Jumlah PMKS Kota Sungai Penuh tahun 2011-2015 telah mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 6.803 menjadi 19.576 pada tahun 2015. Jumlah yang menerima bantuan yang diberikan dengan berbagai program Pemerintah, Provinsi dan Kota.

2.1.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

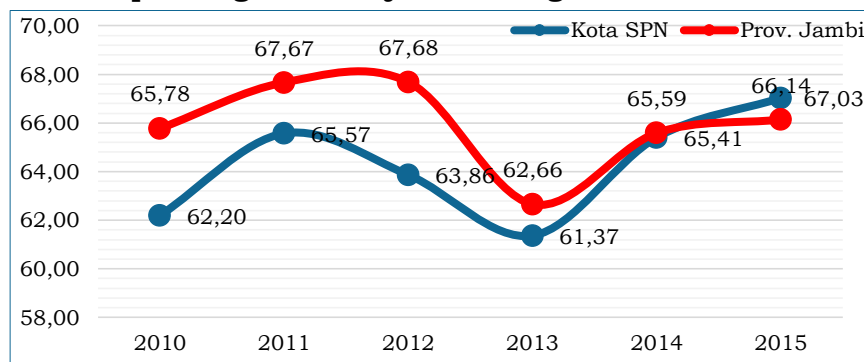
2.1.3.1.2.1. Tenaga Kerja

Keberhasilan dalam pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja diukur melalui beberapa indikator. 3 (tiga) capaiannya mengalami fluktuasi selama tahun 2010-2015. Untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Penempatan tenaga kerja masih menjadi permasalahan dalam Urusan ketenagakerjaan ini.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan Proporsi dari penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja. TPAK Kota Sungai Penuh tahun 2010-2015 memperlihatkan bahwa trennya berkecenderungan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan angka capaian pada tahun 2010 sebesar 62.20% menjadi sebesar 67.03% tahun 2015. Peningkatan ini menunjukkan bahwa dalam penawaran tenaga kerja di Kota Sungai Penuh yang semakin meningkat. Angka ini menggambarkan besarnya proporsi penduduk berusia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian baik yang berstatus bekerja, mencari kerja atau penganggur.

Apabila dibandingkan dengan TPAK Provinsi Jambi, Angkatan Kerja Kota Sungai Penuh pada tahun 2015 lebih tinggi yang berarti proporsi jumlah penduduk angkatan kerja lebih tinggi. Dan juga berarti Potensi tenaga kerja yang berpeluang bekerja di Kota Sungai Penuh lebih tinggi.

Gambar 2. 44
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sungai Penuh dan Provinsi Jambi

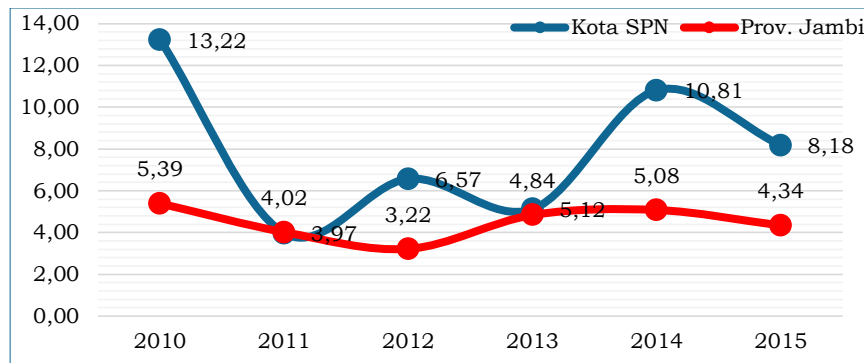


Sumber : BPS Kota Sungai Penuh, Tahun 2016

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2015 mengalami penurunan yang signifikan dari 13,22% pada tahun 2010 turun menjadi 3,97% di tahun 2011, dan kembali mengalami kenaikan sebesar 8,18% pada tahun 2015. Dimungkinkan terjadi karena banyaknya pendatang baru yang menjadi pencari kerja, seiring dengan penambahan penduduk dan perkembangan ekonomi Kota Sungai Penuh. Terjadinya kenaikan pengangguran akan menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan akan berdampak kurang baik terhadap laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Jambi, angka Kota Sungai Penuh lebih tinggi. Hal ini berarti jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja di lebih tinggi. Fenomena ini menunjukkan penduduk Kota Sungai Penuh lebih selektif dalam memilih lapangan usaha dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Sehingga menjadi peluang kerja bagi pencari kerja dari daerah lain. Bila disandingkan dengan rata-rata pertumbuhan tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Sungai Penuh yang hanya 1,61 persen per tahun maka Kota Sungai Penuh rentan terhadap peningkatan angka pengangguran. Untuk itu ke depan program-program peningkatan keterampilan bagi angkatan kerja melalui BLK atau lembaga lainnya dan program bantuan permodalan dapat ditingkatkan di wilayah ini tanpa mengurangi kegiatan serupa di tempat lainnya.

Gambar 2. 45
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sungai Penuh dan Provinsi Jambi



Sumber : BPS Kota Sungai Penuh, Tahun 2016

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Sungai Penuh yang mengalami kenaikan yang fluktuatif, pada tahun 2010 dari 86,73 persen naik menjadi 96,03 persen pada tahun 2011, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 91,82 persen. yang berarti pada tahun 2015 peluang seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa bekerja atau terserap dalam pasar kerja sebesar 91,82 persen. Semakin tinggi TKK suatu wilayah semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah.

Perkembangan penduduk usia kerja, penduduk bekerja di Kota Sungai Penuh dalam 5 tahun terakhir secara absolute menunjukkan peningkatan. Namun jumlah pengangguran terbuka cenderung meningkat. Realisasi kinerja pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.53
Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja

| INDIKATOR | TAHUN | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 62.20 | 65.57 | 63.86 | 61.37 | 65.41 | 67.03 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 13.22 | 3.97 | 6.57 | 5.12 | 10.81 | 8.18 |
| Tingkat Kesempatan Kerja | 86.73 | 96.03 | 93.43 | 94.88 | 89.19 | 91.82 |

Sumber : BPS Kota Sungai Penuh 2016

2.1.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Sungai Penuh dapat dilihat beberapa indikator diantaranya rasio tindak kekerasan dalam rumah tangga, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur dan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

A. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan jumlah tenaga kerja dibawah umur

Kepedulian Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat tercermin dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga didefinisikan kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikologis, penelantaran terhadap perempuan dan anak. Pelaporan kejadian dimungkinkan lebih sedikit dari yang terjadi, karena sebagian menganggap sebagai aib keluarga, dan faktor ketergantungan ekonomi perempuan terhadap laki-laki.

Sedangkan Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas belum dapat dideteksi dengan baik. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta Persentase tenaga kerja di bawah umur di Kota Sungai Penuh lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.54
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur di Kota Sungai Penuh

| No | KECAMATAN | TAHUN | | | | |
|----|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Rasio KDRT per 1.000 rumah tangga | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.018 | 0.026 |
| 2 | Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur | N.a | N.a | N.a | N.a | N.a |

Sumber : BPPMKB Kota Sungai Penuh 2016

Sejak tahun 2011-2015, rasio KDRT per-1000 rumah tangga di Kota Sungai Penuh terjadi fluktuasi dimana pada tahun 2011 sebesar 0.005 naik menjadi 0.026 pada tahun 2015

B. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

IPM merupakan ukuran kualitas hidup berbasis pada kapabilitas dasar penduduk yang diperluas. Sedangkan IPG mengukur hal sama tetapi terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan. Prinsipnya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana kapabilitas yang dicapai perempuan dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG), merupakan turunan dari IPM. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki

dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM perempuan dengan Laki-laki. Semakin tinggi rasionya (mendekati 100) maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Tabel. 2.55
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| INDIKATOR | L | TAHUN | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | P | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) | | | 69.65 | 70.58 | 92.70 | 93.44 | tad |
| 2 Angka Harapan Hidup (Tahun) | L | tad | 69.12 | tad | 69.49 | tad | |
| | P | tad | 73.04 | tad | 73.43 | tad | |
| 3 Angka Melek Huruf (Persen)/Harapan Lama Sekolah | L | tad | 98.17 | tad | 15.04 | tad | |
| | P | tad | 96.02 | tad | 14.30 | tad | |
| 4 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | L | tad | 10.05 | tad | 10.42 | tad | |
| | P | tad | 9.44 | tad | 9.03 | tad | |
| 5 Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (Ribuan Rupiah) | L | tad | 67.68 | tad | 11.42 | tad | |
| | P | tad | 32.04 | tad | 9.24 | tad | |

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, KPPP&PA 2015

Pencapaian pembangunan gender di Kota Sungai Penuh menunjukkan peningkatan setiap tahunnya selama 4 tahun terakhir, seperti yang ditunjukkan pada table diatas. IPG Kota Sungai Penuh dalam kurun waktu tahun 2011-2014 telah meningkat dari 69,65 pada tahun 2011 menjadi 94,44 pada tahun 2014. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Sedangkan *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*, menggambarkan besarnya peranan gender dalam bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan. Saat ini, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan telah mulai tampak hasilnya. Secara kuantitas, telah banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis yang memungkinkan perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan. Namun dari aspek kualitas, masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kompetensi yang dimiliki.

Tabel. 2.56
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|--|-------|-------|------|-------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 60.59 | 61.83 | tad | 50.98 | tad |
| 2 Keterlibatan Perempuan di Parlemen | tad | 10.53 | tad | 0.01 | tad |
| 3 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional | tad | 55.53 | tad | 54.74 | tad |
| 4 Sumbangan Pendapatan Perempuan | tad | 32.02 | tad | 33.15 | tad |

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, KPPP & PA 2015

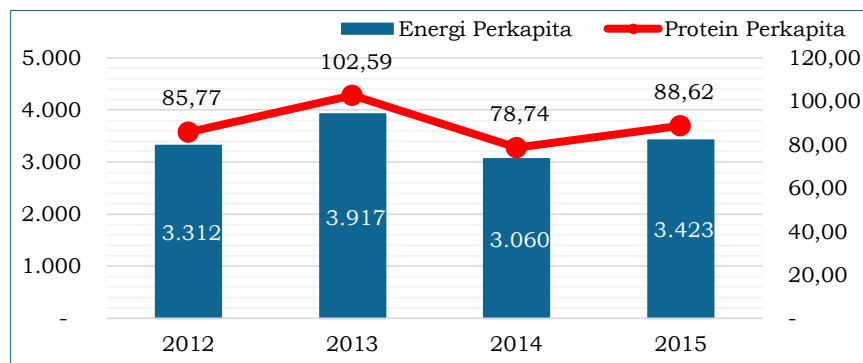
Pencapaian pemberdayaan perempuan yang dihitung melalui IDG menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan IPG. Pada tahun 2011, IDG Kota Sungai Penuh sebesar 60,59 sementara pada tahun 2014 sebesar 50,98. Seluruh komponen IDG, menunjukkan penurunan. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pembangunan harus ditingkatkan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam program pengarusutamaan gender.

2.1.3.1.2.3. Pangan

Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan di Kota Sungai Penuh dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain produksi gabah, beras dan ketersediaan pangan. Indikator ini tidak lain bertujuan untuk mencapai sasaran meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian.

- **Regulasi Ketahanan Pangan**, Pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dirumuskan sebagai usaha mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu. Kondisi ketahanan pangan dilihat dari 3 aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan. Untuk menjaga Ketahanan Pangan di Kota Sungai Penuh perlu dikeluarkan pengaturan (regulasi) ketahanan pangan.
- **Ketersediaan Pangan Utama**, Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Indikator yang digunakan dalam ketersediaan pangan, meliputi: tingkat ketersediaan energi dan protein yang ketercapaiannya diukur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan.

Gambar 2.46
Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kota Sungai Penuh Tahun 2012 - 2015



Sumber : BPS Kota Sungai Penuh, Tahun 2016

Ketersediaan energi yang harus dicapai setiap tahun yakni minimal 2.200 kkal/kap/hari, sedangkan ketersediaan protein minimal 57 gram/kap/hari. Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa baik ketersediaan energi maupun ketersediaan protein, telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

2.1.3.1.2.4. Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diarahkan pada pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan dan persampahan, pencegahan terjadinya dampak lingkungan melalui pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan/cadangan sumber

daya alam, dan pencegahan bencana, serta mengurangi dampak pemanasan global.

Kinerja urusan lingkungan hidup di Kota Sungai Penuh dapat dilihat dari tiga indikator yang mencakup kualitas air sungai, kualitas udara ambien, dan tutupan hutan. Sebagai salah satu Kota yang mengadopsi perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup berdasarkan IKLH Kementerian Lingkungan Hidup RI, maka IKLH Kota Sungai Penuh didapat dengan perhitungan terhadap indeks pencemaran air (IPA), indeks pencemaran udara (IPU) dan indeks tutupan hutan (ITU).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung dengan menggunakan bobot yang sama, di mana masing-masing komponen (IPA, IPU dan ITH) dipandang memiliki peran yang seimbang sehingga masing-masing diberi bobot 1/3 dari total IKLH. Hasil penghitungan nilai IKLH ditetapkan menjadi klasifikasi kualitas lingkungan hidup ke dalam 7 (tujuh) kategori. Penentuan klasifikasi dilakukan sebagai berikut :

- Unggul; IKLH > 90
- Sangat baik; 82 < IKLH = 90
- Baik; 74 < IKLH = 82
- Cukup; 66 = IKLH = 74
- Kurang; 58 = IKLH < 66
- Sangat Kurang; 50 = IKLH < 58
- Waspada; IKLH < 50

Perkembangan Indeks IPA, IPU, ITH serta IKLH di Kota Sungai Penuh pada tahun 2011-2014.

Tabel 2.57
IKLH Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2014

| Indikator | Tahun | | | | Perubahan 2013-2014 |
|---|-------|------|-------|-------|------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | tad | tad | 59.60 | 94.61 | 35.01 |
| 2 Indeks Pencemaran Air (IPA) | tad | tad | 78.64 | 90.64 | 12.00 |
| 3 Indeks Pencemaran Udara (IPU) | tad | tad | 99.40 | 98.85 | (0.55) |
| 4 Indeks Tutupan Hutan (ITH) | tad | tad | 0.77 | 94.35 | 93.58 |

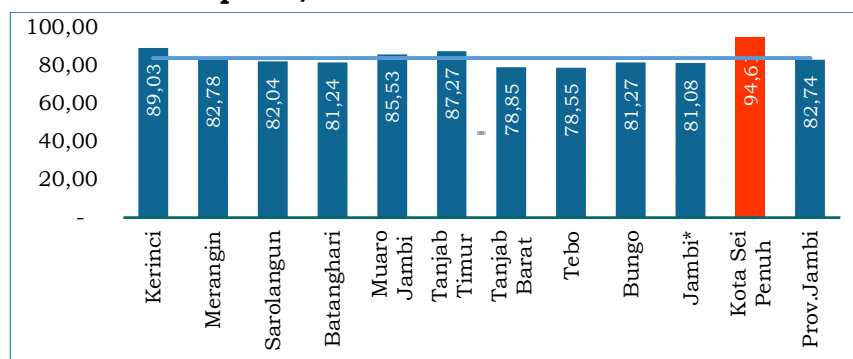
Sumber : SLHD Kota Sungai Penuh dan Provinsi Jambi, 2013-2015.

*Tad (Tidak ada data)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui : **Indeks Pencemaran Air (IPA)**, Peningkatan nilai IPA di Kota Sungai Penuh merupakan indikasi bahwa berbagai upaya yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam kegiatan pengendalian pencemaran air telah berdampak positif, dari mulai penyiapan perangkat peraturan, pengawasan di lapangan sampai pada pemberian sanksi bagi badan usaha yang melanggar. Begitu pula untuk **Indeks Pencemaran Udara (IPU)**, di wilayah Kota Sungai Penuh masih memenuhi baku mutu lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Sedangkan untuk **Indeks Tutupan Hutan (ITU)**. Kurun 2013-2014, nilai ITH di Kota Sungai Penuh mengalami Peningkatan hal ini disebabkan oleh Kota Sungai Penuh sebagian wilayahnya merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan mulai tahun 2014 sudah dimasukkan dalam perhitungan ITH.

Bila dibandingkan, dari sebelas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi, ada lima kabupaten/kota yang memiliki IKLH di atas IKLH Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh, dimana Kota Sungai Penuh mempunyai IKLH tertinggi 94,61 dengan klasifikasi *unggul* dan Kabupaten Tebo mempunyai IKLH terendah 78,55. IKLH ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk per kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk total. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2014 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.47
IKLH Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014.



Sumber : SLHD Prov. Jambi 2015

Indikator lain untuk melihat Kinerja urusan lingkungan hidup di Kota Sungai Penuh meliputi:

- *Persentase Penanganan Sampah*, capaian penanganan sampah pada tahun 2011-2015 secara umum cakupan wilayah pelayanan pengelolaan sampah perkotaan saat ini sudah melayani semua Kecamatan. Ada 4 kecamatan yang belum terlayani 100% dengan permasalahan akses jalan dan fasilitas yaitu kecamatan Koto Baru, Hamparan Rawang, Kumun Debai dan Tanah Kampung. Capaian penanganan sampah sebesar 30.00% pada tahun 2011 menjadi 77.62% pada tahun 2015.
- *Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal*, Jumlah pengawasan Amdal terhadap usaha/kegiatan wajib Amdal pada tahun 2011-2015 telah dilakukan 100%.
- *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penegakan hukum lingkungan pada tahun 2011-2015 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan semua kasus mengenai lingkungan sudah dapat ditindaklanjuti dengan baik.

Tabel 2.58
Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Persentase penanganan sampah | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 45.00 | 77.62 |
| 2 | Persentase pengangkutan sampah | N.a | N.a | N.a | 47.847 | 49.996 |
| 3 | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. | N.a | 75.00 | 85.71 | 88.24 | 82.61 |
| 4 | Penegakan hukum lingkungan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Pemantauan status mutu air | 38.46 | 46.15 | 92.31 | 92.31 | 92.31 |

Sumber : BLHKP Kota Sungai Penuh 2016

Isu utama lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kota Sungai Penuh Pada tahun 2013-2014 yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup paling

tidak ada 3 (tiga) yaitu : (1). Kerusakan Lahan dan Hutan, (2). Pencemaran Air Sungai dan (3). Bencana dan peningkatan Sebaran Wilayah Banjir.

2.1.3.1.2.5. Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Sungai Penuh dalam bidang kependudukan dan catatan sipil dari tahun 2011-2015 telah dilaksanakan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan dengan 4 (empat) buah kegiatan yaitu: Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, Pelayanan Mutasi Pendudukan Antar Daerah dan Kegiatan Pelayanan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK.

Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran tersebut utamanya dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain adalah Kepemilikan KTP, Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, Ketersediaan database kependudukan dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Indikator ini semuanya mengalami peningkatan yang artinya tingkat kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukannya sudah mulai membaik seiring dengan perbaikan sistem administrasi kependudukan. Capaian indikator urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tahun 2011-2015 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.59
Capaian Indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | KECAMATAN | TAHUN | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk | 0.011 | 0.377 | 0.384 | 0.718 | 0.792 |
| 2 | Kepemilikan KTP(%) | 1.12 | 37.74 | 38.41 | 71.81 | 79.20 |
| 3 | Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk | 3.35 | 1.51 | 4.30 | 14.70 | 22.22 |
| 4 | Ketersediaan database kependudukan | ada | ada | ada | ada | ada |

Sumber: Hasil Analisis, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2016

Selain itu Pelayanan KTP Elektronik Berbasis NIK dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional dan terpadu sesuai amanat dari Undang-Undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pemerintah Pusat memprogramkan kegiatan pemberian identitas penduduk yang bersifat unik atau khas dan tunggal dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang berlaku secara Nasional, dari tahun ketahun mengalami kenaikan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.60
Jumlah Penduduk Kota Sungai penuh yang Telah Melakukan
Perekaman KTP Elektronik Dari Tahun 2011-2015

| No | KECAMATAN | TAHUN | | | | |
|----|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Tanah Kampung | 9.609 | 11.213 | 11.524 | 11.191 | 11.659 |
| 2 | Pasisir Bukit | 19.504 | 12.535 | 13.015 | 12.596 | 13.041 |
| 3 | Hamparan Rawang | 14.155 | 14.858 | 15.245 | 15.119 | 15.351 |
| 4 | Kumun Debai | 10.157 | 11.215 | 11.517 | 11.256 | 11.581 |
| 5 | Sungai Penuh | 36.291 | 11.992 | 12.396 | 11.668 | 11.861 |
| 6 | Koto Baru | | 9.618 | 9.986 | 9.979 | 9.163 |
| 7 | Sungai Bungkal | | 10.888 | 11.264 | 10.752 | 10.762 |
| 8 | Pondik Tinggi | | 18.935 | 19.781 | 18.836 | 18.501 |
| | Jumlah | 89.716 | 101.254 | 104.728 | 101.397 | 101.919 |

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh 2016

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa dari tahun 2011-2015 Penduduk Kota Sungai Penuh telah melakukan perekaman KTP Elektronik mengalami peningkatan yang signifikan.

2.1.3.1.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak dan bukan penerima manfaat atau obyek saja. Rukun Warga atau Rukun Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Selain RT/RW, PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapat perhatian.

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kota Sungai Penuh antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), jumlah LSM, PKK aktif, Posyandu aktif, Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat. Rata-rata tahun 2011-2015 menunjukkan tren yang membaik, secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.61
Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | INDIKATOR | CAPAIAN | | | | |
|----|--|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Jumlah LSM | 14 | 17 | 19 | 22 | 22 |
| 3 | PKK aktif | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
| 5 | Posyandu aktif | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 97.40 |
| 6 | Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan masyarakat (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Sumber :BPPMPKB Kota sungai Penuh 2016

Selain itu upaya untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa dilakukan pembinaan pembuatan regulasi, arahan dan pedoman, pemberian fasilitasi, pemberian bimbingan serta monitoring dan evaluasi. Bimbingan teknis yang dilaksanakan mengenai administrasi keuangan Desa kepada aparat pemerintah desa, fasilitasi pengelolaan kekayaan atau asset desa, penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa, fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan fasilitasi pemilihan dan pengisian perangkat desa.

Selain itu untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa terutama dalam peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa serta peningkatan kesejahteraan perangkat desa diberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

2.1.3.1.2.7. Pengendalian Penduduk dan KB

Keluarga Berencana (KB) adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membatasi jumlah kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya.

Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970-an. atau telah dimulai sejak masa orde baru. Program ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia yang kala itu masih termasuk dalam Negara dengan angka pertumbuhan yang tinggi di dunia. Pemerintah saat itu menganggap, bahwa jika masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi itu dapat tertanggulangi, maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Karena dianggap akar dari masih rendahnya kesejahteraan rakyat adalah masih tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk.

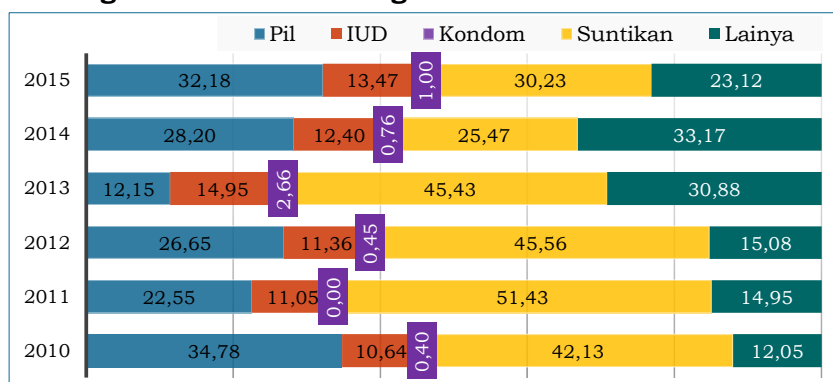
Program keluarga berencana itu sendiri terbagi dalam beberapa program penting, antara lain, pengaturan jarak kelahiran agar tidak terlalu dekat, tidak terlalu banyak dan pengaturan usia ibu saat melahirkan. Untuk itu BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) ditunjuk untuk mensosialisasikan dan mengkoordinasikan program keluarga berencana kepada masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kesediaan masyarakat untuk menyukseskan program keluarga berencana nasional.

Bidang program keluarga berencana yang dilakukan adalah melalui penerangan, penumbuhan motivasi, pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan.

Seperti yang terlihat di Gambar dibawah, 32.18% wanita usia subur di Kota Sungai Penuh pada tahun 2015 sedang menggunakan alat kontrasepsi Pil. sedangkan sisanya menggunakan jenis kontrasepsi lainnya.

Secara keseluruhan terdapat penurunan persentase penduduk yang sedang menggunakan alat kontrasepsi dibandingkan pada tahun 2014 lalu. Yang berdampak pada kenaikan persentase wanita usia subur yang sama sekali tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi.

Gambar 2.48
Persentase Peserta KB Aktif menurut Jenis Kontrasepsi yang Digunakan di Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2015



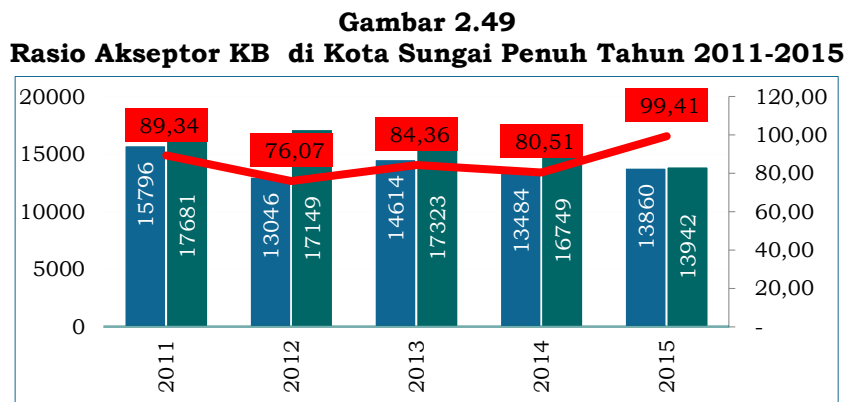
Sumber : Inkesra Kota Sungai Penuh Tahun 2013 dan BPS 2015

Pada tabel diatas agaknya kontrasepsi jenis suntikan masih menjadi primadona atau jenis kontrasepsi yang paling banyak dipilih oleh wanita

peserta KB aktif dari tahun 2010 hingga 2015. Sedangkan kondom terlihat masih jarang digunakan sebagai kontrasepsi yang dipilih oleh pasangan.

Pada tahun periode 2010-2015, kontrasepsi jenis suntikan lebih banyak dipilih oleh PUS, yaitu sebanyak 45,43 persen peserta KB aktif menggunakan suntik KB pada tahun 2013. Kondisi tersebut mengalami penurunan sebesar 15,2 persen hingga pada tahun 2015, sehingga pada tahun 2015 hanya sebanyak 30,23 persen peserta KB aktif menggunakan kontrasepsi jenis suntikan. Sedangkan untuk kontrasepsi jenis lainya mengalami kenaikan pengguna pada tahun 2013. PUS yang awalnya menggunakan kontrasepsi jenis lainya pada tahun 2010 hanya 12,05 persen, pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 23,12 Persen.

Perkembangan **Rasio akseptor KB**, yang dihitung dari jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Rasio Akseptor KB Kota Sungai Penuh Tahun 2011 sebesar 89.34% naik menjadi 99.41% pada tahun 2015 atau terjadi kenaikan sebesar 10.07%. Besarnya angka partisipasi KB (*akseptor*) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.



Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka Tahun 2015

Indikator lainya yang menunjukkan keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Sungai Penuh dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.62
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2011-2015

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|----|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Jumlah anak | 42,786 | 42,041 | 42,754 | 42,791 | 43,673 |
| 2 | Jumlah keluarga | 23,981 | 24,181 | 24,694 | 24,464 | 25,978 |
| 3 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 1.78 | 1.74 | 1.73 | 1.75 | 1.68 |

Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka Tahun 2015

2.1.3.1.2.8. Perhubungan

Dalam pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain, Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah.

Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi. Rencana tata guna lahan kota dan

wilayah harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan. Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Ini berarti transportasi mendukung penuh perkembangan fisik suatu kota atau wilayah.

Perlengkapan jalan yang tersedia di Kota Sungai Penuh meliputi Rambu, Marka, Guardrail dan Penerangan Jalan Umum. Kondisi perlengkapan jalan di Kota Sungai Penuh dari tahun 2010-2015 mengalami peningkatan. Di ikuti dari Penyelenggaraan urusan perhubungan darat antar kota antar provinsi menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 namun peningkatannya tidak terlalu signifikan, Hal ini merupakan implikasi dari maksimalnya pemanfaatan terminal. Adapun jumlah rambu-rambu yang dipasang setiap tahunnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jumlah rambu-rambu yang dipasang berfluktuatif setiap tahunnya sesuai dengan perhitungan kebutuhan. Perkembangan capaian kinerja Urusan Perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Capaian Pembangunan Perhubungan Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Jumlah arus penumpang angkutan umum | 2000 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 |
| Angkutan darat | 300 | 371 | 377 | 377 | 381 |
| Pemasangan Rambu-rambu | 70 | 0 | 132 | 0 | 48 |
| Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh 2016

Wilayah Kota Sungai Penuh sebagian besar merupakan daratan sehingga sistem transportasi dan perhubungan darat menjadi sarana/alat interaksi yang sangat penting. Berikut merupakan gambaran transportasi yang ada di Kota Sungai Penuh.

Sarana Transportasi, Jalan mempunyai peranan yang cukup penting sebagai sarana untuk memperlancar aktivitas perekonomian, pembangunan dan stabilitas sosial. Sehingga kondisi jalan menjadi bagian yang perlu diperhatikan seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan yang begitu pesat.

Tabel 2.64
Jenis Angkutan dan Bahan Bakar di Kota Sungai Penuh

| NO | JENIS KENDARAAN | JUMLAH KENDARAAN | | | JUMLAH |
|----|---------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | PREMIUM | SOLAR | | |
| 1. | Angkutan Penumpang | | | | |
| | 1. Bus Besar | - | Unit 8 | Unit | 8 Unit |
| | 2. Bus Sedang | - | Unit 8 | Unit | 8 Unit |
| | 3. Bus Travel | 15 | Unit 178 | Unit | 193 Unit |
| | Angdes | 300 | Unit - | Unit | 300 Unit |
| | Ojek | 4,334 | Unit - | Unit | 4,334 Unit |
| | Bendi | - | Unit - | Unit | 150 Unit |
| 2. | Angkutan Barang | | | | |
| | 1. Truck | - | Unit 20 | Unit | 20 Unit |
| | 2. Pick Up | 255 | Unit 215 | Unit | 470 Unit |
| | JUMLAH | 4,649 | Unit 429 | Unit | 5,475 Unit |

Sumber : Dishubkominfo Kota Sungai Penuh 2014

2.1.3.1.2.9. Komunikasi dan Informatika

Selama satu dekade terakhir telah terjadi pergeseran paradigma dalam perekonomian dunia, yaitu beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang didorong oleh kemajuan teknologi serta ditandai dengan

semakin meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia.

Urusan komunikasi dan informatika menjadi urusan yang penting dalam proses pembangunan di Kota Sungai Penuh. Kebijakan yang telah dilaksanakan dalam pembangunan urusan ini antara lain adalah penerapan teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan yang dimulai dengan *e-planning (SIPPD)*, dan *e-procurement*. Selain itu juga telah dilakukan penyediaan informasi pembangunan berbasis internet yaitu www.sungaipenuhkota.go.id.

Dalam era komunikasi digital, ternyata masih cukup banyak masyarakat yang menggunakan jasa pos. Tercatat 19.012 pengiriman surat menggunakan jasa pos kilat khusus sepanjang tahun 2014. Pengiriman surat menggunakan jasa pos ekspres tercatat sebanyak 16.628 surat sedangkan pengiriman paket kilat khusus tercatat sebanyak 898.

Tabel 2.65
Indikator Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika
di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|----|---|-------|------|------|------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Jumlah jaringan komunikasi | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Jumlah surat kabar lokal dan nasional | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 3 | Jumlah Penyiaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | a. Radio Nasional (jaringan ke daerah) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | b. Radio Lokal | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | c. TV Lokal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | d. TV Nasional | 4 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| 5 | Website milik pemerintah daerah | ada | ada | ada | ada | ada |
| 6 | jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kominfo Sungai Penuh, 2016

Namun demikian pemanfaatan yang optimal dari TIK belum sepenuhnya dapat tercapai. Salah satu penyebabnya adalah basis data dan aplikasi dibangun menggunakan platform sistem informasi dan data yang berbeda-beda. Akibatnya suatu basis data atau sistem informasi belum dapat saling berhubungan untuk melayani suatu kegiatan yang sifatnya terpadu dan kedepan berbagai aplikasi perangkat lunak akan dibangun dan dimanfaatkan dalam suatu lingkungan jaringan komputer yang meliputi beberapa instansi di Pemerintah Kota Sungai Penuh. Melalui jaringan internet basis data, aplikasi bahkan sistem informasi terhubung satu sama lainnya membentuk jaringan yang jauh lebih kompleks.

2.1.3.1.2.10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, selain UKM, yang berperan dalam ekonomi kerakyatan adalah Koperasi. Sebagai usaha ekonomi yang tak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada kualitas kehidupan anggota-anggotanya. Dengan demikian, maka keberadaan ekonomi perlu didukung agar semakin diminati masyarakat.

Di Kota Sungai Penuh jumlah koperasi menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu lima tahun dari sebanyak 129 unit pada tahun 2011 menjadi 143 unit pada tahun 2015. Walaupun demikian, tingkat keaktifan dan kesehatan koperasi menunjukkan kecenderungan menurun. Jumlah koperasi aktif pada sampai tahun 2015 sebanyak 55.24%, Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 masih terdapat sebanyak 44.76% koperasi yang tidak aktif di Kota

Sungai Penuh. Secara jelas perkembangan koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.66
Kondisi Makro Urusan Koperasi di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No. | INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|-----|-------------------------------|-------|------|------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Jumlah Koperasi (unit) | 129 | 132 | 133 | 139 | 143 |
| 2. | Persentase Koperasi Aktif (%) | N.a | N.a | N.a | 51.08 | 55.24 |

Sumber : Dinas Perindagkop Kota Sungai Penuh, 2011-2015 (diolah).

Selain itu dapat diketahui bahwa Koperasi Pegawai Negeri merupakan jenis koperasi yang paling banyak berperan sebagai sarana penguatan ekonomi masyarakat di Kota Sungai Penuh. Koperasi ini beranggotakan Pegawai Negeri yang aktifitasnya melayani anggota untuk masalah kredit dan simpan pinjam. Koperasi Wanita adalah jenis koperasi lainnya yang berjumlah cukup besar disamping Koperasi Pegawai Negeri diwilayah Kota Sungai Penuh. Koperasi Wanita ini beranggotakan kaum wanita yang memanfaatkan koperasi sebagai sarana penguatan ekonomi mereka, seperti kredit simpan pinjam, pengelolaan barang-barang industri rumah tangga dari hulu sampai hilir, dan sebagainya.

Pertumbuhan jumlah koperasi di Kota Sungai Penuh tak lepas dari intervensi pemerintahan, baik Kementrian Koperasi dan UKM maupun Dinas Koperasi di tingkat Daerah. Bentuk intervensi yang dilakukan diantaranya melalui: penyelenggaraan diklat perkoperasian bagi pengurus; pendampingan RAT; Bantuan modal bergulir; bantuan pemasaran; dan pendampingan usaha.

Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, perhatian pemerintah terhadap pembinaan koperasi tetap serius seperti tahun-tahun lalu, karena terbukti bahwa tanpa intervensi pemerintah koperasi dan UKM tidak akan mampu menjadi besar. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat inilah yang diperlukan untuk memperkuat ekonomi rakyat.

Usaha Kecil dan Menengah, Kondisi mikro ekonomi adalah hal-hal yang berkaitan dengan sektor usaha informal, Usaha Kecil Menengah, dan Koperasi. Ketiga sektor tersebut merupakan pilar ekonomi kerakyatan. Kebutuhan akan eksistensi sektor informal semakin tinggi, karena terbatasnya jumlah pekerjaan dalam sektor formal dibandingkan dengan jumlah perkembangan penduduk usia kerja di kota Sungai Penuh.

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Sungai Penuh menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini terlihat dari tumbuhnya unit UMKM dan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM. Pada tahun 2015 jumlah UMKM di Kota Sungai Penuh mencapai sebanyak 2.041 unit dengan tenaga kerja yang mampu terserap mencapai sebanyak 799 orang, jauh lebih banyak dari jumlah UMKM pada tahun 2011 yaitu sebanyak 932 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.574 orang. Dengan demikian rata-rata setiap unit usaha mempekerjakan 1-3 orang pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah memberikan kontribusi yang positif terhadap penurunan jumlah pengangguran di Kota Sungai Penuh, terutama terkait dengan penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal dan perekonomian daerah. Sebagian besar hasil produksi UMKM masih dipasarkan di Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Tabel.2.67
Perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|---|-------|-------|------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Jumlah Usaha Mikro Kecil | 932 | 821 | 375 | 603 | 2041 |
| 2 Jumlah tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (orang) | 799 | 2,920 | 763 | 3,574 | 3,574 |

Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2015

2.1.3.1.2.11. Penanaman Modal

Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penanaman modal di Kota Sungai Penuh difokuskan pada peningkatan iklim investasi dan promosi investasi. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Penanaman modal di Kota Sungai Penuh sampai tahun 2014 hanya meliputi investasi PMDN 1 Perusahaan yakni PT. Casia-coop yang bergerak dalam bidang usaha pengolahan Casiavera (Kulit Manis) dengan daya serap tenaga kerja 436 orang.

Nilai realisasi investasi PMDN terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2015 mencapai Rp. 53.70 Milyar dari capaian tahun 2011 sebesar Rp. 94.34 Milyar, hal ini berbanding lurus dengan rasio tenaga kerja yang mampu terserap dari adanya investasi PMDN ini sebesar 2.90 pada tahun 2011, menjadi 2.85 pada tahun 2015.

Penurunan investasi di Kota Sungai Penuh ini menunjukkan bahwa investasi di Kota Sungai Penuh perlu meningkatkan kinerjanya. Selain regulasi yang cukup mendukung, dalam rangka peningkatan realisasi investasi, di Kota Sungai Penuh juga telah mengembangkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, sehingga memudahkan para investor dalam mendapatkan pelayanan perizinan berinvestasi. Untuk perkembangan penanaman modal Kota Sungai Penuh dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.68
Hasil Kinerja penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal
Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | INDIKATOR | CAPAIAN | | | | |
|----|--|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Jumlah Inisiatif usaha : | | | | | |
| | a. PMA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | b. PMDN | 1.770 | 1.818 | 1.903 | 897 | 897 |
| 2 | Nilai Investasi : | | | | | |
| | a. PMA (Milyar) | N.a | N.a | N.a | N.a | N.a |
| | b. PMDN | 94.37 | 116.00 | 60.16 | 53.70 | 53.70 |
| 3 | Daya Serap Tenaga Kerja (Rasio) | 2,90 | 3,03 | 3,01 | 2,80 | 2,85 |
| 4 | Peningkatan/penurunan realisasi PMA, PMDN dan Non PMDN : | N.a | 22,91 | -48,13 | -10,74 | -31,85 |

Sumber: Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal Bappeda 2015

2.1.3.1.2.12. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim

tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah.

Sebagai salah satu pusat penyebaran ilmu pengetahuan, perpustakaan mempunyai peran dan tujuan yaitu sebagai wahana untuk mencerdaskan bangsa supaya tercapai masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas. Sejak tahun 2014, telah berdiri perpustakaan daerah di Kota Sungai Penuh sebanyak 1 unit, dengan jumlah pengunjung sebanyak 857 orang pada tahun 2015 serta buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 5.019 buah.

Tabel 2.69
Indikator Capaian Urusan Perpustakaan
di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|----|---|-------|------|------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Jumlah Perpustakaan milik non pemda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 0 | 0 | 0 | 528 | 857 |
| 4 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 5.019 |

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Sungai Penuh, 2016

2.1.3.1.2.13. Kearsipan

Menurut UU No. 43 Tahun 2009 menyatakan bahwa Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di buat dan diterima oleh lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan bertujuan untuk menyelamatkan, melestarikan dan memperbaiki sistem administrasi kearsipan dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan arsip daerah. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota dalam upaya melestarikan kearsipan adalah penataan dan pendataan sistem kearsipan daerah, Pengadaan sarana prasarana sistem penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan sistem kearsipan daerah serta pembinaan sistem kearsipan.

Penyelenggaraan Urusan Kearsipan di Kota Sungai Penuh dilaksanakan pada tahun 2015, dengan perangkat daerah Yang telah menerapkan arsip secara baku sebesar 5%.

Tabel 2.70
Indikator Capaian Urusan Kearsipan Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|----|---|-------|------|------|------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Jumlah perangkat daerah Yang telah menerapkan arsip secara baku (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% |
| 2 | Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM pengelola kearsipan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsp Sungai Penuh, 2016

2.1.3.1.2.14. Statistik

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Oleh karena itu ketersediaan data dan informasi statistik yang akurat merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi tujuan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya. Dalam pelaksanaan urusan statistik, program yang dilaksanakan adalah program pengembangan data/informasi/statistik daerah. Penyelenggaraan urusan statistik di Kota Sungai Penuh digambarkan oleh capaian indikator kinerja urusan statistik sebagai berikut:

Tabel 2.71
Indikator Capaian Urusan Statistik Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No | INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|----|---|-------|------|------|------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Ketersediaan Buku Sungai Penuh Dalam Angka (DDA) | ada | ada | ada | ada | ada |
| 2 | Ketersediaan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | ada | ada | ada | ada | ada |
| 3 | Ketersediaan Buku Indikator Ekonomi | ada | ada | ada | ada | ada |

Sumber :Bappeda Sungai Penuh, 2016

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

2.1.3.2.1. Kelautan Dan Perikanan

Pembangunan Kota Sungai Penuh dalam jangka panjang khususnya pada bidang perikanan dan peternakan memang sedang diarahkan pemanfaatan sumberdaya nya pada perikanan dan peternakan secara optimal dan rasional bagi kesejahteraan manusia tanpa merusak sumberdaya lingkungan yang ada.

Dalam rangka memenuhi pengembangan budidaya perikanan dan peternakan yang ada di Kota Sungai Penuh perlu ada upaya yang mampu meningkatkan hasil produksi perikanan dan peternakan tersebut, salah satunya dengan melakukan pengadaan sarana Budidaya perikanan dan melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok Tani Pembudidayaan perikanan. Selain itu untuk pengembangan peternakan perlu juga adanya kelengkapan sarana dan prasarana peternakan, promosi hasil produksi peternakan unggulan daerah serta pelayanan kesehatan ternak.

Produksi perikanan di Kota Sungai Penuh berfluktuasi dimana pada tahun 2010 produksinya mencapai 171.95 ton, menjadi 156 ton pada tahun 2015 dimana produksi perikanan terbesar berasal dari ikan lele yaitu sebesar 78.70 ton, kemudian disusul oleh ikan nila sebesar 70.89 ton dan yang paling kecil adalah produksi ikan semah sebanyak 6.41 ton, perkembangan Jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72
Produksi Perikanan Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2015 (ton)

| No | Jenis Ikan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|------------|--------|-------|------|------|--------|--------|
| 1 | Barau | N.a | 16,70 | 14,9 | 14,9 | - | N.a |
| 2 | Mas | 9,05 | N.a | N.a | N.a | N.a | N.a |
| 3 | Nila | 131,05 | 17,80 | 17,7 | 17,7 | 184,00 | 70.89 |
| 4 | Lele | 31,85 | 12,20 | 10,1 | 10,1 | 87,60 | 78.70 |
| 5 | Semah | N.a | N.a | N.a | N.a | N.a | 6.41 |
| Total | | 171,95 | 46,70 | 42,7 | 42,7 | 279,00 | 156.00 |

Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2010-2015.

2.1.3.2.2. Pariwisata

Kota Sungai Penuh yang merupakan salah satu kota tertua di Sumatera dan Kota terpadat di Provinsi Jambi setelah Kota Jambi serta pernah menjadi ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci Provinsi Sumatera Tengah sampai tahun 1958. Begitupun dalam Surat Keputusan Pemerintah (*Government Besluit*) nomor 13 tanggal 03 nopember 1909 lembaran negara nomor 523, Sungai Penuh ditunjuk sebagai ibu Kota Kabupaten Kerinci. kemudian dimekarkan menjadi kota otonom tahun 2008, dan Secara umum Kota Sungai Penuh dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Sungai Penuh dalam membangun Kota Sungai Penuh. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Sungai Penuh yang $\pm 59,2\%$ dari total luasnya merupakan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

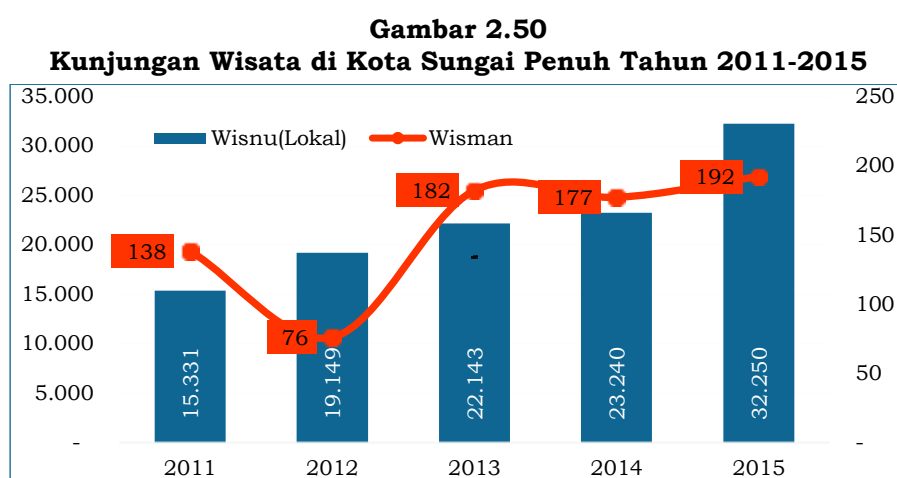
Destinasi pariwisata yang ditawarkan di Kota Sungai Penuh juga sangat beragam, diantaranya wisata religi, wisata alam, Selain wisata budaya, terdapat pula beberapa tempat dan event-event kebudayaan lain yang menarik untuk dinikmati. Dengan Kondisi topografi yang berbukit dapat memberi warna bagi pengembangan Kota Sungai Penuh ke depan, yaitu potensi pemandangan lansekap kota. Kawasan perbukitan di Kota Sungai Penuh memiliki potensi pandang ke arah perkotaan yang memiliki ketinggian yang lebih rendah. Keberadaan bukit-bukit tersebut dapat menjadi titik titik pengembangan yang memberikan nilai view yang terbaik di Kota Sungai Penuh. Lokasi-lokasi perbukitan yang dapat diidentifikasi diantaranya: 1). Kawasan bukit sentiong, Kawasan ini memiliki potensi city view dan pandangan ke arah pegunungan di hinterland kota dari lokasi-lokasi perbukitan; 2) Koridor sepanjang Sungai Jernih dan Renah Kayu Embun pariwisata Bukit Khayangan, Kawasan ini memiliki potensi pandangan ke arah pegunungan di hinterland kota dari lokasi-lokasi perbukitan; 3) Kawasan Pemerintahan Kantor Walikota. Kawasan ini memiliki potensi pandangan ke arah persawahan, pegunungan di hinterland kota, serta city view; dan 4) Kawasan Taman Bunga Talang Lindung. Kawasan ini memiliki pandangan ke arah persawahan, pegunungan di hinterland kota, serta city view. Selain itu, Kota Sungai Penuh merupakan salah satu pusat kehidupan prasejarah dan merupakan pusat kebudayaan melayu tua.

Sektor Pariwisata di Kota Sungai Penuh merupakan potensi yang masih sangat mungkin untuk dikembangkan baik berupa wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan karena kondisi geografisnya di daerah pegunungan yang memiliki panorama indah dan udaranya yang sejuk.

Dari total 125 objek wisata alam di Provinsi Jambi, 5 (lima) diantaranya terdapat di Kota Sungai Penuh. Sedangkan objek wisata buatan baru terdapat 1

(satu) objek dan wisata sejarah/buatan sebanyak 13 objek dari 83 objek wisata budaya/sejarah di Provinsi Jambi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak objek wisata budaya/sejarah yang menjadi bukti pusat sejarah/kebudayaan melayu atau peninggalan melayu kuno mengenai budaya sejarah.

Wisatawan yang berkunjung di Kota Sungai Penuh terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Dalam kurun waktu tahun 2011-2015 jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai obyek wisata di Kota Sungai Penuh menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011 jumlah wisatawan nusantara di Kota Sungai Penuh hanya sebanyak 15.331 orang, pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan nusantara mencapai sebanyak 32.250 orang. Demikian pula halnya kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan kenaikan dari sebanyak 138 orang pada tahun 2011 menjadi 192 orang pada tahun 2015.



Sumber : LKPJ AMJ 2016

Dilihat dari perkembangan jumlah yang berkunjung, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara mengalami perlambatan selama kurun waktu empat tahun (2011-2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai potensi pariwisata di Kota Sungai Penuh memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat menambah lama tinggal wisatawan sehingga dapat membelanjakan uangnya di Kota Sungai Penuh.

2.1.3.2.3. Pertanian

Pertanian hanya memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap perekonomian di Kota Sungai Penuh, yaitu hanya 6,60 % pada tahun 2015, menurun 0,30% dari tahun 2014. Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh perkembangan kota yang begitu pesat dan sejumlah kawasan mengalami banjir, sehingga kurang memungkinkan lagi untuk pengembangan pertanian. Selain itu, Sebagian besar penduduk kota sungai penuh yang sudah beralih ke sektor perdagangan, tapi kegiatan di sektor pertanian ini masih menjadi lapangan pekerjaan yang cukup berpengaruh di Kota Sungai Penuh. Dikarenakan Kota Sungai Penuh merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kerinci, maka tidak heran jika Kota Sungai Penuh masih banyak lahan pertanian yang produktif seperti lahan sawah dengan irigasi yang bagus. Oleh karena itu masih banyak penduduk yang bekerja pada Sector ini membuat produktivitas tanaman pertanian khususnya tanaman pangan terutama padi masih tinggi produksinya.

Produksi tanaman padi dalam kurun waktu tahun 2010-2015 menunjukkan angka yang fluktuatif, produksi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 59.09 (Kw/Ha) dengan tingkat produktivitas sebesar 5,75 ton/ha.

Tabel 2.73
Perkembangan Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2011-2015

| INDIKATOR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | 52.38 | 57.40 | 57.35 | 58.04 | 59.09 |
| Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB | 6.73 | 6.81 | 7.07 | 6.90 | 6.60 |
| Kontribusi Sub sektor pertanian, perburuan dan jasa Pertanian terhadap PDRB | 6.73 | 6.81 | 7.07 | 6.84 | 6.54 |
| a. Kontribusi Sub sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB | 4.29 | 4.41 | 4.59 | 4.52 | 4.31 |
| b. Kontribusi sektor Tanaman Holtikultura semusim terhadap PDRB | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.42 |
| c. Kontribusi Sub sektor perkebunan semusim terhadap PDRB | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| d. Kontribusi Sub sektor Holtikultura Tahunan dan lainnya terhadap PDRB | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| e. Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Tahunan terhadap PDRB | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| f. Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB | 1.23 | 1.18 | 1.14 | 1.04 | 0.98 |
| g. Kontribusi Sub Sektor jasa pertanian dan perburuan terhadap PDRB | 1.18 | 1.14 | 1.17 | 0.41 | 0.39 |
| Kontribusi Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Cakupan bina kelompok petani | 3.00 | 14.00 | 12.00 | 0.00 | |

Sumber: PDRB Kota Sungai Penuh, BPS 2015

Untuk luas tanam dan luas panen tanaman bahan makanan di Kota Sungai Penuh tahun 2015 sebesar 89.918 Ha (tanam) dengan luas panen 8.229 Ha. Dimana Rata-rata produksi tanaman pangan di Kota Sungai Penuh pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Padi Sawah : 5,91 Ton/Ha ; Jagung : 3,75 Ton/Ha; Ubi Kayu : 19,28 Ton/Ha; Ubi Jalar : 22,60 Ton/Ha; Kacang Tanah : 1,22 Ton/Ha.

Tabel 2.74
Produktivitas Tanaman Pangan di Kota Sungai Penuh Tahun 2009-2015

| JENIS TANAMAN/INDIKATOR | TAHUN | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Padi Sawah | | | | | | | |
| - Sisa Tanam Akhir Tahun Lalu (Ha) | 1.527 | 2.330 | 2.330 | 7.650 | 2.330 | 2.981 | 2.206 |
| - Luas Tanam (Ha) | 6.430 | 7.274 | 7.650 | 8.527 | 7.650 | 8.758 | 10.553 |
| - Luas Panen (Ha) | 5.918 | 6.650 | 8.141 | 7.438 | 8.141 | 8.080 | 9.863 |
| - Produksi | 30.468 | 35.154 | 43.289 | 42.990 | 43.289 | 46.891 | 58.280 |
| - Rata-rata Produksi | 5,15 | 5,29 | 5,32 | 5,75 | 5,23 | 5,804 | 5,91 |
| Padi Ladang | - | - | - | - | - | - | - |
| Jagung | | | | | | | |
| - Sisa Tanam Akhir Tahun Lalu (Ha) | 9 | 14 | 74 | 116 | 74 | 21 | 24 |
| - Luas Tanam (Ha) | 22 | 96 | 116 | 61 | 116 | 84 | 110 |
| - Luas Panen (Ha) | 27 | 75 | 57 | 60 | 57 | 69 | 73 |
| - Produksi | 97 | 265 | 217 | 226 | 217 | 258.80 | 274 |
| - Rata-rata Produksi | 3,59 | 3,53 | 3,81 | 3,77 | 3,81 | 3,752 | 3,75 |
| Ubi Kayu | | | | | | | |
| - Sisa Tanam Akhir Tahun Lalu (Ha) | 16 | 18 | 6 | 66 | 6 | 18 | 16 |
| - Luas Tanam (Ha) | 30 | 43 | 66 | 62 | 66 | 46 | 50 |
| - Luas Panen (Ha) | 36 | 28 | 66 | 59 | 60 | 46 | 54 |
| - Produksi | 1.142 | 734 | 1.184 | 1168 | 1188 | 882.90 | 1.041 |
| - Rata-rata Produksi | 31,72 | 26,21 | 17,94 | 19,8 | 20,14 | 19,15 | 19,28 |
| Ubi Jalar | | | | | | | |
| - Sisa Tanam Akhir Tahun Lalu (Ha) | 6 | 8 | 11 | 12 | 11 | 6 | 10 |
| - Luas Tanam (Ha) | 13 | 11 | 17 | 21 | 17 | 26 | 24 |
| - Luas Panen (Ha) | 16 | 5 | 7 | 27 | 7 | 26 | 25 |
| - Produksi | 475 | 26 | 179 | 691 | 179 | 582 | 565 |
| - Rata-rata Produksi | 29,69 | 5,20 | 25,57 | 25,59 | 25,57 | 22,43 | 22,60 |
| Kacang Tanah | | | | | | | |
| - Sisa Tanam Akhir Tahun Lalu (Ha) | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| - Luas Tanam (Ha) | 12 | 17 | 9 | 10 | 9 | 4 | 8 |
| - Luas Panen (Ha) | 15 | 17 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| - Produksi | 53 | 60 | 7 | 23 | 7 | 10 | 11 |
| - Rata-rata Produksi | 3,53 | 3,53 | 1,17 | 3,29 | 1,24 | 1,231 | 1,22 |

Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka, Tahun 2009-2015.

Untuk sub sektor perkebunan, Produksi hasil perkebunan dari tahun ke tahun berfluktuatif pada beberapa tanaman, seperti cassiavera, kopi, dan cengkeh. Pada tanaman kemiri dan tebu dari 2011 s/d 2015 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan jumlah produksi. Peningkatan dan penurunan produksi dijelaskan pada grafik berikut :

Tabel 2.75
Produksi Tanaman Perkebunan di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| TAHUN | KOMODITI | | | | | | |
|-------|------------|------|---------|--------|------|--------|-------|
| | CASSIAVERA | KOPI | CENGKEH | KEMIRI | TEBU | PINANG | KAKAO |
| 2011 | 234 | 154 | 2 | 33 | 4 | 23 | 0 |
| 2012 | 394 | 85 | 4 | 33 | 4 | 23 | 2 |
| 2013 | 225 | 98 | 6 | 33 | 4 | 23 | 3 |
| 2014 | 225 | 98 | 6 | 33 | 4 | 23 | 3 |
| 2015 | 225 | 180 | 6 | 34 | 6 | 37 | 27 |

Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka, Tahun 201-2015.

Sedangkan pada sub sektor Peternakan di Kota Sungai Penuh periode 2011-2015 rata rata hanya memberikan kontribusi sebesar 1,16% terhadap PDRB. Berbagai macam jenis ternak yang dikembangkan oleh masyarakat mengalami pertumbuhan positif antara lain sapi, kerbau, kambing, domba. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kota Sungai Penuh sebanyak 1 buah. Perkembangan peternakan di Kota Sungai Penuh, adalah sebagai berikut : jumlah produksi hasil ternak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76
Perkembangan Populasi Hewan Ternak di Kota Sungai Penuh Tahun 2009-2015

| Jenis Ternak | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Sapi | 3.325 | 4.601 | 4.359 | 3.965 | 4.172 | 3.228 | 3.644 |
| Kerbau | 667 | 1.457 | 1.164 | 894 | 630 | 323 | 360 |
| Kuda | 57 | 62 | 60 | 78 | 78 | 72 | 76 |
| Kambing | 4.230 | 5.551 | 4.082 | 5.323 | 6.074 | 4.770 | 15.437 |
| Domba | 808 | 13.681 | 11.676 | 1.619 | 1.856 | 1.377 | 5.766 |

Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka, Tahun 201-2015.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa populasi hewan ternak yang paling banyak pada tahun 2015 yaitu jenis Kambing yang mencapai 15.437 ekor dan yang paling sedikit jumlah ternak yang ada di Kota Sungai Penuh adalah Kuda yaitu hanya 76 ekor.

2.1.3.2.4. Kehutanan

Kota Sungai Penuh memiliki luas 39.150 Ha yang terdiri dari lahan non sawah, persawahan dan hutan. Penggunaan lahan terbesar yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan hutan lindung seluas 23.177,60 Ha (59,20%) dan lahan budidaya seluas 15.967 Ha (40,80%). Pada tahun 2010 luas TNKS dan Luas Budidaya di Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.77
Luas TNKS dan Luas Budidaya di Kota Sungai Penuh

| No | KECAMATAN | LUAS WILAYAH | | LUAS TNKS | | LUAS BUDIDAYA | |
|----|-----------------|--------------|-------|-----------|-------|---------------|-------|
| | | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| 1. | Tanah Kampung | 1.100 | 2,81 | - | - | 1.100 | 6,89 |
| 2. | Sungai Penuh | 20.525 | 52,43 | 12.260,60 | 52,90 | 8.264,40 | 51,67 |
| 3. | Hampanan Rawang | 1.215 | 3,10 | - | - | 1.215 | 7,61 |
| 4. | Pesisir Bukit | 2.110 | 5,39 | 83,20 | 0,36 | 2.026,80 | 12,69 |
| 5. | Kumun Debai | 14.200 | 36,27 | 10.833,80 | 46,74 | 3.361,20 | 21,05 |

Sumber : BPS Kota Sungai Penuh. 2015

Pada tahun 2012 Kota Sungai Penuh membentuk 3 kecamatan baru yaitu Kecamatan Pondok Tinggi hasil pemekaran Kecamatan Sungai Penuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Koto Baru hasil pemekaran dari Kecamatan Pesisir Bukit berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Sungai Bungkal hasil pemekaran Kecamatan Sungai Penuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Bungkal. Pada tahun 2012 berdasarkan data BPS Kabupaten Kerinci luas wilayah, luas TNKS dan luas budidaya mengalami perubahan luas wilayah dan budidaya perkecamatan dan letak TNKS di kecamatan. Berikut data luas wilayah dan luas budidaya serta letak TNKS perkecamatan di Kota Sungai Penuh :

Tabel 2.78
Luas TNKS dan Luas Budidaya di Kota Sungai Penuh Tahun 2016

| No | KECAMATAN | LUAS WILAYAH | | LUAS TNKS | | LUAS BUDIDAYA | |
|----|-----------------|--------------|-------|-----------|-------|---------------|-------|
| | | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| 1. | Tanah Kampung | 1.100 | 2,81 | - | - | 1.100 | 6,89 |
| 2. | Sungai Penuh | 335 | 0,86 | - | - | 335 | 2,10 |
| 3. | Hamparan Rawang | 1.215 | 3,10 | - | - | 1.215 | 7,61 |
| 4. | Pesisir Bukit | 1.946 | 4,97 | 379 | 1,64 | 1.567 | 9,81 |
| 5. | Kumun Debai | 14.200 | 36,27 | 11.032 | 47,60 | 3.168 | 19,83 |
| 6. | Pondok Tinggi | 9.095 | 23,23 | 4.600 | 19,85 | 4.495 | 28,14 |
| 7. | Sungai Bungkal | 11.095 | 0,42 | 7.167 | 30,92 | 3.928 | 24,59 |
| 8. | Koto Baru | 164 | 28,34 | - | - | 164 | 1,03 |

Sumber : BPS Kota Sungai Penuh. 2016

Dilihat dari tabel diatas, setelah pemekaran 3 kecamatan tersebut banyak terjadi perubahan luas wilayah, luas budidaya dan letak TNKS.

2.1.3.2.5. Energi Dan Sumberdaya Mineral

Kota Sungai Penuh memiliki sektor pertambangan yang sangat potensial untuk dikembangkan meliputi material, Emas, Kaoli, Granit, Basalt, batu bata dan sirtu. Potensi pertambangan yang terkandung di Kota Sungai Penuh hanya sebagian yang diketahui secara pasti potensinya, sehingga kandungan kekayaan alam tersebut masih diteliti oleh Pemerintah Daerah. Jenis potensi sumber daya alam tersebut berupa potensi bahan Emas, Kaoli, dan Granit.

Dalam hal kelistrikan, seluruh kecamatan telah dialiri listrik, baik itu melalui layanan PLN maupun dan PLTMH yang dibangun oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik di daerah terpencil.

2.1.3.2.6. Perdagangan

Perekonomian Kota Sungai Penuh banyak didorong dan didukung oleh sektor perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor). Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya sumbangan dari sub sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sungai Penuh. Sumbangan sub sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun ke tahun selalu menunjukkan tren yang meningkat, baik dari sisi nominalnya maupun dari sisi persentasenya. Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas 23 persen. Pada tahun 2014, kontribusi kategori ini sebesar 26.89 persen, dengan sebesar 26.24 persen (97,29 persen terhadap kategori) disumbangkan oleh Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.

Sedangkan sebesar 0.65 persen (2,71 persen terhadap kategori) disumbangkan oleh subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.

Tabel, 2.79
Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2010-2015

| No | INDIKATOR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** | RATA2 KONTRIBUSI |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------|
| 1 | Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 23.52 | 24.59 | 24.83 | 24.11 | 26.07 | 26.89 | 25.00 |
| 2 | Kontribusi Sub sektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.68 |
| 3 | Kontribusi Sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor | 22.83 | 23.90 | 24.17 | 23.41 | 25.40 | 26.24 | 24.33 |

Sumber: PDRB Kota Sungai Penuh, BPS 2015

Kemajuan sektor perdagangan sebagai salah satu penggerak utama roda perekonomian di Kota Sungai Penuh, didukung oleh 40 unit kelompok pertokoan yang terdiri 3.206 warung/toko, 4 unit pasar umum, 1 unit pasar hewan, dan 25 unit Swalayan, 4 unit pasar umum (3 pasar tradisional dan 1 pasar modern) serta 25 unit swalayan. Sehingga pantaslah sektor ini mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Pasar umum di Kota Sungai Penuh saat ini terdiri dari:

1. Pasar Beringin Jaya I terdiri atas 28 kios, 37 los pemetakan, pada umum merupakan pusat perdagangan grosiran disamping perdagangan lainnya.
2. Pasar Tanjung Bajure; terdiri atas 7 kios, pasar ini merupakan tempat penjualan berbagai komoditi sembako dan barang lainnya.
3. Kincai Plaza; merupakan pusat pemasaran dan distribusi barang dan jasa, kawasan ini yang didukung oleh 422 kios.
4. Pasar Pond; merupakan pusat perdagangan bahan bahan kebutuhan harian yang didukung oleh lebih kurang 700 pedagang.
5. Plaza Artoz merupakan pusat pemasaran dan distribusi barang dan jasa.
6. Plaza Arafah; merupakan pusat pemasaran dan distribusi barang dan jasa.

Potensi perdagangan di Kota Sungai Penuh di prioritaskan pada pengembangan pasar tradisional menjadi pasar modern. Potensi pasar di kota Sungai Penuh yang dapat dikembangkan yaitu : pasar pons, kios pasar tanjung bajure, pasar beringin jaya II, pasar mambo/ramadhan, kios kincai plaza, pelantaran lantai dasar kincai plaza dan pasar malam/MKS. Namun kurangnya promosi potensi yang dimiliki dan tidak adanya peraturan tegas yang dilaksanakan terhadap PKL nakal dan pedagang musiman yang membuat kesemberautan pengelolaan pedagang yang ada, sehingga membuat perkembangan pasar yang ada di kota Sungai Penuh berjalan di tempat.

2.1.3.2.7. Perindustrian

Kategori Industri berdasarkan data dari statistik, merupakan industry Pengolahan yang meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri

pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Seiring peningkatan jumlah industri kecil di Kota Sungai Penuh, terjadi pula peningkatan penyerapan tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi dari industri kecil tersebut. Tenaga kerja yang berhasil diserap oleh industri kecil pada periode tahun 2010-2015 terus meningkat, yaitu dari 799 tenaga kerja pada tahun 2010 meningkat menjadi 7714 orang tenaga kerja pada tahun 2015. Demikian pula nilai investasi dan nilai produksi. Pengembangan industri kecil ini harus terus dilakukan mengingat industri kecil umumnya padat karya sehingga merupakan salah satu solusi pengurangan angka pengangguran serta terbukti lebih mampu bertahan terhadap krisis ekonomi dibandingkan dengan industri besar. Jumlah usaha industri kecil dan menengah pada tahun 2015 adalah sebesar 2.041 usaha yang di dominasi oleh cabang industri sandang yaitu 38,22 persen. Penyerapan tenaga kerja terbesar terdapat di industri pangan sebesar 634 orang dengan produksi sebesar Rp. 289.848.241.000.

Tabel 2.80

Jumlah Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Tenaga Kerja Tahun 2010-2015

| No | INDIKATOR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|-----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah Unit Usaha | 110 | 932 | 821 | 603 | 603 | 2,041 |
| 2 | Tenaga kerja (org) | 799 | 2,920 | 763 | 3,574 | 3,574 | 7,714 |
| 3 | Nilai Investasi (Rp. 000,-) | 2,457 | 12,949 | 1,136 | 7,748 | 7,748 | 21,498 |
| 4 | Nilai Produksi (Rp. 000,-) | 2,224 | 7,049 | | 429,359 | 429,359 | 699,260 |
| 5 | Nilai Bahan Baku | 86,728 | 9,738 | 2,220 | 278,665 | 278,665 | 412,933 |
| 6 | Nilai Tambah (Rp. 000,-) | (84,503) | (2,689) | (2,220) | 150,694 | 150,694 | 286,327 |

Sumber: Sungai Penuh Dalam Angka 2016

Jumlah unit usaha mikro kecil dan menengah dan penyerapan tenaga kerja perkecamatan pada tahun 2015, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.81

Jumlah Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Tenaga Kerja Menurut Kecamatan Tahun 2015

| No | KECAMATAN | UNIT USAHA | | | TENAGA KERJA | TOTAL UNIT USAHA |
|----|-----------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------------|
| | | MICRO | KECIL | MENENGAH | | |
| 1 | Tanah Kampung | 568 | 42 | 0 | 1093 | 1703 |
| 2 | Kumun Debai | 560 | 49 | 1 | 1160 | 1770 |
| 3 | Sungai Penuh | 929 | 606 | 103 | 3214 | 4852 |
| 4 | Hamparan Rawang | 1170 | 7 | 1 | 1416 | 2594 |
| 5 | Pesisir Bukit | 557 | 57 | 1 | 834 | 1449 |
| 6 | Sungai Bungkal | 571 | 71 | 10 | 1068 | 1720 |
| 7 | Pondok Tinggi | 918 | 251 | 38 | 1945 | 3152 |
| 8 | Koto Baru | 1503 | 5 | 0 | 1544 | 3052 |
| | Total | 6776 | 1088 | 154 | 12274 | 20292 |

Sumber: Sungai Penuh Dalam Angka 2016

Sektor perindustrian (Industri Pengolahan) dalam komposisi perekonomian di Kota Sungai Penuh adalah merupakan sector penyumbang terkecil. Pada tahun 2015 sektor perindustrian memberikan kontribusi sebesar 0,67% dari total PDRB dengan kontribusi rata-rata periode 2010-2015 sebesar 0,71%.

Sedangkan jika dilihat dari total PDRB sektor industri pengolahan, sebagian besar masih didominasi kontribusi dari industri makanan, minuman. Selanjutnya yaitu sub sektor industri galian bukan logam.

Tabel 2.82
Perkembangan Distribusi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2010-2015

| No | INDIKATOR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | RATA2 KONTRIBUSI |
|----|---|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1 | INDUSRI PENGOLAHAN | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.71 |
| 1 | Industri Batubara dan Pengilangan Migas | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Industri Makanan dan Minuman | - | 0.57 | 0.6 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.46 |
| 3 | Pengolahan Tembakau | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 5 | Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 7 | Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 8 | Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 10 | Industri Barang Galian bukan Logam | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 11 | Industri Logam Dasar | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 13 | Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 14 | Industri Alat Angkutan | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Industri Furnitur | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 16 | Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 16 | Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Industri | - | - | - | - | - | - | - |

Sumber: PDRB Kota Sungai Penuh, BPS 2015

Pengembangan dan pembangunan industri di Kota Sungai Penuh diarahkan pada peningkatan aktivitas industri kecil dan menengah yang diharapkan bisa berkembang dan bersaing dengan industri menengah keatas. Secara umum belum ada industri yang termasuk kedalam kelompok industri besar, rata-rata industri yang ada di kota Sungai Penuh yaitu industri kecil dan menengah. Dalam pengelolaan industri sangat di perlukan teknologi yang mampu menunjang kinerja pengawasan industri.

2.1.3.3. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah meliputi fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan, Penelitian dan Pengembangan; serta Fungsi Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.3.1. Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2014 maka Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh wajib menyusun dokumen perencanaan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Capaian kinerja urusan wajib perencanaan pembangunan di Kota Sungai Penuh mengacu pada 4 (empat) indikator kinerja kunci, antara lain: 1) tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025; 2) tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD tahun 2011-2016; 3) tersedianya Dokumen

Perencanaan RKPD tiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan 4) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD untuk mengetahui tingkat capaian kinerja per tahun.

Secara lengkap hasil kinerja urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2011-2016 dapat disajikan berikut ini.

Tabel 2.83
Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| Indikator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perwal | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD | tad | tad | tad | tad | tad | tad |

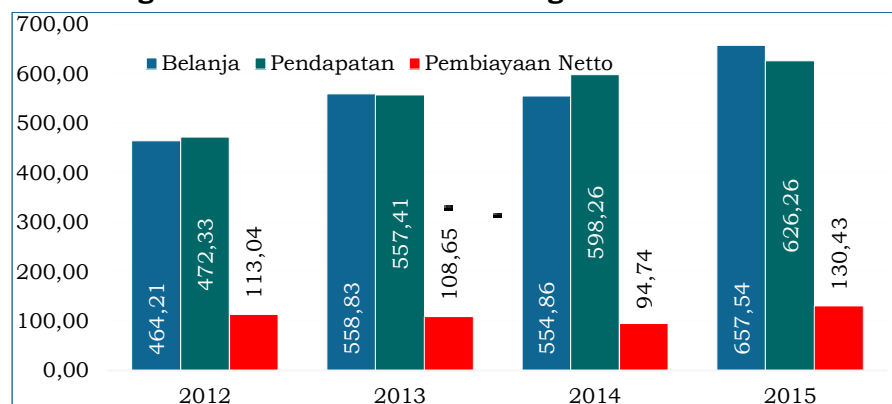
Sumber : Bappeda Kota Sungai Penuh 2016
Keterangan : tad (tidak ada data)

2.1.3.3.2. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Perkembangan APBD Kota Sungai Penuh untuk kurun waktu Tahun 2012-2015 menunjukkan pertumbuhan yang relatif baik. Hal tersebut seiring dengan perkembangan kebutuhan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 2.51
Perkembangan Struktur APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2012-2016



Sumber : DPPKD Kota Sungai Penuh 2016

Struktur APBD Kota Sungai Penuh yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan, masing-masing menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Pendapatan daerah tumbuh rata-rata 7.31% setiap tahunnya, belanja tumbuh rata-rata 9.09% sedangkan pembiayaan netto mengalami

fluktuasi setiap tahunnya namun rata-rata tumbuh 3.64%, sehingga masih dapat menutup defisit anggaran setiap tahunnya.

Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terlihat dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh telah memperoleh opini WTP Empat kali dalam kurun waktu Tahun 2010-2016. Kondisi ini hendaknya dapat terus dipertahankan di masa yang akan datang. Perkembangan Kinerja Urusan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84
Kinerja Urusan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2016

| NO | INDIKATOR | CAPAIAN TAHUN | | | | | | |
|----|---|---------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Belanja Langsung terhadap total APBD | - | 62.50 | 56.31 | 60.41 | 56.62 | 55.30 | 71,31 |
| 2 | Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD | 2.26 | 3.17 | 4.17 | 4.35 | 5.55 | 4.91 | 4,83 |
| 3 | Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya | 78.06 | 41.46 | 30.50 | 23.10 | 25.19 | N.a | N.a |
| 4 | Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja | 84.19 | 79.72 | 82.91 | 86.31 | 83.80 | 87.30 | 90,35 |
| 5 | Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD | 157.90 | 119.76 | 98.40 | 101.18 | 103.11 | 114.04 | 96,76 |
| 6 | Peningkatan PAD | N.a | N.a | 37.26 | 23.14 | 36.81 | 2.14 | -6,14 |
| 7 | Opini BPK terhadap LapKeu Daerah | WDP | WDP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| 8 | Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti | N.a | N.a | N.a | N.a | N.a | N.a | N.a |
| 9 | Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah | 32.13 | 35.64 | 31.56 | 34.53 | 28.94 | 27.06 | 27.00 |
| 10 | Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah | - | 42.67 | 43.69 | 39.59 | 18.82 | 37.69 | 28,68 |

Sumber : DPPKAD Kota Sungai Penuh 2016

2.1.3.3.3. Penelitian dan Pengembangan

Tujuan yang akan dicapai Pemerintah dalam fungsinya sebagai fungsi Penelitian dan Pengembangan yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring/*network* dengan *stakeholder* lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah.

Sampai dengan Tahun 2015, di Kota Sungai Penuh setidaknya telah dikembangkan satu komoditas untuk mendukung penguatan SIDA di Kota Sungai Penuh. Komoditas tersebut adalah Sirsak yang dikembangkan melalui kerjasama Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Provinsi Jambi, BPTP Jambi dan Departemen Pertanian Indonesia.

2.1.3.3.4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan kepegawaian diarahkan dengan meningkatkan pengembangan kapasitas aparatur dengan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, peningkatan kedisiplinan dan penempatan sesuai dengan kompetensi. Pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan menjadi daya ungkit (*leverage*) yang kuat dalam mewujudkan kinerja PNS yang kompeten dan professional.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Sungai Penuh dilayani oleh Aparatur Sipil Negara sebanyak 3.448 orang pada Tahun 2015, terdiri dari ASN yang tingkat pendidikan SD sebanyak 3, berpendidikan SMP sebanyak 22, berpendidikan SMA sebanyak 493, berpendidikan D.I dan D.II sebanyak 250, berpendidikan D.III sebanyak 395, berpendidikan D I/S1/S2/S3 sebanyak 2.334. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas PNS dilihat dari tingkat pendidikannya cukup baik. Dengan tingkat pendidikan yang cukup diharapkan PNS akan dapat melayani masyarakat dengan baik. Perkembangan jumlah PNS dari Tahun 2011-2015 berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan kepangkatan secara rinci terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85
Perkembangan Jumlah PNS, menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan Kepangkatan Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No. | JUMLAH PNS | TAHUN | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Jumlah PNS Daerah menurut tingkat pendidikan | 2.817 | 4.755 | 2.112 | 3.103 | 3.486 |
| | • SD | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| | • SMP | 31 | 10 | 473 | 12 | 11 |
| | • SMA | 486 | 570 | 388 | 450 | 493 |
| | • D.I dan D.II | 812 | 116 | 107 | 238 | 250 |
| | • D III | | | | 324 | 395 |
| | • Tingkat Sarjan/Doktor/Ph.d | 1.414 | 4.001 | 2.579 | 1.957 | 2334 |
| | • S2/S3 | 66 | 58 | N.a | 118 | N.a |
| 2. | Jumlah PNS Daerah menurut golongan | N.a | 4.755 | 2.112 | 3.103 | N.a |
| | • Golongan I | N.a | 8 | 6 | 3 | N.a |
| | • Golongan II | N.a | 487 | 469 | 504 | N.a |
| | • Golongan III | N.a | 1.296 | 1.400 | 1.442 | N.a |
| | • Golongan IV | N.a | 1.266 | 1.237 | 1.154 | N.a |

Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2012-2016 BPS.(diolah).

Jumlah pegawai cenderung mengalami fluktuatif disebabkan mulai pada tahun 2011 banyak ASN yang pindah dan datang di Kota Sungai Penuh.

Dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik masih ditemukan beberapa kendala diantaranya kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap pelayanan masyarakat, Belum optimalnya penerapan SOP pelayanan, Belum meratanya persebaran pegawai di setiap Perangkat Daerah dari segi jumlah maupun kualitas, Belum maksimalnya integrasi antara sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai, Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional, Disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan, Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu ditingkatkan, Masih belum mencukupinya jumlah pegawai dan kompetensi pegawai, Tingkat pemahaman hukum masyarakat dan aparatur masih perlu ditingkatkan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolak ukur, sebagai berikut:

2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk salah satunya dengan pengamatan besarnya tingkat pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka porsi pengeluaran makanan akan bergeser ke pengeluaran bukan makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut golongan Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015 berdasarkan data statistik menunjukkan rata-rata perkapita sebulan paling banyak pada golongan Rp. 500.000-749.999, mencapai 28.50 persen.

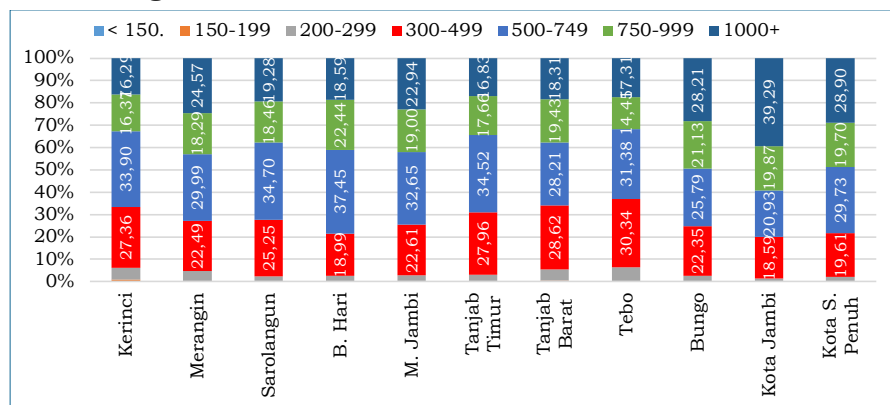
Tabel 2.86
Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan menurut Golongan (%)
di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| No. | KELOMPOK PENGELUARAN | PERSENTASE PENDUDUK | | | | | RATA2 |
|-----|----------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | < 150.000 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2 | 150.000-199.999 | 0.65 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 3 | 200.000-299.999 | 12.76 | 10.60 | 3.23 | 3.15 | 2.56 | 6.46 |
| 4 | 300.000-499.999 | 33.76 | 33.71 | 24.43 | 20.96 | 23.36 | 27.24 |
| 5 | 500.000-749.999 | 28.98 | 23.57 | 33.69 | 26.33 | 29.95 | 28.50 |
| 6 | 750.000-999.999 | 11.83 | 15.23 | 16.84 | 16.52 | 17.84 | 15.65 |
| 7 | 1.000.000+ | 12.02 | 15.91 | 21.82 | 33.04 | 26.29 | 21.82 |

Sumber : Jambi dalam Angka 2011-2015.

Pada Tahun 2013-2015 telah terjadi pergeseran pola distribusi menurut kelompok pengeluaran penduduk Kota Sungai Penuh ke arah pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan kondisi Tahun 2011 dan 2012. Pergeseran pola distribusi pengeluaran penduduk Kota Sungai Penuh mengeluarkan konsumsi per kapita sebesar lebih dari Rp. 200.000,- pada tahun 2011-2012 sekitar 99.02 persen menjadi 100 persen pada Tahun 2013-2015. Hal tersebut, mengindikasikan bahwa pada tahun 2013 terjadi peningkatan kemampuan daya beli masyarakat di Kota Sungai Penuh. Bila dibanding dengan Kab/Kota di Provinsi Jambi, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kota Sungai Penuh masih di bawah rata-rata Kota Jambi yang mencapai Rp 749.999,00 per kapita sebulan.

Gambar 2.52
Pengeluaran Rata-Rata perkapita Sebulan menurut Golongan (%)
di Kota Sungai Penuh Kab/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2011-2015



Sumber : Jambi dalam Angka 2011-2015

2.1.4.1.2. Produktivitas Total Daerah

Secara data kependudukan Kota Sungai Penuh, Mata pencaharian Masyarakat Kota Sungai Penuh di Sektor jasa kemasyarakatan (29.23%) menjadi lapangan kerja terbesar tahun kurun waktu 2010-2015, dibandingkan sektor Perdagangan (25.90%) dan pertanian sebesar (23.81%). Namun Potensi sektor Pertanian masih bisa dikembangkan karena Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah penduduk perdesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan melalui peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta membawa tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih sejahtera, tetapi pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Untuk itu kemampuan ekonomi dapat dilihat dari produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Kota Sungai Penuh. Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Dari ke-17 sektor/lapangan usaha, yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sungai Penuh adalah sektor/lapangan usaha sektor/lapangan usaha perdagangan besar dan eceran disusul kemudian oleh sektor/lapangan usaha informasi dan komunikasi. Sektor/lapangan usaha yang kontribusinya paling kecil adalah sektor/lapangan usaha listrik dan gas.

Tabel. 2.87
Produktivitas Total Daerah Kota Sungai Penuh

| No | SEKTOR | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | RATA2 |
|----|---|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | |
| 1 | Pertanian | 184,543.7 | 6.66 | 195,453.6 | 6.59 | 206,330.8 | 6.41 | 215,695.5 | 6.24 | 218,705.5 | 5.90 | 6.36 |
| 2 | Pertambangan & Penggalian | 24,806.5 | 0.90 | 26,538.8 | 0.89 | 28,177.2 | 0.88 | 29,856.6 | 0.86 | 31,581.5 | 0.85 | 0.88 |
| 3 | Industri Pengolahan | 20,799.5 | 0.75 | 22,946.5 | 0.77 | 23,462.2 | 0.73 | 24,931.8 | 0.72 | 26,172.1 | 0.71 | 0.74 |
| 4 | Listrik & Gas | 664.0 | 0.02 | 729.3 | 0.02 | 777.7 | 0.02 | 841.4 | 0.02 | 889.8 | 0.02 | 0.02 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah | 12,378.1 | 0.45 | 12,516.9 | 0.42 | 12,681.6 | 0.39 | 12,991.0 | 0.38 | 13,411.9 | 0.36 | 0.40 |
| 6 | Konstruksi | 336,119.3 | 12.13 | 390,564.5 | 13.16 | 464,421.5 | 14.43 | 479,401.2 | 13.87 | 496,633.5 | 13.40 | 13.40 |
| 7 | Perdagangan Besar & Eceran | 659,591.7 | 23.80 | 708,097.7 | 23.86 | 769,317.9 | 23.90 | 858,382.7 | 24.84 | 949,866.3 | 25.64 | 24.41 |
| 8 | Transportasi & Pergudangan | 105,794.0 | 3.82 | 114,390.8 | 3.85 | 121,221.1 | 3.77 | 128,611.0 | 3.72 | 136,724.0 | 3.69 | 3.77 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum | 30,156.3 | 1.09 | 31,428.5 | 1.06 | 33,501.6 | 1.04 | 39,169.6 | 1.13 | 42,797.9 | 1.16 | 1.10 |
| 10 | Informasi & komunikasi | 398,652.2 | 14.39 | 407,451.3 | 13.73 | 437,331.8 | 13.59 | 491,349.2 | 14.22 | 538,308.3 | 14.53 | 14.09 |
| 11 | Jasa Keu. & asuransi | 134,113.1 | 4.84 | 153,690.5 | 5.18 | 178,521.9 | 5.55 | 183,854.4 | 5.32 | 185,775.0 | 5.01 | 5.18 |
| 12 | Real Estate | 94,204.6 | 3.40 | 96,201.6 | 3.24 | 99,122.8 | 3.08 | 101,355.8 | 2.93 | 104,064.5 | 2.81 | 3.09 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 185,378.0 | 6.69 | 192,192.1 | 6.48 | 197,818.1 | 6.15 | 205,187.4 | 5.94 | 212,933.4 | 5.75 | 6.20 |
| 14 | Adm. Pemerintahan, Pertahanan | 164,743.0 | 5.95 | 172,479.6 | 5.81 | 181,722.6 | 5.65 | 203,801.0 | 5.90 | 218,938.1 | 5.91 | 5.84 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 277,155.1 | 10.00 | 295,248.7 | 9.95 | 308,093.7 | 9.57 | 308,093.7 | 8.92 | 342,387.5 | 9.24 | 9.54 |
| 16 | Jasa Kesehatan & kegiatan Sosial | 69,545.2 | 2.51 | 71,693.5 | 2.42 | 76,621.9 | 2.38 | 88,945.4 | 2.57 | 97,388.5 | 2.63 | 2.50 |
| 17 | Jasa Lain | 72,265.6 | 2.61 | 75,747.9 | 2.55 | 79,119.1 | 2.46 | 83,254.7 | 2.41 | 88,705.3 | 2.39 | 2.48 |
| | PDRB | 2,770,909 | 100.0 | 2,967,371 | 100.0 | 3,218,243 | 100.0 | 3,455,722 | 100.0 | 3,705,283 | 100.0 | 100.0 |

Sumber: PDRB Sungai Penuh 2011-2015, BPS Kota Sungai Penuh

2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari: aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan.

2.1.4.2.1. Aksesibilitas Daerah

Aksesibilitas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang sangat dominan di Kota Sungai Penuh adalah sarana dan prasarana transportasi darat. Hal ini dikarenakan kondisi geografis dari Kota Sungai Penuh yang tidak memiliki pantai serta sungai yang besar, serta kontur tanah yang berbukit-bukit.

Untuk pergerakan internal di wilayah Kota Sungai Penuh dilayani oleh transportasi jalan dan jembatan. Transportasi jalan dan jembatan ini memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang mobilitas orang dan barang, terutama dilihat dari kapasitas angkutnya dibandingkan dengan transportasi lainnya.

Jembatan yang ada di Kota Sungai Penuh tersebar pada masing-masing kecamatan sebanyak 82 buah jembatan, sebagian besar jembatan-jembatan ini sudah berupa konstruksi beton, kondisi jembatan pada umumnya dalam keadaan baik dan beberapa dalam kondisi rusak sehingga perlu penanganan segera, menurut hasil survey lapangan masih terdapat di beberapa titik ruas

jalan, jembatan tidak atau belum dapat menahan berat kendaraan roda empat atau lebih.

Untuk ketersediaan prasarana jalan raya dan jembatan yang menghubungkan Kota Sungai Penuh dengan wilayah di luarnya, tersedia jaringan jalan Arteri Primer (jalan Provinsi) sebagai berikut:

- Ruas Sungai Penuh – Sanggaran Agung;
- Ruas Sungai Penuh – Siulak Deras;
- Ruas Sungai Penuh – batas propinsi Sumbar (Tapan)
- Ruas Sungai penuh – Jujun – lempur
- Ruas Sungai Penuh – arah Bangko
- Ruas Sungai Penuh – batas propinsi ke arah padang, melalui muara labuh

Dengan demikian pergerakan manusia menjadi aspek yang dominan, selain pergerakan barang, dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi darat.

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Sungai Penuh kurun waktu 2011-2015, dimana pada tahun 2011 mencapai 1 : 22.190 ini artinya bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km, dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 22 kendaraan. Sedangkan pada tahun 2015, ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan sebesar 1 : 10.855. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Kota Sungai Penuh semakin padat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.88
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2015

| No. | URAIAN | TAHUN | | | | |
|-----|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Panjang Jalan | 180.002 | 185,475 | 192,724 | 195,936 | 196,966 |
| 2. | Jumlah Kendaraan | 8112 | 10550 | 13720 | 15778 | 18145 |
| | - Roda 4 | 999 | 1129 | 1259 | 1448 | 1665 |
| | - Roda 2 | 7113 | 9421 | 12461 | 14330 | 16480 |
| | Rasio | 22.190 | 17.581 | 14.047 | 12,418 | 10,855 |

Sumber: Hasil Analisis Data 2015

2.1.4.2.2. Penataan Wilayah

Penataan wilayah di Kota Sungai Penuh dapat dilihat terhadap beberapa Indikasi diantaranya, Ketaatan terhadap RTRW yang merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW, Luas wilayah produktif yang merupakan persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW, Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW, Luas wilayah banjir adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW, Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW, dan Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.89
Perkembangan Penataan Wilayah di Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2015

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Luas wilayah produktif | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |
| Luas wilayah banjir | T.a.d | T.a.d | 12.13 | 12.13 | 9.80 |
| Luas wilayah kekeringan | T.a.d | T.a.d | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| Luas wilayah perkotaan | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 |

Sumber: BPS, Data diolah

2.1.4.2.3. Fasilitas Bank Non Bank

Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut segala urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator kinerja berkaitan dengan fasilitas bank dan non bank salah satunya dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank serta cabang-cabangnya.

Lembaga Keuangan (Bank dan Non Bank) Di Kota Sungai Penuh sebanyak 9 Bank baik itu Bank Pemerintah maupun Bank Swasta yaitu Bank BNI 46, Bank Jambi, Bank Pembangunan Kerinci, BRI, Bank Danamon, Bank BTPN, Bank Mega BPR dan PT. Pos Indonesia. dan diperkuat pula oleh 133 unit Koperasi, 2 unit Asuransi, dan 106 lembaga non Bank lainnya.

2.1.4.2.4. Ketersediaan Air Minum

Fasilitas Air Minum, merupakan salah satu Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali, sedangkan Air Bersih (*clean Water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum (*drinking water*) juga merupakan Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan memasak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air minum di Kota Sungai Penuh dapat dikatakan mengalami peningkatan lebih baik. Jumlah pemakaian air melalui PDAM Tirta Sakti di Kota Sungai Penuh pada Tahun 2015 tercatat 2,58 juta M³. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 21,13%. Pemakaian terbanyak terdapat pada pelanggan Rumah Tangga sebanyak 10,23 juta M³ atau sekitar 76,41% dari seluruh pemakaian air minum. Kalau dilihat dari jumlah pelanggan/sambungan, mengalami peningkatan sebesar 21,13%. dari tahun sebelumnya. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel.

Kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kota Sungai Penuh dapat dipenuhi melalui jaringan perpipaan dari PDAM, sumber air tanah, serta dari Program Pamsimas. Volume air minum yang sudah disalurkan oleh PDAM pada tahun 2012 mencapai 2.135.152 M³, dengan Jumlah Pelanggan sebesar 11.052 dan pada tahun 2015 mencapai 2.586.248 M³, dengan Jumlah Pelanggan sebesar 13.397.

Tabel 2.90
Jumlah Pelanggan Air Bersih Melalui PDAM Tahun 2011-2015

| Uraian | Jumlah Pelanggan | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------|--------|---------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Jumlah Pelanggan | 10.792 | 11.052 | 11.342 | 12.995 | 13397 |
| 2. Pemakaian Air (Ribu M3) | 2.019.000 | 3.835.152 | N.a | 2 674 516 | 2.586.248 |
| 3. Penjualan Air (Ribu Rp) | 5.070 319.00 | 5.360.521.280 | N.a | 6.668.628.000 | 7.534995.540 |

Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka 2011/2- 2016

2.1.4.2.5. Fasilitas Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil.

Sistem jaringan listrik di Kota Sungai penuh dilayani oleh PLTD Koto Lolo dengan kapasitas daya sebesar ± 17 Mwatt, kapasitas eksisting terpasang 15,5 Mwatt dengan pembagian kapasitas sebagai berikut:

- ± 6 Mwatt daya listrik untuk kebutuhan Kota Sungai Penuh
- ± 9,5 MWatt daya listrik untuk kebutuhan Kabupaten Kerinci

Dengan kapasitas daya 6 Mwatt tersebut, belum mencukupi akan kebutuhan masyarakat Kota Sungai Penuh. Namun demikian, telah dilakukan upaya untuk menutupi kekurangan kapasitas listrik di masa yang akan datang dengan membangun jaringan listrik (SUTT) yang masih dalam tahap pelaksanaannya dengan pola interkoneksi Sumbagsel-Sungai Penuh-Sumatera Barat. Jaringan ketenagalistrikan Kota Sungai Penuh yang terdiri dari Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR). Pada Tahun 2014 Daya Terpasang 38.140 (Kw) sementara Daya Mampu Terkini 17.650 (Kw) Seluruh wilayah Kota Sungai Penuh telah terlayani jaringan listrik. Secara lengkap dapat dilihat table berikut

Tabel 2.91
Persentase Rumah Tinggal Pengguna Listrik

| No. | INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Jumlah Pelanggan | 46.517 | 15.174 | 55.393 | 57.260 | 62.253 |
| 2 | Daya Tersambung (000,0) Kwh | 54.974 | 27.890 | 65.297 | 73.186 | 5.951 |
| 3 | Rumah tangga pengguna listrik (unit) | | | | | |
| | Juml Rumah Tangga | 22,143 | 22,200 | 22,274 | 22,628 | 22,841 |
| | Rasio Elektrifikasi (RE) | 94.56 | 94.28 | 98.49 | 97.50 | 96.88 |

Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka, diolah, 2016

2.1.4.2.6. Ketersediaan Rumah Makan/Restoran dan Penginapan/Hotel

Ketersediaan restoran, rumah makan dan penginapan pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan restoran dan rumah makan salah satunya dapat dilihat dari jumlah restoran dan rumah makan. Selama kurun waktu 2008-2015 jumlah restoran, rumah makan dan penginapan yang berhasil di data oleh BPS Kota Sungai Penuh menunjukkan tren yang terus bertambah, yaitu 86 buah yang terdiri dari restoran/rumah makan, dan Cafe.

Untuk Ketersediaan Hotel/prnginapan, Jumlah hotel di Kota Sungai Penuh kondisi Tahun 2015 sebanyak 11 hotel dengan klasifikasi 1 (satu) hotel bintang 2 dan sisanya 8 (delapan) hotel melati. Jumlah kamar yang tersedia sebanyak 267 kamar dan 593 tempat tidur. Jumlah ini mengalami peningkatan yang dikarenakan adanya pembangunan hotel baru di Kota Sungai Penuh sedangkan untuk transportasi angkutan yang ada di Kota Sungai Penuh sebanyak 25 angkutan.

2.1.4.3. Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kota Sungai Penuh.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja : angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, peraturan daerah (perda) yang mendukung iklim usaha dan status desa (persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa).

2.1.4.3.1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Penanganan tindak kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan kondusivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Angka kriminalitas yang tertangani menunjukkan jumlah tindak kriminal yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kerinci yang meliputi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci selama satu tahun terhadap 10.000 penduduk. Angka kriminalitas yang tertangani sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 2.92
Jumlah Tindak Pidana di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci
Tahun 2010-2014

| TAHUN | JUMLAH TINDAK PIDANA | | | Rasio (%) | ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI |
|--------|----------------------|---------|--------|-----------|--|
| | Lapor | Selesai | | | |
| 1 2010 | 125 | 82 | 65.60% | 2.630 | |
| 2 2011 | 161 | 78 | 48.45% | 2.436 | |
| 3 2012 | 341 | 166 | 48.68% | 5.155 | |
| 4 2013 | Tad. | Tad. | Tad. | Tad. | |
| 5 2014 | 281 | 149 | 53.02% | 4.653 | |

Sumber : BPS, diolah, 2015

2.1.4.3.2. Kemudahan Perizinan

Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-

menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi.

Jenis perizinan yang ditangani Kota Sungai Penuh pada Tahun 2015 sebanyak 71 jenis perizinan, termasuk diantaranya : izin usaha perdagangan (SIUP), izin tempat usaha (SITU), TDP,IUI, TDI, IMB, HO, , IPT, izin reklame, IPLC dan izin jasa konstruksi. Lamanya waktu untuk pengurusan izin tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.93
Lama Proses Perizinan di Kota Sungai Penuh Tahun 2015

| No | Jenis perizinan | Waktu Penyelesaian |
|----|--|-----------------------|
| 1 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | Max 15 Hari Kerja |
| 2 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 1-3 Hari Kerja |
| 3 | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | 1-3 Hari Kerja |
| 4 | Surat Izin Gangguan (HO) | Max 7 Hari Kerja |
| 5 | Tanda Daftar Gudang (TDG) | 1 – 3 Hari Kerja |
| 6 | Surat Izin Tempat Usaha (SITU) | 1 – 3 Hari Kerja |
| 7 | Izin Usaha Pariwisata | 1 – 3 Hari Kerja |
| 8 | Izin Pemasangan Reklame | 1 – 3 Hari Kerja |
| 9 | Izin Mendirikan Perusahaan Bengkel Kendaraan Bermotor | 1 – 3 Hari Kerja |
| 10 | Izin Pemasangan Warung Internet(Warnet), Pemantau Data Telepon, dan Pemasangan Telepon | 1 – 3 Hari Kerja |
| 11 | Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi | Minimal 14 Hari Kerja |
| 12 | Izin Menara | Minimal 14 Hari Kerja |
| 13 | Tanda Daftar Industri(TDI)/Izin Usaha Industri (IUI) | 1 – 3 Hari Kerja |
| 14 | Perizinan Praktek Dokter Umum | 1 – 3 Hari Kerja |
| 15 | Perizinan Praktek Dokter Gigi | 1 – 3 Hari Kerja |
| 16 | Perizinan Praktek Dokter Spesialis | 1 – 3 Hari Kerja |
| 17 | Perizinan Praktek Keperawatan | 1 – 3 Hari Kerja |
| 18 | Perizinan Praktek Bidan | 1 – 3 Hari Kerja |
| 19 | Perizinan Praktek Ahli Gizi | 1 – 3 Hari Kerja |
| 20 | Perizinan Praktek Fisioterapi | 1 – 3 Hari Kerja |
| 21 | Perizinan Praktek Apoteker | 1 – 3 Hari Kerja |
| 22 | Perizinan Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian | 1 – 3 Hari Kerja |
| 23 | Izin Klinik | 1 – 3 Hari Kerja |
| 24 | Izin Klinik Bersama | 1 – 3 Hari Kerja |
| 25 | Izin Klinik Bersalin | 1 – 3 Hari Kerja |
| 26 | Izin Poliklinik Swasta | 1 – 3 Hari Kerja |
| 27 | Izin Balai Pengobatan | 1 – 3 Hari Kerja |
| 28 | Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta | 1 – 3 Hari Kerja |
| 29 | Izin Apotek | 1 – 3 Hari Kerja |
| 30 | Izin Optikal | 1 – 3 Hari Kerja |
| 31 | Izin Toko Obat | 1 – 3 Hari Kerja |
| 32 | Izin Okupasi Terapi | 1 – 3 Hari Kerja |
| 33 | Izin Laboratorium Kesehatan | 1 – 3 Hari Kerja |
| 34 | Izin Pengobatan Komplementer Alternatif, Jamu Tradisional,Pengobatan Tradisional, Tabib, Akupuntur dan Sejenisnya. | 1 – 3 Hari Kerja |
| 35 | Izin Penelitian Akademik | 1 Hari |
| 36 | Izin Prinsip | 1 – 14 Hari |
| 37 | Izin Lokasi | 1 – 14 Hari |
| 38 | Izin Prinsip Penanaman Modal | 1 – 14 Hari |
| 39 | Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal | 1 – 14 Hari |
| 40 | Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal | 1 – 14 Hari |
| 41 | Izin Penyelenggaraan Pendidikan | 1 – 3 Hari Kerja |
| 42 | Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) | 1 – 5 Hari |
| 43 | Izin Usaha Peternakan | 1 – 3 Hari Kerja |
| 44 | Izin Penyediaan,Peruntukan,Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air Pada Wilayah Sungai | 1 – 7 Hari |
| 45 | Izin Usaha Angkutan Wisata | 1 – 3 Hari Kerja |
| 46 | Izin Angkutan Umum | 1 – 3 Hari Kerja |
| 47 | Izin Trayek Angkutan Kota | 1 – 3 Hari Kerja |
| 48 | Izin Usaha Angkutan | 1 Hari |
| 49 | Izin Usaha Pendirian Perusahaan Angkutan | 1 –3 Hari |
| 50 | Izin Usaha Mendirikan Cucian Kendaraan Bermotor | 1 – 3 Hari Kerja |
| 51 | Izin Usaha Mendirikan Pendidikan & Latihan Mengemudi | 1 – 3 Hari Kerja |
| 52 | Izin Terhadap Objek Pengawasan Ketenagakerjaan | 1 – 3 Hari Kerja |
| 53 | Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi | 1 – 3 Hari Kerja |
| 54 | Izin Usaha Budidaya Peternakan | 1 – 3 Hari Kerja |
| 55 | Izin Klinik Hewan | 1 – 3 Hari Kerja |

| No | Jenis perizinan | Waktu Penyelesaian |
|----|--|--------------------|
| 56 | Izin Usaha Perikanan | 1 – 3 Hari Kerja |
| 57 | Izin Tempat Pemotongan Hewan (TPH/TPU) | 1 – 3 Hari |
| 58 | Izin Usaha Alat Angkut/ Transportasi Produk Peternakan | 1 – 3 Hari Kerja |
| 59 | Izin Pembuatan Tempat Penimbunan Kayu | 1 – 3 Hari Kerja |
| 60 | Izin Pendirian Salon Kecantikan | 1 – 3 Hari Kerja |
| 61 | Izin Pendirian Pusat Kebugaran | 1 – 3 Hari Kerja |
| 62 | Izin Usaha Hotel | 1 – 3 Hari Kerja |
| 63 | Izin Usaha Biro/Agen Perjalanan | 1 – 3 Hari Kerja |
| 64 | Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras | 1 – 3 Hari Kerja |
| 65 | Izin Operasional Depot Air Minum Isi Ulang | 1 – 3 Hari Kerja |
| 66 | Izin Penggunaan Instalasi Kebakaran | 1 – 3 Hari Kerja |
| 67 | Izin Operasional Gelanggang Olahraga dan Kolam Renang | 1 – 3 Hari Kerja |
| 68 | Izin Usaha Restoran, Cafe dan Rumah Makan | 1 – 3 Hari Kerja |
| 69 | Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum | 1 – 3 Hari Kerja |
| 70 | Izin Jasa Boga | 1 – 3 Hari Kerja |
| 71 | Izin Pertunjukan/Hiburan | 1 – 2 Hari |

Sumber: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sungai Penuh, Tahun 2015

2.1.4.3.3. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah realisasi serta macam pajak dan retribusi daerah di Kota Sungai Penuh selama kurun waktu 2010-2015

Tabel 2.94
Jumlah Realisasi serta Macam Pajak dan Retribusi Daerah
di Kota Sungai Penuh Pada Tahun 2010-2015 (dalam 0.000,-)

| No | URAIAN | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I | Jumlah Pajak Daerah | 5,275,545 | 3,101,182 | 4,027,874 | 4,473,730 | 6,861,587 | 5,157,521 |
| | Hotel | 70,858 | 86,477 | 842,488 | 135,188 | 310,783 | 132,224 |
| | Restoran | 3,220,123 | 434,448 | | 1,052,480 | 1,204,316 | 1,044,734 |
| | Hiburan | 1,005 | 3,100 | 3,064 | 3,366 | 9,193 | 15,363 |
| | Reklame | 58,161 | 171,846 | 224,424 | 297,742 | 323,723 | 304,897 |
| | Penerangan Jalan | 1,066,283 | 1,254,433 | 1,808,320 | 1,829,033 | 3,666,337 | 2260,410 |
| | Galian Gol. C | 859,114 | 1,150,875 | 1,149,577 | 1,155,919 | 1,347,231 | 1,261,346 |
| II | Jumlah Retribusi Daerah | 1,786,474 | 1,234,554 | | | | |
| | Retribusi Jasa Umum | 953,370 | 796,229 | | | | |
| | Retribusi Jasa Usaha | 161,340 | 361,414 | | | | |
| | Retribusi Perizinan Tertentu | 671,763 | 76,910 | | | | |

Sumber : Indikator Ekonomi Sungai Penuh Dalam 2013, BPS Kota Sungai Penuh 2015

2.1.4.3.4. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diketahui adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha meliputi : Perda terkait dengan perizinan terdiri dari Izin mendirikan bangunan, gangguan, perizinan bidang perdagangan dan perizinan bidang kesehatan sedangkan perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan belum ada.

2.1.4.3.5. Status Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya

Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.

2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

3. Desa Maju atau Desa Swasembada

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju

Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya saing daerah maka salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada.

Penilaian status desa/kelurahan diambil berdasarkan data dari profil desa/kelurahan yang berisi data potensi dan perkembangan. Sehingga pengisian data-data dalam profil desa/kelurahan menjadi sangat penting

karena menentukan status desa. Status desa/kelurahan di Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada :

Tabel 2.95
Status Desa/Kelurahan Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2015

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 3 Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Jumlah Desa/Kelurahan | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |

Sumber : Profil Desa/Kelurahan, diolah 2016

Dari tabel gambar diatas sampai dengan Tahun 2015 Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya 69 desa/kelurahan, sedangkan Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada belum ada.

2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Sumber daya manusia yang termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja di Kota Sungai Penuh pada tahun 2011-2015 paling banyak adalah lulusan SMA dengan rata-rata 36.30%, namun trendnya tetap dalam beberapa tahun terakhir. Begitu pula Kelompok usia lainnya. Namun bila dilihat dari pencari kerja di Kota Sungai Penuh terbanyak merupakan tamatan pendidikan S1/S2/S3 yaitu sekitar 60,60%, kemudian yang bertamatan SMA sebesar 18,43%, diikuti bertamatan pendidikan DIII sebesar 18,13%, DI/DII sebesar 2,54% dan SMP sebesar 0,30%.

Jika dilihat secara keseluruhan jumlah pencari kerja di Kota Sungai Penuh tahun 2014 yang bertamatan pendidikan perguruan tinggi sudah mencapai 80%.

Tabel 2.96
Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Tingkatan Pendidikan (%)
di Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2015

| URAIAN | TAHUN | | | | | RATA2 |
|------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Tidak / Belum Pernah Sekolah | 0.92 | 1.07 | N.a | 1.48 | 3.11 | 1.65 |
| Tidak / Belum Tamat SD | 9.52 | 5.76 | N.a | 11.34 | 10.66 | 9.32 |
| Sekolah Dasar | 12.92 | 13.88 | N.a | 13.47 | 16.81 | 14.27 |
| SMP | 17.04 | 14.46 | N.a | 13.20 | 15.33 | 15.01 |
| SMA | 37.57 | 38.91 | N.a | 36.68 | 32.05 | 36.30 |
| Perguruan Tinggi | 22.03 | 25.92 | N.a | 23.83 | 22.04 | 23.45 |

Sumber : BPS Kota Sungai Penuh 2015

Sumber Daya Manusia di Kota Sungai Penuh cukup baik dengan tingginya usia produktif yang siap untuk bekerja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk usia 15-64 pada tahun 2015 adalah 71.087 jiwa, yang jika dibandingkan dengan penduduk usia non produktif nya sebanyak 26.037 jiwa maka dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan penduduk di Kota Sungai Penuh adalah sebesar 42,84%.

Tabel 2.97
Rasio Ketergantungan di Kota Sungai Penuh
Tahun 2011-2015

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Jumlah penduduk Usia < 15 tahun | 18,431 | 23,105 | 23,709 | 21,917 | 23,756 |
| 2 Jumlah penduduk Usia > 64 tahun | 5,573 | 5,908 | 5,789 | 7,100 | 6,699 |
| 3 Jumlah penduduk Usia Tidak Produktif (1) + (2) | 24,004 | 29,013 | 29,498 | 29,017 | 30,455 |
| 4 Jumlah penduduk Usia 15 s/d 64 tahun | 65,712 | 72,241 | 74,642 | 72,380 | 71,087 |
| 5 Rasio Ketergantungan (3)/(4) (%) | 36.53% | 40.16% | 39.52% | 40.09% | 42.84% |

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh 2015

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) periode 2011-2015 mengalami kecenderungan meningkat hal ini menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, hal ini juga menunjukkan bahwa Kota Sungai Penuh tergolong sebagai daerah sedang berkembang.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan RPJMD 2011 – 2016

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun 2016 dan realisasi RPJMD 2011-2016 yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan realisasi Renstra SKPD 2011-2016 oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Sungai Penuh tahun 2016 dan RPJMD 2011-2016. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah per-SKPD, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan tahun 2017.
3. realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2016 dan kinerja pembangunan daerah
6. kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam hal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, dokumen rencana yang dihasilkan memberikan arah kebijakan jangka panjang hingga program pembangunan daerah jangka menengah. Jika perhatian diarahkan pada pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan lebih nyata, maka akan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka pendek atau rencana pembangunan tahunan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang disusun benar-benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan pembangunan, fokus perhatian perlu diarahkan pada perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dalam hal perencanaan tahunan, maka focus perhatian sebagai lingkup kajian di arahkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengetahui dan nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan

indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan rencana pembangunan tahun berikutnya.

Berdasarkan Evaluasi program APBD Tahun 2016 dan tahun berjalan (2017) terhadap indikator RPJMD Tahun 2011 - 2016 dan data BPS Kota Sungai Penuh yang disusun menurut capaian misi adalah sebagai berikut:

Hasil evaluasi, status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah merupakan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD.

RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2011 - 2016 dan Renstra SKPD Tahun 2011 - 2016 belum mencantumkan secara kuantitatif terhadap seluruh capaian indikator kinerja masing masing SKPD yang akan dicapai untuk dinilai tingkat pencapaiannya setiap tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, akan tetapi ada beberapa indikator makro yang ingin dicapai, yang dicantumkan pada RKPD Tahun 2016. Sampai dengan tahun 2017, berdasarkan pencapaian kinerja pembangunan yang diukur dari indikator-indikator makro pembangunan daerah menunjukkan trend peningkatan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 naik sebesar 0,2 % (6,86 % tahun 2011 naik menjadi 7,06 % Tahun 2015). Pertumbuhan ekonomi di Kota Sungai Penuh tahun 2011-2015 tumbuh Positif lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian Kota Sungai Penuh masih ditopang oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, dan Jasa Pendidikan

Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu yang meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Secara umum semua program telah dilaksanakan semua SKPD dengan baik dan telah terealisasi dan kinerja yang diharapkan dari terlaksananya program tersebut telah tercapai. Capaian tahun 2016 selain sebagai hasil kinerja pencapaian tahun akhir RPJMD periode tahun 2011 - 2016 juga menjadi titik awal kinerja RPJMD 2016-2021.

2.2.1. Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian RPJMD 2011-2016

2.2.1.1. Urusan Wajib yang dilaksanakan.

1) Urusan Pendidikan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh yang dijelaskan pada berbagai program dan kegiatan dengan total anggaran Rp. 28.669.048.998,- dengan rincian anggaran APBD Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 11.966.003.114,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 16.703.045.884,-. Dari anggaran yang tersedia terealisasi sebesar Rp. 22.269.248.984,- kinerja

keuangan 77,68 %, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.399.800.014,- dengan kinerja fisik 83,73%. Adapun rincian pelaksanaan urusan melalui program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
Program ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan terhadap Anak Usia Dini, meningkatkan aksesibilitas dalam mendapatkan pendidikan serta meningkatkan peran serta anak usia dini dalam pendidikan.
Alokasi anggaran pada program ini Rp.1.944.154.590,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp1.707.047.603,- kinerja keuangan 87,80 % dan kinerja fisik 96%.
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun.
Program ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan terhadap wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan meningkatkan aksesibilitas dalam mendapatkan pendidikan serta meningkatkan peran serta anak usia sekolah dalam pendidikan.
Alokasi anggaran pada Program Wajib Belajar Sembilan Tahun sebesar Rp. 3.167.615.634,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan keseluruhan realisasi anggaran Rp.2.991.034.249,- atau kinerja keuangan 94,43% dan kinerja fisik 98,57%.
- c. Program Pendidikan Menengah.
Program ini dilaksanakan sebagai upaya pemantapan mutu pendidikan menengah, meningkatkan aksesibilitas dalam mendapatkan pendidikan serta meningkatkan peran serta anak usia sekolah dalam pendidikan. Program ini dilaksanakan dengan jumlah anggaran Rp. 1.950.101.292,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan total realisasi Rp 1.713.015.394,- atau 87,84% dan realisasi fisik 97,78%.
- d. Program pendidikan non formal
Program ini diadakan dalam rangka mendukung pendidikan non formal yang ada di Kota Sungai Penuh. Dengan jumlah anggaran Rp 884.863.808,- dengan realisasi anggaran Rp.590.491.804,- atau 47,15%.
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan.
Program ini dilaksanakan dengan jumlah anggaran Rp.1.036.141.644,- yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan realisasi Rp. 973.284.271,-. Dengan kinerja keuangan 93,93% dan kinerja fisik adalah 98,33%.
- f. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Sekolah Dasar (SD).
Program ini dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan yang jumlah anggaran Rp.12.298.097.099,- dengan realisasi anggaran Rp11.582.504.287,- atau 94,18 %.
- g. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan – Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Program ini dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : Rehabilitasi sedang ruang kelas (DAK), dan sarana teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan multimedia pembelajaran interaktif (DAK). Dengan jumlah anggaran Rp. 2.636.851.503,-tapi kegiatan ini tidak terealisasi sehingga realisasi anggaran Rp.0 % begitu pula persentase kinerja keuangan dan kinerja fisik 0%. Program tersebut tidak dapat

dilaksanakan pada tahun 2016 dikarenakan karena juknis dari pusat tidak ada.

- h. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan – Sekolah Menengah Atas (SMA).

Program ini dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan yang jumlah anggaran Rp.535.126.803,- dengan realisasi anggaran Rp 0,-. Dengan demikian persentase kinerja keuangan dan kinerja fisik adalah 0%. Alokasi anggaran program tersebut bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).

- i. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan – Sekolah Menengah Atas (SMK).

Program ini dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan yang jumlah anggaran Rp. 1.232.970.479,- dengan realisasi anggaran Rp.0,-. Dengan demikian persentase kinerja keuangan dan kinerja fisik adalah 0%. Alokasi anggaran program tersebut bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).

2) Urusan Kesehatan

Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang ada di Kota Sungai Penuh, Dinas Kesehatan menyadari sepenuhnya akan peran dimasa yang akan datang sebagai tumpuan dan harapan masyarakat kota untuk mengatasi masalah kesehatan yang timbul akibat perubahan pola hidup masyarakat perkotaan. Masalah kesehatan yang dominan antara lain masalah lingkungan pemukiman, gizi, kesehatan reproduksi maupun penanggulangan penyakit menular yang ada dilingkungan kota maupun yang datang dari luar kota. Masyarakat Kota Sungai Penuh yang sehat, mandiri merupakan keinginan yang akan kita wujudkan, dimana masyarakat Kota Sungai Penuh hidup dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu, terintegritas dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Tujuan dari program ini adalah melayani penanganan P3K pada event khusus dan kondisi pasca bencana, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatkan penggunaan obat rasional dan pemakaian obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kesehatan ibu dan anak, menurunkannya angka kesakitan dan kematian terhadap penyakit tidak menular, meningkatnya kemampuan untuk mengembangkan desa siaga dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 4,868,493,196,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.3,508,596,248,- kinerja keuangan 72,07% dan kinerja fisik 99,80%.

- b. Program Pengawasan Obat dan Makanan.

Program Pengawasan Obat dan Makanan adalah suatu program yang mengawasi peredaran obat dan makanan di masyarakat. Tujuan dari program ini adalah mengawasi mutu, keamanan dan khasiat produk

- terapeutik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan makanan serta produk hasil olahannya. Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.57.510.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 56.700.000,- kinerja keuangan 98,59% dan kinerja fisik 100%.
- c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya atau proses menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, membentuk forum desa siaga dan meningkatkan pengetahuan anak sekolah tentang kesehatan. Alokasi anggaran pada program ini Rp. 3.516.195.765,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.3.316.359.336,- kinerja keuangan 94,32% dan kinerja fisik 98,46%.
- d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah program pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan multi gizi perseorangan dan masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi serta kesehatan. Alokasi anggaran pada program ini Rp. 190.822.900,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.183.683.792,- kinerja keuangan 96,26% dan kinerja fisik 100%.
- e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat adalah suatu program untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan. Tujuan dari program ini adalah terciptanya mutu lingkungan hidup yang sehat. Alokasi anggaran pada program ini Rp. 225.230.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.224.810.950,- kinerja keuangan 99,81% dan kinerja fisik 100%.
- f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk mencegah dan menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian, membatasi penularan serta penyebaran. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan mutu dan pemerataan kualitas pelayanan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, menanggulangi kejadian luar biasa dan penanggulangan bencana akibat penyakit menular. Alokasi anggaran pada program ini Rp. 389.655.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.378.825.450,- kinerja keuangan 97,22% dan kinerja fisik 99,92%.
- g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan adalah suatu program yang dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan. Tujuan dari program ini adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan yang memenuhi standar.

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 553.641.890,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.544.923.434,- kinerja keuangan 98,43% dan kinerja fisik 99,93%.

- h. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya adalah suatu program untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Tujuan dari program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya.

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.1.782.794.163,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.1.763.680.000,- kinerja keuangan 98,93% dan kinerja fisik 100%.

- i. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan adalah suatu program yang memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakat. Tujuan dari program ini adalah terlindunginya masyarakat dengan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan.

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 3.821.269.170,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.3.364.529.500,- kinerja keuangan 88,05% dan kinerja fisik 96,45%.

- j. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita adalah suatu program dalam rangka deteksi dini penyakit pada anak balita dan penanganan serta pelayanan kesehatan pada anak balita. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan pada usia anak balita sebagai generasi muda bangsa untuk kehidupan yang bahagia, sehat dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 165.610.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.164.427.600,- kinerja keuangan 99,29% dan kinerja fisik 100%.

- k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia adalah upaya kesehatan paripurna dasar dan menyeluruh di bidang kesehatan usia lanjut yang meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai dengan keberadaannya dalam masyarakat serta meningkatkan kesadaran pada usia lanjut untuk membina sendiri kesehatannya.

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.101.950.927,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 101.928.200,- kinerja keuangan 99,98% dan kinerja fisik 100%.

- l. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan–Pelayanan Dasar.

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan–Pelayanan Dasar adalah merupakan suatu program bidang kesehatan yang diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan

bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2015 yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015. Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 2.999.818.000,- dengan realisasi Rp. 2.703.464.397,- kinerja keuangan 90,12% dan kinerja fisik 96,50%.

- m. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan–Pelayanan Farmasi.

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan–Pelayanan Farmasi adalah merupakan suatu program bidang kesehatan yang diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2016 yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016. Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung pelayanan kefarmasian bagi masyarakat.

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.1.377.266.000,- dengan realisasi Rp. 1.209.438.514,- kinerja keuangan 87,81% dan kinerja fisik 97%.

- n. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Program ini dilaksanakan dalam rangka pemberian bantuan dari Menteri Kesehatan RI kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mendukung operasional Puskesmas. Bantuan Operasional Puskesmas ini telah banyak membantu dalam pencapaian program kesehatan Prioritas Nasional yang ada di daerah, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.1.176.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.100.611.894,- kinerja keuangan 93,59% dan kinerja fisik 96%.

- o. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Akreditasi Puskesmas.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka salah satu upaya untuk memastikan bahwa Puskesmas telah siap melaksanakan fungsi dan perannya. Karena itu Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar sejak tahun 2011 telah mulai melakukan akreditasi terhadap Puskesmas sebagai bentuk implementasi atas butir ke lima dari Nawa Cita “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” yang juga telah dijadikan sebagai indikator RPJMN dan Renstra. Adapun tujuan dari dilaksanakannya uji coba akreditasi Puskesmas adalah mendapatkan input terkait implementasi modul akreditasi dan materi teknis standar serta instrumen akreditasi Puskesmas dan perbaikan NSPK akreditasi Puskesmas.

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.169.468.960,- dengan realisasi Rp. 168.737.499,- kinerja keuangan 99,57% dan kinerja fisik 100%.

3) Urusan Pekerjaan Umum

Infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu daerah, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi.

Infrastruktur adalah modal esensial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial-budaya, serta kesatuan dan persatuan yang mengikat dan menghubungkan antar daerah/wilayah. Bertolak dari hal tersebut, pembangunan infrastruktur adalah merupakan *Public Service Obligation*, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah karena infrastruktur mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh**. Tahun 2016 alokasi anggaran pada Urusan Pekerjaan Umum Rp. 145.191.489.011,- dengan realisasi Rp.143.225.802.026,- kinerja keuangan 98,64% dan kinerja fisik 98%. Adapun rincian pelaksanaan urusan melalui program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya merupakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Alokasi anggaran pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 760.857.600,- realisasi Rp. 659.479.844,- dengan kinerja keuangan 86,60% dan kinerja fisik 94,80%
- b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Alokasi anggaran Program Pembangunan Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 9.167.574.699,- realisasi Rp. 8.982.359.126,- kinerja keuangan 97,90% dan kinerja fisik 97,90%.
- c. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur, sarana dan prasarana daerah dan termasuk dalam rangka mengurangi titik genangan. Program ini termasuk dalam arah kebijakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebencanaan. Alokasi anggaran kegiatan ini Rp. 3.025.710.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.3.005.172.900,- kinerja keuangan 99,32% dan kinerja fisik 99,34%. Capaian terhadap target RPJMD/Renstra adalah 99,94%.
- d. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong termasuk dalam arah kebijakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebencanaan dan bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur, sarana dan prasarana daerah dan termasuk dalam rangka melindungi pemukiman masyarakat dan infrastruktur yang tebing sungainya tergerus oleh air sungai. Alokasi anggaran program ini Rp. 6.077.386.142,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.5.953.458.165,- kinerja keuangan 97,96% dan kinerja fisik 100%. Capaian terhadap target RPJMD/Renstra adalah 100%.

- e. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam rangka pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas angkutan jalan untuk meningkatkan kondisi dan merehabilitasi kondisi jalan.
Alokasi anggaran Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp.10.952.337.499,- realisasi Rp.10.873.105.130,- dengan kinerja keuangan 99,28% dan kinerja fisik 99,95%.
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
Program ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan alat-alat berat yang dimiliki kebinamargaan, serta untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Alokasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan sebesar Rp. 7.557.372.000,- realisasi Rp.7.484.788.534,- dengan kinerja keuangan 99,04% dan kinerja fisik 99,17%.
- g. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya terdiri dari membangun jaringan air bersih/air minum yang belum terjangkau oleh PDAM, melakukan pemeliharaan dan merehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Sungai Penuh.
Alokasi anggaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya sebesar Rp.8.140.595.455,- realisasi Rp.8.054.271.787,- dengan kinerja keuangan 98,94% dan kinerja fisik 100%.
- h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Kegiatan dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah adalah membangun Instalasi pengolah air limbah (IPAL) secara Komunal .IPAL Komunal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan khususnya di lokasi-lokasi yang padat serta sekaligus melindungi sumber air baku. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur, sarana, dan prasarana daerah.
Alokasi anggaran kegiatan ini Rp. 7.998.084.009,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.7.582.172.940,- kinerja keuangan 94,80% dan kinerja fisik 95,40%.
- i. Program Pengendalian Banjir.
Kegiatan dari program ini, yaitu Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali merupakan pelaksanaan normalisasi saluran pembuang Sungai Air Nek Desa Koto Dumo dan Bandar Tuan Luak Desa Simp. III Rawang, normalisasi saluran sungai Kadano (Koto Baru-Koto Dian), Normalisasi Sungai Muara Jaya dan Pemeliharaan sungai dalam Kota Sungai Penuh.
Alokasi anggaran kegiatan ini Rp. 4.067.297.590,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.3.995.745.498,- kinerja keuangan 98,24% dan kinerja fisik 99,98%.
- j. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.
Kegiatan dari program ini adalah Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. kegiatan ini untuk membangun jalan setapak, jalan lingkungan dan jembatan pedesaan.

Alokasi anggaran kegiatan ini Rp.3.817.080.500,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.3.804.040.780,- kinerja keuangan 99,66% dan kinerja fisik 100%.

k. Program Pembinaan Jasa Kontruksi

Program Pembinaan Jasa Kontruksi termasuk dalam arah kebijakan penataan dan pengelolaan jasa kontruksi yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan jasa kontruksi daerah. kegiatan program ini adalah mengatur penyelenggaraan izin usaha jasa kontruksi, pemberdayaan pengguna dan penyedia jasa kontruksi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa kontruksi.

Alokasi anggaran kegiatan ini Rp.587.976.200,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.532.471.515,- kinerja keuangan 90,5% dan kinerja fisik 97,3%.

l. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Jalan.

Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK) Bidang Infrastruktur Jalan dalam rangka pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas angkutan jalan untuk meningkatkan kondisi dan merehabilitasi kondisi jalan.

Alokasi anggaran kegiatan ini Rp.60.057.055.809,- dengan realisasi Rp.59.901.997.850,- kinerja keuangan 99,74% dan kinerja fisik 99,84%.

m. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Irigasi.

Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) dalam rangka pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pengairan untuk meningkatkan kondisi dan merehabilitasi kondisi irigasi.

Alokasi anggaran kegiatan ini Rp.18.000.000.000,- dengan realisasi Rp.17.842.979.205,- kinerja keuangan 99,13% dan kinerja fisik 100%.

n. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Air Minum.

Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Sederhana/IPAS (DAK) merupakan pelaksanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Sungai Jernih Kec. Pondok Tinggi, Desa Pelayang Raya Kec. Sungai Bungkal, Desa Air Teluh Kec. Kumun Debai, Desa Renah Kayu Embun Kec. Kumun Debai.

Alokasi anggaran kegiatan ini Rp. 2.690.500.308,- dengan realisasi Rp.2.662.187.252,- kinerja keuangan 99,05% dan kinerja fisik 100%.

o. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Sanitasi

Kegiatan Pelaksanaan Sanimas-DAK (San-DAK) dalam rangka pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas berbasis masyarakat untuk meningkatkan pelayanan fasilitas sanitasi masyarakat.

Alokasi anggaran kegiatan ini Rp. 2.291.561.200,- dengan realisasi Rp. 1.891.571.500,- kinerja keuangan 82,55% dan kinerja fisik 91%.

4) Urusan Penataan Ruang

a. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang merupakan pelaksanaan penyusunan kajian tata ruang daerah Kota Sungai Penuh.

Alokasi anggaran kegiatan ini Rp.2.021.580.500,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.1.974.559.795,- kinerja keuangan 97,67% dan kinerja fisik 99,91%.

Kegiatan Pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan merupakan pelaksanaan sosialisasi terhadap proses pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan.

Alokasi anggaran kegiatan ini Rp. 329.159.900,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.319.290.000,- kinerja keuangan 97% dan kinerja fisik 97,32%.

5) Urusan Perumahan

Urusan perumahan merupakan suatu urusan yang terkait dengan salah satu kebutuhan dasar manusia (papan) yang mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, peningkatan kualitas generasi yang akan datang serta merupakan perwujudan kualitas kehidupan masyarakat. Tujuan pelaksanaan urusan perumahan adalah untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat yang dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan papannya.

Urusan perumahan yang layak huni menjadi tanggung jawab Pemerintah, terutama pemerintah daerah, seperti yang tertuang dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa perumahan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk menyikapi kondisi tersebut mutlak perlu adanya suatu perencanaan yang komprehensif, terintegratif antar sektor, implementatif serta sesuai kebutuhan lokal oleh pemerintah dalam perencanaan yang berkaitan dengan urusan perumahan.

a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran merupakan program yang berada di UPTB Damkar BPBD Kota Sungai Penuh, program ini berupa honorarium petugas Damkar dan pengadaan alat pemadam kebakaran seperti selang pemadam kebakaran, nozzle, dan perlengkapan penunjang lainnya seperti pakaian anggota pemadam kebakaran.

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 3.882.559.250,- yang bersumber pada APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 3.742.900.499,- kinerja keuangan 97,73% dan kinerja fisik 100%.

b. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam merupakan program yang berada dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Program ini mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 242.489.800,- yang bersumber pada APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 233.112.160,- kinerja keuangan 98,29% dan kinerja fisik 100%.

c. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana.

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana adalah program pemulihan dan pembangunan pasca bencana. Program ini juga tersedianya bahan baku bangunan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak kebakaran yang terjadi dalam wilayah Kota Sungai Penuh.

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 10.086.838.000,- yang bersumber pada APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp. 10.072.057.927,- kinerja keuangan 99,48% dan kinerja fisik 100%.

d. Program Tanggap Darurat Bencana

Program Tanggap Darurat Bencana merupakan program yang berada dibidang kedarurat dan logistik dengan tujuan terlaksananya tanggap darurat pada saat bencana dan mengurangi dampak bencana dan penanggulangan korban bencana, untuk membantu korban bencana langsung dibantu oleh tim reaksi cepat (TRC) BPBD Kota Sungai Penuh Alokasi anggaran pada kegiatan ini Rp. 1.913.775.510,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 1.688.986.766,- kinerja keuangan 97,39% dan kinerja fisik 100 %.

e. Program Pencegahan Dini dan Penanganan Korban Bencana Alam

Program pencegahan dini dan penanganan korban bencana alam merupakan program penanganan korban bencana alam yang dibantu oleh TRC dan penyelenggaraan pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana seperti laporan data bencana alam yang dikelola langsung oleh anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Sungai Penuh.

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 89.059.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 88.905.240,- kinerja keuangan 99,83% dan kinerja fisik 100%.

f. Program Pembuatan Rencana Kontigensi

Program pembuatan rencana kontigensi merupakan proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontigensi atau belum tentu terjadi dan tercapainya pelaksanaan simulasi gempa bumi.

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 199.169.794,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 114.004.630,- kinerja keuangan 95,67% dan kinerja fisik 100%.

6) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Dalam Negeri diarahkan pada upaya peningkatan stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh komponen masyarakat dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh.

a. Program Peningkatan dan Kenyamanan lingkungan

Program Peningkatan dan kenyamanan lingkungan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Sungai Penuh dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi komunikasi intelijen daerah (KOMINDA) kota sungai penuh dan kegiatan Pendataan/Pembinaan Keberadaan Parpol/Ormas dan LSM, NGO dan Tim Terpadu Penanggulangan Gangguan Keamanan di Kota Sungai Penuh tahun 2016 yang jumlah anggarannya Rp.333.768102,- yang sumber dana dari Dana Alokasi umum dengan realisasi Rp.322.839.500,- atau 96,73%.

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan adalah meliputi kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama atau FKUB, kegiatan Forum pembauran kebangsaan atau FBK. Alokasi anggaran pada program ini Rp.248.992.205,- yang bersumber APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp. 240.696.950,- dan kinerja keuangan 96,67%.

c. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program Pendidikan Politik Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Sungai Penuh dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat, Verifikasi Administrasi pantuan Bartai Politik serta Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur Propinsi Jambi dan Walikota Sungai Penuh tahun 2016. Alokasi anggaran pada program ini Rp. 601.367.110,- yang bersumber APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp.526.787.280,- kinerja keuangan 87,59%.

d. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Sungai Penuh dilaksanakan yaitu pembentukan panitia pelaksana kegiatan tahun 2016, pembentukan Tim FKDM Tingkat Kota Sungai Penuh dengan Jumlah anggaran Rp. 84.446.936,- yang terialisasi dalam 1 tahun ditahun 2016 yaitu Rp. 82.941.880,- atau 98,22%.

Dalam melaksanakan peran dan fungsi peningkatan Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh mendapat Alokasi anggaran Rp. 2.923.851.350,- yang bersumber APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 2.861.711.167,- kinerja keuangan 97,87%.

e. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan adalah untuk memberikan rasa aman dan keyamanan di tengah-tengah masyarakat. Capaian indikator kinerja program sampai dengan tahun 2016 adalah 100%.

Alokasi anggaran pada program ini Rp.126.567.700.- yang bersumber APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp.126.394.750.- kinerja keuangan 96,73 % dan kinerja fisik 100%.

f. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal adalah untuk meningkatkan rasa ketentraman dan kenyamanan ditengah masyarakat serta melaksanakan pencegahan tindak kriminal. Capaian indikator program sampai dengan tahun 2016 adalah 100%.

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 44.217.475.- yang bersumber APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp.40.362.900.- kinerja keuangan 91,28% dan kinerja fisik 100%.

g. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat program ini dilaksanakan untuk memberikan penyuluhan, pencegahan terhadapdampak dari bahaya penyakit masyarakat. Capaian indikator kinerja program sampai dengan tahun 2016 adalah 98%.

Alokasi anggaran pada program ini Rp.183.086.900.- yang bersumber APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp. 172.695.933.- kinerja keuangan 94,32% dan kinerja fisik 100%.

h. Program Operasi Pengendalian.

Program Operasi dan Pengendalian Program ini dilaksanakan untuk melaksanakan operasi dan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat, daerah serta penegakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Capaian indikator kinerja program sampai dengan tahun 2016 adalah 98%

Alokasi anggaran pada program ini Rp.2.433.979.925.- yang bersumber APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp. 2.386.708.585.- kinerja keuangan 98,02% dan kinerja fisik 100%.

i. Program Penyidikan dan Pemeriksaan

Program Penyidikan dan Pemeriksaan dilaksanakan dalam rangka penegakan perda dilingkungan Kota Sungai Penuh. Capaian indikator kinerja program sampai dengan tahun 2016 adalah 97%.

Alokasi anggaran pada program ini Rp.135.999.350.- yang bersumber APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp.135.548.999.- kinerja keuangan 99,67% dan kinerja fisik 100%.

7) Urusan Sosial

Urusan sosial adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan kelembagaan sosial, jaminan sosial, bantuan sosial, perlindungan sosial dan pelayanan serta rehabilitasi sosial, tujuan pelaksanaan program adalah untuk pemberdayaan kelembagaan sosial, Rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pengumpulan dan pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, dan penanganan fakir miskin.

Program urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Kota Sungai Penuh dalam rangka penanganan masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan peningkatan kualitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

Alokasi anggaran pada urusan ini Rp. 1.227.820.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 999.210.420,- kinerja keuangan 81,38%. Adapun rincian pelaksanaan urusan melalui program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah suatu program nasional sebagai upaya memfasilitasi, membantu, dan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin tujuan dari program ini adalah dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin.

Alokasi anggaran pada program ini Rp.40.245.100,- yang bersumber dari APBD kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 34.019.260,- kinerja keuangan 84,53%.

b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial adalah seseorang keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan meningkatkan peran serta lembaga / perseorangan sebagai potensi sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tujuan dari

program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian dan pendayugunaan nilai dasar kesejahteraan sosial masyarakat khususnya organisasi sosial (ORSOS), TSK, Relawan Sosial dan dunia usaha.

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 206.712.400,- yang bersumber dari APBD kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 157.454.881,- kinerja keuangan 76,17%.

c. Program Pelayanan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial

Program pelayanan rehabilitas kesejahteraan sosial adalah proses dan pengembangan untuk melaksanakan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, tujuan dari program ini adalah untuk memulihkan fungsi sosial, memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 675.100.076,- yang bersumber dari APBD kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp. 544.667.910,- kinerja keuangan 80,68%.

d. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo adalah dalam rangka peningkatan ketrampilan bagi penghuni panti dan pendidik, tujuan dari program ini adalah terlaksananya kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo, terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi panti asuhan/ panti jompo dan terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelajaran.

Alokasi anggaran pada kegiatan Rp.196.358.230,- yang bersumber dari APBD kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp. 166.158.495,- kinerja keuangan 84,62%.

e. Program Pembinaan Anak Terlantar

Program pembinaan anak terlantar adalah peningkatan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar baik di dalam panti maupun diluar panti, dalam aspek pendidik dan ketrampilan, tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan anak terlantar baik di dalam panti maupun di luar panti, terlaksananya pembinaan anak terlantar yang putus sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan.

Alokasi anggaran pada kegiatan Rp.109.404.197,- yang bersumber dari APBD kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp. 96.909.875,- kinerja keuangan 88,58%.

8) Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Wajib Ketenagakerjaan adalah salah satu sasaran utama pembangunan agar terciptanya jumlah dan kualitas lapangan kerja baru yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Sungai Penuh. Tujuan pelaksanaan program ini berupaya mengarahkan pada perluasan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta perlindungan terhadap pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Pada Urusan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sungai Penuh dalam rangka penempatan tenaga kerja dan pengawasan tenaga kerja.

Alokasi anggaran pada urusan ini sebesar Rp. 1.896.745.550,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.1.842.733.131,- kinerja keuangan 97,15%. Adapun rincian pelaksanaan urusan melalui program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah untuk melatih pencari kerja dalam Kota Sungai Penuh, tujuan dari program ini adalah agar pencari kerja memperoleh keterampilan atau life skill.

Alokasi anggaran pada program ini Rp.1.058.315.550,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 1.033.981.832,- kinerja keuangan 97,70%.

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Peningkatan Kerja adalah untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, tujuan dari program ini adalah memberdayakan dan memdayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

Alokasi anggaran pada program ini Rp.373.000.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.349.028.667,- kinerja keuangan 93,57%. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

c. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan adalah program untuk melaksanakan pengawasan program ini adalah untuk menciptakan ketenangan kerja bagi tenaga dan perlindungan tenaga kerja di tempat kerja, tujuan dari kerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha.

Alokasi anggaran pada program ini Rp.465.430.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.459.722.632,- kinerja keuangan 98,77%.

9) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam hal pemberdayaan perempuan secara fungsi melaksanakan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan serta sosial budaya, melaksanakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan dan anak, perempuan lanjut usia, penyandang cacat, perempuan dan anak daerah konflik.

a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Kegiatan Pembentukan Kota Layak Anak Daerah Kota Sungai Penuh dan Pengembangan Forum Anak Daerah Kota Sungai Penuh merupakan pembentukan gugus tugas kota layak anak dan terlantar sehingga meningkatnya jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.77.935.350,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.77.355.350,- kinerja keuangan 99,26% dan kinerja fisik 100%.

b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

Kegiatan Posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada sesama masyarakat khususnya bagi kaum perempuan dan anak dalam rangka

mempercepat angka kematian ibu, angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian anak balita (AKABA) di Indonesia.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.62.168.400,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 59.275.600,- kinerja keuangan 95,35% dan kinerja fisik 95,83%

- c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan melaksanakan 5 (lima) kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.2.340.879.660,- terealisasi Rp.2.105.044.363,- kinerja keuangan 89,93%. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan merupakan pelaksanaan dari sosialisasi terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pelaksanaan perlombaan kecamatan gerakan sayang ibu. Alokasi anggaran Rp.118.594.900,- dengan realisasi Rp.114.893.900,- kinerja keuangan 96,88%.

10) Urusan Ketahanan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Ketahanan Pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional.

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ada tiga alasan utama yang melandasi adanya kesadaran dari semua komponen bangsa atas pentingnya ketahanan pangan yaitu : 1) Akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan Hak Azasi Manusia, 2) Konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, 3) Ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan pangan ekonomi bahkan bagi ketahanan nasional.

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) merupakan merupakan upaya untuk mewujudkan tersedianya pangan yang cukup untuk seluruh penduduk Kota Sungai Penuh. Program ini dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh dengan alokasi anggaran Rp. 1.420.000.000,- dengan realisasi Rp.1.367.097.922,- kinerja keuangan 96,27%.

- b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) merupakan merupakan upaya untuk mewujudkan tersedianya pangan yang cukup untuk seluruh penduduk Kota Sungai Penuh. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sungai Penuh dengan alokasi anggaran Rp.3.219.125.700,- dengan realisasi Rp.3.077.562.326.- kinerja keuangan 95,60%.

11) Urusan Pertanahan

Kewenangan pemerintah kota dalam urusan pertanahan lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Hal ini terlihat dari beberapa kewenangan seperti penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, penetapan tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.

Sedangkan kewenangan dalam hal yang bersifat mengatur antara lain pemberian ijin lokasi, izin membuka tanah, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah kota. Selanjutnya disamping peran tersebut, Pemerintah Kota Sungai Penuh juga melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

a. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan tanah

Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah adalah Program yang melaksanakan menata, menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk pembangunan daerah. Tujuan program ini ialah dalam rangka melaksanakan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam urusan wajib pertanahan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Sungai Penuh dan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Sungai Penuh.

Alokasi anggaran Rp.4.798.113.578,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.886.842.780,- kinerja keuangan 60,16 % dan kinerja fisik 95,51%.

12) Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diarahkan pada pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan dan persampahan, pencegahan terjadinya dampak lingkungan melalui pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan/cadangan sumber daya alam, dan pencegahan bencana, serta mengurangi dampak pemanasan global. Kebijakan pada Urusan Lingkungan Hidup diarahkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim, melalui :

1. Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas
2. Peningkatan peran dan kesadaran pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Sungai Penuh dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh dengan alokasi anggaran Rp. 20.984.782.546,- dengan realisasi Rp. 18.125.984.102,- kinerja keuangan 86,38% dan kinerja fisik 91,99%.

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan diarahkan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sampah dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Capaian indikator sampai Juni 2016 adalah 13,30 %, capaian indikator selama tahun 2016 adalah 73,30%, sumber anggaran APBD.

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 6.324.521.669,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.5.688.950.805,- kinerja keuangan 73,30% dan kinerja fisik 80,67%.

- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup adalah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Capaian indikator sampai Juni 2016 adalah 40,49%, capaian indikator selama tahun 2016 adalah 82,90%, sumber anggaran APBD.
Alokasi anggaran pada program ini Rp. 1.592.506.182,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.1.049.796.522,- kinerja keuangan 82,97% dan realisasi fisik 87,80%. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Program ini adalah peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang LH dan pengembangan data informasi lingkungan. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Capaian indikator sampai Juni 2016 adalah 45,69%, capaian indikator selama tahun 2016 adalah 94,61%, sumber anggaran APBN.
Alokasi anggaran pada program ini Rp. 292.192.064,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 277.508.546,- kinerja keuangan 94,90% dan realisasi fisik 96,50%. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- d. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Program ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui pemeliharaan ruang terbuka hijau dan penyediaan PJU. Program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Sungai Penuh dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh.
Alokasi anggaran pada program ini Rp. 3.268.624.741,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.3.071.874.219,- kinerja keuangan 93,45% dan kinerja fisik 96,50%. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup
- e. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Sungai Penuh.
Alokasi anggaran pada program ini Rp. 1.067.609.360,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.1.018.322.000,- kinerja keuangan 95,30% dan kinerja fisik 85%.

13) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh dan pemerintah Provinsi. Pada tahun anggaran 2016 dalam melaksanakan urusan wajib di bidang Kependudukan dan pencatatan Sipil tersebut memiliki anggaran sebesar Rp. 1.263.215.821,- dimana telah terealisasi sebesar Rp. 1.175.104.444,- atau sebesar 93,02% dan realisasi fisik sebesar 100%. Urusan ini melaksanakan 1 (satu) program dan 8 (delapan) kegiatan.

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien, meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif, meningkatkan sumber daya aparatur, meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan akurasi data base.

Alokasi anggaran Rp. 1.263.215.821,- dimana telah terealisasi sebesar Rp. 1.175.104.444,- atau sebesar 93,02% dan kinerja fisik 100%.

14) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh. Tahun 2016 alokasi anggaran pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Rp. 1.491.800.425,- dengan realisasi Rp. 1.459.317.090,- kinerja keuangan 97,82%.

a. Program Peningkatan Masyarakat Pedesaan.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan bertujuan untuk meningkatkan suatu keberhasilan masyarakat di pedesaan. Alokasi pelaksanaan program Rp. 440.499.400,- terealisasi Rp.438.716.849,- kinerja keuangan 99,59%.

b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Program ini bertujuan menggerakkan dan berdaya upaya menumbuhkan ekonomi masyarakat agar dapat kehidupan dengan ekonomi yang layak.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.76.530.449,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.75.164.439,- kinerja keuangan 98,22% dan kinerja fisik 98,33%.

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa bertujuan untuk meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam upaya membangun desa. Alokasi anggaran Rp. 406.915.828,- terealisasi Rp. 392.794.025,- kinerja keuangan 96,52%.

d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

Program Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan agar tertatanya administrasi desa/kelurahan dengan baik sehingga laporan keuangan yang diberikan data-datanya lebih valid dan dapat dijadikan acuan dalam membuat perencanaan pembangunan dan pemberdayaan desa/kelurahan.

Alokasi anggaran Rp.124.411.300,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.123.903.279,- kinerja keuangan 99,59% dan kinerja fisik 100%.

e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa bertujuan untuk meningkatkan aparatur melalui pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa. Alokasi anggaran Rp. 443.443.448,- terealisasi Rp. 428.788.498,- kinerja keuangan 96,70%.

15) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh. Tahun 2016 alokasi anggaran pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera Rp.1.323.811.814,- dengan realisasi Rp.1.189.889.751,- kinerja keuangan 98,88%.

a. Program Keluarga Berencana.

Kegiatan Pelayanan KIE bertujuan untuk menambah pengetahuan pasangan usia subur dan pentingnya program keluarga berencana.

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.254.485.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.251.225.100,- kinerja keuangan 98,72% dan kinerja fisik 99,17%.

b. Program Pelayanan Kontrasepsi.

Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB bertujuan untuk memberikan pelayanan pemasangan kontrasepsi bagi masyarakat prasejahtera secara gratis.

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.119.785.425,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 115.191.000,- kinerja keuangan 96,16% dan kinerja fisik 96,67%.

c. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri.

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program yang dijalankan pemerintah serta untuk mendukung peningkatan usaha pendapatan keluarga.

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.94.071.125,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.89.555.925,- kinerja keuangan 95,20% dan kinerja fisik 95,83%.

d. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana (KB).

Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling (DAK) dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan kendaraan operasional bagi penyuluh

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.855.470.264,- dengan realisasi Rp.733.917.726,- kinerja keuangan 85,79% dan kinerja fisik 95,83%.

16) Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan yang diserahkan (desentralisasi) dan yang diperbantukan kepada daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada urusan wajib perhubungan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh dan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh dalam rangka melaksanakan urusan yang terkait dengan bidang perhubungan baik dari pengumpulan, pengolahan data, perencanaan, perumusan kebijakan hingga pengendalian dan pengawasan serta evaluasi bidang perhubungan.

Dalam pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain, pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah.

Transportasi atau perhubungan berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi. Rencana tata guna lahan kota dan wilayah harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan. Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Ini berarti transportasi mendukung penuh perkembangan fisik suatu kota atau wilayah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama pada pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu pemerintah secara khusus mengatur penyelenggaraan urusan perhubungan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perencanaan transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kota dan wilayah. Rencana kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola transportasi yang akan terjadi sebagai akibat dari rencana itu sendiri, akan menghasilkan kesemrawutan lalu lintas dikemudian hari. Akibat lebih lanjut adalah meningkatnya jumlah kecelakaan, pelanggaran dan menurunnya sopan santun berlalu lintas, serta meningkatnya pencemaran udara.

- a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ adalah merupakan program tetap di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh untuk rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. Tujuan dari program ini adalah untuk memelihara seluruh fasilitas LLAJ seperti *traffic light*, rambu-rambu, RPPJ dan lain-lain.
Alokasi anggaran pada program ini Rp.492.289.216,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.489.060.420,- kinerja keuangan 99,34% dan kinerja fisik 100%.
- b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan adalah merupakan program tetap Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh untuk upaya meningkatkan pelayanan angkutan. Tujuan dari program ini adalah untuk menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas pada 8 kecamatan di dalam Kota Sungai Penuh.

Alokasi anggaran pada program ini Rp.1.508.854.650,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.1.480.684.320,- kinerja keuangan 98,02% dan kinerja fisik 100%.

c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas adalah merupakan program tetap Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas. Tujuan dari program ini adalah untuk menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas dalam Kota Sungai Penuh dan untuk meningkatkan kenyamanan berlalu lintas.

Alokasi anggaran pada program ini Rp.349.167.174,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.336.803.359,- kinerja keuangan 93,35% dan kinerja fisik 100%.

d. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keselamatan Transportasi Darat.

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keselamatan Transportasi Darat adalah program di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh yang merupakan suatu program yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan keselamatan transportasi darat yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan guna menurunkan tingkat fatalitas (korban meninggal dunia) akibat kecelakaan lalu lintas.

Alokasi anggaran pada program ini Rp.149.220.502,- dengan realisasi Rp.141.872.942,- kinerja keuangan 95,08% dan kinerja fisik 100%.

17) Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika adalah suatu urusan yang berkaitan dengan permasalahan kehumasan dan pengelolaan data telematika yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informasi dengan hasil terselenggaranya penerapan e-Government di instansi pemerintah yang terkait. Perkembangan komunikasi dan informasi bagi pemerintahan sangat perlu ditingkatkan dan diperluas di berbagai bidang di instansi pemerintahan.

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa adalah merupakan program tetap bidang komunikasi dan informasi untuk pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan fasilitas komunikasi dan informasi.

Alokasi anggaran pada program ini Rp.1.860.840.716,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.1.703.661.686,- kinerja keuangan 91,55% dan kinerja fisik 100%.

b. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media adalah merupakan program tetap bidang komunikasi dan informasi untuk kerjasama informasi dengan mass media. Tujuan dari program ini adalah untuk melakukan kerjasama informasi, penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan pengembangan sistem informasi dengan mass media yang sarannya adalah masyarakat Kota Sungai Penuh.

Alokasi anggaran pada program ini Rp.106.514.556,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.105.299.556,- kinerja keuangan 98,86% dan kinerja fisik 100%.

18) Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Fungsi dan peran Koperasi menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut : Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat dengan Prinsip Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip Koperasi, yaitu: Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Alokasi anggaran pada urusan ini Rp.986.658.425,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.78.750.855,- terdiri dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan.

a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah adalah meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi usaha menengah. Tujuan dari program ini ialah menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian.

Alokasi anggaran pada program ini Rp.210.412.570,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp 175.856.025,- kinerja keuangan 83,58% dan kinerja fisik 83,58%.

b. Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah adalah meningkatkan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM. Tujuan dari program ini ialah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

Alokasi anggaran pada program ini Rp.278.159.015,- dengan realisasi anggaran Rp.237.522.850,- kinerja keuangan 96,94%.

c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi adalah program penataan organisasi koperasi baik kelembagaan, permodalan dan usaha koperasi. Tujuan dari program ini ialah terwujudnya koperasi yang mandiri.

Alokasi anggaran Rp. 703.565.415,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 469.379.984,- kinerja keuangan 60,52% dan kinerja fisik 70,83%.

19) Urusan Penanaman Modal

Penanaman Modal di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi

Indikator kinerja program adalah Jumlah dan Nilai Penanaman Modal Daerah dengan capaian pada tahun 2016 adalah Rp. 90.725.856.240,-. Program investasi merupakan faktor pendorong utama timbul dan berkembangnya sektor-sektor lainnya, seperti perdagangan, ekspor-impor, perbankan, transportasi dan informasi, serta penduduk. Hal ini berdampak kepada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Investasi juga dapat menyerap tenaga kerja sehingga memberi dampak kepada penurunan tingkat pengangguran.

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.167.989.200,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.169.360.773,- kinerja keuangan 99,63% dan kinerja fisik 100%.

Pelayanan Perizinan Terpadu

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sungai Penuh bertugas dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simfilikasi, Keamanan Dan Kepastian. Dengan prinsip tersebut akan dapat memangkas jalur birokrasi perizinan, sehingga administrasi pelayanan perizinan akan dapat di akses oleh masyarakat dalam waktu singkat.

Menghadapi persaingan bebas serta tuntutan atas peningkatan pelayanan masyarakat, maka diperlukan penyederhanaan dan kemudahan perizinan. Pemerintah melangkah cepat dengan menerapkan Pelayanan Perizinan Satu Pintu atau One Stop Service (OSS). Penerapan Pelayanan Perizinan Satu Pintu atau One Stop Service ini harus didukung oleh semua jajaran eksekutif dan legislatif. Semua pihak terkait diharapkan mengedepankan semangat melayani, bukan dilayani, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. One Stop Service memberikan pelayanan secara cepat, mudah, transparan dan pasti. One Stop Service adalah jaminan kualitas pelayanan prima.

Urusan Wajib Perizinan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sungai Penuh. Alokasi anggaran pada Urusan Perizinan Rp. 844.325.227,- terealisasi Rp. 790.862.711,- kinerja keuangan 93,67% dan atau 71 izin pada tahun 2016.

a. Program Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

- *Kegiatan Penatausahaan Informasi Pelayanan Perizinan*

Alokasi anggaran Rp. 314.913.046,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 280.619.836,- kinerja keuangan 89,11% dan kinerja fisik 89,40%

- *Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Perizinan.*

Alokasi anggaran Rp. 268.879.820,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 268.480.513,- kinerja keuangan 94,91% dan kinerja fisik 95,20%.

- *Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan.*

Alokasi anggaran Rp. 246.532.361,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 241.762.362,- kinerja keuangan 98,07% dan kinerja fisik 98,30%.

20) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, dalam hal untuk mengupayakan pembentukan generasi pemuda yang tangguh dan berkarakter yang tercermin di dalam visi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh yaitu “Terwujudnya Kualitas Sumberdaya Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam Upaya meningkatkan daya saing Kota Sungai Penuh”. Alokasi anggaran pada urusan ini yang dilaksanakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp. 2.012.752.716,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 1.833.186.110,- kinerja keuangan 91,08%.

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

Indikator kinerja program yaitu jumlah kader-kader pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kepemimpinan, manajemen dan kewirausahaan dengan capaian indikator sampai dengan tahun 2016 adalah 97% (69 desa/kelurahan). Alokasi anggaran Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan sebesar Rp. 920.209.201,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.894.694.101,- dengan kinerja keuangan 97,22%.

- b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

Indikator kinerja program yaitu terciptanya kamandirian pemuda dari kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri dengan capaian indikator sampai dengan tahun 2016 adalah 100% (69 fasilitasi). Secara umum Program ini bertujuan untuk mendorong agar para pemuda terpacu motivasinya untuk berusaha, dan secara khusus program ini bertujuan untuk melatih peserta Secara bertahap agar memiliki kompetisi kewirausahaan dan bisnis, melatih wirausahawan agar mampu bertindak mendirikan usaha yang layak dengan memanfaatkan peluang yang ada pada saat tertentu dan di daerah tertentu, Mengembangkan SDM yang mampu menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan.

Alokasi anggaran pada program ini Rp.36.763.920,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp.34.658.170,- kinerja keuangan 94,27% dan kinerja fisik 100%.

- c. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Indikator kinerja program yaitu terciptanya kamandirian pemuda dari kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri dengan capaian indikator sampai dengan tahun 2016 adalah 99% (175 orang). Tujuannya untuk

meningkatkan pemahaman tentang Napza di kalangan generasi pemuda, terutama masalah pengertian, jenis-jenis Napza, ciri-ciri penyalahgunaan Napza, dampak penyalahgunaan Napza dan penanggulangannya.

Alokasi anggaran pada program ini Rp.69.849.408,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp.59.794.408,- dengan kinerja keuangan 85,60% dan kinerja fisik 99%.

d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

Indikator kinerja program yaitu jumlah peserta perlombaan olahraga massal, festival dan invitasi olahraga sampai dengan tahun 2016 adalah 98,33% (25 Cabor). Alokasi anggaran Program Rp.985.930.187,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp.976.460.771,- dengan kinerja keuangan 99,18%.

21) Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan merupakan urusan yang sangat spesifik yang menggambarkan pola kehidupan masyarakat. Pada tahun 2016 Pemerintah Daerah lebih mengutamakan pada pembinaan dan pendataan keragaman budaya dan peningkatan sarana dan prasarana cagar budaya dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan aspirasi dan kreasi dan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan Kota Sungai Penuh.

Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh dengan alokasi anggaran pada urusan ini Rp.653.708.033,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.563.795.633,- kinerja keuangan 86,25%.

a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Indikator program adalah meningkatnya kualitas pengelolaan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan warisan dan benda cagar budaya dengan capaian sampai tahun 2016 yaitu 99%.

Alokasi anggaran Rp. 65.375.677,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaranRp. 65.080.677,- kinerja keuangan 99,55% dan kinerja fisik 100%.

b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Indikator kinerja program yaitu benda cagar budaya yang dilindungi dan terpelihara dengan capaian indikator sampai dengan tahun 2016 adalah 87,50%. Alokasi anggaran Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan sebesar Rp. 588.332.356,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 498.714.956,- dengan kinerja keuangan 84,77%.

22) Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib yang melaksanakan penyediaan tempat membaca bagi semua masyarakat Kota Sungai Penuh. Perpustakaan yang dimiliki Kota Sungai Penuh telah berjalan kira-kira 2 tahun, bertujuan meningkatkan budaya baca melalui perpustakaan yang dimiliki.

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Kota Sungai Penuh. Tahun 2016 alokasi anggaran pelaksanaan Urusan Perpustakaan Rp.119,346,316,- dengan realisasi Rp. 114.746.153,- kinerja keuangan 96,15% dan kinerja fisik 100%.

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.52.219.503,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.52.219.503,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.

b. Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.67.126.813,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 62.527.650,- kinerja keuangan 93,15% dan kinerja fisik 100%.

23) Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan merupakan salah satu wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan Arsip yang baik adalah suatu keberhasilan bagi suatu pemerintahan yang dijalankan, disamping itu untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian tak terlepas dari pengelolaan kearsipan dengan benar.

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Sungai Penuh. Tahun 2016 alokasi anggaran pelaksanaan Urusan Kearsipan Rp. 69.152.541,- dengan realisasi Rp 67.479.641,- kinerja keuangan 97.58% dan kinerja fisik 100%.

a. Program Peningkatan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip.

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.69.152.541,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 67.479.614,- kinerja keuangan 97,58% dan kinerja fisik 100%.

2.2.1.2 Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Sungai Penuh pada pasal 2 dan 3 tertulis bahwa, Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Bidang Peternakan dan perikanan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaantugas desentralisasi di bidang Peternakan dan Perikanan.

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan merupakan upaya untuk mengembangkan budidaya perikanan untuk Kota Sungai Penuh. Alokasi anggaran untuk program ini adalah Rp. 921.263.250,- dengan realisasi sebesar 920.918.205,- kinerja keuangan 99,96% dan kinerja fisik 100%.

b. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan merupakan upaya untuk mengelola dan memasarkan hasil produksi perikanan masyarakat di Kota Sungai Penuh. Alokasi anggaran untuk program ini adalah Rp. 250.665.250,- dengan realisasi 244.200.664,-.

c. Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari satu kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 1.563.497.928,- dan dana pendamping dari DAU sebesar Rp. 1.529.595.000.

d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak merupakan upaya untuk mewujudkan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak yang ada di Kota Sungai Penuh. Alokasi anggaran untuk program ini adalah Rp. 395.362.362.- dengan realisasi Rp. 384.892.450.- kinerja keuangan 97,35%.

e. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan merupakan upaya untuk meningkatkan produksi hasil peternakan yang akan dipasarkan untuk seluruh penduduk Kota Sungai Penuh. Alokasi anggaran untuk program ini adalah Rp.2.354.245.658.- dengan realisasi Rp.1.737.331.000.- kinerja keuangan 73,80% .

f. Program Peningkatan Pemasaran Produksi Peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Produksi Peternakan merupakan upaya untuk mewujudkan pemasaran produksi peternakan yang meningkat dalam Kota Sungai Penuh. Alokasi anggaran untuk program ini adalah Rp. 193.725.575.- dengan realisasi Rp. 187.379.900.- kinerja keuangan 96,72%%.

g. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut Air Payau dan Air Tawar

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.344.626.500,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.344.496.255,- kinerja keuangan 99,96 dan kinerja fisik 100%.

h. Program Peningkatan Produksi Peternakan

Program peningkatan penerapan produksi peternakan merupakan upaya untuk meningkatkan produksi peternakan bagi petani dalam Kota Sungai Penuh. Alokasi anggaran untuk program ini adalah 1.250.608.200,- dengan realisasi 1.242.490.900,- kinerja keuangan 99,35%.

2) Urusan Pariwisata

Konsep pengembangan pemasaran pariwisata dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Kota Sungai Penuh kepada wisatawan lokal maupun Internasional.

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh. Alokasi anggaran pada urusan ini Rp.1.426.744.275,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp. 1.202.159.850,- kinerja keuangan 84,26%.

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Indikator program adalah meningkatnya kunjungan wisatawan manca negara dan wisata lokal dengan capaian sampai tahun 2016 yaitu 89%.

Alokasi anggaran Rp. 1.004.152.746,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 883.043.046,- kinerja keuangan 87,94% dan kinerja fisik ...%.

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Indikator program adalah peningkatan dalam pengelolaan jasa pariwisata dengan capaian sampai tahun 2016 yaitu 99%.

Alokasi anggaran Rp.300.840.461,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp.296.358.361,- kinerja keuangan 98,51% dan kinerja fisik 100%.

c. Program Pengembangan Kemitraan.

Indikator program adalah meningkatnya pelayanan jasa wisata dalam mempromosikan Kota Sungai Penuh dengan capaian sampai tahun 2016 yaitu 65%.

Alokasi anggaran Rp. 121.751.068,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp.22.758.443,- kinerja keuangan 18,69% dan kinerja fisik ...%.

3) Urusan Pertanian

Sektor pertanian berperan penting terhadap perekonomian daerah, sumbangannya terhadap pendapatan daerah di luar minyak dan gas bumi serta dalam perekonomian rakyat tidak bisa diabaikan. Sejalan dengan hal ini, kondisi pertanian yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki pasar yang luas akan mendapat prioritas utama dalam pengembangannya. Dengan demikian kebutuhan pangan, bahan baku industri, peningkatan lapangan kerja, peningkatan kesempatan berusaha dan peningkatan ekspor komoditi pertanian diharapkan dapat terjamin dan berkesinambungan.

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Indikator kinerja program peningkatan Kesejahteraan Petani adalah Tingkat Frekwensi penyuluhan dan pembinaan dengan capaian sampai 2016 adalah 100%

Program Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petani dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dengan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh. Program ini merupakan urusan pilihan yang merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan ketrampilan dan kemampuan petani. Alokasi anggaran Rp. 1.132.908.070 dengan realisasi Rp. 1.023.322.900,- kinerja keuangan 90,33% dan kinerja fisik 93%.

b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.167.616.500,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.146.545.100,- kinerja keuangan 87,43% dan kinerja fisik 100%, capaian terhadap target RPJMD/Renstra 2,62%.

c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.

Indikator kinerja Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan adalah tersedianya sarana dan prasarana pertanian dengan capaian sampai 2016 adalah 287 unit.

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.136.269.500,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.121.574.500,- kinerja keuangan 89,22% dan kinerja fisik 100%, capaian terhadap target RPJMD/Renstra 2,97%.

d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sungai Penuh. Program ini melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 4.292.845.794,- dengan realisasi Rp.4.188.353.077,- kinerja keuangan 98,71% dan kinerja fisik 100%.

e. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian.

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sungai Penuh. Program ini melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran

Rp. 1.830.793.050,- dengan realisasi Rp.1.825.904.500,- kinerja keuangan 99,71% dan kinerja fisik 100%.

- f. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh dengan alokasi anggaran Rp.1.340.000.000,- realisasi Rp. 1.238.462.240,- kinerja keuangan 92,42% dan kinerja fisik 91%.

4) Urusan Kehutanan

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 565.370.000,- dengan realisasi Rp. 518.010.723,- kinerja keuangan 91,62%.
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 292.167.200,- dengan realisasi Rp. 220.088.650,- kinerja keuangan 87,78%.
- c. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan.
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan merupakan mekanisme pembiayaan pembangunan kehutanan dalam bentuk biaya transfer kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan prioritas nasional di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah. Alokasi anggaran Rp. 1.583.032.750,- dengan realisasi Rp.1.389.612.500,- kinerja keuangan 87,78%

5) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Implementasi urusan pilihan energi dan sumber daya mineral di Kota Sungai Penuh belum ada sumber mineral yang berasal dari hasil bidang pertambangan yang dikelola pemerintah daerah maupun swasta karena belum adanya hasil penelitian yang pasti mengenai hasil sumber daya mineral yang dapat dikembangkan. Namun untuk energi alternatif lain telah dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan, baik dari air, angin, tenaga surya, umbi-umbian dan biji-bijian yang nantinya bisa diolah menjadi biodiesel, termasuk energi biogas dari kotoran ternak maupun biomassa yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan nantinya untuk kebutuhan skala rumah tangga maupun

industri. Alokasi anggaran pada urusan ini Rp. 113.839.400,- dengan realisasi Rp.112.496,000,-.

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan merupakan upaya peningkatan penerimaan daerah dan sektor pertambangan umum, penertiban perizinan kegiatan usaha pertambangan dan pengawasan pengusaha SPPBU dan LPG pada wilayah pemerintah daerah Kota Sungai Penuh. Tujuan pelaksanaan program ini agar terlaksananya pelayanan teknis administrasi yang baik sesuai dengan standar masing-masing organisasi dan meningkatkan kerapian dan disiplin aparatur, terlaksananya pelayanan dan penertiban usaha pertambangan, terlaksananya perencanaan serta pengawasan pertambangan migas dan menyediakan informasi peraturan perundang-undangan disektor energi dan sumber daya mineral.

Alokasi anggaran pada program ini Rp.113.839.400,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp 47.577.500,- kinerja keuangan 41,79% dan kinerja fisik 55,00%.

6) Urusan Perdagangan

Pembangunan kegiatan perdagangan di Kota Sungai Penuh dilaksanakan dengan pengembangan pemasaran dengan pola kemitraan dan promosi produk melalui misi dagang yang berlangsung setiap tahun, sehingga mampu mendukung terhadap pengembangan pangsa pasar dan secara makro mendukung pembangunan ekonomi di kota Sungai Penuh.

Pada urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kota Sungai Penuh dan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir dengan alokasi anggaran Rp. 3.652.247.445,- realisasi keuangan Rp. 3.637.724.628,- kinerja keuangan 95 %.

a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Pedagang adalah mensosialisasikan dan memberi pembinaan kepada pedagang agar tidak melakukan kecurangan dalam proses perdagangan yang akan menyebabkan resiko yang tinggi. Tujuan dari program ini ialah mengamankan konsumen sebagai pengguna akhir dari perbuatan oknum perdagangan yang tidak bertanggung jawab yang sengaja menjual barang yang telah tidak layak diperjual belikan, mensosialisasikan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan jual beli dengan melakukan pemeriksaan kepada barang-barang yang akan dibeli dengan cara cermat dalam memeriksa barang belanjaan.

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 404.448.034,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp347.221.044,- kinerja keuangan 92% dan kinerja fisik 95%.

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor adalah merupakan kebijakan pemerintah dalam peningkatan dan dalam menghadapi era globalisasi dan ekonomi pasar bebas yang sedang berlangsung saat ini. Tujuan dari program ini ialah untuk peningkatan pengembangan pasar dan distribusi atau barang melalui promosi produk unggulan daerahpermodalan, pemasaran dan kerjasama produksi.

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 618.913.190,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp 604.290.170,- kinerja keuangan 96,62% dan kinerja fisik 98%.

c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri adalah peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Tujuan dari program ini ialah untuk memantau harga sembako dan barang penting lainnya, tersedianya harga sembako dan barang penting lainnya 3 kali dalam satu minggu

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 364.120.619,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp 348.663.788,- kinerja keuangan 98,65% dan kinerja fisik 100%.

d. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan.

Alokasi anggaran Rp. 813.283.272,- dengan realisasi anggaran Rp. 807.691.076,- kinerja keuangan 96,40%.

e. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Program Pembinaan pedagang kaki lima merupakan salah satu program pada urusan pilihan yaitu Urusan Perdagangan. Program ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber PAD. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dilaksanakan oleh SKPD Kantor Pengelola Pasar dan Parkir yang meliputi 6 kegiatan yang bersifat pembinaan dan penataan pedagang sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap pedagang dan masyarakat (konsumen) yakni berupa Kegiatan Penyuluhan, Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Operasional Pemungutan Retribusi Pasar, Pengaturan Pemakaian Lokasi Pasar Ramadhan, Penataan dan Penertiban PKL, Pengelolaan K3 Pasar, Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Pasar. Dengan total anggaran sebesar Rp.1.451.482.340,- yang bersumber dari DAU dengan realisasi anggaran Rp.1.429.858.550,- atau mencapai (97,50%).

7) Urusan Industri

Urusan industri merupakan kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan, hasil industri tidak hanya berupa barang tetapi juga dalam bentuk jasa. Tujuan urusan ini untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan SDA dan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kota Sungai Penuh dengan Alokasi anggaran pada urusan ini Rp. 8.471.284.787,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.314.884.391,- terdiri dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan.

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah adalah meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi usaha menengah. Tujuan dari program

ini ialah menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian.

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 827.369.220,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.779.052.732,- kinerja keuangan 94,61% dan kinerja fisik 94,61%.

b. Program Penataan Struktur Industri.

Program Penataan Struktur Industri merupakan program peningkatan kemampuan usaha industri dengan memantapkan aspek kelembagaan usaha dan pelaku usaha industri. Tujuan pelaksanaan program untuk mengembangkan industri baru, meningkatkan efisiensi dan daya saing serta memperluas jenis industri yang berorientasi ekspor, dan memperkuat struktur industri ditinjau dari aspek kelembagaan usaha dan pelaku industri. Penataan struktur industri juga berkaitan erat dengan upaya penyebaran industri ke daerah untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya sekaligus mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri.

Alokasi anggaran Rp. 600.839.400,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp.555.589.050,- kinerja keuangan 20% dan kinerja fisik 95%.

2.2.1.3 Urusan Penunjang yang Dilaksanakan

1) Urusan Perencanaan Pembangunan.

a. Program Pengembangan Data/Informasi

Indikator kinerja program tersedianya data informasi pembangunan daerah 15 dokumen. Program Pengembangan Data/Informasi dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan data dan informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Program ini juga dilaksanakan untuk mengembangkan data-data elektronik seperti Informasi Web-GIS dan website Bappeda Kota Sungai Penuh yang dapat diakses oleh public maupun data elektronik yang hanya digunakan dilingkup Bappeda Kota Sungai Penuh, seperti Sistem Informasi Buku Harian dan Kepegawai.

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp. 619.153.807,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.598.395.607,- kinerja keuangan 96,65% dan kinerja fisik 100%.

b. Program Kerjasama Pembangunan.

Indikator kinerja program tersedianya dokumen kerjasama pembangunan daerah 18 dokumen. Perkembangan dunia usaha khususnya UKM mendapat perhatian yang besar baik oleh pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kota Sungai Penuh selaku kota perdagangan diharap mampu menangkap peluang dan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.80.146.050,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 79.701.900,- kinerja keuangan 99,45% dan kinerja fisik 100%.

c. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai. Disamping itu Program

ini juga bertujuan untuk menginventarisasi data sehingga mendapat suatu rencana pembangunan hunian di Kota Sungai Penuh yang meliputi lokasi, jumlah serta jenis dari perumahan serta permukiman tersebut dalam perencanaan perumahan dan permukiman (RPKP).

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.210.777.598,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 183.726.235,- kinerja keuangan 87,17% dan kinerja fisik 98%.

- d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator kinerja program tersediannya sistem informasi kelembagaan daerah 1 sistem (Web Kota Sungai Penuh). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas aparat perencana Bappeda Kota Sungai Penuh melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga resmi pemerintah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat nasional.

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.130.000.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 129.964.000,- kinerja keuangan 99,97% dan kinerja fisik 100%.

- e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator kinerja program tersediannya dokumen perencanaan pembangunan daerah 126 dokumen. Program Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Bappeda Kota Sungai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program ini merupakan upaya penyelarasan dan sinergitas pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang menjadi tujuan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan.

Kebijakan perencanaan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunan baik untuk jangka menengah maupun pogram pembangunan tahunan.

Untuk program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.732.916.368,- dengan realisasi sebesar Rp.4.600.823.079,- kinerja keuangan 97,21% dan kinerja fisiknya 100%.

- f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Indikator kinerja program tersedianya dokumentasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah 13 dokumen. Program perencanaan pembangunan Ekonomi dilaksanakan dalam rangka menyusun perencanaan Ekonomi untuk mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai kota perdagangan dan jasa, terutama dalam mengembangkan kewirausahaan dengan menjalin kerjasama dengan Pro Indonesia.

Untuk program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp.383.556.660,- dengan realisasi Rp. 380.861.077,- kinerja keuangan 99,30% dan kinerja fisiknya 100%.

- g. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Indikator kinerja program tersedianya dokumentasi perencanaan pembangunan sosial budaya 23 dokumen. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya dilaksanakan dalam rangka menyusun perencanaan dibidang sosial dan budaya yang meliputi

bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, budaya dan tenaga kerja.

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp. 693.364.622,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.658.098.112,- kinerja keuangan 94,91% dan kinerja fisik 100%.

h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Indikator kinerja program tersedianya dokumentasi perencanaan pembangunan sarana dan prasarana dan pemetaan potensi kekayaan sumberdaya alam 20 dokumen. Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam dilaksanakandalam rangka menyusun Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam, Penataan Ruang Wilayah, Rencana Aksi Kota Hijau, Penyusunan Rencana Aksi DaerahPenurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Kajian Sistem dan Manajemen Transportasi Publik Kota Sungai Penuh.

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp. 912.814.283,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.850.632.778,-kinerja keuangan 93,19% dan kinerja fisik 93,19%.

2) Keuangan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah melaksanakan urusan administrasi keuangan daerah, pada tahun 2016 alokasi anggaran pada urusan administrasi keuangan daerah Rp.7.432.416.000,- dengan realisasi Rp. 6.952.787.983,- kinerja keuangan 93,55% dan kinerja fisik 92,28%.

a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran Rp. 811.597.900,- terealisasi 791.318.760,- kinerja keuangan 97,50% dan kinerja fisik 100%.

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator kinerja program adalah terwujudnya tingkat peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 25 (Dua Puluh Lima) kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp. 4.797.916.743,- terealisasi Rp. 4.392.714.074,- kinerja keuangan 91,55% dan kinerja fisik 100%.

c. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja program adalah terfasilitasi evaluasi tentang Ranperda/Perkada tentang keuangan daerah. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp.221.593.000, terealisasi Rp. 179.182.422,- kinerja keuangan 80,86% dan kinerja fisik 80,86%.

d. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator kinerja program adalah ketersediaan dokumen pendukung pengelolaan keuangan daerah. Program penataan peraturan perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 153.030.000,- terealisasi Rp. 150.770.300,- kinerja keuangan 98,52% dan kinerja fisik 100%.

- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah. Indikator kinerja program adalah terwujudnya tingkat kapasitas pengelolaan barang milik daerah. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang daerah melaksanakan 10 (Sepuluh) kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.1.448.278.357,- terealisasi Rp. 1.437.316.177,- kinerja keuangan 99,24% dan kinerja fisik 97,40%.

3) Kepegawaian

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good governace) sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas maka pada tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan urusan memperoleh anggaran sebesar Rp. 4.806.885.901,- Dari dana tersebut, implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Sungai Penuh dijabarkan kedalam 3 program dan 24 kegiatan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2016, dari dana tersebut telah terealisasi sebesar Rp.4.029.820.998,- atau mencapai 83.8%.

- a. Program Pendidikan Kedinasan

Program pendidikan kedinasan diajukan untuk meningkatkan manajemen kepemimpinan bagi aparatur. Alokasi anggaran pada program ini sebesar Rp. 296.351.317,- yang berasal dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp. 289.743.732,- dan kinerja keuangan 97,7% dan realisasi fisik 100%.

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur merupakan program yang dilaksanakan Pemerintah dalam rangka meningkatkan dan menjadikan aparatur yang profesional dalam rangka menunjukkan kapasitas, identitas serta potensi tersembunyi yang ada dalam setiap aparatur sehingga mampu mengembangkan pemikiran yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya di pemerintah daerah pada saat ini. Aparatur dituntut untuk mampu memaksimalkan kapasitas potensial yang dimilikinya, kemudian diaplikasikan secara langsung ke dalam ketugasan pokok dan fungsi mereka sebagai sosok customer atau pelayan yang responsif terhadap keinginan, keperluan atau kebutuhan para pelanggannya baik internal maupun eksternal. Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang profesional dan terampil dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan profesional.

Alokasi anggaran pada program ini sebesar Rp. 163.754.592,- yang berasal dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp. 154.898.950,- dan kinerja keuangan 94,59% dan realisasi fisik 100%.

- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur program yang dilaksanakan Pemerintah dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan tata kelola kepegawaian yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi sehingga memberikan kemudahan, ketepatan, keefisienan dan keefektifan administrasi kepegawaian. Program ini merupakan inti pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di Kota

Sungai Penuh. Tujuan program ini membangun sistem pembinaan PNS yang komprehensif dan membangun sistem pola karir PNS yang terstruktur. Untuk mencapai sasaran program pembinaan dan pengembangan aparatur didukung oleh 21 (dua puluh satu) kegiatan. Alokasi anggaran pada program ini sebesar Rp.4.346.779.992,- dan telah terealisasi sebesar Rp.3.585.178.315,- kinerja keuangan 82,4%.

4) Sekretariat DPRD

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan daerah (ayat (2) pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Sungai Penuh merupakan program yang khusus memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD Kota Sungai Penuh bertujuan untuk menambah wawasan dan pebalaran bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh.
Adapun anggaran pada program ini Rp. 15.859.203.528,- yang bersumber APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 13.132.697.664,- kinerja keuangan 82,81%.
- b. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota adalah dalam rangka untuk pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota.
Alokasi anggaran pada program ini Rp. 145.627.000,- yang bersumber APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp. 133.456.085,- dan kinerja keuangan 91,64 %.
- c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah dalam rangka untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi terhadap informasi pembangunan daerah.
Alokasi anggaran pada program ini Rp.380.154.114,- yang bersumber APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp.286.181.938,- dan kinerja keuangan 75,28%.
- d. Program Peliputan, Penerbitan Penyiaran dan Pelayanan Pers
Program peliputan, penerbitan, penyiaran dan pelayanan pers adalah salah satu program untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan anggota DPRD.
Alokasi anggaran pada program ini Rp.54.924.235,- yang bersumber APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp.48.778.848,- kinerja keuangan 88,81% kinerja fisik 78,00%.

5) Sekretariat Daerah

Untuk tahun 2016 alokasi anggaran Sekretariat Daerah Rp.17.848.858.725,- dengan Jumlah realisasi keuangan Rp.16.740.519.610,- kinerja keuangan 92,11% dan kinerja fisik 97,21%.

a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- *Kegiatan Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan*
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.92,462,000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp.71,483,500,- Kinerja Keuangan 77.31 % dan Kinerja Fisik 100% . Capaian Terhadap RPJMD/Renstra 100%.
- *Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar negeri*
Alokasi Anggaran Kegiatan ini Rp.160.680.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp.110.880.000,- Kinerja Keuangan 69.01% dan Kinerja Fisik 100%. Capaian terhadap RPJMD/Renstra 24 kali.
- *Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah*
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.194.560.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp.161.587.000,- Kinerja Keuangan 83,05% dan Kinerja Fisik 100%. Capaian terhadap RPJMD/Rentra 48 Kali.
- *Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya*
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Rp.1.136.673.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp.1.136.672.209,- Kinerja Keuangan 100% Kinerja Fisik 100%. Capaian terhadap RPJMD/Renstra 525 oh (124 kali).

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

- *Kegiatan Pelaksanaan Operasional Perlengkapan*
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Rp.640.700.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp.528.218.500,- Kinerja Keuangan 82,44% dan Kinerja Fisik 100%. Capaian terhadap RPJMD/Renstra 48 Kali.

c. Program Pelayanan Informasi dan Lintas Sektoral

- *Kegiatan Dokumentasi dan Publikasi*
Kegiatan Dokumentasi dan Publikasi ini bertujuan untuk Memberikan atau Menyediakan Segala Bentuk Informasi Pembangunan Kepada Masyarakat.
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.316.281.400,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp.304.366.700,- kinerja keuangan 96,23% dan kinerja fisik 996,23%.

d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- *Kegiatan Pelaksanaan Upacara dan Acara Kedinasan*
Kegiatan ini Melaksanakan Kegiatan/ Acara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.408.836.750,- yang bersumber dari Dana APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp. 407.631.050,- Kinerja Keuangan 99,71% dan Kinerja Fisik 99,71%.

- *Kegiatan Pelayanan Tamu Daerah*

Kegiatan ini Melaksanakan Seluruh Kegiatan Pelayanan Tamu Daerah.

Alokasi anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.270.478.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp. 269.153.617,- Kinerja Keuangan 99,51% dan Kinerja Fisik 99,51%.

e. Program Peliputan, Penerbitan, Penyiaran dan Pelayanan Pers.

- *Kegiatan Peliputan dan Pembuatan Berita.*

Terlaksananya Kegiatan Peliputan dan Pembuatan Berita Selama Tahun Anggaran 2015.

Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.307.835.000,- yang Bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp.301.213.334,- Kinerja Keuangan 97,85% dan Kinerja Fisik 97,85%.

- *Kegiatan Penyiaran Berita dan Pengaduan Koran*

Melaksanakan Penyebaran Informasi Pembangunan Kepada Masyarakat Melalui Media Cetak dan Elektronik.

Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Rp.1.250.750.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp.1.227.155.300,- Kinerja Keuangan 98,11 % dan Kinerja Fisik 98,11%.

- *Kegiatan Jumpa Pers*

Melaksanakan Kegiatan Jumpa Pers dan Pembuatan Berita di Media Cetak. *Keluaran* Kegiatan ini adalah Terlaksananya Jumpa Pers dan Penerbitan Berita Pada Media Cetak. *Hasil* Kegiatan ini adalah Terbangunnya Komunikasi dan Hubungan Baik Dengan Insan Pers Sekaligus Tersosialisasi Informasi Pembangunan.

Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.101.974.850,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp.101.810.000,- Kinerja Keuangan 99,84% dan Kinerja Fisik 99,84%.

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- *Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keuangan*

Kegiatan ini Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keuangan.

Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.227.284.740,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh Realisasi Keuangan Rp.219.045.860,- Kinerja Keuangan 96,38% dan Kinerja Fisik 100%.

- *Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran.*

Kegiatan ini adalah Melaksanakan Penyusunan Program dan Anggaran.

Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.192.112.160,- yang Bersumber dari Dana APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp.188.816.111,- Kinerja Keuangan 98,28% dan Kinerja Fisik 100%.

- g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
- *Kegiatan Verifikasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh*
Melaksanakan Verifikasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.213.204.625,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp.211.266.996,- kinerja keuangan 99,09% dan Kinerja Fisik 100%.
- h. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.
- *Kegiatan Analisis Kebijakan Kepala Daerah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.*
Kegiatan ini Melaksanakan Analisa Kebijakan KDH di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.193.917.500,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp.177.733.550,- kinerja keuangan 91.66% dan kinerja fisik 93,65%.
- i. Program Pengendalian Bidang Pembangunan
- *Kegiatan Pembinaan Administrasi Pelaporan dan Progres Fisik APBD*
Kegiatan ini melaksanakan rapat pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.153.546.800,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp.142.642.700,- kinerja keuangan 92,83 % dan kinerja fisik 92,83%.
 - *Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.*
Kegiatan ini melaksanakan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.
Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.181.608.300,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp.172.524.800,- kinerja keuangan 95% dan kinerja fisik 97% .
 - *Kegiatan Penyusunan Program Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Sekretariat Kota Sungai penuh.*
Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Program Kegiatan Pembangunan di Lingkup Setda Kota Sungai Penuh.
Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.126.507.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp.125.169.700,- kinerja keuangan 98,94 % dan kinerja fisik 99,50% .
- j. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- *Kegiatan Operasional Pembentukan Unit Layanan (ULP)*
Kegiatan ini Melaksanakan Operasional ULP Kota Sungai Penuh dan Pembinaan Pokja ULP.
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.262.148.600,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp.253.430.200,- Kinerja Keuangan 96,67 % dan Kinerja Fisik 96,67%

- *Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*
Kegiatan ini melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.159.598.400,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp.157.824.133,- Kinerja Keuangan 98,89 % dan Kinerja Fisik 98,89%.
- k. Program Peningkatan dan Pengendalian Perekonomian.
 - *Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian*
Kegiatan ini Mengkoordinir dan Mengevaluasi Kegiatan SKPD terkait Bidang Perekonomian.
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.156.617.050,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp. 149.848.550,- kinerja keuangan 95,68% Kinerja Fisik 97,68%.
 - *Kegiatan Pengendalian Kegiatan Bidang Perekonomian*
Kegiatan ini Mengkoordinir dan Mengevaluasi Kegiatan SKPD Terkait Bidang Perekonomian.
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.164.301.750,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp. 158.115.900,- Kinerja Keuangan 96,24% Kinerja Fisik 99,24%.
 - *Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Raskin*
Kegiatan ini Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Raskin di Setiap Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh.
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Rp.133.993.350,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh Realisasi Keuangan Rp.129.820.100,- Kinerja Keuangan 96,89% dan Kinerja Fisik 98,89%
 - *Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida*
Kegiatan ini Melaksanakan Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Setiap Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh.
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.144.394.250,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp. 137.834.550,- Kinerja Keuangan 95,46% dan Kinerja Fisik 97,46%.
 - *Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah*
Kegiatan ini Terlaksananya Pengendalian Bidang Perekonomian.
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.163.786.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh Realisasi Keuangan Rp.161.413.500,- Kinerja Keuangan 98,55% dan Kinerja Fisik 99,55%.
- l. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - *Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan*
Kegiatan ini Terlaksananya Pemilihan Camat Teladan Kota Sungai Penuh Tahun 2016 dan Pelaksanaan rakor Camat.
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.146.688.400,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh Realisasi Keuangan Rp.142.486.900,- Kinerja Keuangan 97,14% dan Kinerja Fisik 100%.

m. Program Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan.

- *Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan*

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dalam Rangka Melaksanakan Rapat Koordinasi di Bidang Pemerintahan.

Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.500.191.294,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp.455.527.600,- kinerja keuangan 91,07 % dan kinerja fisik 91,07%.

- *Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)*

Pelaksanaan Kegiatan Dilaksanakan dalam Rangka Menyusun LPPD Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.243.918.634,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Rp.241.751.304,- Kinerja Keuangan 99,11% dan Kinerja Fisik 99,11%.

- *Kegiatan Penyusunan Laporan Buku Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota.*

Pelaksanaan Kegiatan Dilaksanakan dalam Rangka Agar Tersusunnya Buku Laporan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh.

Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.83.962.984,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp. 79.938.524,- Kinerja Keuangan 95,21% dan Kinerja Fisik 95,21%.

- *Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).*

Pelaksanaan Kegiatan ini dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp. 145.156.800,- yang bersumber dari Dana APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp. 139.730.100,- Kinerja Keuangan 96,26% dan Kinerja fisik 96,26%.

n. Program Penataan dan Pengembangan Wilayah Administrasi

- *Kegiatan Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi*

Pelaksanaan Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi tujuannya tercapainya Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi.

Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.128.744.700,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi Keuangan Rp.124.028.700,- Kinerja Keuangan 96,34 % dan Kinerja Fisik 96,34%.

o. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

- *Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga.*

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.

Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini Rp.153.518.300,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi

Keuangan Rp. 144.401.300,- Kinerja Keuangan 94,06% dan Kinerja Fisik 100%.

p. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

- *Fasilitasi Percepatan Penyerahan P3D dari Daerah Induk ke Daerah Pemekaran.*

Pelaksanaannya dalam Rangka Mempercepat Proses Penyerahan P3D dari Daerah Induk ke Daerah Pemekaran.

Alokasi anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Rp.311.874.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh Realisasi Keuangan Rp. 305.463.250,- Kinerja Keuangan 97,94% dan Kinerja Fisik 97,94%.

- *Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah.*

Kegiatan ini dilaksanakan dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Daerah. *Keluaran* 30 Km. Hasil Kegiatan ini adalah Peta Kecamatan.

Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Rp.145.489.700,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh, dengan Realisasi Keuangan Rp. 131.290.100,- Kinerja Keuangan 90,24% dan Kinerja Fisik 90,24%.

q. Program Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan.

- *Kegiatan Pembinaan Kehidupan Beragama/Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB).*

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp.554.729.738,- yang bersumber dari APBD kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 468.884.756,- kinerja keuangan 84,52% dan kinerja fisik 99%. Capaian terhadap target RPJMD/ Renstra 100%.

- *Kegiatan Pembinaan TPA/TPSA*

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 1.189.340.844,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 1.108.628.680,- kinerja keuangan 93,21% dan kinerja fisik 95%. Capaian terhadap target RPJMD/ Renstra 100%

- *Kegiatan Koodinasi Bina Sosial*

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp.202.370.725,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 181.741.386,- kinerja keuangan 89,81% dan kinerja fisik 95%. Capaian terhadap target RPJMD/ Renstra 100%.

r. Program kegiatan Pembinaan Pendidikan Mental dan Spritual

- *Kegiatan Peningkatan Pembinaan Pengamalan Alqur'an.*

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 1.731.673.904,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp.1.595.675.907,- kinerja keuangan 92,15% dan kinerja fisik 95%. Capaian terhadap target RPJMD/ Renstra 100%.

- *Kegiatan Koordinasi Kesehatan.*

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 236.954.558,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan 207.012.200,- kinerja keuangan 87,36% dan kinerja fisik 93%. Capaian terhadap target RPJMD/ Renstra 100%.

- *Kegiatan Pembinaan Festival Anak Soleh Indonesia*
Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp.178.161.647,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 45.420.000,- kinerja keuangan 25,49% dan kinerja fisik 59%. Capaian terhadap target RPJMD/ Renstra 100%.

 - *Kegiatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*
Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 139.768.584,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 96.033.950,- kinerja keuangan 68,71% dan kinerja fisik 80 %. Capaian terhadap target RPJMD/ Renstra 100%.
- s. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- *Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah.*
Pelaksanaan *Kegiatan* Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah.
Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.208.439.400,- yang bersumber dari dana APBD Kota Sungai penuh dengan realisasi keuangan Rp. 199.521.988,- kinerja keuangan Rp. 95,72% dan kinerja fisik 100%.
 - *Kegiatan Analisis Kebijakan Kepala Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik*
Pelaksanaan *Kegiatan* Analisis Kebijakan Kepala Daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.218.400.000,- yang bersumber dari dana APBD Kota Sungai penuh dengan realisasi keuangan Rp. 216.403.381,- kinerja keuangan Rp. 99,09% dan kinerja fisik 100%.
- t. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- *Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan.*
Kegiatan ini memberikan konsultasi dan telaahan permasalahan peraturan perundang-undangan. *Keluaran* kegiatan ini adalah 10 kali.
Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.147.266.400,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 145.721.801,- kinerja keuangan 98,95% dan kinerja fisik 98,95%
 - *Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan.*
Kegiatan ini pelaksanaannya menyusun program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2017.
Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.53.456.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 52.434.000,- kinerja keuangan Rp. 98,09% dan kinerja fisik 100%.
 - *Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan*
Pelaksanaan kegiatan ini untuk membuat produk hukum daerah (Perda, Perwako, dan SK).

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.321.784.800,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 308,619,124,- kinerja keuangan 95,91% dan kinerja fisik 100%.

- *Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan*

Pelaksanaan kegiatan mengetahui jumlah orang yang tersosialisasi.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp.116.787.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 112.524,626,- kinerja keuangan 96,35 % dan kinerja fisik 100%.

- *Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan*

Kegiatan publikasi Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan penyusunan LD perda, BD perwako, Himpunan SK, Warta perundang-undangan dan Buku Peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp.267.579.400,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai penuh dengan realisasi keuangan Rp. 264,154.678,- kinerja keuangan 98,72% dan kinerja fisik 100%.

- *Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah.*

Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan Daerah.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp.118.594.800,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 116.006.711,- kinerja keuangan 97,82% kinerja fisik 97,82%.

- *Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Sungai Penuh.*

Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota sungai Penuh.

Alokasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 148.542.500,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 143.043,200,- kinerja keuangan 96,30% dan kinerja fisik 100%

- *Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Lomba Keluarga Sadar Hukum*
Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan lomba Keluarga Sadar Hukum.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 110.140.200,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan 106.751.525,- kinerja keuangan 96,92% dan kinerja fisik 100%.

- *Kegiatan Pengembangan Website JDIH Kota Sungai Penuh dan Operasional Website JDIH*

Terlaksananya pengembangan Website JDIH Kota Sungai Penuh dan Operasional JDIH.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 119.009.500,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh Rp. 115.944.206,- kinerja keuangan 97,42% kinerja fisik 100%.

- u. Program Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- *Kegiatan Analisis Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kemasyarakatan dan SDM*
Kegiatan Analisis Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.196.850.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 169.543.172,- kinerja keuangan 86,13 % dan kinerja fisik 90%.
- v. Program Peningkatan Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan
- *Kegiatan Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur.*
Kegiatan ini Untuk melaksanakan kegiatan Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur tahun 2016.
Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.164.689.560,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 162.758.686,- kinerja keuangan 98,83 % dan kinerja fisik 100%.
 - *Kegiatan Penataan Organisasi Kelembagaan Perangkat Daerah*
Kegiatan ini merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp.320.716.940,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 314.624.469,- kinerja keuangan 98,10 % dan kinerja fisik 100%.
 - *Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi*
Kegiatan ini merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi pemerintahan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintah daerah.
Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.137.989.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 107.255.851,- kinerja keuangan 77,73% dan kinerja fisik 90%.
 - *Kegiatan Pendayagunaan Kepegawaian dan Perpustakaan Setda*
Kegiatan ini mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak, dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya aparatur yang mempunyai budaya membaca dan belajar.
Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan in Rp.139.336.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp.139.015.331,- kinerja keuangan 99,77% dan kinerja fisik 100%.
 - *Kegiatan Pembinaan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).*
Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk

dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.142.980.688,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 140.353.778,- kinerja keuangan 98,16% dan kinerja fisik 100%.

- *Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)*

Kegiatan ini merupakan serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah. SOP dirumuskan dengan mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan/ atau pejabat yang membidangi ketatausahaan.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.43.076.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai dengan realisasi keuangan 42.433.400,- kinerja keuangan 98,51% dan kinerja fisik 100%.

- *Kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja*

Kegiatan ini bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala bidang. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang terjadi saat ini profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.228.578.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 222.681.450,- kinerja keuangan 97,42% dan kinerja fisik 100%.

w. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

- *Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik*

Merupakan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik merupakan kegiatan penyusunan sistem informasi manajemen layanan publik yang berupa aplikasi dan system serta melaksanakan koordinasi dan sinergisitas pada SKPD terkait.

Alokasi Anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.79.575.100,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp.79.233.066,- kinerja keuangan 99,57% dan kinerja fisik 99,57%.

- *Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian dan Tunjangan PNS*

Merupakan kegiatan pengelolaan dan operasional berupa pencatatan dan pencetakan daftar gaji PNS lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan menggunakan Sistem Aplikasi Gaji (SIM-Gaji).

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.200.893.700,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp.200.774.435,- kinerja keuangan 99,94% dan kinerja fisik 99,94%.

- *Kegiatan Pengembangan Jaringan Teknologi Informatika*

Merupakan kegiatan mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp.458.477.400,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp.455.076.353,- kinerja keuangan 99,26% dan kinerja fisik 99,26%.

- *Kegiatan Asistensi Pengolahan Data Elektronik*

Merupakan kegiatan yang mengkoordinasikan, menjabarkan dan membuat regulasi/aturan-aturan, standar operasional prosedur, petunjuk teknis dan master plan rencana pengolahan data elektronik dalam pelaksanaan implementasi pengembangan layanan publik lingkup pemerintah Kota Sungai Penuh.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp.187.521.500,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.184.304.342,- kinerja keuangan 98,28% dan kinerja fisik 98,28%.

- *Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Pusat, Daerah dan Santelda.*

Merupakan upaya meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk komunikasi atau informasi bersandi dan bentuk lainnya.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp.69.482.500,- yang bersumber dari dana APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 67.647.520,- kinerja keuangan 97,36% dan kinerja fisik 97,36%.

- *Kegiatan Operasional Website Sebagai Media Informasi Publik Pemerintah Kota Sungai Penuh.*

Merupakan upaya meningkatkan Koordinasi dan pertukaran informasi layanan publik guna optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk komunikasi atau informasi layanan publik yang berbentuk media pengolahan data, sistem informasi publik yaitu operasional Website Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Alokasi Anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 201.896.000 yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi keuangan Rp. 200.020.000,- kinerja keuangan 99,07% dan kinerja fisik 99,07%.

6) Inspektorat

Urusan Inspektorat di Indonesia diatur melalui Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Indikator kinerja program adalah terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan dengan capaian sampai dengan tahun 2016 sebesar 96,22%. Sebagai Pengawas internal dalam organisasi pemerintah daerah, inspektorat memiliki tugas pokok untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Daerah telah

dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana. Indikator program ini adalah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.2.762.473.100.00,-yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 2.726.407.761.00,- kinerja keuangan 96,117% dan kinerja fisik 100%.

b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Indikator kinerja program adalah tercapainya jumlah aparatur pengawas yang mempunyai kemampuan dibidang pengawasan dengan capaian sampai dengan tahun 2016 sebanyak 48 orang. Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap objek pemeriksaan (Obrik)

Alokasi Anggaran pelaksanaan program ini Rp.265.245.050,00-yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan Realisasi keuangan Rp. 259.745.238,00- kinerja keuangan 97,93% dan kinerja fisik 100 %.

c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Indikator kinerja program adalah terlaksananya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dengan capaian sampai dengan tahun 2016 yaitu 1 dokumen, 6 SOP. Selaras dengan fungsi Inspektorat Kota Sungai Penuh dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektorat Kota Sungai Penuh perlu menyusun Program Kerja Pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih operasional audit dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lain; dan menghindari pengawasan yang bertubi-tubi untuk efektivitas, efisiensi, dan ekonomis pelaksanaan pengawasan.

Alokasi anggaran pelaksanaan program ini Rp.124.154.800,-yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.123.084.480,- kinerja keuangan 99,14% dan kinerja fisik 100%.

7) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Walikota Sungai Penuh melalui Sekretaris Daerah sekaligus wadah untuk berhimpun bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil. Pada Sekretariat KORPRI terdapat beberapa program dan kegiatan yang memiliki Alokasi Dana Sebesar Rp. 707.743.128,-dengan realisasi keuangan sebesar Rp.694.045.040.- Kinerja Keuangan 98,06%, arah kebijakan umum Sekretariat KORPRI sebagai satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh Pegawai Republik Indonesia di luar Kedinasan, dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971, Tanggal 29 November 1971 yang lalu dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tanggal 4 November 2010 tentang pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Pegawai Republik Indonesia serta Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 bahwa Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik

Indonesia Mempunyai Tugas Pokok dukungan Tekhnis Operasional dan Administrasi pada pengurus Korpri Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap unsur dalam dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Sungai Penuh.

- a. Program Pendidikan Mental dan Spritual
Pelaksanaan Program pembinaan Pendidikan mental spritual dengan kegiatan yaitu pelaksanaan MTQ Korpri antara Satuan Perangkat Daerah dari uraian kegiatan tersebut capaian Indikator sampai Juni 2016 mencapai 62% Alokasi Anggaran pelaksanaan kegiatan ini Rp. 32.000.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dengan Realisasi Anggaran sebanyak Rp. 31.461.513,-Realisasi Keuangan Rp. 31.461.513,- kinerja keuangan 98,32 %.
- b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Pelaksanaan Program pembinaan dan Perasyarakatan Olah Raga dengan Alokasi Anggaran kegiatan ini Rp. 110.020.273,- denganrealisasianggaransebanyakRp.109.150.149,- atau kinerja keuangan 99,21%.
- c. Program Peningkatan Penataan Organisasidan Ketatalaksanaan
Pelaksanaan Program peningkatan penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan dari uraian kegiatan tersebut capaian Alokasi Anggaran Rp.100.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.99.053.588,- kinerja keuangan 99,05%.

8) Kecamatan

Kecamatan Sungai Penuh

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - *Kegiatan Pembinaan dan Lomba Desa.*
Kegiatan ini melaksanakan pembinaan dan lomba desa sehingga terpenuhinya pembinaan dan lomba desa. Alokasi anggaran Rp.27.257.900,- dengan realisasi Rp. Rp. 27.212.900,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.
 - *Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban.*
Kegiatan ini melaksanakan pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban Kec Sungai penuh. Alokasi anggaran Rp. 25.357.000,- dengan realisasi Rp.25.167.750,-kinerja keuangan 99% dan kinerja fisik 100%
 - *Kegiatan Pengelolaan Raskin.*
Kegiatan ini menyediakan pengelolaan Raskin di Kecamatan Sungai Penuh sehingga terselenggaranya dan tersalurkanya Raskin kemasyarakat tidak mampu di Kecamatan Sungai Penuh. Alokasi anggaran Rp.6.169.000,-dengan realisasi Rp. Rp. 6.099.000,- kinerja keuangan 99% dan kinerja fisik 100%.
 - *Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Keagamaan.*
Kegiatan ini melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan social keagamaan sehingga terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan social kemasyarakatan. Alokasi anggaran Rp. 74.000.750,-dengan realisasi Rp.73.898.650,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.
 - *Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Teknologi Tepat guna*

Kegiatan ini dilaksanakan agar tercapainya Pembinaan dan Fasilitasi Teknologi Tepat Guna. Alokasi anggaran Rp. 11.134.500,- dengan realisasi Rp. 11.023.340,- kinerja keuangan 99% dan kinerja fisik 100%.

- b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Kegiatan ini melaksanakan pembinaan generasi muda, seni dan budaya sehingga terlaksananya pecan harmoni budaya kecamatan dan hasilnya meningkatkan SDM generasi muda serta dapat melaksanakan seni dan budaya. Alokasi anggaran Rp. 20.945.500,- dengan realisasi Rp. Rp. 20.915.500,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.
- c. Program Pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan
Program ini melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan alokasi anggaran Rp 12.909.000,- dengan realisasi 12.889.000,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%
- d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Program ini melaksanakan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa tingkat kecamatan alokasi anggaran Rp. 10.000.000,- dengan realisasi Rp. 9.970.500,- kinerja keuangan 100% dan realisasi fisik 100%.
- e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program ini melaksanakan pembinaan dan fasilitasi alokasi dan desa sehingga terlaksananya pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa. Alokasi anggaran Rp. 5.959.000,- dengan realisasi Rp. 5.907.500,- kinerja keuangan 99% dan kinerja fisik 100%.
- f. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak-anak.
Program ini melaksanakan pemberdayaan lembaga yang berbasis gender sehingga terlaksananya peningkatan dan pelaksanaan PKK dan hasilnya terlaksananya kegiatan 10 program pokok PKK. Alokasi anggaran Rp. 41.734.500,- dengan realisasi Rp. Rp. 39.692.500,- kinerja keuangan 95% dan kinerja fisik 100%.

Kecamatan Hampan Rawang

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - *Kegiatan pembinaan dan Lomba Desa*
Kegiatan ini melaksanakan pembinaan dan lomba desa sehingga terpenuhinya pembinaan dan lomba desa. Alokasi anggaran Rp. 23.216.326,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 23.216.326,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.
 - *Kegiatan pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban*
Kegiatan ini melaksanakan pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban. Alokasi anggaran Rp. 18.158.830,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 18.158.830,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.
 - *Kegiatan pengelolaan raskin*
Kegiatan ini menyediakan pengelolaan raskin di Kecamatan Hampan Rawang sehingga terselenggaranya dan tersalurkannya raskin ke masyarakat tidak mampu di Kecamatan Hampan Rawang. Alokasi anggaran Rp. 15.000.000,- yang bersumber dari APBD Kota

Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 14.963.400,- kinerja keuangan 99,76% dan kinerja fisik 100%.

- *Kegiatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial keagamaan.*

Kegiatan ini melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial keagamaan sehingga terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan. Alokasi anggaran Rp. 88.520.565,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 88.520.565,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.

- b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program ini melaksanakan pembinaan dan pengembangan lembaga ekonomi desa sehingga terlaksananya pembinaan dan pengembangan ekonomi desa. Alokasi anggaran Rp. 16.758.834,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 16.720.592,- kinerja keuangan 99,77% dan kinerja fisik 100%.

- c. Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender

Program ini melaksanakan pemberdayaan lembaga yang berbasis gender sehingga terlaksananya peningkatan dan pelaksanaan PKK dan hasilnya terlaksananya kegiatan 10 program pokok PKK.

Alokasi anggaran Rp. 48.050.900,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 46.810.900,- kinerja keuangan 97,42% dan kinerja fisik 100%.

- d. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini melaksanakan pembinaan generasi muda, seni dan budaya sehingga terlaksananya pekan harmoni budaya kecamatan dan hasilnya meningkatkan SDM generasi muda serta dapat melaksanakannya.

Alokasi anggaran Rp. 42.058.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 42.058.000,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.

Kecamatan Pesisir Bukit

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- *Kegiatan Pembinaan dan Lomba Desa*

Kegiatan ini melaksanakan pembinaan dan lomba desa sehingga terselenggaranya kegiatan pembinaan dan lomba desa dengan Alokasi Anggaran Rp. 8.625.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 8.625.000,- kinerja keuangan 100 % dan kinerja fisik 100 %

- *Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban*

Kegiatan ini melaksanakan pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban terselenggaranya kegiatan pembinaan monitoring keamanan dan ketertiban. Alokasi Anggaran Rp. 22.920.000,- yang bersumber dari dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 22.920.000,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100 %.

- *Kegiatan Pengelolaan Raskin*

Kegiatan ini melaksanakan pengelolaan Raskin di Kecamatan Pesisir Bukit sehingga terselenggara dan tersalurkan Raskin ke masyarakat. Alokasi Anggaran Rp.10.000.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.10.000.000,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100 %.

- *Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan sosial keagamaan.*

Kegiatan ini melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial keagamaan sehingga terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial keagamaan. Alokasi Anggaran Rp.76.420.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.76.420.000,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100 %.

- *Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan berbasis gender*
Kegiatan ini melaksanakan pemberdayaan lembaga yang berbasis gender sehingga terlaksananya pemberdayaan lembaga yang berbasis gender. Alokasi Anggaran Rp. 50.000.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.50.000.000,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.
- b. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Program ini melaksanakan pembinaan generasi muda, seni dan budaya sehingga terlaksananya Pekan Harmoni Budaya Kecamatan dan hasilnya meningkatnya SDM Generasi Muda serta dapat melaksanakan Seni dan Budaya. Alokasi Anggaran Rp.22.045.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 22.045.000,- kinerja keuangan 100 % dan kinerja fisik 100 %.
- c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
Program ini melaksanakan musyawarah pembangunan desa sehingga terlaksananya pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa. Alokasi Anggaran Rp. 13.170.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp.13.170.000,- Kinerja Keuangan 100 % dan kinerja fisik 100 %
- d. Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa.
Program ini melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa sehingga terlaksananya pembinaan dan fasilitasi Alokasi Dana Desa. Alokasi Anggaran Rp.12.629.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi Rp. 12.629.000,- kinerja keuangan 100 % dan kinerja fisik 100 %.

Kecamatan Kumun Debai

- a. Program Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah suatu pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan yang ada di kecamatan untuk melayani masyarakat yang akan berurusan dengan pemerintahan kecamatan yang dilakukan dengan mudah dan cepat. Kegiatan ini dilaksanakan agar terlaksananya pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) kepada masyarakat. Alokasi anggaran Rp. 15.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.15.000.000,-kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.
- b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Lomba Desa dilaksanakan dalam dua tahap yaitu pelaksanaan lomba desa tingkat Kecamatan untuk mendapatkan juara yang kemudian dilombakan untuk tingkat Kota Sungai Penuh. Penilaian lomba desa ditentukan berdasarkan kriteria yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan agar terlaksananya pembinaan dan lomba desa terciptanya desa yang bersih. Alokasi anggaran Rp.22.514.300,00,- dengan realisasi keuangan Rp. 22.254.300,00,- kinerja keuangan 98,85% dan kinerja fisik100%.
- *Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban (K3).*

Monitoring keamanan dan ketertiban di kecamatan Kumun Debai dilaksanakan untuk menciptakan suasana kecamatan yang aman dan kondusif. Pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pembinaan dan memberi pengarahan kepada Kepala Desa untuk dapat memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum guna mendapatkan kondisi lingkungan yang aman dan tentram agar terlaksananya pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban serta terciptanya keamanan dan ketertiban kecamatan yang kondusif. Alokasi anggaran Rp.21.826.469,- dengan realisasi keuangan Rp. 21.826.469,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.

- *Kegiatan Pengelolaan Raskin*

Pengelolaan raskin Kecamatan adalah pemberian rekomendasi untuk penebusan raskin yang akan dibagikan kepada RTS-PM raskin ditingkat desa. Selain itu kecamatan juga memberikan laporan kepada pihak yang terkait mengenai masalah raskin. Agar terlaksananya kegiatan pengelolaan raskin di kecamatan dan tersalurkannya raskin ke RTS-PM raskin. Alokasi anggaran Rp. 15.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.14.990.000,- kinerja keuangan 99,93% dan kinerja fisik 100%.

- *Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial dan Keagamaan*

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pembinaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan sosial dan keagamaan, terutama pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan dan Kota, serta melaksanakan kegiatan pembinaan generasi muda dan LPTQ agar terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan social keagamaan serta terlaksananya kegiatan MTQ dan kegiatan sosial keagamaan. Alokasi anggaran Rp. 80.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.79.190.000,00- kinerja keuangan 98,99% dan kinerja fisik100%.

c. Program Peningkatan peran Serta Kepemudaan

Program ini membina Generasi muda, seni dan budaya bertujuan untuk menumbuhkan semangat untuk melaksanakan atau melestarikan budaya yang ada di Indonesia umumnya dan khususnya budaya yang ada di Provinsi Jambi agar terlaksananya pekan harmoni dan budaya kecamatan. Alokasi anggaran Rp. 37.721.700,00- dengan realisasi keuangan Rp.37.701.700,00- kinerja keuangan 99,94% dan kinerja fisik100%.

d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Musyawarah pembangunan desa di Kecamatan Kumun Debai dilaksanakan pada triwulan 1, Musrenbang Kecamatan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari 9 (sembilan) desa di Kecamatan Kumun Debai agar program pembangunan di Kecamatan (khususnya desa) dapat diapresiasi oleh pemerintah agar terlaksananya fasilitasi kegiatan musyawarah pembangunan dan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kecamatan. Alokasi anggaran Rp. 18.536.700,- dengan realisasi keuangan Rp.18.041.500,- kinerja keuangan 97,32% dan kinerja fisik 100%.

e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program fasilitasi alokasi dana desa (ADD) dilaksanakan oleh Kecamatan dengan melibatkan Kepala Desa dan Aparatur Desa. Kegiatan ini dimaksud agar pencairan ADD dapat berjalan sesuai dengan jadwalnya agar terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi ADD serta tersedianya dokumen pertanggungjawaban alokasi dana desa. Alokasi anggaran Rp.15.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 14.690.170,- kinerja keuangan 97,93% dan kinerja fisik 100%. Pada kegiatan ini masih terdapat desa yang mengalami keterlambatan pencairan.

- f. Program Penguatan Kelembagaan Pengarususahaan Gender dan Anak
Program ini dilaksanakan oleh gerakan PKK Kecamatan dengan melibatkan gerakan PKK desa dengan menghasilkan pendapat dan keterampilan yang diperlukan dalam upaya meningkatkan masyarakat social dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga serta meningkatkan pemanfaatan perkarangan sehingga terlaksananya dan meningkatnya derajat kesehatan fisik dan melestarikan lingkungan hidup serta membiasakan berencana untuk kehidupannya serta tersedianya dalam peningkatan pengelolaan gerakan PKK baik administrasi maupun program sesuai kondisi situasi setempat. Alokasi anggaran Rp.50.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.49.229.000,- kinerja keuangan 98,46% dan kinerja fisik 98,46%.

Kecamatan Tanah Kampung

- a. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat Perdesaan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan adalah program yang dilaksanakan dalam rangka mengupayakan peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan.
- *Kegiatan Pembinaan dan Lomba Desa*
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka terlaksananya pembinaan dan lomba Desa, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya juara Lomba Desa.
Keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Desa terbaik Tingkat Kecamatan.
Alokasi anggaran pada kegiatan ini adalah Rp.15.798.408,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh/DAK dengan realisasi anggaran Rp. 15.798.408,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.
 - *Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban*
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya keamanan yang kondusif.
Alokasi anggaran pada kegiatan ini adalah Rp.22.102.766,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh/DAK dengan realisasi anggaran Rp. 22.102.766,- kinerja keuangan 100 % dan kinerja fisik 100 %.
 - *Kegiatan Pengelolaan Raskin*
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi penyaluran raskin bagi masyarakat miskin diperdesaan, tujuan pelaksanaan

kegiatan ini adalah terlaksananya penyaluran raskin terhadap masyarakat miskin.

Keluaran dari kegiatan ini adalah tercapainya penyaluran beras murah bagi masyarakat miskin

Alokasi anggaran pada kegiatan ini adalah Rp.39.307.609,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh/DAK dengan realisasi anggaran Rp. 39.307.609,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.

- *Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan*

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka terbinaanya kegiatan keagamaan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Kecamatan dan Kota.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan dan Kota.

Alokasi anggaran pada kegiatan ini adalah Rp.80.000.000,- yng bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp. 79.998.698,- realisasi kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.

- *Kegiatan Administrasi Terpadu (PATEN)*

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka terbinaanya kegiatan keagamaan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Kecamatan dan Kota.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan dan Kota. Alokasi anggaran pada kegiatan ini adalah Rp. 26.487.786,- yng bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp. 26.487.786,- realisasi kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.

b. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan adalah program yang dilaksanakan dalam rangka mengupayakan peningkatan peran serta kepemudaan, tujuan dari program ini adalah meningkatkan peran serta kepemudaan.

Alokasi anggaran pada program ini Rp. 29.962.156,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh/DAK dengan realisasi anggaran Rp. 29.962.156,- kinerja keuangan 100% dan kinerja Fisik 100%.

c. Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa melalui pelaksanaan musrembang-Des dan musrembang Kecamatan, tujuan program ini dilaksanakan adalah meningkatkan peran serta masyarakat melalui perwakilan ikut berperan aktif didalam pembangunan desa

Alokasi anggaran pada program ini adalah Rp.16.767.609,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh/DAK dengan realisasi anggaran Rp. 16.767.609,- kinerja keuangan 100 % dan kinerja fisik 100 %.

d. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Program peningkatan peran perempuan di pedesaan adalah program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran/keikutsertaan perempuan di pedesaan, tujuan dari program ini adalah untuk memberdayakan perempuan di pedesaan.

Alokasi anggaran pada program ini adalah Rp.48.295.718,- yang bersumber dari APBD kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp.48.295.718,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.

e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa adalah program yang dilaksanakan dalam rangka membina dan memfasilitasi pemerintahan Desa didalam pengelolaan keuangan Desa, Tujuan dari Program ini adalah memberikan pembinaan serta memfasilitasi Pemerintahan Desa didalam pengelolaan keuangan desa terutama alokasi dana Desa (ADD).

Alokasi anggaran pada program ini adalah Rp.15.000.000,- yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dengan realisasi anggaran Rp. 14.970.000,- kinerja keuangan 99,80 % dan kinerja fisik 99,80%.

Kecamatan Pondok Tinggi

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- *Kegiatan Pembinaan dan Lomba Desa*

Melaksanakan Pembinaan terhadap Perangkat Desa dan dalam Pengelolaan Administrasi Perkantoran, sehingga terbentuk perangkat desa yang profesional. Kegiatan ini juga dapat menggerakkan realisasi PBB sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, Alokasi anggaran Rp. Rp.30.167.800,00 dengan realisasi Rp. 29.531.800,00 kinerja keuangan 97,90 % dan kinerja fisik 100%

- *Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban*

Monitoring keamanan dan ketertiban dikecamatan Pondok Tinggi dilaksanakan untuk menciptakan suasana kecamatan yang aman dan kondusif. Pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pembinaan dan memberi pengarahan kepada kepala desa untuk dapat memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum guna mendapatkan kondisi lingkungan yang aman dan tentram. Alokasi anggaran Rp. 31.337.100,00 dengan realisasi Rp. 31.053.100,00 kinerja keuangan 99 % dan kinerja fisik 100%.

- *Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial dan Keagamaan*

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pembinaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan sosial dan keagamaan, terutama pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan dan kota, LPTQ. Alokasi anggaran Rp. 86.558.400,00 dengan realisasi Rp. 85.973.900,00 kinerja keuangan 99,32 % dan kinerja fisik 100%

- *Kegiatan Pengelolaan Raskin*

Pengelolaan Raskin kecamatan adalah pemberian rekomendasi untuk penebusan raskin yang akan dibagikan kepada RTS-PM raskin di tingkat Desa. Selain itu kecamatan juga memberikan laporan kepada pihak yang terkait mengenai masalah raskin. Alokasi anggaran Rp. 19.632.300,00 dengan realisasi Rp.19.620.300,00 kinerja keuangan 99,94 %.

b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Kegiatan pembinaan dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan ini adalah membina kelompok-kelompok ekonomi dan usaha masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan agar tercapainya pembinaan terhadap masyarakat dalam mengembangkan

- ekonomi pedesaan. Alokasi anggaran Rp. 10.395.900,- dengan realisasi Rp.10.384.800,- kinerja keuangan 98.71 % dan kinerja fisik 100%.
- c. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Kegiatan ini membina generasi muda, seni dan budaya yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat untuk melaksanakan atau melestarikan budaya yang ada di Indonesia umumnya dan khususnya budaya yang ada di Kota Sungai Penuh. Dalam kegiatan ini melaksanakan jenis kegiatan seperti Pekan Harmoni Budaya Kecamatan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan SDM yaitu generasi muda untuk dapat melaksanakan kegiatan seni dan budaya. Alokasi anggaran Rp. 30.145.800,00,- dengan realisasi Rp. 30.127.800,00,- kinerja keuangan 99.94%.
- d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
Musyawarah pembangunan desa dikecamatan Pondok Tinggi dilaksanakan pada triwulan 1, musrenbang kecamatan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari 7 desa dan 1 Kelurahan dikecamatan Pondok Tinggi agar program pembangunan di kecamatan (khususnya desa) dapat diapresiasi oleh pemerintah. Alokasi anggaran Rp. 8.980.300,- dengan realisasi Rp.8.894.000,00,- kinerja keuangan 99,04 %.
- e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Kegiatan fasilitasi alokasi dana desa (ADD) dilaksanakan oleh kecamatan dengan melibatkan kepala desa dan aparatur desa. Kegiatan ini dimaksud agar pencairan ADD dapat berjalan sesuai dengan jadwalnya .Alokasi anggaran Rp. 23.231.400,00,- dengan realisasi Rp.23.219.400,00,- kinerja keuangan 99,95 %.
- f. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Penggerak PKK kecamatan dengan melibatkan Tim Penggerak PKK desa agar menghasilkan pendapatan dan ketrampilan yang diperlukan dalam upaya meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga serta meningkatkan pemanfaatan pekarangan. Alokasi anggaran Rp. 41.277.100,00,- dengan realisasi Rp.41.198.000,00,- kinerja keuangan 99,81% dan kinerja fisik 100%.

Kecamatan Sungai Bungkal

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- *Kegiatan Pembinaan dan Lomba Desa*
Lomba ini dilaksanakan dalam dua tahap yaitu pelaksanaan Lomba Desa tingkat Kecamatan untuk mendapat juara yang kemudian dilombakan untuk tingkat Kota Sungai Penuh. Penilaian lomba berdasarkan pada kriteria yang ada. Tujuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya.
Alokasi anggaran Rp. 12.507.444,- dengan realisasi keuangan Rp. 12.380.000,- kinerja keuangan 98,98% dan kinerja fisik 98,98%.
 - *Kegiatan Pembinaan Monitoring Keamanan dan Ketertiban*
Kegiatan Monitoring Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Sungai Bungkal dilaksanakan untuk menciptakan suasana Kecamatan yang aman dan kondusif. Pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pembinaan dan memberi pengarahan kepada Kepala Desa untuk dapat memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya

kesadaran hukum guna mendapatkan kondisi lingkungan yang aman dan tenteram. Tujuan untuk menciptakan suasana Kecamatan yang aman dan kondusif.

Alokasi anggaran Rp. 17.359.964,- dengan realisasi keuangan Rp. 17.359.964,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100 %.

- *Kegiatan Pengelolaan Raskin*

Kegiatan Pengelolaan Raskin Kecamatan adalah pemberian rekomendasi untuk penebusan Raskin yang akan dibagikan kepada RTS-PM Raskin di tingkat Desa. Selain itu juga Kecamatan juga memberikan laporan kepada pihak yang terkait masalah Raskin. Tujuan untuk penebusan Raskin yang akan dibagikan kepada RTS-PM Raskin di tingkat Desa

Alokasi anggaran Rp. 8.581.953,- dengan realisasi keuangan Rp. 8.581.953,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.

- *Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Sungai Penuh*

Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerjasama pihak pemerintah desa agar pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Sungai Penuh dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal selain itu setiap panitia yang terlibat dalam kegiatan ini bertugas untuk menyelesaikan segala dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan MTQ. Tujuan untuk melaksanakan pembinaan dan persiapan dalam mengikuti kegiatan MTQ tingkat Kecamatan dan Kota.

Alokasi anggaran Rp. 79.097.200,- dengan realisasi keuangan Rp. 78.737.200,- kinerja keuangan 99,54% dan kinerja fisik 100%.

- *Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat secara menyeluruh. Tujuan Untuk meningkatkan pelayanan yang baik dan benar.

Alokasi anggaran Rp. 42.083.900,- dengan realisasi Rp.40.840.000,- kinerja keuangan 97,04% dan kinerja fisik 97,04%.

b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini membina generasi muda, seni dan budaya bertujuan untuk menumbuhkan semangat untuk melaksanakan atau melestarikan budaya yang ada di Indonesia umumnya dan khususnya budaya yang ada di Provinsi Jambi. Tujuan untuk menumbuhkan semangat dalam melaksanakan atau melestarikan budaya

Alokasi anggaran Rp. 24.160.344,- dengan realisasi keuangan Rp. 24.149.296,- kinerja keuangan 99,95% dan kinerja fisik 99,95%.

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Musyawarah Pembangunan Desa di Kecamatan Sungai Bungkal dilaksanakan pada Triwulan I, Musrenbang Kecamatan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari Enam Desa di Kecamatan Sungai Bungkal agar program pembangunan di Kecamatan (khususnya desa) dapat diapresiasi oleh pemerintah. Tujuan untuk mendapatkan masukan dari Enam Desa di Kecamatan Sungai Bungkal.

Alokasi anggaran Rp. 11.470.004,- dengan realisasi keuangan Rp. 10.968.400,- kinerja keuangan 95,63% dan kinerja fisik 100%.

d. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program ini mempunyai kegiatan fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan oleh Kecamatan dengan melibatkan Kepala Desa dan Aparatur Desa. Kegiatan ini dimaksudkan agar pencairan ADD dapat

berjalan sesuai jadwalnya. Tujuan untuk mendamping Kepala Desa dan Aparatur Desa dalam pencairan ADD.

Alokasi anggaran Rp. 9.689.462,- dengan realisasi keuangan Rp. 8.848.900,- kinerja keuangan 91,32% dan kinerja fisik 91,23%.

- e. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program ini dilaksanakan oleh gerakan PKK Kecamatan dengan melibatkan gerakan PKK Desa dengan menghasilkan pendapat dan keterampilan yang diperlukan dalam upaya meningkatkan masyarakat sosial dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga serta meningkatkan pemanfaatan pekarangan. Tujuan untuk meningkatkan masyarakat sosial dalam melestarikan lingkungan hidup.

Alokasi anggaran Rp.37.449.188,- dengan realisasi keuangan Rp. 36.809.188,- kinerja keuangan 98,29% dan kinerja fisik 98,29%.

Kecamatan Koto Baru

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- *Kegiatan Pembinaan dan Lomba Desa*

Kegiatan ini di laksanakan dalam rangka pelaksanaan lomba tingkat kecamatan untuk mendapatkan juara yang kemudian dilombakan untuk tingkat kota sungai penuh. Penilaian lomba desa ditentukan berdasarkan kriteria yang ada.

Alokasi anggaran Rp. 19.932.800,- yang bersumber dari DAU dengan realisasi Rp. 19.932.800,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.

- *Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Keamanan dan Ketertiban*

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan suasana kecamatan yang kondusif.

Alokasi anggaran Rp.28.811.500,- yang bersumber dari DAU dengan realisasi Rp. 28.781.500,- kinerja keuangan 99,90% dan kinerja fisik 100%.

- *Kegiatan Pengelolaan Raskin*

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi memantau pembagian raskin ke masyarakat. Selain itu kecamatan juga memberikan laporan kepada pihak yang terkait mengenai masalah raskin.

Alokasi anggaran Rp.10.100.000,- yang bersumber dari DAU dengan realisasi Rp. 10.079.500,- kinerja keuangan 99,80%. Dan kinerja fisik 100%.

- *Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan*

Kegiatan ini di laksanakan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan sosial dan keagamaan, peringatan hari-hari besar islam dll.

Alokasi anggaran Rp.79.964.000,- yang bersumber dari DAU dengan realisasi Rp.79.963.000,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.

- *Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat*

Kegiatan pelaksanaan memfasilitasi pengaduan masyarakat dan penanganan di wilayah kecamatan koto baru.

Alokasi anggaran Rp.11.285.000,- yang bersumber dari DAU dengan realisasi Rp.11.285.000,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100%.

- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
Program ini dilaksanakan oleh gerakan PKK kecamatan dengan melibatkan gerakan PKK desa dengan melaksanakan pembinaan ke desa-desa dalam wilayah koto baru guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Alokasi anggaran Rp.52.702.500,- yang bersumber dari DAU dengan realisasi Rp.51.872.500,- kinerja keuangan 98,43% dan kinerja fisik 100%.
- c. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program ini dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan semangat untuk atau melestarikan budaya yang ada di kota Sungai Penuh pada umumnya dan khususnya budaya yang ada di kotobaru khususnya yang di tampilkan pada acara pekan harmoni serta terlaksananya peringatan HUT proklamasi tingkat kecamatan koto baru.
Alokasi anggaran Rp.37.886.000,- yang bersumber dari DAU dengan realisasi Rp.37.806.000,- kinerja keuangan 99,79% kinerja fisik 100%.
- d. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Program ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan musyawarah pembangunan desa yang dilaksanakan pada triwulan 1, musrembang kecamatan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari 6(enam) desa di kecamatan kotobaru agar program pembangunan di kecamatan (khususnya desa) dapat di apresiasi oleh pemerintah.
Alokasi anggaran Rp. 24.807.200,- yang bersumber dari DAU dengan realisasi Rp. 24.797.200,- kinerja keuangan 99,89% dan kinerja fisik 100%.

9) Kelurahan

Kelurahan Sungai Penuh

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program ini dilaksanakan dalam melakukan Peningkatan pembinaan dan lomba desa agar terlaksananya pembinaan dan lomba desa di tingkat kelurahan, Pembinaan Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan agar adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kehidupan sosial Keagamaan antar masyarakat, Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) agar tersedianya pembinaan Posyandu di kelurahan Sungai Penuh, Pengelolaan raskin untuk memperlancar pendistribusian beras kepada masyarakat dalam Kelurahan Sungai Penuh.
Anggaran yang dialokasikan pada program ini Rp. 36.368.750,- yang bersumber dari APBD dengan realisasi keuangan Rp. 35.510.000,- kinerja keuangan 98% dan kinerja fisik 100%.
- b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan.
Program ini dilaksanakan dalam melakukan peningkatan dan pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) agar tercapainya program PKK yang dilaksanakan selama 12 bulan.
Alokasi anggaran sebesar Rp.10.076.000,- yang bersumber dari APBD dengan realisasi keuangan Rp.9.585.000,- kinerja keuangan 95,13%.

Kelurahan Pasar Sungai Penuh

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi warga dalam mensukseskan program-program Pemerintah Kota Sungai Penuh dan mempersiapkan diri pada event-event tingkat kecamatan ataupun tingkat Kota Sungai Penuh. Dalam Kegiatan Pembinaan dan Lomba Desa ini dilaksanakan dengan berintegrasi langsung dengan masyarakat atau terjun langsung ke lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk memberikan arahan serta petunjuk bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, rapi dan asri serta mendengar saran dan masukan dari masyarakat. Pembinaan dilaksanakan sebagai persiapan dalam Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa yang setiap tahunnya dilaksanakan, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Kota Sungai Penuh. Kegiatan yang dilaksanakan pada Lomba Desa antara lain : bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan lomba tertib administrasi. Kegiatan Pembinaan dan Lomba Desa ini dilaksanakan dengan pembinaan pada 10 RT untuk 2 kali lomba.

Anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini Rp. 58.300.000,- yang bersumber dari APBD dengan realisasi keuangan Rp. 52.512.500,- kinerja keuangan 75,50 % dan kinerja fisik 98,00%

b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Di setiap awal tahun anggaran diadakan Musrenbang tingkat kelurahan biasanya bulan Januari, sebelum dilanjutkan ke Musrenbang tingkat kecamatan dan tingkat Kota Sungai Penuh. Adapun musyawarah yang dimaksud merupakan suatu wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu musrenbang juga diharapkan sebagai wujud pembangunan partisipatif.

Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2016 sebesar Rp. 4.469.500,- yang bersumber dari APBD dengan realisasi keuangan Rp. 4.417.500,- kinerja keuangan 100 % dan kinerja fisik 100%.

c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan.

Kegiatan ini merupakan wadah yang menghimpun ibu-ibu warga Kelurahan Pasar Sungai Penuh yang tergabung dalam Dasa Wisma. Salah satu aktivitas yang dilaksanakan adalah pembibitan Tanaman Toga Dasa Wisma.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 7.513.750,- yang bersumber dari APBD dengan realisasi keuangan Rp. 7.189.750,- kinerja keuangan 95,69 % dan kinerja fisik 90,00%.

Kelurahan Pondok Tinggi

b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi warga dalam mensukseskan program-program pemerintah Kota Sungai Penuh dan mempersiapkan diri pada event-event tingkat Kecamatan ataupun tingkat Kota Sungai Penuh. Dalam pembinaan dan lomba desa ini dilaksanakan dengan berintegrasi langsung dengan masyarakat atau

terjun langsung kelapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk memberikan arahan serta petunjuk bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, rapi dan asri serta mendengar saran dan masukan dari masyarakat. Pembinaan dilaksanakan sebagai persiapan dalam Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa yang setiap tahunnya dilaksanakan, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Kota Sungai Penuh.

Anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini Rp. 41.731.258 - yang bersumber dari APBD dengan realisasi keuangan Rp. 40.765.348,- kinerja keuangan 98,87% dari kegiatan yang dilaksanakan sedangkan kinerja fisik 100%.

- c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Musyawarah Pembangun Desa (Musrembang) merupakan kegiatan yang dilaksanakan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan Pondok Tinggi untuk turut aktif dalam pembangunan, bersama Ketua Lingkungan dan Ketua Rukun Tetangga (RT) maka diadakanlah Kegiatan Musyawarah untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Alokasi anggaran sebesar Rp.10.162.790,- yang bersumber dari APBD dengan realisasi keuangan Rp.8.322.790,- kinerja keuangan 81,89% sedangkan kinerja fisik 100%.
- d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kestaraan Jender Dalam Pembangunan Kegiatan PKK Kelurahan Pondok Tinggi merupakan Binaan Tim Penggerak PKK Kecamatan Pondok Tinggi dan Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, yang dilaksanakan dengan pertemuan pembinaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan ini untuk mencapai program PKK yang dilaksanakan selama 12 bulan. Alokasi anggaran sebesar Rp.11.975.389,- yang bersumber dari APBD dengan realisasi keuangan Rp.10.054.365,- kinerja keuangan 83,96% dari kegiatan yang dilaksanakan sedangkan kinerja fisik 100%.

Kelurahan Dusun Baru

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat.
Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi warga dalam mensukseskan program-program Pemerintah Kota Sungai Penuh dan mempersiapkan diri pada event-event tingkat kecamatan ataupun tingkat Kota Sungai Penuh. Dalam Kegiatan Pembinaan dan Lomba Desa ini dilaksanakan dengan berintegrasi langsung dengan masyarakat atau terjun langsung ke lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk memberikan arahan serta petunjuk bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, rapi dan asri serta mendengar saran dan masukan dari masyarakat.
Alokasi anggaran pada program ini Rp. 36.242.250,- yang bersumber dari APBD dengan realisasi keuangan Rp. 36.242.250,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100% dari kegiatan yang dilaksanakan.

b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Program ini merupakan wadah yang menghimpun ibu-ibu warga Kelurahan Pasar Sungai Penuh yang tergabung dalam Dasa Wisma. Salah satu aktivitas yang dilaksanakan adalah pembibitan Tanaman Toga Dasa Wisma.

Alokasi anggaran sebesar Rp.3.685.000,- yang bersumber dari APBD dengan realisasi keuangan Rp.3.685.000,- kinerja keuangan 100% dan kinerja fisik 100% dari kegiatan yang dilaksanakan.

2.2.2. Pencapaian Misi RPJMD

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menetapkan tujuh (7) misi yang akan dicapai. Pencapaian misi-misi ini perlu untuk selalu dievaluasi sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan Kota Sungai Penuh. Evaluasi pencapaian misi pembangunan Kota Sungai Penuh dilakukan melalui evaluasi terhadap berbagai indikator RPJMD, evaluasi terhadap pelaksanaan program APBD Tahun 2016 dan evaluasi terhadap data-data BPS. Dan Capaian RPJMD 2011-2016 Berdasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka pencapaian misi pembangunan Kota Sungai Penuh dapat dijelaskan sebagaimana terlampir.